

ISBN: 978-602-96172-7-6



PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S-2)
DAN ILMU PENDIDIKAN (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSIDING SEMINARNASIONAL

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TANTANGAN

Universitas Negeri Yogyakarta,
5 Oktober 2013



PROSIDING

Seminar Nasional:

Politik Pendidikan Nasional dalam Tantangan

INSTITUSI PENERBIT

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Yogyakarta

KETUA PANITIA

Prof. Zamroni, Ph.D

REVIEWER

Dr. Dwi Siswoyo

Prof. Zamroni, Ph.D.

EDITOR

Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum

Suhaini M. Saleh, M.A.

LAY OUT

Rohmat Purwoko, A.Md.

ADMINISTRASI

Pramusinta Putri Dewanti

ALAMAT

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang 55281 Yogyakarta

ISBN

Diterbitkan di Yogyakarta

Oleh Indo Media Pustaka

Semua Tulisan yang Ada dalam Prosiding "Seminar Nasional: Politik Pendidikan Nasional dalam Tantangan" Bukan Merupakan Cerminan Sikap dan atau Pendapat Editor. Tanggung Jawab terhadap Isi dan atau Akibat dari Tulisan Tetap Terletak pada Penulis.



PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S-2)
DAN ILMU PENDIDIKAN (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROSIDING SEMINARNASIONAL

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TANTANGAN

Universitas Negeri Yogyakarta,
5 Oktober 2013



PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S-2)
DAN ILMU PENDIDIKAN (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA DALAM DINAMIKA PERUBAHAN ABAD KE-21

Prof. Slamet PH, MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D
Universitas Negeri Yogyakarta

1. Pendahuluan

Kehidupan diciptakan oleh-Nya selalu berpasang-pasangan, yaitu ada sebab dan ada akibat. Ciri kehidupan adalah perubahan dan pendidikan nasional dapat dikategorikan sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik dalam tujuan yang akan dicapai (sebab) maupun upaya-upaya untuk mencapainya (akibat). Baik tujuan pendidikan (sebab) maupun upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapainya (akibat), sewaktu-waktu harus diperbaiki, disempurnakan, dan dikembangkan karena keduanya memiliki hubungan simbiosis dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis, misalnya sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi, religi, moralitas/etika, seni/estetika, pertumbuhan penduduk, dan globalisasi. Tujuan dan upaya pendidikan di masa lalu cocok untuk zamannya, mungkin kurang pas untuk saat ini, dan mungkin perlu perubahan-perubahan untuk abad ke-21.

Dengan demikian, pendidikan Indonesia selalu dihadapkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang tidak sama kepentingannya (sangat turbulen) sehingga pilihan-pilihan prioritas tujuan pendidikan Indonesia dan upaya-upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara selektif yang tentu saja tidak semua tekanan-tekanan/kepentingan-kepentingan lingkungan strategis diakomodasi semuanya karena ketidaksesuaian nilai-nilai dan juga keterbatasan sumber daya yang tersedia. Inilah esensi garapan bidang politik pendidikan nasional dalam rangka membangun kualitas manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kualitas dasar yang kuat (daya pikir, daya hati, daya fisik), memiliki kualitas instrumental yang kuat (penguasaan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga sesuai kespesifikan daerah) yang dibutuhkan oleh Indonesia, dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja sama dan bersaing dengan negara-negara lain dalam skala regional dan internasional dalam rangka ikut menjaga ketertiban dan perdamaian, kelangsungan hidup, dan perkembangan dunia.

Apapun politik pendidikannya, semua negara mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan utamanya oleh kualitas warga bangsanya. Negara-negara yang warga bangsanya berkualitas tinggi cenderung maju dan berkembang dengan pesat. Jadi, tinggi rendahnya kualitas warga bangsa suatu negara menjadi barometer bagi kemajuan dan perkembangannya. Kualitas warga bangsa dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik) dan kualitas instrumental yang meliputi ilmu, teknologi, seni, dan olah raga. Singapore, Jepang, China, Korea Selatan, Hongkong, Amerika, Jerman, dan sejumlah negara lainnya merupakan contoh konkret bahwa mereka maju karena kualitas warga bangsanya. Singapore maju karena kualitas warganya dalam sektor layanan, baik jasa tersier maupun jasa kuartier sehingga negara ini disebut sebagai negara jasa (*service country*). Jepang maju karena kualitas warga bangsanya dalam teknologi mesin (otomotif) dan elektronik. China maju karena daya inovasi dan etos kerja keras warga bangsanya dalam mengembangkan produk-produk baru dan jasa-jasa baru yang cenderung lebih murah dibanding dengan negara-negara lainnya. Intinya, negara-negara tersebut maju dan berkembang karena kualitas warga bangsanya sangat tinggi dengan tetap mengedepankan kepentingan dan jati diri negaranya. Disinilah, politik pendidikan harus hadir dalam rangka membuat prioritas-prioritas keputusan dan kebijakan pendidikan sehingga politik pendidikan mampu menjalankan fungsinya yaitu integrasi pendidikan bangsa dalam menghadapi abad ke-21.

Sisa makalah ini akan membahas: arti politik pendidikan, mengapa harus berpolitik pendidikan, kondisi politik pendidikan Indonesia saat ini, perubahan lingkungan strategis abad ke-21, dan strategi politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21.

2. Apakah politik pendidikan itu?

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan itu

terpisah dan harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982). Sementara itu, dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituannya (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika regimnya juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang kontinyu dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikhawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran politik pendidikan sangat dibutuhkan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin dan dikendalikan.

Harold Lasswels (1958) menyatakan bahwa *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Definisi klasik ini masih berlaku untuk situasi Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, semuanya melibatkan berbagai pihak yang jelas-jelas kepentingannya berbeda. Mereka saling adu argumen untuk mempengaruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar nilai-nilai dan alokasi sumber daya yang terbatas diputuskan sesuai dengan keinginannya. Jika sumber daya terbatas yang dialokasikan tidak sesuai dengan keinginan berbagai pihak tersebut, maka konflik politik pendidikan akan memanjang sepanjang waktu dan di semua tempat. Apa lagi dalam era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sangat kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, LSM, media masa, dan masyarakat atentif, yang kesemuanya memiliki kepentingan untuk mempengaruhi penguasa/pengambil keputusan pendidikan

dalam pembahasan berbagai isu strategis pendidikan. Disinilah dibutuhkan seni untuk mengatasi konflik kepentingan pendidikan yang disebut ilmu politik pendidikan.

Jadi, politik pendidikan itu adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan, norma, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambil keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu masuk dalam pengambilan keputusan, norma, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus bidang pendidikan, praksis-praksis hedonis dan primordial kian menguat sehingga dikhawatirkan akan terjadi diskontinuitas kepemimpinan pendidikan dimasa depan jika terjadi pergantian regim yang akan datang. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituansnya, yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu. Organisasi profesi guru memiliki kepentingan peningkatan kemampuan/kompetensi guru, kesejahteraan guru, dan pengembangan karir guru. Media masa berkepentingan membentuk opini publik dalam rangka meningkatkan penggemarnya (konsumennya) dan bahkan saat ini sudah ada media masa tertentu yang menjadi alat partai politik tertentu. Independensinya jelas mulai dipertanyakan oleh publik. Sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia (bukan sekolah asing) yang jumlahnya sudah lebih dari dua ratusan juga memiliki kepentingan beragam antara lain motif keuangan dan bisa jadi ingin melakukan invasi ideologi di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, akan tetapi intinya bahwa pendidikan Indonesia telah mirip miniatur politik makro dimana pendidikan telah menjadi arena konflik kepentingan.

3. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia

Lingkungan-lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan Indonesia adalah sistem regulasi, Rencana Pembangunan Nasional, Kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah, kelompok kekuatan, kemajuan ekonomi, dinamika politik, dinamika sosio-kultural, kemajemukan/kebhinnekaan, tuntutan desentralisasi, tuntutan globalisasi, dan kemajuan teknologi.

Sistem regulasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan pendidikan. Sistem regulasi digunakan sebagai acuan bagi penyusunan/ formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pada umumnya, penguasa tidak mau melanggar sistem regulasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Beberapa regulasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan antara lain: UU 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU 20/2003: Sistem Pendidikan Nasional, UU 32/2004: Pemerintahan Daerah, UU 33/2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun menjadi periode-periode berikut: Periode 2005 - 2010: Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi, Periode 2010 - 2015: Penguatan Pelayanan, Periode 2015 - 2020: Daya Saing Regional, dan Periode 2020 - 2025: Daya Saing Internasional. Pendidikan Indonesia harus mengacu kepada RPJPN tersebut.

Kebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran Tahunan Pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap politik pendidikan nasional. Misalnya, Kurikulum 2013 yang awalnya akan didukung dana sebesar Rp 2,6 triliun pada tahun 2012, ternyata DPR tidak menyetujui dan akhirnya hanya didukung dana sebesar Rp 800 an milyar. Kebijakan anggaran pendidikan yang tiba-tiba mengecil ini akan menyebabkan diskontinyu dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan ini sangat mengganggu kemajuan pendidikan.

Perencanaan pendidikan pada tingkat makro (nasional), meso (provinsi, kabupaten/kota), dan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan dan jika salah merencanakan berarti merencanakan kesalahan. Penganggaran yang tidak pro-kemiskinan juga akan menimbulkan kesenjangan pendidikan, dan jangan sampai pembangunan pendidikan itu memperlemah si lemah.

Kelompok-kelompok kekuatan yang juga berpengaruh terhadap politik pendidikan mencakup antara lain: nilai-nilai pribadi penguasa, kelompok eksekutif, kelompok legislatif, kelompok yudikatif, media masa, pengusaha, organisasi profesi (PGRI, FGI, dsb.), pakar pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terkena dampak kebijakan, kristalisasi isu-isu pendidikan yang dipublikasikan, dan tekanan asing/globalisasi.

Kebijakan dan kemajuan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap politik pendidikan, misalnya kebijakan fiskal (APBN/APBD dan pajak), kebijakan moneter (jumlah uang beredar, nilai tukar uang, inflasi, produktivitas, dan suku bunga kredit perbankan), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan. Selain itu, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi bacaan penting bagi pembangunan pendidikan Indonesia.

Dinamika politik juga sangat berpengaruh terhadap politik pendidikan. Bahkan ini yang paling berpengaruh terhadap politik pendidikan. Platform politik, pergantian regim/pejabat khususnya di daerah (setelah otonomi daerah), dan solidaritas berpolitik sangat mengganggu terhadap kemajuan pendidikan.

Dinamika sosio-kultural juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Tingkat perdamaian, kemajemukan/kebhinnekaan (suku, agama, ras, golongan, budaya, kekayaan alam), hak asasi manusia, persamaan kesempatan, tata kelola (formal vs informal), kesehatan masyarakat, dan kebudayaan, semuanya memiliki pengaruh terhadap politik pendidikan Indonesia.

Desentralisasi pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap politik pendidikan karena variasi kapasitas/kemampuan sistem (regulasi/kebijakan), kapasitas kelembagaan/entitas, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas sumber daya selebihnya (dana, peralatan, bahan, dsb.), dan kapasitas

kemitraan, baik di tingkat pusat dan lebih-lebih di tingkat daerah.

Abad ke-21 yang dipicu oleh kemajuan-kemajuan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi (khususnya digital) menuntut kepemilikan *professional human resources, great global management, great global leadership*, teknologi yang mutakhir dan canggih, internalisasi tuntutan global terhadap kebijakan domestik akibat persaingan, komitmen global (*MDG, EFA, human right for education, education for sustainable development, competency standards, world climate*, dsb. Mega Trends oleh John Naisbitt (10 new directions transforming our lives) masih sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yaitu: from industrial society to information society, from forced technology to high tech/high touch, from national economy to world economy, from short term to long term, from centralization to decentralization, from institutional help to self-help, from representative democracy to participatory democracy, from hierarchies to networking, from north to south, and from either/or to multiple options.

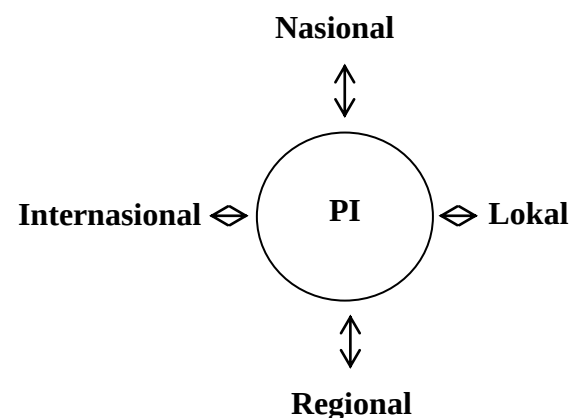
Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap pilihan politik pendidikan, yaitu, teknologi konstruksi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi energi, teknologi bio, dan teknologi bahan. Saat ini dan kedepan, teknologi komunikasi sangat berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia.

4. Pentingnya Politik Pendidikan Indonesia

Pendidikan Indonesia dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat turbulen sebagaimana diuraikan secara singkat sebelumnya dan jika tidak mempersiapkan dirinya secara memadai untuk menghadapinya, maka pendidikan Indonesia akan terbawa arus oleh perubahan lingkungan strategis yang tidak terseleksi sehingga politik pendidikan Indonesia akan bertanpa arah. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan telah menjadi miniatur politik makro sehingga perlu ketegasan tentang sebenarnya politik pendidikan kita itu mau kemana. Berbicara politik pendidikan berarti bahwa kita mendekati pendidikan dengan politik sebagai tolok ukurnya/takarannya/kriterianya. Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sangat tergantung pada ideologi suatu negara.

Negara-negara barat yang ideologi ekonominya kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal (liberalisme), maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik juga.

Untuk Indonesia, Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia sehingga politik pendidikannya pun harus dikembangkan berdasarkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pembangunan pendidikan Indonesia harus tegas-tegas meng-Indonesia yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada karakteristik dan kebutuhan bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam (tanah, laut, udara), sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Ilmu-ilmu yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik Indonesia semestinya ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tanah air yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam dan subur tanahnya, dan lautnya yang kaya ikan dan tumbuh-tumbuhan, dan budaya yang sangat beragam jenisnya. Pendidikan Indonesia harus mencurahkan perhatiannya terhadap kebutuhan/kearifan lokal (daerah) seraya tetap memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan internasional (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Cakrawala Pendidikan Indonesia

PI = Pendidikan Indonesia

Dari Gambar 1 ditunjukkan bahwa apa yang diajarkan kepada peserta didik mencakup kesepikan lokal, karakteristik dan kebutuhan nasional, kerjasama dan daya saing regional dan internasional. Namun demikian,

pendidikan Indonesia harus lebih sesuai dengan karakteristik/jati diri Indonesia dan mengutamakan pencukupan kebutuhan Indonesia dalam berbagai sektor dan sub-sub sektornya.

Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan yaitu menjalankan peraturan formal secara konsisten diatas peraturan informal. Hedonisme dan primordialisme harus diminimalisir karena mereka merupakan penghambat demokratisasi dan kemajuan pendidikan Indonesia.

5. Kondisi Politik Pendidikan Indonesia Saat Ini

5.1 Politik Pendidikan Tingkat Nasional

Sejarah politik pendidikan Indonesia mengalami dinamika. Pada waktu penjajahan, politik pendidikan diarahkan untuk memerdekakan nusantara, jadi politik pendidikannya adalah pendidikan untuk melawan penjajah. Tamansiswa merupakan pendidikan di zaman penjajah yang melawan penjajah dan ini merupakan satu-satunya di dunia yang diakui oleh UNESCO. Dalam masa orde lama, politik pendidikan lebih diarahkan untuk membangun sistem pendidikan baru setelah sekian lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk memandirikan bangsa merupakan acuannya, tetapi saat itu pendidikan Indonesia terjebak bercampur baur dengan partai politik sehingga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi terkotak-kotak berpartai politik. Dalam zaman orde baru, politik pendidikan Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama, pendidikan Indonesia terkooptasi oleh kekuasaan sehingga pendidikan lebih merupakan alat/instrumen kekuasaan. Dalam era reformasi, pendidikan Indonesia lebih demokratik, tetapi politik pendidikannya tanpa arah. Meskipun RPJPN secara eksplisit bahwa pada tahun 2025, Indonesia telah mampu bersaing secara Internasional, namun dalam prakteknya tidak mengarah ke itu. Disamping itu dan justru yang paling penting, semestinya politik pendidikan Indonesia diarahkan untuk memandirikan Indonesia dan karenanya pendidikan Indonesia diselenggarakan atas dasar karakteristik dan kebutuhan Indonesia, alias pendidikan harus yang meng-Indonesia. Belum lagi, praktek-praktek hedonis, oligarkis, dan primordial malah menjamur akibat dominasi golongan

tertentu dalam penyelenggaraan sehingga terjadinya diskontinuitas kepemimpinan pendidikan Indonesia di masa mendatang sangat dimungkinkan.

Pendidikan Indonesia memang kurang *meng-Indonesia*, kurang berjati diri/kurang berkarakter Indonesia, kurang membumi, kurang melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan kurang mengakar pada kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia. Lihat saja rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bunyinya: *bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab*. Tujuan pendidikan nasional tersebut jelas-jelas belum sepenuhnya mengacu kepada Pancasila. Semestinya, tujuan pendidikan nasional harus mengacu Pancasila, yaitu mendidik manusia Indonesia agar beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial (lebih rincinya, lihat kupasan Suprpto di Jurnal Cakrawala Pendidikan terbitan Juni 2013, Tahun XXXII, Nomor 2, 2013).

Seperti disebut sebelumnya, negara kita adalah negara yang subur tanahnya, kaya lautannya terutama ikan dan keindahan karangnya, kaya sumberdaya alamnya terutama tambang/mineral, minyak, gas bumi dan batubara, kaya keragaman budayanya yang tiada bandingannya di dunia, dan potensi-potensi lain yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Namun demikian, negara kita masih mengimpor buah-buahan, garam yodium, kedelai, daging, susu, dan sebagainya yang sebenarnya dapat dipenuhi dari dalam negeri kita sendiri. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap importasi barang-barang tersebut antara lain adalah bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan nasional kita kurang mengakar dan bahkan mencabut dari akarnya, mengerosi aset-aset alam kita, dan kurang mendukung pengelolaan kekayaan alam kita dan bahkan cenderung melumpuhkan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*). Pendidikan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan/kelautan, kedokteran hewan, dan pertambangan sudah selayaknya mendapat tempat yang layak dan jangan sampai Indonesia mengimpor barang-

barang yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri.

Bahkan, kebijakan-kebijakan pendidikan nasional kita telah memberi kebebasan negara asing (liberalisasi) untuk melakukan invasi terhadap sistem pendidikan nasional kita yang tentu saja, selain menguras devisa kita karena mengalirnya dana keluar negeri, juga invasi nilai-nilai yang tidak saja membawa konflik tetapi juga benturan dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Ini akan sangat merugikan bangsa Indonesia dan ini kurang mendukung pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara fisik (tanah, air, udara), secara formal (hukum), dan secara informal (sosial-budaya). Oleh karena itu, kita semua harus bisa menjawab pertanyaan berikut secara tepat, yaitu: "Ilmu-ilmu apa sajakah yang seharusnya diajarkan kepada generasi muda Indonesia?"

Tidak hanya itu, dalam pengangkatan pejabat pendidikan, perilaku-perilaku primordial masih sangat kuat. Misalnya, pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sangat didominasi oleh satu golongan. Akibatnya, jika periode berikutnya pimpinan Kemdikbud diganti oleh golongan lain, maka banyak pejabat saat ini yang akan diganti dan ini akan menyebabkan diskontinuitas kepemimpinan Kemdikbud, yang tentu saja merugikan masyarakat.

5.2 Politik Pendidikan Tingkat Lokal

Politik pendidikan pada tingkat lokal (propinsi dan kabupaten/kota) dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat Gambar 1). *Structure follows function* (Mintzberg, 1979) yang bahasa Indonesianya adalah struktur organisasi mengikuti fungsi. Itulah teori penyusunan struktur organisasi. Saat ini, dalam kenyataannya tidak demikian. Di pusat terjadi penggemukan struktur organisasi (semula 7 eselon 1, sekarang 9 eselon 1). Demikian juga di provinsi, saat ini miskin fungsi tetapi kaya struktur organisasi. Sebaliknya, di kabupaten/kota, saat ini kaya fungsi tetapi miskin struktur organisasi. Gambar 2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (utamanya) dipengaruhi oleh Kemdagri, Kemdikbud, dan Kemnag. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di bawah Kemdikbud sudah di desentralisasikan, tetapi yang di bawah

Kemnag masih di sentralisasikan. Kemdikbud tidak memiliki wewenang untuk memerintah Dinas Pendidikan Provinsi (hanya mengkoordinasikan), Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki wewenang memerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (hanya mengkoordinasikan), dan hanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota saja yang memiliki wewenang memerintah sekolah. Kesimpulannya, dari Kemdikbud ke sekolah terjadi keterkaitan yang hilang (*missing link*) sehingga hal ini menyulitkan koordinasi. Akibat lemahnya koordinasi, masalah yang juga menonjol dalam desentralisasi pendidikan saat ini adalah ketidak-sinkronan regulasi pendidikan (UU 20/2003, UU 32/2004, PP 38/2007, PP 17/2010, dll.).

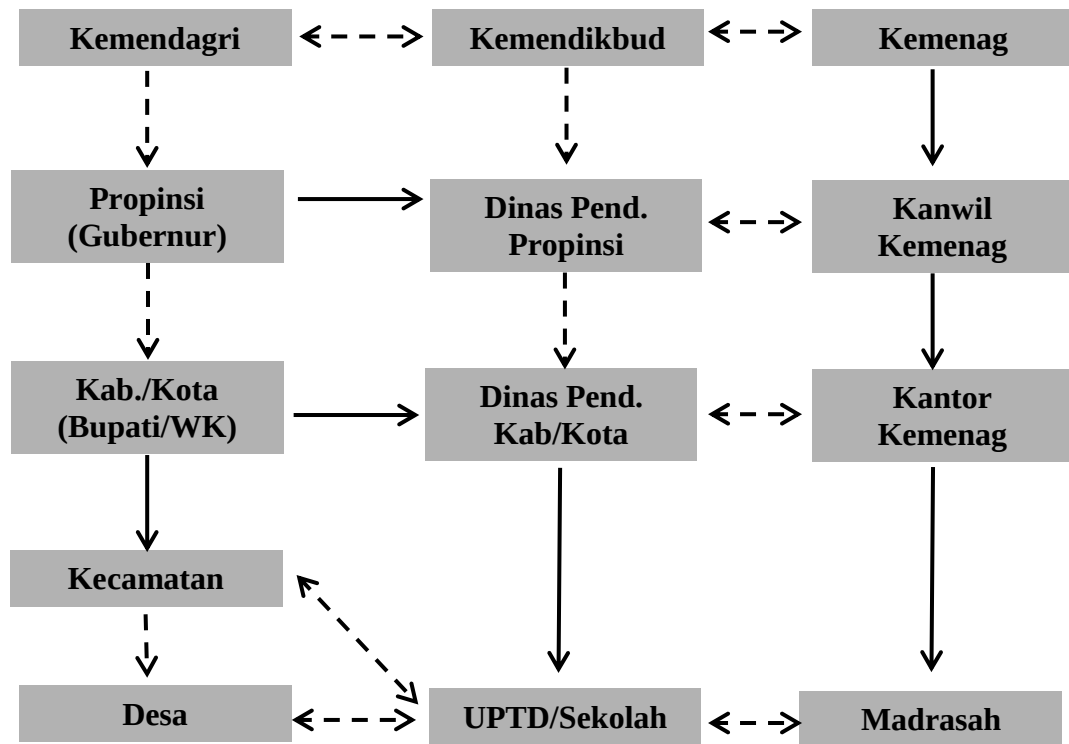
Secara *teknis* dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengacu ke Kemdikbud tetapi secara *otoritatif* mereka tidak mentaati sehingga mereka lebih taat kepada gubernur atau bupati/walikota dari pada kepada Mendikbud. Akibatnya, hal-hal yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh Dinas-dinas tersebut, dan mesin birokrasi pendidikan kurang kompak, berjalan lambat, dan inersia.

Dari Gambar 2, Dinas Pendidikan Propinsi lebih taat kepada Gubernur karena dialah yang mengangkat dan melantiknya sehingga Kepala Dinas Pendidikan Propinsi lebih taat kepada Gubernur dari pada kepada Mendikbud. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. Kalau begitu, kemana arah politik pendidikan propinsi? Demikian juga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih taat kepada Bupati/Walikota karena dialah yang mengangkat dan melantiknya sehingga kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Propinsi belum tentu dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau begitu, kemana pula arah politik pendidikan kabupaten/kota?

Tidak hanya itu, birokrat-birokrat pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kualitas birokrat pendidikan tingkat propinsi dan kabupaten/kota juga dipertanyakan. Bukan rahasia lagi bahwa banyak Kepala Dinas Pendidikan yang dijabat oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang profesi pendidikan. Penunjukan pejabat

pendidikan di daerah sangat sarat dengan kepentingan. Tidak hanya itu, dalam era demokrasi seperti saat ini, perilaku-perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan otoriter pimpinan pendidikan di daerah masih sangat kuat meskipun secara normatif sudah harus berfaham demokrasi. Perilaku-perilaku

otoriter masih menjamur dalam era demokrasi saat ini sehingga ada pameo bahwa yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah orang yang sedang mempunyai otoritas tertinggi meskipun yang bersangkutan tidak memiliki abilitas yang tinggi.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah

5.3 Politik Pendidikan pada Tingkat Sekolah

Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab ke sekolah lebih besar dari pada era sentralistik, maka sekolah lebih mandiri dan memiliki ruang gerak lebih luas dalam memajukan sekolahnya. Disamping itu, dengan dilibatkannya komite sekolah sebagai mitra sekolah yang anggota-anggotanya mewakili masyarakat di sekitarnya, maka sekolah harus bekerja sama dengan komite sekolah. Komite sekolah memiliki peran-peran utama sebagai pemberi nasehat, pendukung, fasilitator, mediator, dan pengontrol. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak lagi bisa bebas sepenuhnya untuk mengambil keputusan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, tetapi harus dia harus bekerja sama dengan

komite sekolah. Disinilah politik pendidikan berbicara karena di sekolah akan terjadi negosiasi, dialog, dan bahkan perdebatan dalam memilih nilai-nilai yang pantas untuk diajarkan kepada peserta didik (selain yang sudah ditetapkan oleh standar nasional pendidikan) dan dalam mengalokasikan sumber daya sekolah.

6. Politik Pendidikan Indonesia Dalam Menghadapi Abad Ke-21

Berikut ditawarkan sejumlah pemikiran untuk memperbaiki praktek-praktek politik pendidikan Indonesia menuju abad ke-21.

- Pendidikan Indonesia abad ke-21 menghadapi lingkungan strategis yang sangat kompleks sehingga politik pendidikan harus mampu secara kontinyu, konvergen, dan konsentris menyeleksi lingkungan strategis mana yang selaras dengan karakteristik dan

- kebutuhan Indonesia. Pembelajaran abad ke-21 yang diwarnai oleh digital juga harus menjadi bagian integral dalam memper-timbangkan politik pendidikan Indonesia.
- b. Tujuan pendidikan nasional agar mencakup pengembangan manusia Indonesia seutuhnya (termasuk melek sosial) sesuai amanat UU 45 yaitu mencedaskan kehidupan bangsa yang mencakup pengembangan kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik), kualitas instrumental (penguasaan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga untuk memenuhi kepentingan Indonesia), kualitas ke-Indonesiaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), dan kualitas global.
 - c. Politik pendidikan Indonesia harus fokus pada pembangunan manusia yang sesuai dengan karakteristik Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Indonesia membutuhkan generasi muda yang mampu mengelola mineral, migas, batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, air, tanah, dan udara. Yang mendesak, Indonesia harus mendidik generasi muda agar mampu mengelola tambang sehingga kemampuan tentang *resource technologies* harus menjadi prioritas pendidikan nasional. Jangan terbuai beasiswa asing yang tidak bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan Indonesia dan juga jangan terbuai oleh ukuran-ukuran internasional yang sifatnya kompetitif melulu dan melupakan kebutuhan-kebutuhan nasional yang kaya akan keunggulan komparatif, baik sumber daya manusia, sumber daya natural maupun sumber daya kultural.
 - d. Pembangunan pendidikan harus bertitik-tolak dari proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat-martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, serta terjaganya kebahagiaan rakyat." (Muhammad Hatta yang dikutip Sri-Edi Swasono 2012).
 - e. Amanat UUD 45 mengatakan bahwa Indonesia memiliki satu sistem pendidikan nasional sehingga semua jenis dan jenjang pendidikan dibawah naungan Kemenag harus diintegrasikan menjadi satu dengan Kemdikbud karena sistem pendidikan ganda yang seperti sekarang menyebabkan disintegrasi pendidikan nasional dan menyulitkan arah politik pendidikan Indonesia.
 - f. UU 20/2003 Pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa: "Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" harus dihilangkan dan diganti dengan kerjasama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia.
 - g. Atas dasar bukti bahwa banyak Permendikbud yang tidak ditaati oleh pemerintah daerah, maka akan lebih baik PP-PP turunan UU 20/2003 dibuat per jenis dan jenjang pendidikan seperti PP-PP turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - h. Tim RUU-RPP Kemdikbud (2011) telah menghasilkan alternatif-alternatif desentralisasi pendidikan, yaitu: asimetris, provinsi, atau parsial pusat. Semula saya sepakat yang model asimetris dengan pertimbangan keragaman daerah di Indonesia. Tetapi saya berubah pikiran karena kalau model asimetrik dipilih akan membuahkan dua sistem pendidikan nasional lagi yaitu desentralisasi bagi daerah yang mampu dan sentralisasi bagi daerah yang kurang mampu. Saya memilih model desentralisasi pendidikan di provinsi dengan alasan bahwa desentralisasi seperti sekarang ini yang fokusnya di kabupaten/kota terlalu kecil unitnya sehingga daerah yang kaya sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya) akan maju dengan pesat dan daerah yang miskin sumber daya akan tertinggal sehingga kesenjangan antar kabupaten/kota akan lebar/menganga.
 - i. Diusulkan, urusan-urusan pendidikan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota meliputi kualifikasi dan kompetensi lulusan, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik/kesiswaan, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen dan organisasi, evaluasi (penjaminan dan pengendalian mutu serta akreditasi), kerjasama eksternal, hukum (peraturan perundang-

- undangan), kepemimpinan dan kultur pendidikan, system informasi (*ICT/e-education (e-schooling, e-learning, e-library, e-administration)*), dan kebudayaan. Urusan-urusan pendidikan mana yang merupakan bagian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, tidak dibahas dalam makalah ini karena terlalu banyak.
- j. Struktur organisasi pendidikan mengikuti pembagian urusan pendidikan. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersifat koordinatif, dan hubungan antara pemerintah propinsi dan kabupaten bersifat direktif/komando. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan yang sesuai dengan fungsi masing-masing tingkatan birokrasi pendidikan harus dilakukan. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian urusan pendidikan antara Kemdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sehingga penataan ulang pembagian urusan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan terlebih dahulu.
 - k. Pendidik dan tenaga kependidikan di daerah agar tidak dibawah gubernur dan bupati/walikota, tetapi diurus berdasarkan kaidah-kaidah kompetensi sehingga pengadaan, pemberhentian, dan pemindahan harus didasarkan atas kompetensi, bukan seperti sekarang yang kental dengan nuansa politik. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara profesional dan bebas dari campur tangan politik. Untuk itu, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan diatur tersendiri melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan penyempurnaan UU 32/2004 yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Gubernur dan Bupati/Walikota sehingga *the right person in the right place* yang diidamkan dapat diwujudkan melalui cara-cara yang profesional.
 - l. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kapasitas, baik tingkat makro, kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya selebihnya, dan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, panduan, lokakarya, dan sebagainya sesuai dengan konteks yang dihadapi.
 - m. Pembuatan keputusan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, harus mendasarkan pada data-data yang akurat. Untuk itu, unit dukungan pembuatan keputusan (*decision making support*) harus diadakan di tingkat pusat dan di daerah untuk menghindari pembuatan keputusan yang kurang berbasis data. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah merupakan keniscayaan untuk mendukung pembuatan keputusan agar lebih cepat dan akurat.
 - n. Uang mengikuti fungsi sehingga dengan adanya penambahan beban urusan pendidikan menengah kepada propinsi, dengan sendirinya dana yang dimiliki oleh propinsi sebesar minimal 20% APBD dapat disesuaikan penggunaannya. Yang lebih penting, anggaran harus lebih besar difokuskan untuk pengembangan sekolah dan struktur anggaran sekolah lebih difokuskan pada pembelajaran. Alokasi anggaran untuk manajemen pendidikan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sebagai pendukung sekolah harus lebih kecil dari pada anggaran yang dialokasikan ke sekolah.
 - o. Perubahan (kemajuan dan perkembangan) pendidikan memerlukan kepemimpinan kewirausahaan yang kuat. Untuk itu, pengembangan kapasitas dalam kepemimpinan kewirausahaan bagi pejabat pendidikan di tingkat pusat, daerah, dan sekolah harus dilaksanakan melalui pelatihan, lokakarya, atau bentuk-bentuk lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan pejabat pendidikan yang bersangkutan.
 - p. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan yang sesuai dengan fungsi masing-masing tingkatan birokrasi pendidikan harus dilakukan. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian urusan pendidikan antara Kemdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, sehingga penataan ulang pembagian urusan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah

- kabupaten/kota merupakan prasyaratnya.
- q. Pengelolaan pendidikan dibenahi termasuk pengelolaan kesenjangan pendidikan. Integrasi pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dibenahi melalui integrasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, implementasi, koordinasi, dan pengendalian pendidikan. Selain itu, keselarasan dan kompatibilitas pengelolaan pendidikan antar jenjang pemerintahan diupayakan melalui pembenahan musyawarah perencanaan pembangunan pendidikan dan koordinasi serta sinkronisasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*). Sedang pengelolaan kesenjangan pendidikan, baik dari segi pemerataan maupun mutu, dilakukan melalui intervensi-intervensi secara struktural, kultural, dan figural. Secara struktural, pengelolaan kesenjangan pendidikan dilakukan melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan yang lebih pro terhadap kemiskinan dan daerah tertinggal, terpencil, terpecar, dan terisolir. Sebenarnya, pemerintah sudah memberikan dana alokasi khusus untuk daera-daerah tertinggal namun penggunaannya kurang luwes karena hanya untuk infrastruktur. Padahal, rendahnya angka partisipasi pendidikan disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena kekurangan infrastruktur (prasarana). Kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesulitan geografis, dsb. membutuhkan solusi yang sesuai. Intervensi-intervensi kultural dilakukan melalui perubahan kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakat yang tidak pro terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya untuk keluar dari kesengsaraan. Intervensi-intervensi secara figural dilakukan melalui advokasi-advokasi pendidikan untuk mengubah pola pikir (*mind set*), pola hati (*heart set*), dan pola tindak/perilaku (*action set*).
- r. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara profesional dan bebas dari campur tangan politik. Untuk itu, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan diatur tersendiri melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan penyempurnaan UU 32/2004 yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Gubernur dan Bupati/Walikota, sehingga *the right person in the right place* yang diidamkan dapat diwujudkan melalui cara-cara yang profesional.
- s. Di tingkat sekolah, komite sekolah sebagai mitra sekolah agar dipilih secara benar sehingga selain mewakili *stakeholders*, juga *the right person in the right place* yang tentu saja akan mendukung peningkatan kualitas politik pendidikan tingkat sekolah.

BACAAN TERBATAS

- Lasswell, Harold (1958). *Politics: Who Gets What, When, and How*. New York: The Wolrd Publishing Company.
- Makagiansar, Makaminan (1998). *Perkiraan Profil Profesional Guru pada Awal Abad ke - 21 dengan Fokus pada Kualifikasi Tenaga Akademik Ilmu Rekayasa*. Makalah Disampaikan pada Lokakarya Regenerasi Tenaga Akademik Ilmu Rekayasa II, Komisi Ilmu Rekayasa, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta Tanggal 1-2 Juli 1998.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Slamet PH (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemdikbud.
- Sri-Edi Swasono (2012). *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Bappenas.
- Sri-Edi Swasono. *Kelengahan Kultural*. Jakarta: Suara Pembaharuan 11 Agustus 2011.
- Sri Suprpto (2013). *Lanhdasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2013, Th.XXXII, No.2)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tim Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan (2011). Jakarta: Balitbang, Kemdikbud.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (Amandemen 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Wirt & Michael W. Kirst (1982). *The Politic of
Education: Schools in Conflict*. Berkeley:
McCutchan Publishing Corporation.

TANTANGAN SEKOLAH PADA ABAD KE-21

Nasution, M.Hum.,M.Ed.,Ph.D
Universitas Negeri Surabaya

1. Pendahuluan

Tema tentang politik pendidikan terasa baru di Negara kita. Studi tentang tema ini karya M. Sirozi¹ dapat dijadikan rujukan yang bagus guna memahami konsep dan perjalanan politik pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya.²

Politik dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan mempunyai hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan adalah bahwa lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan dalam membentuk perilaku politik masyarakat di sebuah Negara, begitu pula sebaliknya lembaga dan proses politik di sebuah Negara dapat membawa dampak besar terhadap karakteristik pendidikan di Negara tersebut.³ Dengan kata lain bahwa lembaga dan proses pendidikan tidak hanya mempengaruhi perilaku politik masyarakat saja melainkan perilaku masyarakat secara keseluruhan dan campur tangan politik juga membawa dampak yang besar terhadap pendidikan yang juga berakselerasi langsung terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Hal yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah bahwa pemerintah yang berkuasa sering menjadikan lembaga dan proses pendidikan (sekolah), sebagai wadah dan media untuk misi-misi politik, social, ekonomi, mereka. Cara-cara yang ditempuh adalah mengindoktrinasi peserta didik agar menerima misi mereka. Dengan kata lain mereka mengarahkan pemikiran hanya ke satu arah sebagaimana yang diinginkan, Kadang kala mereka menempuh cara dalam menanamkan kepercayaan atau keyakinan tentang kebenaran misi mereka dengan

melakukan pencucian otak. Meskipun cara-cara itu bertentangan dengan pendidikan, sekolah tidak dapat menolak dirinya dari pemberian indoktrinasi.

Dalam makalah ini akan dibahas tentang indoktrinasi dan berbagai permasalahannya dalam pendidikan, dan kemudian bagaimana proses pendidikan di sekolah itu sebaiknya diselenggarakan.

2. Permasalahan Indoktrinasi di Sekolah

Di sekolah-sekolah di Indonesia, indoktrinasi masih sangat umum dilakukan dalam pembelajaran. Belum ada diskusi khusus baik dalam jurnal atau media umum tentang pantang tidaknya cara ini dilakukan dalam dunia pendidikan. Para pendidik di sekolah belum banyak yang menyadari apakah yang dilakukan selama ini termasuk indoktrinasi atau bukan, perlu dihindari atau tidak, lalu bagaimana sebaiknya proses pendidikan di sekolah itu diselenggarakan.

Sebenarnya diskusi masalah indoktrinasi dalam pendidikan sudah lama menjadi ajang perdebatan di Amerika yakni muncul dipermukaan sejak tahun 1930an. Meskipun demikian, pembahasan masalah indoktrinasi dalam pendidikan masih juga berlangsung hangat hingga saat ini.⁴ Demikian pula di Indonesia, mendiskusikan hal ini merupakan hal yang harus mulai dipikirkan, mengingat indoktrinasi masih kental digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

Pada masa Orde Lama, masalah ideology politik merupakan problem yang sedang dihadapi pada masa itu. Dalam masyarakat terbagi dalam tiga kelompok politik besar, yakni golongan Islam (Agamis), Komunis, dan Sekuler (Nasionalis). Sekolah terbagi dalam

¹ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).

² Ibid., hlm. ix.

³ Ibid., hlm. 1.

⁴ Dalam diskusi pendidikan isu indoktrinasi ini karena masih dianggap relevan, diangkat kembali dalam diskusi oleh Samuel Shermis S., dan James L. Barth, dengan judul *Indoctrination and the Study of Social Problems: A Re-Examination of the 1930s Debate in The Social Frontier*, *Social Education*, March 1985, hal. 191.

berbagai indoktrinasi politik. Pada masa Orde Baru, legitimasi politik penguasa lebih mendominasi proses pendidikan di sekolah. Dan pada masa ini, sebagai hasil euphoria kebebasan yang berlebihan setelah reformasi masalah pendidikan karakter menjadi masalah paling mengedepan.

Sentimen antara kebudayaan Barat dan Timur sampai saat ini masih berlangsung, sebagai efek dari perang salib beberapa abad silam, yang kadang kala masih menyelubungi berupa kecurigaan benturan kebudayaan. Membawa debat tentang indoktrinasi ini mungkin ada yang bergumam, Amerika adalah Amerika, dan Indonesia adalah Indonesia, kita mempunyai ideology yang berbeda dengan mereka. Apalagi di sekolah-sekolah sering diperlihatkan bahwa segala bentuk tingkah laku negative yang dilakukan dari anak bangsa ini adalah sebagai bentuk dari pengaruh Amerika atau Barat. Disinilah kadang kala para pendidik di sekolah secara sengaja atau tidak, telah menanamkan satu sudut pandang yang tunggal tentang fenomena social tertentu. Dan membawa ranah diskusi ini bukanlah dalam rangka Amerikanisasi atau Baratisasi melainkan semata-mata mengajak berpikir bersama dalam rangka perbaikan di dunia pendidikan sekolah kita.

3. Konsep Indoktrinasi

Kata Indoktrinasi ini berasal dari kata doktrin yang awal mulanya digunakan oleh gereja katolik dalam kebaktian umum dengan cara menanamkan keyakinan ke dalam hati kepada setiap pengikutnya. Secara historis kata ini muncul dalam pendidikan di Eropa pada abad pertengahan atau lahir dalam pendidikan agama Katolik. Dalam pendidikan Katolik di Eropa abad pertengahan sampai dengan abad modern, ajaran yang bersifat keagamaan diajarkan dimana dalam proses pembelajarannya baik secara isi maupun penyampaiannya dengan tidak mengenal kritik atau bantahan (Sinkyoikugaku Daijiten, 1990: 149).⁵ Setelah itu kata ini menyebar dan digunakan secara luas dalam pendidikan atau hal-hal yang serupa.

Marsden merumuskan bahwa indoktrinasi merupakan seperangkat teknik yang didesain untuk memperkenankan kekuatan

atau kekuasaan khususnya pemerintah atau gereja untuk mengubah seseorang atau kelompok dari beragam sudut pandang menjadi hanya satu sudut pandang tertentu. Mereka menawarkan control social dan politik yang kuat. Prosedur ini telah dikenakan pada system sekolah dan pada masyarakat yang lebih luas. Indoktrinasi ini merupakan manifestasi dari berlawanan dengan pandangan bahwa pendidikan perlu pengembangan otonom. Di sekolah pengajaran secara historis menggunakan control yang mencengkeram melalui inculcation yakni proses mempengaruhi secara paksa atas pikiran dengan sering mengulang-ulang dan Indoktrinasi berkaitan dengan materi atau system kepercayaan yang ditanamkan. Secara historis metode seperti itu telah secara jelas bahwa pendidikan merupakan barang yang telah digunakan untuk menarik masuk apakah agama, kepentingan nasional, moral, atau lingkungan.⁶ Definisi yang disampaikan oleh Marsden cukup jelas dan mudah dipahami, dia mendasarkan pada kriteria yang tegas untuk dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekolah adalah sebagai bentuk Indoktrinasi.

Dalam kamus Oxford, indoktrinasi diartikan sebagai perintah pada satu pokok persoalan; pengajaran dan pengilhaman atau bujukan. Dan dalam jurnal *Social Frontier* Indoktrinasi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk membentuk pikiran orang-orang dengan menjadikan mereka sasaran tipuannya dengan kekuasaan.⁷

Definisi indoktrinasi ini kemudian berkembang lebih luas Washburn mendefinisikan Indoktrinasi yakni sebagai suatu usaha mempengaruhi siswa untuk menerima satu solusi untuk satu masalah atau satu pokok persoalan.⁸

John Dewey mendefinisikan Indoktrinasi sebagai penggunaan cara yang sistematis yang memungkinkan untuk menanamkan pada siswa tentang satu set pandangan ekonomi dan politik dengan mengesampingkan hal lainnya.⁹

⁶ Marsden, William E., *The School Textbook: Geography, History and Social Studies*. (London: Woburn Press, 2001), hal. 167.

⁷ *Social Frontier* 1935, dalam: Shermis, Samuel S., dan James L. Barth, *log.cit*.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

⁵ 新教育学大辞典, (Kamus Besar Baru Ilmu Pendidikan) cetakan I, tahun 1990, p. 149.

Menanggapi banyaknya definisi tentang indoktrinasi yang beragam Snook kemudian mencatat bahwa indoktrinasi adalah merupakan istilah yang berkonotasi negative, dan penggunaannya secara moral patut dikritisi. Untuk melihat apakah sebuah pengajaran itu sebagai bentuk indoktrinasi atau bukan dia lebih menekankan pada motif. Hal ini menurutnya seseorang diajarkan matematika dengan menggunakan metode yang dapat digolongkan indoktrinasi, tetapi orang cenderung tidak akan mengatakan itu indoktrinasi. Sebuah pengajaran itu termasuk indoktrinasi atau bukan, menurutnya kriteria motif merupakan hal yang utama.¹⁰

4. Indoktrinasi vs Pendidikan

Berkaitan dengan isu indoktrinasi yang masih kental dilakukan dalam proses pendidikan di Indonesia, diantara para ahli pendidikan terbetik satu pemikiran tentang perlunya pemisahan antara pendidikan dan politik. Para pemikir ini ingin agar pendidikan dan politik menjadi wilayah yang terpisah. Harapan mereka adalah berusaha untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.¹¹

Pemikiran pemisahan secara tegas nampaknya mudah untuk dikatakan tetapi dalam kenyatannya sangat sulit untuk dilaksanakan. Beberapa teori pendidikan yang memperkuat salah satunya adalah mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah proses sosial, dimana ia didesain dan diorganisasi untuk menjadikan generasi baru ke dalam anggota dalam sebuah kelompok, apakah kelompok itu adalah sebuah suku, sebuah masyarakat, atau sebuah bangsa.¹² Dari definisi itu karena pendidikan sebagai sebuah produk proses sosial ia tidak dapat otonom, dia diadakan sebagai bentuk ekspresi ide-ide, ideal-ideal, harapan-harapan dan aspirasi dari kelompok sosial yang ada. Oleh sebab itu karakternya ditentukan oleh organisasi sosial dan keagamaan, ekonomi, politik, oleh siapa saja yang mencerminkan total kebudayaan

dari sebuah kelompok, baik secara material maupun spiritual.

Sehubungan dengan sifat pendidikan yang tidak bisa netral, maka sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan factual yang netral melainkan juga sebagai alat dalam menanamkan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, loyalitas, dan ide-ide. Bahkan buku pelajaran sekolah sering ditulis dan diseleksi dengan ide menyebarkan doktrin-doktrin politik, social, religi, dan moral dari kelompok social tertentu. Memang satu hal yang tidak mungkin bahwa sekolah harus dipisahkan dengan campur tangan politik khususnya dalam proses pendidikan, namun beberapa hal yang patut dihindari adalah upaya pemaksaan kehendak atau pemaksaan pemaknaan tunggal dari penguasa dengan menghindari indoktrinasi.

Untuk dapat menghindari indoktrinasi ini kita perlu tahu perbedaan antara indoktrinasi dan pendidikan. Di atas sudah dibahas panjang lebar tentang konsep indoktrinasi, yang berlawanan dengan konsep pendidikan. Pendidikan adalah proses pengalaman langsung oleh seorang individu yang akan memimpinnya dalam memformulasikan filosofinya tentang kehidupan, orientasi social, moral ideal, dan tujuan-tujuan loyalitas. Bila indoktrinasi mengajarkan apa untuk dipikir; pendidikan adalah mengajarkan bagaimana berpikir.¹³ Membebaskan program pendidikan dari indoktrinasi dengan atau tanpa tekanan oleh kelompok atau pemerintah, atau dari pendidik merupakan harapan dari pemikir pendidikan menuju ke arah kemajuan. Indoktrinasi harus di jauhi karena bertentangan dengan pendidikan yang meletakkan dasar kebebasan dalam merekonstruksi pengalaman oleh siswa sebagai individu.

5. Tantangan Sekolah abad ke-21

Campur tangan politik ke dalam lembaga dan proses pendidikan di Indonesia ibarat sudah mengakar. Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, sejak dikenalkannya system pendidikan modern model Barat, hampir setiap zaman, siapa yang memerintah mereka selalu mempengaruhi lembaga dan proses pendidikan dengan satu set perangkat kebijakan dengan tujuan dan kepentingan

¹⁰ Snook, A., 1970. The Concept of Indoctrination, in: *Studies in Philosophy and Education*, vol. VII, number 2.

¹¹ M. Sirozi, op.cit., hal. 20-26.

¹² *Colliers Encyclopedia*. (New York: Mac Millan Educational Company, 1987), hal. 581.

¹³ Introductory Remarks on Indoctrination, dalam *Social Frontier*, January 1935, hal. 8.

tertentu. Hingga sampai saat ini pun sekolah tidak bisa menghindar dari cetak biru tatanan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

Hal yang sedang kita hadapi dan sekaligus merupakan tantangan sekolah yang patut diperhatikan adalah perubahan dunia yang begitu cepat membuat kita perlu melakukan ide-ide dan orientasi baru. Nilai-nilai yang diatur sepanjang waktu dengan indoktrinasi hanya akan melahirkan manusia yang tidak dapat menyesuaikan diri. Karena itu sekolah harus menyediakan ruang agar pendidikan langsung memenuhi usaha-usaha untuk mengembangkan sensitivitas, mental yang tajam, dan kemampuan memperoleh makna dan nilai-nilai dari pengalaman-pengalaman yang dilalui siswa. Indoktrinasi itu sama seperti perbudakan moral dan intelektual.¹⁴ Bila anak didik dengan indoktrinasi, bila mereka dewasa ibarat seperti wayang, tergantung kepada siapa dalang yang menggerakkannya.

Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh James P. Shaver,¹⁵ tantangan sekolah adalah bagaimana memperbesar kemampuan siswa dalam membuat keputusan-keputusan sehingga mereka mendapat kematangan. Sekolah hendaknya memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat dalam pendefinisian dan pembentukan masalah, dan mereka diminta untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian siswa merasakan hubungan antara nilai-nilai yang diperdebatkan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan mereka sendiri. Melibatkan siswa dalam dalam penyelidikan supaya mereka dapat menjadi seperti masyarakat dewasa dalam membuat keputusan-keputusan yang rasional. Keputusan-keputusan itu hanya dapat dibangun dari komitmen-komitmen dari hasil perdebatan rasional diantara mereka.

Sebagai kata akhir, puisi Kahlil Gibran di bawah ini, mungkin dapat dijadikan rujukan gambaran imajinatif penolakan terhadap indoktrinasi, dan gambaran tantangan sekolah dalam menyediakan ruang bagi anak didiknya untuk mendefinisikan sendiri masa depan mereka, yang mungkin berbeda dan bahkan

tidak pernah diketahui bentuknya sebelumnya.

Anakmu bukan milikmu (Kahlil Gibran)

Anakmu bukan milikmu,
Mereka adalah putra putri sang hidup,
Yang rindu akan dirinya sendiri.

Mereka lahir lewat engkau,
Tetapi bukan dari engkau,
Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu.
Berikanlah mereka kasih sayangmu,
Namun jangan sodorkan pemikiranmu,
Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri.

Patut kau berikan rumah pada raganya,
Namun tidak bagi jiwanya,
Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan,

Yang tiada dapat kau kunjungi,
Sekalipun dalam mimpimu.

Engkau boleh berusaha menyerupai mereka,
Namun jangan membuat mereka menyerupaimu,
Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur,

Atau tenggelam ke masa lampau.

Engkaulah busur asal anakmu,
Anak panah hidup, melesat pergi.

Sang pemanah membidik sasaran keabadian,
Dia merentangkanmu dengan kuasaNya,
Hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat.
Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah,
Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat,
Sebagaimana dikasihiNya pula busur yang mantap.

DAFTAR PUSTAKA

- Colliers Encyclopedia*. (New York: Mac Millan Educational Company, 1987)
- Marsden, William E., *The School Text-book: Geography, History and Social Studies*. (London: Woburn Press, 2001).
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).
- 新教育学大辞典, (Sinkyoikugaku daijiten-Kamus Besar Baru Ilmu Pendidikan) cetakan I, tahun 1990.

¹⁴ Introductory Remarks on Indocritination, *Social Frontier*, log.cit.

¹⁵ Shaver, James P., *Commitment to Values and the Study of Social Problems in Citizenship Education*, dalam: *Social Education*, vol. 49, March 1985.

Social Education, March 1985: Samuel Shermis S., dan James L. Barth, Indoctrination and the Study of Social Problems: A Re-Examination of the 1930s Debate in The Social Frontier.

_____, James P. Shaver, Commitment to Values and the study of

social Problems in Citizenship Education.

Social Frontier, January 1935: Introductory Remarks on Indoctrination.

Studies in Philosophy and Education, vol. VII, number 2, 1970. Snook, A., The Concept of Indoctrination.

TANTANGAN GURU PADA ABAD KE-21

Hywel Coleman

Honorary Senior Research Fellow, School of Education, University of Leeds, UK
H.Coleman@leeds.ac.uk

1. Pendahuluan

Menurut Bank Dunia, salah satu masalah pokok berkaitan dengan guru di Indonesia pada saat ini adalah ketidakberhasilan program sertifikasi dan pemberian tunjangan guru (Chang, akan terbit 2014). Penelitian Bank Dunia berkesimpulan bahwa cara mengajar guru yang telah disertifikasi tidak bisa dibedakan dengan metode guru yang belum disertifikasi. Wiryawan (2013) juga berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi guru adalah keharusan untuk memperbaiki mutunya sendiri, terutama kompetensi pedagogiknya dan kompetensi kepribadiannya. Sementara Madani melihat tantangan guru sebagai masalah rumit yang menyangkut pendidikan awal sebagai guru dan pengembangan keprofesiannya selanjutnya:

Perguruan tinggi yang menyiapkan guru kita, apakah mereka cukup memahami persoalan guru? Apakah perubahan IKIP menjadi universitas bisa memenuhi harapan kita agar dapat menyiapkan calon guru? Bagaimanakah beberapa negara lain - misalnya India dan Cina - melakukan perbaikan terhadap guru? Apakah guru SD, SMP, dan SMA semua harus melalui jalur yang sama di perguruan tinggi? Bagaimana pola pengembangan profesi guru di lapangan? (Faisal Madani, komunikasi pribadi, 2013)

Makalah ini mencoba membahas tantangan yang sedang dihadapi oleh guru di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Pembahasan dimulai dengan analisis sederhana mengenai hubungan antara pendidikan dengan perkembangan masyarakat yang ada saat ini di Indonesia. Dengan kata lain, kita perlu melihat terlebih dahulu tentang dampak pendidikan selama ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap karakter pendidikan yang diperlukan saat ini dan bagaimana wujud karakter pendidikan yang diperlukan pada masa depan. Apabila

terdapat perbedaan atau kekurangan antara dampak pendidikan selama ini dengan karakteristik masyarakat yang diharapkan, berarti sistem pendidikan yang ada belum sepenuhnya mencapai sasarannya. Perbedaan atau kekurangan tersebut harus menjadi fokus perhatian bagi para pemangku kepentingan.

Pertanyaan yang timbul adalah, apakah semua kekurangan dalam sistem pendidikan selama ini merupakan tanggung jawab guru sendiri, ataukah ada pihak lain yang juga berperan? Setelah pertanyaan tersebut terjawab, baru dapat dilihat dengan jelas apa yang menjadi tantangan bagi guru.

2. Hubungan antara pendidikan dengan perkembangan masyarakat selama ini

Isu pertama yang akan dibahas adalah hubungan antara pendidikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia selama ini. Apakah sistem pendidikan berdampak pada peserta didik, bagaimana proses pendidikan selama mereka belajar dan selanjutnya bagaimana dampaknya setelah mereka menjadi anggota masyarakat? Apakah dampak tersebut bersifat positif atau negatif?

Untuk mengevaluasi dampak sistem pendidikan tidak cukup dengan melihat Nilai Evaluasi Murni (NEM) yang diperoleh oleh peserta didik. Akan tetapi perlu juga dilihat empat hal, sebagai berikut:

- kompetensi siswa: melihat sejauh mana peserta didik di Indonesia memiliki kompetensi membaca, menghitung (matematika), dan memahami dunia di sekitarnya (sains)?
- kesehatan: apakah terdapat korelasi antara tingkat pendidikan seseorang dengan keadaan kesehatannya?
- ekonomi: apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dengan pendapatan?
- sikap dan perilaku sosial: apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, cara berfikir, dengan sikap dan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat?

2.1 Kompetensi membaca, menghitung, dan memahami dunia sekitarnya

Sampai dengan saat ini, Indonesia sudah lima kali berpartisipasi dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA), yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012. PISA mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains yang dimiliki oleh peserta didik pada usia 15 tahun. Tujuan PISA adalah untuk 'menilai sampai sejauh mana peserta didik yang mendekati tahap akhir program wajib belajar telah mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat modern, dengan memfokuskan pada membaca, matematika, dan sains. PISA mencoba untuk tidak hanya menilai apakah peserta didik dapat mereproduksi ilmu, tetapi juga meneliti seberapa terampil mereka dalam mengekstrapolasi dari apa yang sudah mereka pelajari dan bagaimana menerapkannya di lingkungan yang baru, baik di dalam maupun di luar sekolah' (OECD 2010, 18).

Table 1. Kompetensi membaca yang dimiliki siswa di Indonesia, umur 15 tahun (SMA Kelas 1)

Tahun	Indonesia		Jumlah negara yang berpartisipasi	Negara atau negara bagian dengan skor tertinggi	Negara dengan skor terendah
	Skor	Urutan			
2000	371	39	41	Finland 546	Peru 327
2003	382	39	40	Finland 543	Tunisia 375
2006	393	48	56	Korea 556	Kyrgyzstan 285
2009	402	57	65	Shanghai, China 556	Kyrgyzstan 314
2012	396	60	65	Shanghai, China 570	Peru 384

Sumber: OECD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013

Hasil dari lima kali pelaksanaan penilaian PISA terhadap kompetensi membaca peserta didik dirangkum dalam Tabel 1. Hasil penilaian kompetensi membaca berkisar dari skor rata-rata antara 371 pada tahun 2000 sampai dengan 402 pada tahun 2009. Sebagian besar peserta didik berada pada Level 1 (terbawah dari enam level) sedangkan kurang dari lima persen berada pada Level 4, 5 atau 6 (level tertinggi). Namun ada peningkatan sedikit dari tahun 2000 sampai dengan 2009, akan tetapi pada tahun 2012 skor rata-rata Indonesia menurun lagi dari 402 ke 396.

Tabel 2 merangkum kompetensi sains anak Indonesia usia 15 tahun di tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012. Selama dua belas tahun kompetensi di bidang sains 'tidak berubah secara signifikan' (OECD 2013). Pada tahun 2000 skor rata-rata yang dicapai adalah 393 dan pada tahun 2012 sudah menurun menjadi 382. Sejak tahun 2003 skornya semakin menurun dari tahun ke tahun. Kurang dari 0,1 persen peserta didik Indonesia dapat mencapai Level 5 atau 6 dan lebih dari separuh peserta didik berada pada Level 1 atau pada posisi yang lebih rendah lagi dari Level 1.

Table 2. Kompetensi yang dimiliki siswa di Indonesia, umur 15 tahun (SMA Kelas 1), di bidang sains

Tahun	Indonesia		Jumlah negara yang berpartisipasi	Negara atau negara bagian dengan skor tertinggi	Negara dengan skor terendah
	Skor	Urutan			
2000	393	38	41	Korea 552	Peru 333
2003	395	38	40	Finland 548	Tunisia 385
2006	393	50	57	Finland 563	Kyrgyzstan 322
2009	383	60	65	Shanghai, China 575	Kyrgyzstan 330
2012	382	64	65	Shanghai, China 580	Peru 373

Sumber: OECD Sumber: OECD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013

Di bidang matematika hasil penilaian PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 3. Sekali lagi tidak terlihat ada kecenderungan yang jelas; pada tahun 2000 skor rata-rata yang dicapai adalah 367 dan pada tahun 2012 skornya 375. Pada tahun 2006 skor sempat naik sedikit menjadi 391 kemudian pada tahun 2009 menurun lagi. Menurut OECD, selama dua belas tahun terakhir 'tidak terjadi perubahan

signifikan' dalam kompetensi matematika yang dimiliki oleh peserta didik di Indonesia. Dibanding dengan semua negara lain yang berpartisipasi dalam program PISA, Indonesia mempunyai persentase siswa yang paling sedikit pada Level 2 ke atas dan persentase yang paling besar pada Level 1 atau lebih rendah lagi, yaitu di bawah Level 1 (OECD 2013).

Table 3. Kompetensi yang dimiliki siswa di Indonesia, umur 15 tahun (SMA Kelas 1), di bidang matematika

Tahun	Indonesia		Jumlah negara yang berpartisipasi	Negara atau negara bagian dengan skor tertinggi	Negara dengan skor terendah
	Skor	Urutan			
2000	367	39	41	Hong Kong 560	Peru 292
2003	360	38	40	Hong Kong 550	Brazil 356
2006	391	50	57	Chinese Taipei 549	Kyrgyzstan 311
2009	371	61	65	Shanghai, China 600	Kyrgyzstan 331
2012	375	64	65	Shanghai, China 613	Peru 368

Sumber: OECD Sumber: OECD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013

Dari lima belas kali pelaksanaan pengukuran kompetensi anak dalam membaca, matematika, dan sains yang dilaksanakan melalui program PISA antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa:

- Anak Indonesia usia 15 tahun pada umumnya mencapai tingkat kompetensi antara sangat rendah dan rendah dalam ketiga bidang pengukuran kompetensi
- Mayoritas peserta didik tergolong ke dalam level terendah pada ukuran kompetensi; sangat sedikit yang mencapai tingkat tinggi
- Terdapat sedikit peningkatan kompetensi membaca antara tahun 2000 dan 2009 akan tetapi terjadi penurunan lagi antara tahun 2009 dan 2012
- Dalam kompetensi matematika dan sains tidak terjadi perubahan signifikan selama dua belas tahun
- Dalam bidang matematika dan sains Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara, dengan skor yang tidak berbeda secara signifikan dengan Colombia (peringkat 62), Qatar (63), dan Peru (65)
- Kompetensi membaca menempatkan Indonesia pada peringkat 60, tidak berbeda secara signifikan dengan Tunisia (56), Colombia (57), Jordania (58), Malaysia (59), Argentina (61), Albania (62), dan Kazakhstan (63).

2.2 Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah adanya pemahaman dan perilaku lulusannya yang berkaitan dengan kesehatan dirinya sendiri serta kesehatan anaknya. Seseorang yang berpendidikan diharapkan akan memiliki pemahaman tentang hal-hal yang perlu dihindari dan hal-hal lain yang perlu dilakukan agar dirinya dan keluarganya dapat hidup dengan sehat. Lebih dari itu, diharapkan orang yang berpendidikan tidak hanya mempunyai pemahaman yang lebih tentang kesehatan dibanding dengan warga lain yang pendidikannya lebih rendah tetapi dia juga akan mengimplementasikan pemahamannya tersebut dalam cara hidup yang sehat. Hubungan antara pendidikan dengan pemahaman serta perilaku bisa diperoleh secara langsung melalui pendidikan (misalnya, hal-hal yang menyangkut kesehatan diajarkan di sekolah, kemudian

diterapkan langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya) atau diperoleh secara tidak langsung (yang terpelajar cenderung banyak membaca; yang banyak membaca akan terekspos terhadap informasi tentang gizi dan kesehatan; yang melek kesehatan cenderung memilih pola hidup sehat). Temuan dari enam studi kasus di Indonesia memberi indikasi tentang hal ini.

Pada studi kasus pertama, penelitian dilakukan dengan pasien hamil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa *tidak* terdapat hubungan antara tingkat pendidikan calon-calon ibu dan rencana mereka untuk memberikan ASI (air susu ibu) kepada bayinya setelah melahirkan:

Planning of prolonged breastfeeding has little to do with maternal education. (Idris et al. 2013)

Merencanakan pemberian ASI selama jangka waktu panjang tidak berkaitan secara signifikan dengan pendidikan ibu.

Ibu-ibu, baik yang berpendidikan rendah maupun tinggi, cenderung merencanakan pemberian ASI kepada bayinya selama jangka waktu yang kurang lebih sama. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman tentang pentingnya bayi diberi ASI tidak jauh berbeda antara yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan lebih tinggi.

Studi kasus kedua dilakukan oleh tim dari University of Illinois at Chicago dengan kaum laki-laki di Jakarta yang melakukan seks dengan sesama jenis. Penelitiannya menemukan adanya korelasi langsung antara tingkat pendidikan dan pemakaian kondom:

Having a higher level of education was associated with more condom use ($p < .05$). (Safika et al. 2013)

Memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi berhubungan dengan kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan kondom ($p < .05$).

Dalam hal ini, laki-laki yang rentan mengidap HIV tetapi berpendidikan tinggi menyadari pentingnya menggunakan kondom dan mereka bertindak sesuai dengan kesadaran tersebut. Akan tetapi oleh populasi yang sama dengan pendidikan lebih rendah penggunaan kondom juga rendah, karena mereka belum memahami risiko yang dihadapi. Dengan demikian, tingkat

pendidikan berkaitan langsung dengan perilaku dan kesehatan.

Pada kasus lain, ternyata pemahaman tentang cara hidup sehat tidak selalu disertai dengan tindakan yang sesuai. Survei Demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2012, yang dilakukan bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), misalnya, mengukur pemahaman yang dimiliki oleh wanita kawin umur 15-49¹ tentang perlunya sterilisasi pria sebagai salah satu metode keluarga berencana (KB). (Lihat Tabel 4.) Di antara wanita yang tidak pernah sekolah hanya 13 persen memahami bahwa sterilisasi pria merupakan salah satu metode KB. Dari wanita yang pernah duduk di bangku SD tetapi tidak tamat, tingkat pemahaman meningkat menjadi 21 persen, sedangkan dari yang sudah tamat SD 28 persen memahami mengenai hal ini. Tingkat pemahaman yang paling tinggi terdapat pada kelompok wanita yang tamat SMA atau berpendidikan di atas SMA, di mana 57 persen wanita memiliki pemahaman tentang hal tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman; makin tinggi pendidikan seorang wanita makin besar kemungkinan dia memiliki pemahaman tentang sterilisasi pria sebagai salah satu jenis KB (BPS, BKKBN & Kemenkes 2012).

Table 4. Pemahaman/penggunaan KB sterilisasi pria (% wanita kawin umur 15-49) di Indonesia
Sumber: BPS, BKKBN & Kemenkes (2012, 10, 12)

Pendidikan	Memahami	Menggunakan
Tidak sekolah	13	0,9
Tidak tamat SD	21	0,3
Tamat SD	28	0,1
Tidak tamat SMA	35	0,0
Tamat SMA+	57	0,1

¹ Frasa 'wanita kawin umur 15-49' adalah istilah yang digunakan oleh BPS.

Dari Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk *menggunakan* jenis KB ini sangat rendah (kurang dari satu persen). Dengan demikian, tidak ada korelasi antara tingkat pemahaman dan tingkat penggunaan: dari kelompok wanita yang paling sedikit memahami sterilisasi (yaitu yang tidak pernah sekolah) terdapat hanya 0,9 persen yang suaminya disterilisasi. Sebaliknya, dari kelompok yang paling banyak mengerti tentang sterilisasi (lulusan SMA) ternyata hanya 0,1 persen yang suaminya disterilisasi. Berarti tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan wanita dengan kecenderungan suaminya untuk memilih sterilisasi sebagai metode KB.

Penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of California, Berkeley, bekerja sama dengan Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (*International Food Policy Research Institute*) di Washington DC, membandingkan tingkat pendidikan dari sekitar 2.000 orang ibu di Indonesia dengan perkembangan anaknya berumur 0 sampai dengan 23 bulan. Perkembangan anak dilihat dari dua perspektif:

- perkembangan secara umum (kemampuan berkomunikasi, kemampuan menggerakkan anggota badan, dan interaksi sosial)
- panjang badan² berbanding dengan umur anak (disingkat di sini 'panjang badan/umur anak').

Sedangkan tingkat pendidikan ibu dilihat dari lamanya mereka bersekolah:

- 1-5 tahun (berarti tidak tamat SD)
- 6 tahun (kemungkinan besar tamat SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP)
- 7-9 tahun (kemungkinan besar tamat SD dan melanjutkan ke SMP tetapi belum tentu tamat SMP)
- lebih dari 9 tahun (kemungkinan sudah tamat SMP dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi).

Ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

² Istilah 'panjang badan' adalah istilah yang digunakan oleh BPS.

Table 5. Pendidikan ibu dibanding dengan perkembangan dan panjang badan/umur anak (umur 0-23 bulan) di Indonesia
Sumber: Fernand et al. (2012)

Pendidikan ibu (tahun)	Tingkat perkembangan anak N=1631	Panjang badan/umur anak N=2019
1-5	0.20	0.03
6	0.20	0.07
7-9	0.20	0.06
> 9	0.34* (p < 0.10)	0.19

* angka yang signifikan

Tentang perkembangan anak, ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dan perkembangan anak, kecuali dalam satu aspek, yaitu pada kelompok ibu yang bersekolah lebih dari 9 tahun. Dengan kata lain, tidak ditemukan

korelasi antara lamanya ibu belajar di sekolah (1-5 tahun, 6 tahun, 7-9 tahun) dengan perkembangan anak mereka.

Kesimpulan yang hampir sama juga dapat ditarik dari perbandingan antara lamanya ibu bersekolah dengan panjang badan/umur anak mereka, yaitu tidak ada korelasi antara kedua variabel tersebut. Terdapat kecenderungan bagi ibu yang bersekolah lebih dari 9 tahun mempunyai anak yang badannya sedikit lebih panjang berbanding umur, tetapi secara statistik perbedaannya tidak signifikan.

Pembahasan di atas disimpulkan pada Tabel 6. Hubungan yang nyata antara pendidikan dengan kesehatan (atau pemahaman tentang kesehatan) hanya dapat ditemukan pada kasus 2 dan 3. Pada kasus 5, hubungan antara pendidikan ibu dan perkembangan anak di bawah umur 23 bulan hanya dapat dilihat pada ibu dengan pendidikan selama atau lebih dari 9 tahun. Pada kasus 1, 4, dan 6 tidak terdapat bukti sama sekali tentang dampak pendidikan terhadap pemahaman kesehatan atau cara hidup masyarakat.

Table 6. Hubungan antara pendidikan dengan kesehatan: 6 studi kasus di Indonesia

Fokus	Kesimpulan
1 Rencana wanita hamil untuk memberikan ASI setelah melahirkan	Tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan
2 Penggunaan kondom oleh laki-laki yang berisiko tinggi mengidap penyakit HIV	Berkorelasi dengan tingkat pendidikan
3 Pemahaman wanita tentang sterilisasi pria sebagai jenis KB	Berkorelasi dengan tingkat pendidikan
4 Penggunaan sterilisasi pria sebagai jenis KB	Tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan isteri
5 Perkembangan anak umur 0-23 bulan	Tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan ibu (kecuali bagi ibu yang bersekolah lebih dari 9 tahun)
6 Panjang badan/umur anak (umur 0-23 bulan)	Tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan ibu

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan pada tingkah laku masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya masih sangat terbatas, padahal sistem

pendidikan nasional seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Berarti dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh pendidikan di Indonesia belum dapat tercapai sepenuhnya.

2.3 Hubungan antara pendidikan dan pekerjaan/pendapatan

Mengenai kemungkinan adanya hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dan jenis pekerjaannya atau pendapatannya, hubungan tersebut telah dibuktikan oleh beberapa studi di Indonesia, akan tetapi makna dari hubungan tersebut tidak selalu jelas.

Sumner, misalnya, menggunakan data dari Survei Demografi Indonesia dari 1991 sampai dengan 2007 untuk mengidentifikasi ciri khas kelompok masyarakat yang paling miskin. Kesimpulannya:

[In Indonesia] poverty remains concentrated among those in households with heads with no or incomplete primary education. (Sumner 2013, 30)

[Di Indonesia] masih terdapat kantong kemiskinan pada rumah tangga di mana kepala keluarga tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD.

Ini berarti bahwa salah satu karakteristik golongan masyarakat yang paling miskin di Indonesia adalah mereka yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Namun kita harus sangat hati-hati dalam menafsirkan kesimpulan Sumner tersebut karena korelasi belum tentu berarti hubungan sebab-akibat. Apakah golongan yang paling miskin itu menjadi miskin karena mereka tidak sempat sekolah? Ataukah mereka tidak sekolah karena berasal dari keluarga yang miskin?

Pada studi lain, Digdowiseiso (2009) menganalisis data dari 23 provinsi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 1996, 1999, 2002, dan 2005, dengan tujuan untuk melihat hubungan antara peningkatan mutu sumber daya manusia (melalui pendidikan) dengan pendapatan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan serta keberagaman mutu sumber daya manusia dalam masyarakat (dari yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi) menyebabkan penghasilan menjadi tidak merata (ada yang berpenghasilan rendah dan ada yang berpenghasilan tinggi).
- Sebaliknya, perkembangan ekonomi negara menyebabkan pendapatan

masyarakat cenderung menjadi lebih merata.

- Penanaman modal pada peningkatan mutu sumber daya manusia (yaitu dengan menyediakan dana untuk pengembangan sistem pendidikan) berdampak secara signifikan pada perkembangan ekonomi nasional.
- Jika negara-negara berkembang seperti Indonesia hendak mencapai pemerataan dalam masyarakat, maka anggaran negara harus dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pendidikan dan menyediakan bea siswa agar setiap anak bisa mengakses pendidikan, daripada untuk membagikan BTL (Bantuan Tunai Langsung).³

Dengan demikian, menurut analisis Digdowiseiso, pendidikan di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan pada ekonomi secara menyeluruh. Pemerataan sosial dapat dicapai melalui pengembangan sistem pendidikan. Namun, analisis data SUSENAS 2011 (BPS 2011a), yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Agung Purwadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terdapat kesimpulan yang agak berbeda. Menurut Purwadi (komunikasi pribadi, 2012), pada tingkat individu, dampak tingkat pendidikan seseorang pada jenis pekerjaan dan pendapatan memang ada, tetapi hanya terlihat pada pendidikan Diploma ke atas. Ini berarti bahwa seorang lulusan SMA tidak berada pada posisi yang lebih menguntungkan (dari segi jenis pekerjaan dan penghasilan) dibanding dengan orang lain yang hanya tamat dari SD. Untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan

³ Diterjemahkan secara bebas dari Digdowiseiso (2009, 15-16): 'The econometric results ... indicate that a higher level of human capital ... and the relative dispersion of human capital have a disequalising effect on ... income distribution. This study also confirms that economic growth has [a] strongly and significantly equalising effect on ... income distribution, supporting the complementarity relationship between equity and growth. ... Finally, human capital investment contributes significantly to the growth of [the] economy. ... If developing countries such as Indonesia want to achieve an egalitarian society with a more equitable distribution of income, economic policies should be more targeted at educational expansion and equal access to [the] education sector than ... redistributive policies.'

yang lebih tinggi, dia harus sekolah sampai minimum D1. Baru setelah itu tingkat pendidikan berkorelasi dengan pendapatan. (Lulusan S1 cenderung memperoleh upah yang lebih baik dibanding dengan lulusan D1; lulusan S2 cenderung membawa pulang penghasilan lebih tinggi dibanding dengan lulusan S1, dan seterusnya.)⁴

2.4 Hubungan antara pendidikan dengan sikap/perilaku sosial

Menurut Agung Purwadi (berdasarkan komunikasi pribadi, 2012), data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia atau *Indonesia Family Life Survey* (RAND Corporation & CPPS 2007) dan Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS (BPS 2011b) dapat dimanfaatkan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan seseorang dengan sikap sosial dan perilakunya. Misalnya, menurut Purwadi, ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pendapat Ibu/Bapak/Sdr jika salah satu saudara (termasuk anak) menikah dengan pasangan yang berbeda aliran kepercayaan/agama ?
Sangat keberatan / Keberatan / Tidak keberatan / Sangat tidak keberatan)
(RAND Corporation & CPPS 2007,57)

Ternyata, responden dengan tingkat pendidikan tinggi (SMA ke atas) cenderung lebih sering memilih jawaban 'sangat keberatan' atau 'keberatan' dibanding dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Demikian juga, menurut Purwadi, data SAKERNAS mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang (SMA ke atas) semakin jarang dia mau bekerja dengan berusaha sendiri dan semakin sering dia menjadi pegawai pada instansi pemerintah atau karyawan pada perusahaan swasta.

Jika interpretasi Purwadi benar, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia pada zaman sekarang menciptakan masyarakat yang a) cenderung menjadi semakin konservatif dan memiliki sikap sosial yang semakin kaku dan b)

semakin hati-hati dalam pengambilan risiko sehingga dia lebih suka memilih pekerjaan yang 'aman'. Kreatifitas dibendung oleh pendidikan, tidak dikembangkan.

Perlu diingat bahwa analisis Purwadi belum diterbitkan dan masih bersifat tentatif. Namun demikian, kesimpulannya menarik dan dapat diperkuat oleh observasi penulis di lingkungan tempat tinggalnya di perbatasan Depok-Jakarta Selatan, dengan membandingkan dua kelompok warga: pramuniaga di toko-toko besar di mall dan petugas satuan pengamanan (satpam) di perumahan.

Kelompok pertama, pramuniaga yang bekerja di toko milik perusahaan skala nasional di mall, harus memiliki ijazah SMA atau sederajat dan biasanya harus 'berpenampilan menarik'. Mereka bekerja selama delapan jam per hari selama enam hari per minggu (total 48 jam kerja selama tujuh hari). Gaji yang diterima biasanya sesuai dengan upah minimum regional (UPR) atau sedikit lebih tinggi lagi; pada tahun 2013 UPR di Depok sebesar Rp 2.042.000 per bulan dan pada tahun 2014 akan dinaikkan sampai Rp 2.397.000, sementara di DKI UPR tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000 dan pada tahun 2014 akan naik menjadi Rp 2.441.000.⁵ Sebagai karyawan, walaupun dengan gaji relatif kecil, para pramuniaga memperoleh beberapa jaminan, seperti uang lembur, tunjangan hari raya, dan jaminan kesehatan. Umumnya mereka merasa aman dan terlindungi.

Situasi kelompok satpam yang dipekerjakan oleh perusahaan sekuriti lokal sangat berbeda. Sebagian besar adalah lulusan SD atau SMP; sebagian kecil mempunyai ijazah SMK/SMA. Jam kerjanya selama dua belas jam per hari; regu siang bertugas dari jam 07.00 sampai 19.00 dan regu malam dari jam 19.00 sampai jam 07.00. Pada setiap siklus enam hari mereka bertugas siang dua kali, bertugas malam dua kali, dan istirahat satu setengah hari (total 48 jam kerja selama enam hari). Gaji yang diterima hanya Rp 1.200.000 per bulan, jauh di bawah UPR. Mereka tidak mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri beserta keluarga dengan pendapatan yang begitu minim, sehingga mereka terpaksa mempunyai kegiatan lain di luar jam kerja yang menghasilkan nafkah. Ada yang menanam padi, jambu, dan belimbing, ada

⁴ Sangat disayangkan, hasil penelitian Agung Purwadi ini belum diterbitkan.

⁵ Data diperoleh dari laman Human Resource Community di www.hrcentro.com.

yang menawarkan jasa pijit, ada yang menjadi pengojek, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, ada yang membantu isterinya menjual kue, ada yang menjadi tukang kebun di rumah-rumah pribadi, dan ada juga yang menjadi makelar atau perantara bagi penjual/pembeli rumah.

Ironisnya, kelompok satpam ini tingkat pendidikannya relatif sederhana tetapi mereka memiliki sifat kewirausahaan dan dapat merespon situasi sulit di mana mereka berada dengan berbagai macam akal kreatif. Kelompok satpam inilah – bukan kelompok pramuniaga – yang berani melakukan terobosan baru yang mengandung risiko. Bukan hanya itu, tetapi di antara kelompok satpam ini ada dua orang (Pak Tani dan Pak Tukang Pijit) yang juga bertugas sebagai ketua RT di kampungnya masing-masing dan dengan demikian mereka menunjukkan sifat kemasyarakatan yang sangat luwes dan aktif. Jadi, jika hipotesa Purwadi mengatakan bahwa sistem pendidikan menciptakan lulusan yang cenderung menghindari risiko dan mencari situasi aman, para karyawan toko mewah di mall merupakan contoh klasik gejala tersebut. Sementara itu, bapak-bapak satpam (yang tingkat pendidikannya agak lebih rendah) masih memiliki kearifan lokal yang kental dan berani bertindak atas inisiatif sendiri tanpa mencari perlindungan sebagai karyawan atau suruhan pemilik modal.

3. Seperti apakah Manusia Indonesia yang akan diciptakan?

Dari pembahasan tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan masyarakat di atas, tampak jelas bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Maksud makalah ini adalah bukan untuk mencari penyebab kenapa kekurangan tersebut bisa terjadi. Akan tetapi yang terpenting adalah langkah apa yang perlu dilakukan, yaitu dengan memulai proses penentuan apa yang hendak diciptakan oleh sistem pendidikan. Kompetensi dan karakteristik apa yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-21?

Paling sedikit para lulusan sekolah di Indonesia harus:

- memiliki kompetensi pada level antara sedang dan tinggi dalam membaca/menulis, menghitung (matematika), dan memahami dunia sekitarnya (sains)

- memahami *dan menerapkan* cara menjaga kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya
- memiliki bekal untuk memperoleh jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya, dan menghasilkan pendapatan yang wajar dan mencukupi kebutuhan hidup
- bisa mempertahankan sikap terbuka terhadap keberagaman
- bisa mempertahankan sikap kreatif, berani, dan siap mengambil risiko
- menyadari tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat dan bertindak berdasarkan kesadaran tersebut.

Pada intinya, daftar di atas barangkali tidak terlalu jauh berbeda dengan rumusan Nasution, yang mengatakan bahwa, untuk menghadapi tantangan abad ke-21, sekolah di Indonesia:

harus menyediakan ruang agar pendidikan langsung memenuhi usaha-usaha untuk mengembangkan sensitivitas, mental yang tajam, dan kemampuan memperoleh makna dan nilai-nilai dari pengalaman-pengalaman yang dilalui siswa. (Nasution 2013)

4. Siapa yang perlu bertindak?

Transformasi pendidikan yang diperlukan tentu saja tidak bisa dibebankan secara menyeluruh kepada guru. Banyak pihak lain yang juga harus berkontribusi.

Pertama, Indonesia membutuhkan ideologi atau filsafat pendidikan baru. Hal ini harus disusun bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (termasuk orang tua dan guru). Sebenarnya, Pancasila bisa dimanfaatkan sebagai titik awal untuk penyusunan ideologi pendidikan tersebut, sedangkan formulasi 'peningkatan daya saing dengan negara lain' (yang sering dikemukakan sebagai salah satu tujuan pendidikan di Indonesia) adalah dasar pemikiran yang terlalu miskin.

Masyarakat, sekolah, orang tua, guru, media, dan lain-lain juga perlu dilibatkan dalam implementasi program pendidikan. Ambil saja pemberantasan korupsi sebagai contoh. Pelajaran konvensional tentang korupsi memang perlu, tetapi selama gejala korupsi ditolerir oleh masyarakat pelajaran di

sekolah tidak akan mempunyai dampak signifikan. Hal ini diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri:

Salah satu faktor korupsi sulit diberantas adalah karena ia sudah berkembang menjadi 'pengetahuan diam-diam' (*tacit knowledge*) yang merangkai dan menggerakkan hampir seluruh kesadaran kolektif bangsa ini ... Korupsi dianggap lumrah. Sudah tradisi. Orang memberi tip kepada pegawai kelurahan, misalnya, dianggap lumrah. Tradisi. Padahal ini suap. (KPK 2012, 2-3)

Sekolah sendiri harus berubah menjadi 'komunitas bermoral' (*moral community*), di mana semua pihak - siswa, guru, dan manajemen sekolah - hidup, bekerja, dan berinteraksi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang sudah disepakati bersama (Fullan 2010, Ryan & Gilbert 2008, Wagner & Simpson 2008). Siswa yang berkembang dalam komunitas yang secara eksplisit berfungsi berdasarkan suatu sistem etik akan siap untuk berperan secara moral dalam masyarakat di luar sekolah. Tetapi siswa yang hanya mempelajari etika sebagai mata pelajaran yang harus dihafal belum dibekali dengan dasar moral.

Contoh lainnya menyangkut penggunaan alat transportasi di jalan raya. Sudah beberapa kali terjadi kasus di mana anak di bawah umur dibiarkan membawa mobil atau motor sendiri. Anak tersebut tidak dapat menguasai mobil atau motor yang dikendarainya sehingga terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban luka atau meninggal. Siapa yang dapat disalahkan dalam kasus ini?



Gambar 1. Sepeda motor milik siswa di pelataran parkir salah satu SMP negeri
(Foto: Hywel Coleman)

Penulis mengambil foto (Gambar 1) di halaman salah satu SMP swasta di ibu kota

salah satu provinsi di Indonesia. Pemandangan serupa dapat dilihat di hampir semua sekolah di Indonesia. Jumlah motor yang diparkir di sini dan di bagian lain di halaman yang sama mencapai sekitar 115. Jumlah helm yang kelihatan sekitar sepuluh buah. Bagaimana gejala ini bisa terjadi? Sepertinya mustahil anak SMP bisa membeli motor dengan uang sendiri dan hampir bisa dipastikan anak SMP belum cukup berumur untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM (persyaratan minimal umur 16 tahun untuk SIM C). Berarti orang tua membelikan motor dan mengizinkan anaknya membawa motor tanpa dokumen izin mengemudi dan pada umumnya tanpa menggunakan helm. Bukan hanya itu tetapi pihak sekolah juga menyediakan halaman parkir untuk siswanya yang jelas-jelas melanggar hukum. Hasil dari persekongkolan antara sekolah dan orang tua ini adalah anak-anak belajar (menjadi sadar) bahwa hukum tidak perlu ditaati, walaupun dengan melanggar hukum ada risiko si anak bisa mencelakakan dirinya dan warga lain. Jika sejak kecil anak-anak memperoleh 'pelajaran' seperti ini akan sulit sekali untuk merubah pandangan dan perilaku mereka di kemudian hari.

Transformasi pendidikan mendesak untuk diterapkan, dan guru harus berperan aktif dalam transformasi tersebut. Namun guru tidak bisa bertindak sendiri melawan gejala-gejala sosial seperti yang dibahas di atas.

5. Tantangan bagi guru-guru di Indonesia

Ada fenomena baru di Indonesia, di mana guru dipandang seperti robot yang harus menerapkan kurikulum tanpa menggunakan inisiatif:

Penyimpangan dalam implementasi kurikulum selama ini terjadi karena guru. Maka peran guru harus banyak dikurangi ... Guru adalah satu variabel yang harus disesuaikan dengan kurikulum ... Kurikulum harus bebas dari konstrain/kendala. Wujud kurikulum adalah buku untuk siswa dan manual untuk guru. Guru sekarang berada di posisi ketiga, bukan pertama. (Alkaff 2013)⁶

⁶ Komentar Abdullah Alkaff tentang guru disampaikan pada seminar di Komunitas Salihara, Jakarta, pada tanggal 7 Mei 2013. Komentar

Menurut Alkaff, peran guru perlu dibatasi agar kurikulum dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya. Pandangan tersebut dapat dikomentari sebagai berikut:

- Dalam sejarah pendidikan belum pernah ditemukan suatu kurikulum atau metodologi yang 'kebal guru'
- Hubungan antara guru dan siswa adalah inti dari proses pendidikan; guru tidak dapat dikesampingkan
- Guru adalah ahli (bukan robot) karena gurulah yang sehari-hari berinteraksi dengan siswa dan memahami kebutuhan dan ciri khas mereka
- Usaha untuk menyingkirkan atau mengerdilkan guru pasti akan gagal.

Menurut Bjork, guru di Indonesia telah dibentuk sebagai *pegawai negeri* yang melaksanakan perintah atasan, bukan sebagai *pendidik* yang dengan otonomi penuh bertindak sesuai kebutuhan siswanya (Bjork 2013, 54). Padahal, guru yang kita perlukan adalah guru seperti yang digambarkan oleh Sumardianta, yang mengajar di SMA Kolese John De Britto di Yogyakarta:

Guru yang hebat [adalah guru yang] menginspirasi murid ... Kurikulum diolah dan disajikan sesuai kebutuhan murid ... Guru inspiratif [adalah guru] yang kerjanya bukan sekadar mengajar, melainkan benar-benar mendidik. Guru yang hebat paham bahwa pekerjaan utamanya menginspirasi murid. (Sumardianta 2013, xii)

Muhaimin Syamsuddin (komunikasi pribadi, 2013) juga pernah mengalami pendidikan yang menginspirasi ketika dia belajar di madrasah:

Saya beruntung sekolah di madrasah Kyai Wahid karena beliau memberikan kesempatan yang luas ke muridnya untuk belajar *usul fiqh*, terjemahan bebasnya adalah filsafat pengambilan hukum. Dibanding anak madrasah lain yang tidak pernah didorong belajar *usul fiqh* saya merasa 'diselamatkan' oleh

Kyai Wahid dari terjatuh ke dalam *jumud* (kolot atau berhenti berfikir). Anak madrasah lain lebih banyak dijejali menghafal *fiqh* yang esensinya adalah 'produk hukum siap pakai'. Kyai Wahid mendorong kami untuk berani berpendapat. Kyai Wahid seringkali mengingatkan kami terhadap sabda Nabi: barangsiapa yang bersungguh-sungguh berfikir dan menelurkan satu pendapat dan pendapatnya tersebut benar, maka baginya dua pahala; dan barangsiapa yang bersungguh-sungguh berfikir dan menelurkan satu pendapat dan pendapatnya tersebut salah, maka baginya satu pahala. ... [Pada umumnya] para ustadz cukup merasa sukses kalau bisa memaksa santri untuk menghafalkan hukum-hukum *fiqh* dan memaksa para santri untuk menganut salah satu mazhab tertentu. Para santri tidak diajarkan untuk berani berpendapat sendiri. Kreatifitas santri dikebiri dengan standard-standard yang mudah diukur dan dangkal. Misalnya: santri yang baik dan pintar adalah santri yang dapat menghafal setidaknya 15 bab (juz) Al Quran.

Guru perlu diberdayakan dan diberi kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan siswa dan harapan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang guru menjadi ragu-ragu atau takut bertindak karena khawatir apa yang mau dilakukannya tidak sesuai dengan kurikulum atau tidak sesuai dengan 'standar'. 'Standar' memang perlu, tetapi jangan sampai 'standar' itu menjadi borgol bagi guru sehingga dia tidak berani berinisiatif.

Untuk menghadapi tantangan yang sudah kita bahas di atas, guru perlu diberi kemerdekaan, bukan dibelenggu. Guru adalah bukan teknisi tetapi pelopor kemerdekaan bagi siswanya. Dan supaya guru dapat menghadapi tantangan dan melaksanakan tugasnya, dia harus mencintai siswanya, mencintai bangsanya, dan memiliki visi masa depan. Guru perlu bersemangat.

DAFTAR PUSTAKA

Alkaff, Abdullah. 2013. Perlunya kompetensi sikap pada rumusan kurikulum. Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kebudayaan dari Zaman

tersebut tidak tercantum dalam makalah tertulis yang didistribusikan pada saat itu tetapi dikemukakan secara lisan. Penulis hadir pada seminar tersebut dan sempat menyalin untaikan pemakalah..

- Pergerakan hingga Kini, Komunitas Salihara, Jakarta, 7 Mei 2013.
- Bjork, C. 2013. Teacher training, school norms and teacher effectiveness in Indonesia. In D.Suryadarma and G.W.Jones (eds), *Education in Indonesia*, 53-67. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2011a. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011*. Jakarta: BPS.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2011b. *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2011*. Jakarta: BPS.
- BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN (Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional), dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan). 2012. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia: Laporan Pendahuluan*. Jakarta: BPS, BKKBN, dan Kemenkes.
<http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.bkkbn.go.id%2Flitbang%2Fpusdu%2FHasil%20Penelitian%2FSDKI%25202012%2FLaporan%2520Pendahuluan%2520SDKI%25202012.pdf>.
- Chang, M.C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A.B., de Ree, J., and Stevenson, R. Akan terbit, 2014. *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington, DC: World Bank.
- Digdowniseiso, K. 2009. Education inequality, economic growth and income inequality: Evidence from Indonesia, 1996-2005. MPRA Paper 17792. Munich: Munich Personal RePEc Archive.
<http://mpira.ub.uni-muenchen.de/17792/>.
- Fernand, L.C., Kariger, P., Hidrobo, M. and Gertler, P.J. 2012. Socioeconomic gradients in child development in very young children: Evidence from India, Indonesia, Peru and Senegal. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 109 (Supplement 2), 17273-17280.
http://www.pnas.org/content/109/Supplement_2.toc.
- Fullan, M. 2010. *The Moral Imperative of School Leadership*. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Idris, N.S., Sastroasmoro, S., Hidayati, F., Sapriani, I., Suradi, R., Grobbee, D.E. and Uiterwaal, C.S. 2013. Exclusive breastfeeding plan of pregnant Southeast Asian women: What encourages them? *Breastfeeding Medicine* 8(3), 317-320.
http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/23057643/Exclusive_breastfeeding_plan_of_pregnant_southeast_asian_women_what_encourages_them?
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2012. *Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi: Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: KPK.
<http://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/955-laporan-tahunan-kpk-2012>.
- Nasution. 2013. Tantangan sekolah pada abad ke-21. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Politik Pendidikan Nasional dalam Tantangan, Universitas Negeri Yogyakarta, 5 Oktober 2013.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 2000. *Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA [Programme for International Student Assessment]* 2000. Paris: OECD & UNESCO (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organisation).
<http://www.oecd.org/pisa/>.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 2004. *Learning for Tomorrow's World: First Results from PISA 2003*. Paris: OECD.
<http://www.oecd.org/pisa/>.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 2007. *PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World*. Paris: OECD.
<http://www.oecd.org/pisa/>.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 2010. *PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do*. Paris: OECD.
<http://www.oecd.org/pisa/>.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 2013. *PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do*. Paris: OECD.
<http://www.oecd.org/pisa/>.
- RAND Corporation and CPPS (Centre for Population & Policy Studies). 2007. *Survei [sic] Aspek Kehidupan Rumah*

- Tangga Indonesia 2007: Buku IIIa*. Santa Monica, CA: RAND Corporation dan Yogyakarta: CPPS, Universitas Gadjah Mada.
<http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/ifls4.html>.
- Ryan, W. and Gilbert, I. 2008. *Leadership with a Moral Purpose: Turning Your School Inside Out*. Carmarthen: Crown House Publishing.
- Safika, I., Johnson, T.P., Cho, Y.I., and Praptoraharjo, I. 2013. Condom use among men who have sex with men and male-to-female transgenders in Jakarta, Indonesia. *American Journal of Men's Health*. [e-publication ahead of printing]
<http://www.bioportfolio.com/resources/pmarticle/752626/Condom-Use-Among-Men-Who-Have-Sex-With-Men-and-Male-to.html>.
- Sumardianta, J. 2013. *Guru Gokil Murid Unyu*. Sleman: Penerbit Bentang.
- Sumner, A. 2013. *The Evolving Composition of Poverty in Middle-Income Countries: The Case of Indonesia, 1991–2007*. (IDS Working Paper 2012, 409.) Brighton: Institute for Development Studies (IDS).
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2040-0209.2012.00409.x/pdf>.
- Wagner, A. and Simpson, D.J. 2008. *Ethical Decision Making in School Administration*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Wiryawan, P. 2013. Tantangan guru pada abad ke-21 (dari perspektif politik lokal). Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Politik Pendidikan Nasional dalam Tantangan, Universitas Negeri Yogyakarta, 5 Oktober 2013.

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL MEMACU KEMAMPUAN EKSPONENSIAL MEMBANTU PROBLEMATIK BESAR BANGSA

Prof. Dr. Noeng Muhadjir

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Inggris butuh 200 tahun, dan Amerika Serikat butuh 30 tahun untuk masuk era industri. Kalau berfikir linier, kapan Indonesia dengan penduduk terbesar keempat sesudah Amerika Serikat akan jadi negara besar industrial?

Perlu membuat loncatan ke *heavy industries* pesawat terbang dan kapal laut, termasuk komponen *primary structure* Boeing, Airbus, dan F-16 Perhitungan Habibie dengan CN 235, N 250, dan nantinya N 80 Indonesia dapat menghemat biaya 33,33% dibanding negara lain.

Politik Pendidikan Nasional perlu memacu kemampuan eksponensial pangkat 8 sampai 10 (Spesialis dan doktor yang relevan), untuk mengangkat yang hanya berkemampuan deret hitung (yang menganggur dan yang tamat SD) maupun berkemampuan deret ukur pangkat 1 atau 2 (yang tamat SLP, SLA sampai strata 1).

1. Peran Para Tedidik

Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbanyak sesudah Amerika Serikat. Bila Indonesia berfikir linier, membuat proyeksi masa depan maka paling tidak akan seperti Inggris, yaitu untuk masuk era industri dari era agraris, butuh waktu lebih dari 200 tahun (1730 - 1946). Banyaknya penduduk menjadi beban bangsa. Amerika Serikat dengan para imigran pertama adalah orang-orang terdidik dan membawa ideologi liberal, dapat lebih cepat dari era agraris masuk era industri massive selama 30 tahun (1900-1930). Thatcher bersedia mengembalikan Hongkong kepada Cina bila Cina berjanji tetap mempertahankan sistem kapitalisme Hongkong. Deng Xiao Ping dengan politik pragmatismenya menjawab : tidak peduli kucing putih atau kucing hitam asal mampu menangkap tikus. Sehingga akhirnya bukan hanya Hongkong, tetapi juga pantai Timur Cina mengembangkan sistem kapitalisme. Sebanyak 10 etnik Cina yang jadi dosen pilihan di Harvard University kembali ke Cina, juga banyak para ahli yang kembali ke Cina. Terjadi *brain gain*. Sehingga sepanjang pantai Timur mempunyai pendapatan \$3.500 per kapita, sedangkan pedalaman Cina yang tetap menggunakan sistem kolektif dogmatik, mempunyai pendapatan \$350 per kapita sejak banyak dekade. India yang sempat dipimpin partai Sudra dan Paria sempat mengalami *brain gain*, banyak para doktor India yang Sudra dan Paria yang menjadi dosen di

Amerika Serikat kembali ke India. Seentar India dengan penduduk di atas 1 milyar GDPnya naik. Setelah elit Partai Kongres berkuasa kembali, para doktor yang Sudra dan Paria kembali ke Amerika Serikat, terjadi *brain drain* lagi, dan GDPnya turun kembali.

1.1 Politik pendidikan : PDB atau PSDM

Tahun 1967 penulis sudah menerbitkan kumpulan naskah banyak prasaran penulis tentang Politik Pendidikan. Salah satu tesis pada waktu itu adalah bahwa Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu mendahului Investasi Produk Domestik Bruto. PDB tinggi dengan PSDM rendah, akan mengakibatkan kekayaan malahan dimanfaatkan negara lain. Misal Timur Tengah dengan PDB tinggi karena minyak, yang membangun dan mengelola Rumah Sakit adalah mereka-mereka para ahli dari Skandinavia; sampai untuk tenaga kerjapun, kekayaan mereka dimanfaatkan oleh tenaga kerja Korea Selatan, dan Indonesia.

1.1.1 PDB dan PSDM simultan

Pada prasaran ini, untuk Indonesia bukan lagi menunggu PSDM dulu baru PDB, tetapi keduanya harus sekaligus dikejar, malahan tenaga berkeahlian perlu dipacu peranannya memacu GDP guna menyelamatkan tenaga kerja yang berkemampuan rendah.

Penduduk jadi beban

Berfikir konvensional dalam politik pendidikan adalah menyelematkan *grass root*

sebagai prioritas pertama. Dipacu wajib belajar 6 tahun pada tahun 1973, dan sekarang partisipasi SD sudah menjadi 90%. Dipacu wajib belajar 9 tahun pada 1982, karena kemampuan ekonomi tidak mampu mendukung, wajib belajar 9 tahun gagal. Partisipasi 9 tahun masih di bawah 60%. Jumlah penduduk naik terus, dari 273 juta tahun 2012, diproyeksikan akan menjadi 340 juta pada 2030. Dengan kemampuan ekonomi seperti sekarang, diproyeksikan hanya akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja (*labor force*) 5% per tahun; sedangkan jumlah penganggur di perkotaan sebesar 42%, dan di pedesaan sebesar 64%. Jumlah penduduk nyata-nyata menjadi beban. Menaikkan partisipasi SMP pun tidak mampu.

Upper class

Upper class di Amerika Serikat hanya 1%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Amerika Serikat 50% nya berasal dan 0,1% dari *upper class* tersebut. Penulis dalam posisi berpendapat : biarlah *upper class* kapitalistik tersebut tetap ada, karena mampu membiayai anggaran negara. Promovendus penulis bertanya balik : "apakah Prof. setuju adanya 0,27% orang terkaya di Indonesia?"

Pajak besar

Dua orang terkaya di Indonesia seperti Michel Hartono dan Budi Hartono pemilik Djarum Kudus, pemilik BCA, dan pemilik assembling mobil, oke-oke saja sejauh tertib membayar pajaknya. Syukur diexpose berapa besar sumbangannya pada APBN di Indonesia.

Kaya malah memelaratkan

Tetapi seperti Abu Rizal Bakrie dan Samin Tan yang kekayaannya tidak menghasilkan *value added* bagi bangsa, tidak ada gunanya bagi bangsa. Karena mereka berdua malah memelaratkan bangsa, kelapa sawit bikin tanah tandus dan sawitnya langsung dikirim ke Malaysia, dan orang Malaysia yang mengolahnya dan menjadi kaya. Seharusnya dilarang, dan harus diolah di Indonesia. Itu termasuk *manufacturing natural resources*, seperti *saw-mill* untuk kayu.

2. Struktur sosial piramidal bergeser ke struktur sosial poligon

Dengan temuan penulis lewat disertasi (1982) tentang peran *opinion leader innovatif* (mereka yang berpengaruh secara informal

karena cepat tanggap terhadap pembaharuan) dan dengan membesarnya mereka-mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi, pada tahun 2003 penulis memprediksikan struktur sosial piramidal (yang digunakan *World Bank*) akan bergeser menjadi struktur sosial poligon (Noeng Muhadjir, 2003).

2.1 Distribusi pendapatan model piramidal

Dalam struktur sosial yang dikembangkan oleh *World Bank* adalah model piramidal Quintil 1 dan 2 atau 40% dengan distribusi pendapatan PDB kurang dari 8% sampai 12%; Q 3 dan 4 *middle class* 40% dengan PDB sekitar 28% sampai 32%, dan *upper class* 20% dengan PDB lebih dari 34% sampai lebih dari 50%

2.2 Prediksi menjadi model poligon

Dengan mencermati semakin besarnya proporsi yang berpendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta penulis temukan lewat disertasi (1982) tentang peranan *opinion leader innovatif*, penulis memprediksikan bahwa struktur sosial piramidal akan bergeser menjadi struktur sosial poligon, dimana klas menengah akan membesar, pendapatan klas menengah akan semakin besar, dan jumlah klas bawah akan semakin kecil, dengan komposisi : 16% *upper class*, 34% *middle class*, 34% *working class*, dan 16% *lower class*.

2.2.1 Validasi Academic Class Models

Ternyata prediksi penulis 1982 dan 2003 bahwa struktur sosial akan bergeser menjadi poligon tervalidasi dengan *Academic Class Models* oleh Beeghley (2004), dan Thompson & Hickly (2005) dengan distribusi pendapatan 1% *upper class* di atas \$500.000, 15% *upper middle class* dengan pendapatan di atas \$100.000, dan 34% *lower middle class* dengan pendapatan antara \$35.000 sampai \$75.000. Dengan bertambah besarnya subsidi perlu diberikan untuk *public care* menjadi sepertiga anggaran AS pada 2050, maka pajak dari *middle class* dapat ditarik pula untuk membantu 34% *working class* dengan pendapatan antara \$16.000 sampai \$30.000, dan *lower class* yang hidup di bawah garis kemiskinan.

3. Problematik besar kependudukan dan loncatan besar mengatasinya

Meningkatkan kemampuan *value added* atau lebih tepat disebut mengubah besarnya penduduk menjadi komponen produktif dari

sisi ekonomi itu penting. Dengan PDB \$2.100 menyelenggarakan SMP saja tidak mampu; dan mengembangkan industri massif saja terseok-seok.

3.1 Perlu loncatan besar

Atas bukti peran industri pesawat terbang CN 235, dan kontribusi *primary structure* untuk Boeing dan F-16 Indonesia perlu membuat loncatan bukan ke industri massif *manufacture*, tetapi ke *heavy industries* pesawat terbang dan kapal laut.

3.1.1 Kemampuan Habibie dan kadernya

Menurut hitungan Habibie atas bukti produk CN 235 dan kontribusi *primary structure* ekor pesawat dan pintu Boeing, dan komponen F-16, Habibie dengan kadernya dapat menghemat *vendor item* (komponen yang harus dibeli) dari 43,33% menjadi 33,33%, tenaga kerja dapat menghemat dari 33,33% menjadi 10%, dan *machine-hour* tetap 23,33%. Sehingga kemampuan Habibie dengan kadernya menjadi sangat kompetitif, karena mampu menghemat 33,33% biaya produksi.

Produksi CN 235

Saat kerjasannya dengan Spanyol untuk memproduksi CN 235, Indonesia mampu menyeter lebih banyak CN 235 daripada Spanyol karena mutu dan harganya lebih kompetitif.

Primary structure

Kemampuan Indonesia mampu bersaing dengan Mitsubishi *Heavy Industry* untuk membuat komponen *primary structure* tersebut di atas. Cina yang dihambat oleh Barat, hanya mampu membuat komponen *tersiary structure* seperti ban.

3.1.2 IPTN dibunuh IMF

Dengan alasan finansial (dengan tujuan jauh jangan menyaingi kapitalisme Barat), saat krisis moneter 1987, pemerintah Indonesia dilarang mensubsidi IPTN. Sehingga IPTN kolaps tanpa modal, dan mengalami mati suri.

3.2 Makna N 250

N 250 adalah pesawat jet *subsonic* seperti Fokker 100. Digunakan untuk penerbangan jarak pendek dengan ketinggian 1000 m. Boeing dan Airbus merupakan pesawat jet *supersonic* untuk penerbangan jarak jauh dengan ketinggian 3000 m.

3.2.1 N 250 taraf uji coba

N 250 masih dalam uji coba, dan belum mendapatkan sertifikat untuk terbang. Tetapi sudah membuat saham Fokker turun, dan akhirnya pabrik Fokker di negeri Belanda tutup.

3.2.2 Banyak tawaran

Meski baru uji coba, banyak negara sudah menawarkan bersedia membuka pabrik untuk N 250, termasuk di Amerika Serikat. Alabama malahan menawarkan menyediakan tanah dengan sewa beli hanya \$5 per m².

3.3 Model lain

Karena N 250 menjadi mati suri, muncul banyak negara yang mengembangkan lebih lanjut model tersebut.

(Catatan : maaf, terlalu banyak membahas Habibie dengan kemampuannya; sedangkan tujuan seminar ini adalah mengembangkan politik pendidikan nasional).

3.3.1 Beban nasional dan hambatan pendidikan perlu diatasi

Beban nasional dan hambatan pendidikan perlu diatasi dengan meningkatkan kemampuan nasional untuk meloncatkan PDB nasional kita menjadi sangat besar, dari \$2.100 per kapita menjadi \$20.000 per kapita lewat produksi pesawat terbang dan kapal laut. Dan bukti-bukti kemampuannya telah dibahas di atas. Dengan loncatan besar tersebut, dapat diharapkan bangsa ini tidak terlalu lama terpuruk. Penduduk terbesar keempat di dunia sesudah Amerika Serikat ini, harus dengan cepat menjadi negara besar industrial.

Kemampuan eksponensial tinggi menyelamatkan kemampuan rendah

Kemampuan akademisi kita dengan kemampuan eksponensial pangkat 8 sampai 10 hendaknya dapat menjadi penyelamat bangsa yang kemampuannya terbatas mengikuti deret hitung (yang menganggur, yang tamat SD) dan yang kemampuan sebatas mengikuti deret ukur pangkat 1 dan 2.

Modal dari mana?

Berdasar pengalaman IPTN dibunuh IMF, maka modal jangan mengandalkan pada subsidi pemerintah. Modal perlu dihimpun dari investor dalam dan luar negeri. Dikembangkan sedemikian agar dominasi modal terkendali pada yang punya *commitment* pada Indonesia.

Off-set

Hitung-hitung saat kita membeli 10 F-16 dengan harga 500 juta dolar, Indonesia dapat *off-set* 35%. Artinya kita hanya membayar 65%; sebanyak 140 juta dolar kita memasok *primary structure* sebagai kompoenen F-16.

Menjual saham

Kita menjual saham di pasar modal. Mencermati respons produk N 250 di masa lampau dapat diperkirakan saham akan laku tinggi di pasaran.

Mengundang investor

Ilham Habibie, Habibie sendiri, dan kader-kader Habibie yang sudah tersebar di Brasil, di Jerman, di Seattle, dan negara-negara lain diundang kembali untuk bekerja dan berinvestasi.

Komparasi

Untuk memproduksi CN 235 hanya butuh 19 orang kemampuan eksponensial pangkat 8 sampai pangkat 10. Harga satu CN 235 sama dengan harga beras produk sekian ratus ribu petani dengan kemampuan deret hitung, sama dengan 1000 sedan proton yang dikerjakan 3000 teknisi dengan kemampuan eksponensial pangkat 1, 2.

4. Posisi strategis Indonesia

Penulis mencermati bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat sesudah Amerika Serikat, memiliki wilayah seluas AS meski yang berupa daratan hanya 27%.

4.1 Posisi geopolitik

Dari segi geografis, bila orang bicara BRIC's (Brasil, Rusia, India, dan Cina, penulis tambahkan menjadi BRIIC's (Brasil, Rusia, Indonesia, India, dan Cina yang diprediksikan menjadi negara-negara besar baru yang menjadi negara industri. Dari segi geografis Indonesia mempunyai posisi geopolitik yang strategis. Semua negara yang butuh beraktivitas di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia perlu mempunyai kerjasama dengan Indonesia, karena harus melalui Zona Eksklusif 200 mil laut negara Indonesia, yang tertutup baik lintas laut dan udaranya. Strategi politik bagaimana harus ditempuh memposisikan Indonesia terhadap kekuatan Amerika Serikat-Singapura-Malaysia, terhadap kekuatan Cina, dan terhadap kekuatan Rusia.

4.2 Posisi strategi ekonomi

Secara ekonomi Indonesia akan menjadi obyek atau subyek lalu-lintas ekonomi. Tergantung lihainya ahli-ahli kita.

4.2.1 Strategi kehidupan sosial ekonomi

Perdagangan antara kawasan Pasifik menjadi penting. Bagaimana melindungi Indonesia yang memiliki penduduk besar lebih mementingkan *export-oriented* daripada *import-oriented*. Jangan mengimport produk yang *value added* nutrisinya rendah, misalnya. Penulis sempat mendapat kado hari raya berupa coklat yang kemasannya canggih, artinya harganya mahal, sedangkan nutrisinya cuma beberapa butir mete yang dibalut coklat.

4.2.2 Produk pesawat jet subsonic dan kapal laut tonage kecil

Dengan kemampuan eksponensial tinggi sekaligus kompetitif, Indonesia dapat menjual produk pesawat jet *subsonic* untuk jarak dekat pada banyak negara tetangga. Juga untuk pemakaian transportasi antar pulau, termasuk kapal laut dengan tonage kecil.

4.2.3 Transportasi udara Asia Pasifik

Diprediksikan bahwa transportasi udara di dunia, 40% akan berlangsung dari dan ke Asia Pasifik. Indonesia dapat terus mengembangkan N 250 dan perkembangan selanjutnya. Bukan mustahil menjual 500 N 250 setiap tahunnya.

5. Kesimpulan Politik Nasional Indonesia

Dari pembahasan di atas, ada tiga hal yang penulis tekankan.

5.1 Kemampuan eksponensial tinggi menyelamatkan kemampuan rendah

Sistem pendidikan nasional kita tidak dapat lagi dikembangkan linier : dari agraris, ke tinggal landas, ke industri *manufacturing*, ke *mass industry*, ke industri dewasa *basic industry* dan *heavy industry*, dan akhirnya ke post-industry. Kita harus membuat loncatan untuk menggunakan kemampuan eksponensial tinggi guna menyelamatkan bangsa agar jangan terlalu lama terpuruk. Dipilih loncatan lewat *heavy industry* pesawat terbang, yang terbukti sudah unggul.

5.2 Identifikasi dan pembinaan calon

Bukan lewat RSBI atau SBI, tetapi lewat program *enrichment* atau pengayaan individual sejak TK, SD, SMP, SMA/SMK. Pada semua

sekolah supaya meningkatkan fasilitas untuk studi individual lewat peluang pengayaan. Siapapun yang sudah selesai tugas klasikalnya diberi peluang untuk minta tugas tambahan pada gurunya. Masing-masing sekolah dapat mengembangkan fasilitas studi individual mulai tersedianya perpustakaan, laboratoria, komputer, dan lainnya. Bila pemerintah menyediakan anggaran, disediakan kompetitif, berdasar bukti-bukti aktivitas *enrichment* siswanya.

5.3 Peluang alternatif pengembangan di Perguruan Tinggi

Dari pembahasan di atas, dikembangkan peluang alternatif program.

5.3.1 Kemampuan eksponensial untuk pesawat serta kapal dan penunjangnya

Pertama, dikembangkan program pendidikan yang langsung untuk berkeahlian pada kemampuan eksponensial tinggi untuk pesawat dan kapal, juga penunjang-penunjangnya. Kemampuan eksponensial dilacak lewat program *enrichment* dari TK sampai SLA.

5.3.2 Kemampuan politik

Tidak dapat diabaikan perlunya ada yang lihai dalam strategi politik, yang membuat Indonesia tetap aktif tidak terdominasi blok tertentu.

5.3.3 Strategi ekonomi

Tidak pula dapat diabaikan perlunya yang lihai dalam strategi perdagangan yang mampu lebih mensejahterakan bangsa. Baik untuk konsumsi, maupun untuk membuat produk pesawat dan produk kapal tonase kecil laku keras di pasaran.

REFERENSI :

- Beehgly, 2004, *The Structure of Social Stratification in the United States*, Boston, MA : Pearson, Allyn & Bacon.
- Makka, Andi Makmur., Editor 2010, *Jejak Pemikiran B.J. Habibie. Peradaban Teknologi untuk Kemandirian Bangsa*. Bandung : PT Mizan Pustaka
- Noeng Muhadjir, 2013, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan*, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin.
- , Addenda 2013, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan*, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin
- , 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Integrasi penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin.
- , 2000, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*. Pengembangan Sumber Daya Manusia., Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin
- , 2000, *Identifikasi Faktor-Faktor Opinion Leader Innovative untuk Pembangunan Masyarakat* (disertasi). Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin
- , 1967, *Politik Pendidikan* (kumpulan prasaran). Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin
- Thompson, W., and Hickey, J., 2005, *Society in Focus*. Boston, MA : Pearson Allyn & Bacon.

TANTANGAN SEKOLAH PADA ABAD KE 21

Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro, M.Ed.
Universitas Negeri Yogyakarta

1. Pendahuluan

Memasuki abad 21 adalah seperti memasuki era baru di mana kehidupan mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga pendekatan, sikap, dan praktik tradisional dihadapkan tantangan dan dipertanyakan kesesuaian atau efektivitasnya. Pencapaian kemajuan teknologi informasi yang sangat tinggi, mendorong komunikasi antar belahan dunia semakin cepat terjadi, kejadian atau peristiwa yang terjadi di satu tempat jauh di belahan dunia segera dapat diketahui oleh manusia di belahan lain. Pikiran, ide-ide, dan problem yang dihadapi suatu masyarakat di dunia, cepat dapat ditangkap dan dipahami oleh masyarakat yang lain secara global. (Joan Stephenson, Lonrairie Ling, Eva Burman, Maxine Cooper, 1998, hal xv).

Tulisan saya "tantangan pendidikan dalam kehidupan modern: suatu perubahan paradigma pidato pelepasan guru besar UNY (april 2013), isinya menekankan perlunya perubahan paradigma pendidikan yang harus dilakukan dalam menghadapi kehidupan modern-global. Identik dengan tantangan sekolah pada abad 21 seperti dijelaskan di atas, memasuki abad 21 di mana kehidupan mengalami perubahan cepat, sehingga pendekatan, sikap, dan praktik tradisional dihadapkan tantangan dan dipertanyakan kesesuaiannya atau efektivitasnya. Karena adanya persamaan pemikiran maka tulisan ini walaupun menggunakan tema baru "Tantangan Sekolah pada Abad ke 21", menggunakan isi seperti yang ditulis dalam pidato pelepasan guru besar UNY, dengan perbaikan dan ditambah uraiannya sebagai suatu edisi revisi.

Dalam kehidupan modern dan global yang berubah sangat cepat seperti sekarang ini orangtua, pendidik, atau guru, pemerintah, masyarakat dihadapkan pada situasi yang sulit, suatu kondisi ketidakpastian akan ke mana anak-anak atau generasi muda harus dipersiapkan, karena kehidupan yang akan datang tidak dapat dipahami secara tepat. Aktivitas pendidikan yang masih dilakukan secara tradisional dengan sistem pendidikan

persekolahan yang menekankan pada penguasaan materi pelajaran secara statis pengetahuan yang sekedar untuk menjawab soal ujian, tentunya sudah tidak cocok untuk menghadapi kehidupan yang kompleks dan cepat berubah. Apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini adalah kemampuan menghadapi dan memecahkan permasalahan yang terus menerus berubah dan berkembang, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan fisik dan sosial yang terus berubah dan kemampuan menjaga kontinuiti (kesinambungan kehidupan) dengan membangun kehidupan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan. Ini mengisyaratkan perlu adanya perubahan paradigma pendidikan untuk menghadapi tantangan kehidupan modern global abad ke 21 ini, sebab tanpa perubahan paradigma pendidikan maka anak-anak dan generasi muda mereka akan menjadi penerima pasif dari perubahan yang terjadi di sekitarnya atau bahkan akan menjadi terjajah atau tertindas oleh perubahan kehidupan yang terjadi di sekitarnya.

Paradigma pendidikan yang perlu dibangun adalah pendidikan yang meletakkan tujuan pada pengembangan manusianya yang utuh sebagai individu dan sosial. Sebagai individu manusia dilahirkan dengan potensi-potensi bawaannya dan memiliki kodrat kebebasan atau memiliki kemauan dan keinginan untuk mengembangkan apa yang menjadi tendensi dalam dirinya tetapi manusia juga sebagai bagian dari kehidupan sosial karena mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam komunitas sosialnya. Sebagai sosial individu memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama dengan manusia lain, sehingga memperoleh pengakuan akan keberadaannya dan memperoleh penghargaan akan perannya dalam kehidupan bersama.

Pengembangan manusia yang utuh sebagai individu dan sosial sebagai tujuan pendidikan lebih mengutamakan terbentuknya kepribadian yang mandiri dan kreatif dengan memiliki tanggungjawab sosial. Tujuan pendidikan yang bersifat instrumental yang banyak berkembang di

lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini lebih menekankan pada pengembangan kemampuan kognitif (kecerdasan) manusia, sehingga produk pendidikan cenderung menghasilkan manusia cerdas, tetapi kurang memiliki kepribadian yang diharapkan sebagaimana agama mengajarkan “sebaik baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain”, atau memiliki kepribadian yang kreatif, mandiri, dan tanggungjawab sosial. Karakter manusia yang berfungsi sosial kurang dapat dikembangkan. Manusia yang cerdas tetapi memetingkan diri sendiri (*selfish*) cenderung menjadi produk pendidikan sekarang ini yang tidak membawa pada kemajuan bersama tetapi justru menimbulkan sikap dan perilaku patologi seperti korupsi, tidak disiplin, perkelahian, dll., yang membawa kerusakan kehidupan sosial. Sementara tantangan kehidupan global di satu sisi memberi kesempatan (peluang) untuk maju ke taraf internasional, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan problem kehidupan individu dan sosial-budayanya yang mengalami erosi dan kerusakan.

Tantangan kehidupan modern global tidak dapat dihadapi secara individual, tetapi sebaliknya membutuhkan kebersamaan sosial; kesatuan nasional baik secara intelektual, ideologis, maupun sosial budaya. Konsep pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kurang memadai lagi dalam kehidupan modern global sekarang ini, karena kecenderungan menghasilkan manusia yang cerdas tetapi dengan karakter mementingkan diri sendiri yang merugikan banyak orang. Oleh karenanya, konsep pendidikan bagi pengembangan SDM di mana manusia sebagai modal pembangunan bagi suatu bangsa membutuhkan penyempurnaan dengan konsep pendidikan bagi pengembangan modal sosial dan modal budaya. Perasaan, kebersamaan, nilai-nilai, semangat, sikap, dan tindakan yang menyatukan semua warga masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan problem sosial kehidupan bersama adalah merupakan modal sosial dan budaya yang harus dibangun oleh dunia pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah, keluarga, organisasi sosial, program TV, organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam pengembangan modal sosial dan budaya di samping modal intelektual bagi pembangunan bangsa.

Modal pembangunan bukan sekedar modal fisik seperti luas wilayah, kekayaan

sumber alam yang dimiliki atau modal uang yang tersedia tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan sumber daya intelektual dan kekuatan nilai-nilai atau semangat kohesi sosial dan budaya yang dapat dikelola oleh suatu komunitas atau bangsa. Apa yang penting dikembangkan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan modern global yang penuh persaingan yang menghancurkan dan memberi kesempatan untuk maju dan berkembang dalam kehidupan internasional adalah perlunya perubahan paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan yang selama ini dikembangkan di mana menekankan sekedar penguasaan materi pengetahuan secara statis dan lulus ujian sekolah atau nasional harus diubah ke arah pengembangan kepribadian yang mandiri dan kreatif yang memiliki tanggung jawab sosial.

Karena kehidupan mengalami perubahan sangat cepat dan kompleks yang sulit dipahami secara pasti maka tugas pendidikan bukan sekedar pemberian pengetahuan statis pada siswa, tetapi justru pengembangan manusia yang dapat beradaptasi terhadap perubahan, manusia yang berkepribadian kreatif yang dapat menemukan cara-cara baru dalam pemecahan masalah kehidupan adalah seharusnya menjadi tugas utama pendidikan. Konsep pendidikan untuk menyiapkan peserta didik memasuki kehidupan yang akan datang perlu dikritisi karena tidak ada gambaran yang pasti kehidupan yang akan datang itu, sehingga apa yang penting adalah memikirkan pengembangan kehidupan sekarang sebab kualitas kehidupan sekarang akan menentukan keadaan kehidupan yang akan datang. Oleh karenanya perhatian kita lebih harus diarahkan perbaikan keadaan pendidikan kita sekarang, dengan memahami situasi pendidikan kita sekarang dalam konteks individu dan sosial serta memecahkannya. Sebagaimana John Dewey yang menolak konsep pendidikan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang, dia menekankan konsep pendidikan sebagai pertumbuhan, di mana dalam pertumbuhan terdapat kontinuitas kemampuan yang dicapai sekarang untuk berkembang menjadi kemampuan yang akan datang. Apabila pendidikan dipikirkan sebagai kegiatan persiapan kehidupan yang akan datang, maka dapat terjadi pendidik, guru, orang tua, melupakan kebutuhan, dan minat belajar, serta

tingkat perkembangan mental anak yang sekarang sedang tumbuh, dan memaksakan keinginan mereka untuk anaknya bagi kehidupan yang akan datang, yang tidak diketahui anak.

2. Pengembangan Dimensi-dimensi Pendidikan Intelektual, Emosional, dan Sosial

Kegiatan pendidikan yang seharusnya menyentuh seluruh dimensi kehidupan anak: intelektual, fisik (keterampilan), emosional, moral (kepribadian), dan sosial sering direduksi sebagai kegiatan pengajaran dan persekolahan yang lebih terpusat pada penyampaian ilmu pengetahuan secara statis dan kemampuan teknikal. Fenomena yang terjadi adalah guru sebagai pendidik yang seharusnya memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan diri anak secara utuh, berubah lebih menekankan pada tugas sebagai pengajar yang menyampaikan suatu pengetahuan dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang diberikan. Kegiatan pendidikan dipersekolahan berubah menjadi sekedar pengajaran dengan penekanan penyampaian materi pelajaran, sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang utuh yang memiliki kepribadian mandiri kreatif dengan karakter yang baik, semangat atau motivasi yang kuat untuk mencapai kemajuan kurang dapat dikembangkan. Dapat dikatakan sekarang jarang ditemukan guru yang pendidik, sebaliknya lebih banyak ditemukan guru bidang ilmu seperti guru matematika, guru biologi, sejarah, ekonomi, dan lainnya yang kurang mengarahkan perhatiannya pada pengembangan diri anak. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dan global di mana setiap hari atau bahkan setiap jam kehidupan mengalami perubahan maka kita membutuhkan landasan paradigma pendidikan yang bersifat transformasional, bukan paradigma pendidikan yang bersifat transaksional yang transmisif sekedar memindahkan pengetahuan. Pendidikan transformatif adalah pendidikan yang membangun perubahan pada diri anak, seluruh dimensi kehidupan dirinya, perasaan, emosi, pikiran, nilai-nilai, dan kepribadian yang mendorong untuk perbaikan kehidupan. Kegiatan pendidikan dan belajar pada

dasarnya tidak terpisahkan dari dorongan untuk hidup dan perjuangan untuk hidup, serta menjaga kontinuitas keberlangsungan (survival) hidup.

Oleh karena dalam diri anak memiliki dorongan untuk hidup, maka secara alami dalam diri anak terdapat dorongan untuk belajar untuk mempertahankan kehidupannya. Ahli psikoanalisis Freud memandang kegiatan belajar manusia adalah sebagai dorongan (*drive*) dari dalam diri untuk dapat survival (hidup berkelanjutan), dapat mengatasi hambatan-hambatan kehidupan. Apabila kita meletakkan dorongan survival sebagai dasar kegiatan belajar maka kegiatan belajar untuk menemukan cara baru (inovasi) baik yang skala besar maupun kecil adalah penting dalam kegiatan pendidikan atau belajar agar kehidupan manusia (individu dan sosial) dapat menjaga kontinuitasnya. Kegiatan belajar manusia secara alami melibatkan banyak dimensi. Tiga dimensi belajar yang sangat penting menurut ahli pendidikan Denmark: Knud Illers (2004) adalah dimensi pikiran, perasaan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari seluruh dimensi belajar ini sulit dipisahkan satu dengan lain karena keterkaitannya sangat erat, tetapi hanya dalam pemikiran teoritis dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Secara umum orang berpendapat bahwa kegiatan belajar terjadi dalam kepala manusia (otak manusia), seolah-olah kegiatan belajar dilakukan secara individual dengan aktivitas membaca buku yang tidak boleh terganggu oleh kegiatan lain. Pendapat semacam ini mungkin tidak salah, tetapi apabila dipikir secara mendalam pendapat ini melupakan bahwa kegiatan belajar merupakan bagian dari kegiatan kehidupan sehingga kegiatan belajar terjadi dalam konteks aktivitas kehidupan di mana di samping dirinya sendiri juga terdapat orang lain. Anak-anak bermain dengan teman lain, berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang disenangi dan dihargai bersama, maka dengan berpartisipasi setiap anak memperhatikan apa yang dilakukan oleh yang lain. Anak yang baru masuk kelompok itu maka dia cukup mengikuti atau menirukan dari mereka yang sudah memiliki kemampuan lebih banyak atau sudah banyak pengalaman. Dalam konteks sosial kegiatan belajar selalu belajar sosial, belajar dari orang lain, dan belajar bersama orang lain. Mereka yang sudah memiliki kemampuan lebih tinggi akan membantu

mereka yang belum memiliki kemampuan dengan cara sekedar membantu-bantu suatu pekerjaan. Apabila mereka sudah sedikit ada kemampuan, maka dipersilakan mencoba mengerjakan sendiri dengan diberi bantuan atau pengawasan untuk memperbaiki suatu pekerjaan yang masih salah. Di sini berlaku konsep *scaffolding* (penyangga) dari Vygotsky (Rusia): untuk mencapai perkembangan kemampuan yang tertinggi apabila secara individual tidak mampu melakukansendiri, maka pendidik (orang lain yang lebih tinggi kemampuannya) membantu, membimbing, mengarahkan,dengan pelan-pelan dan bertahap sampai individu dapat melakukan sendiri secara mandiri. Pada waktu anak sudah dapat melakukan sendiri aktivitas (pekerjaan), maka bantuan dilepas.

Praktik pengajaran di sekolah sekarang ini masih menekankan belajar secara individual bahkan menanamkan sikap kompetisi satu dengan lain, sehingga sekolah lebih memupuk sikap sombong bagi anak-anak cerdas dan seolah-olah kurang respek (menghargai) pada teman-teman yang lain. Kondisi semacam ini kurang menguntungkan bagi pengembangan modal-sosial (budaya) suatu masyarakat yang dibutuhkan bagi pembangunan suatu bangsa. Pendidikan di sekolah, keluarga, masjid, tempat kerja, organisasi sosial seharusnya memperhatikan dan mengembangkan modal sosial dan emosional di samping modal intelektual bagi instrumen pencapaian kemajuan masyarakat dan bangsa.

Dimensi belajar sosial seperti belajar memecahkan problem kehidupan secara kelompok masih perlu dikembangkan dalam praktik pendidikan di sekolah. Pendidikan untuk melakukan tugas untuk kepentingan bersama, seperti menjaga kebersihan, keindahan, kerukunan, kebaikan, kepedulian, atau belajar dalam kelompok-kelompok tugas memecahkan masalah sebagai modal sosial perlu memperoleh perhatian dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. John Dewey (filosof pendidikan Amerika), menggambarkan sekolah sebagai bentuk kecil suatu masyarakat (komunitas) yang lebih besar. Sebagai komunitas (*community*) maka setiap individu menjadi bagian yang mendukung sesuatu yang bernilai bagi kehidupan bersama, sesuatu yang bermakna bagi kehidupan yang ideal. Kata *common* (sesuatu yang menjadi bernilai bagi hidup bersama) adalah tidak terpisahkan dari kata *community* dan menjadi

pengikat di antara individu untuk mengarahkan kehidupannya bagi pencapaian kehidupan ideal bersama. Komunikasi (*communication*) adalah alat untuk berhubungan satu dengan lain untuk merefleksikan sesuatu yang ideal (*common*) bagi hidup bersama, alat untuk mengambil keputusan untuk suatu tindakan, dan melakukan tindakan untuk mencapai cita-cita kehidupan ideal yang telah disepakati bersama. Dalam komunikasi terdapat kesamaan, kesetaraan, mempercayai, empati, saling menghargai dalam merefleksikan sesuatu apa yang ideal. Dengan demikian kata *community*, *common*, dan *communication* memiliki keterkaitan satu dengan lain, yang tidak dapat dipisahkan untuk membangun terwujudnya masyarakat ideal.

Apa arti penting konsep sekolah sebagai *community* kecil adalah sekolah bukan sebagai tempat berkumpulnya individu yang bersaing satu dengan lain yang menghasilkan manusia yang mementingkan diri sendiri (*selfish*) yang menghancurkan orang lain tetapi sekolah adalah sebagai masyarakat kecil yang ideal, di mana sikap, kepribadian sosial (persaudaraan, persamaan, percaya, toleransi, saling membantu) dapat dikembangkan dengan baik.Sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan kekuatan intelektual, emosional, dan social anak-anak yang dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat atau bangsa yang ideal.

Seperti di atas telah disampaikan bahwa kegiatan belajar lebih sering diartikan sebagai aktivitas yang terkait dengan kecerdasan otak (intelektual), yang terjadi dalam diri individu terlepas dari kehidupan sosialnya. Teori belajar kognitif (Piaget) menekankan bahwa pengetahuan yang bersumber dari realita di luar diri manusia melalui pancaindera (pengamatan, pendengaran, dll.) dibawa ke dalam pikiran manusia maka terjadi proses konstruksi pengetahuan (assimilasi dan akomodasi) dengan menghubungkan skema (pengetahuan yang lama) dengan objek baru maka terbentuk pengetahuan baru (skema baru). Pengetahuan yang bersumber dari luar diri manusia dengan proses asimilasi dan akomodasi dalam pikiran manusia akan dibangun pengetahuan baru. Teori kognitif dalam belajar seolah-olah kurang memperhatikan dimensi emosional-perasaan manusia dalam pengembangan pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang diperoleh bersifat intelektual kurang menyentuh pengembangan

diri (*self*). Tetapi manusia selalu berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang bermakna (*meaningful*) bagi hidupnya, dan untuk memperoleh pengetahuan yang bermakna, maka dibutuhkan keterlibatan emosi dan perasaan, sebab hanya keterlibatan emosi dan perasaan maka pengetahuan dapat menyerap dalam diri individu dapat merubah dirinya (*selfnya*) atau mengembangkan kepribadiannya.

Para ahli pendidikan humanistik (Carl Rogers, dll.) menekankan pentingnya arti pendidikan atau belajar yang bermakna untuk mengembangkan konsep diri atau mengembangkan kepribadian, sehingga kegiatan pendidikan atau belajar tidak sekedar aktivitas pikiran, tetapi melibatkan pikiran dan perasaan sehingga memperoleh pengetahuan yang bermakna bagi dirinya. Pendidikan tradisional yang lebih berorientasi pada pengetahuan untuk menjawab soal ujian, atau sekedar penguasaan pengetahuan teknis untuk melakukan pekerjaan rutinitas, kurang mengembangkan dimensi emosional perasaan yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran baru, apakah pengetahuan yang mereka peroleh itu bermakna bagi kehidupannya atau mungkin menghancurkan bagi dirinya. Program pendidikan atau belajar dengan metode refleksi (*reflection*) yang bersifat mempelajari, menganalisis, dan menyampaikan kembali pengalaman yang telah dialami oleh para anak-anak adalah penting digunakan untuk dapat mengembangkan diri (kepribadian) yang kuat dan mandiri, mengembangkan kekuatan intelektual dan emosionalnya, serta mengembangkan kekuatan social-budayanya. Metode refleksi yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat membangun kemampuan berfikir kritis, mengembangkan kepribadian mandiri kreatif dengan tanggung jawab sosial.

3. Pengembangan Kualitas Mengajar dan Belajar di Sekolah

Dalam pendidikan kita secara umum aktivitas mengajar dan belajar masih didominasi oleh proses kognitif yaitu penyampaian pengetahuan dari guru pada siswa, sehingga siswa cenderung sebagai penerima yang pasif. Pengembangan kepribadian yang kreatif mandiri dan memiliki tanggung jawab sosial yang dibutuhkan oleh kehidupan modern global seperti sekarang ini kurang dapat dihasilkan dari model

pengajaran atau belajar sebagai penerima pasif. Oleh karenanya, dibutuhkan perubahan paradigma pengajaran dan belajar yang dapat menyentuh dimensi pikiran, perasaan, dan sosial sebagaimana di atas telah disampaikan. (baca: Knud Illeris, *The three dimensions of learning*, 2004).

Pendidikan di sekolah sebagai pemindahan pengetahuan yang menghancurkan pembentukan kepribadian kreatif anak, harus diubah dengan pendidikan yang bersifat pemecahan masalah kehidupan, di mana anak-anak dan ilmu pengetahuan dibawa dalam kehidupan untuk memecahkan masalah dan menemukan secara kreatif baik skala kecil atau besar yaitu cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang dapat membawa perbaikan kehidupan. Metode mengajar di mana guru yang lebih banyak berdiri di depan kelas dalam menyampaikan pengetahuan diubah menjadi terlibat bersama murid dalam berdiskusi memecahkan masalah, sesuai dengan tema-tema pembelajarannya di mana guru dan siswa terlibat secara aktif dalam diskusi pemecahan masalah yang seolah-olah sebagai mitra yang setara tanpa ada yang dianggap lebih tinggi atau rendah. Komunikasi yang membangun penghargaan, kesetaraan, dan kepercayaan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran, karena komunikasi semacam itu memberi makna bagi pengembangan diri (kepribadian) anak di mana guru bukan sekedar penyampaian pengetahuan yang dipaksakan. Anak merasa memperoleh penghargaan akan harga diri (*self esteem*) dan dengan demikian mereka membangun kepribadian yang percaya diri dan bersemangat untuk maju.

Belajar kelompok untuk memecahkan masalah atau melakukan tugas bersama juga bermakna bagi anak karena mencerminkan kehidupan bersama dalam kehidupan sosial masyarakat di mana setiap orang merupakan bagian dari sosialnya dan memiliki kontribusi yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah kehidupan. Dalam melakukan tugas bersama ada anak yang berperan memunculkan masalah dan merumuskan masalah, tetapi juga ada anak yang berperan menemukan ide-ide hipotetis pemecahan masalah, dan ada juga anak yang berusaha menemukan model eksperimen untuk percobaan pemecahan masalah dan ada juga anak yang menemukan atau menteorikan teori barunya. Dengan belajar dalam kelompok maka terjadi penguatan kekuatan sosial untuk

berpartisipasi dalam pemecahan masalah dengan peran yang berbeda, tetapi untuk tujuan bersama. Kegiatan pendidikan bukan sekedar menerima secara pasif pengetahuan, informasi, keterampilan, nilai yang disampaikan oleh guru, tetapi anak (peserta didik) terlibat aktif dan interaktif satu dengan yang lain dalam memahami realita kehidupan atau permasalahan kehidupan dan menemukan pemecahannya.

Pembelajaran yang humanis adalah bukan sekedar memindahkan pengetahuan dari guru pada siswa, karena pembelajaran semacam ini menghancurkan harkat kemanusiaan, dimana pada dasarnya manusia adalah aktif dan memiliki keinginan (kemauan) untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama orang lain (sosial). Pembelajaran yang humanis juga bukan kegiatan pembelajaran yang sekedar mengembangkan fungsi dan kemampuan pikiran, seperti mengajarkan pengetahuan teknis yang sekedar akan digunakan untuk mencari pekerjaan, tetapi pembelajaran yang melibatkan pikiran dan perasaan (emosi) sekaligus sehingga pengetahuan yang diterima dapat meresap dalam dirinya (*selfnya*) dan bermakna bagi pengembangan kesadaran dirinya. Kesadaran diri akan makna pengetahuan yang diperoleh oleh setiap orang adalah penting bagi pengembangan sikap dan perilaku kritis terhadap sesuatu pengetahuan, keterampilan yang diterima apakah dapat bermakna bagi hidupnya atau membelenggu hidupnya. Pengetahuan dan keterampilan teknis yang diterima anak dapat menyebabkan sikap ketergantungan pada pengetahuan teknis yang telah dikuasai, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide-ide lain apabila dihadapkan pada tantangan kehidupan baru yang yang kompleks lebih luas. Seolah-olah manusia telah terperangkap dalam lorong yang sempit dari pengetahuan dan keterampilan teknis yang dikuasai dan seolah-olah sulit untuk beradaptasi terhadap kehidupan yang lebih kompleks dan mengalami perubahan sangat cepat.

Model pembelajaran yang membawa pengetahuan dalam konteks kehidupan adalah merupakan model pembelajaran yang lebih bermakna bagi kehidupan anak sekarang dan yang akan datang, di mana anak (siswa) dihadapkan pada permasalahan kehidupan sekarang dan memecahkan permasalahan kehidupan sekarang, dan dengan keberhasilan

menghadapi kehidupan sekarang akan menjadi dasar pijakan untuk keberhasilan menghadapi kehidupan yang akan datang. Sementara pembelajaran yang menyampaikan pengetahuan yang terpisah dari kehidupan, sekedar menguasai pengetahuan informatif menghasilkan manusia yang verbalistik (sekedar dapat berbicara), tetapi tidak menghasilkan kesadaran dan tindakan untuk merubah kehidupan yang kurang baik. Model pengajaran sekarang di sekolah banyak yang bersifat penguasaan pengetahuan yang verbalistik, yang kurang mengembangkan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah kehidupan.

Pengembangan model pembelajaran yang aktif dan interaktif membutuhkan pengembangan fasilitas dan peralatan yang lebih memadai bagi pemenuhan kebutuhan dan minat belajar siswa yang beragam dan berbeda-beda. Sesuai dengan teori belajar bahwa kegiatan belajar yang didasari oleh kebutuhan dan minat akan menimbulkan keterlibatan pikiran dan perasaan anak dalam kegiatan belajar. Oleh karenanya, pengembangan model pembelajaran dalam kehidupan modern dan global harus melibatkan pengembangan fasilitas dan media belajar seperti laboratorium untuk pengajaran fisika, biologi, kimia, bahasa, dll., ruang belajar musik, seni melukis, ruang olah raga renang, sepak bola, tenis, judo, pencak silat, dll. Dengan tersedianya bermacam-macam fasilitas belajar dan sumber belajar yang beraneka ragam memungkinkan sekolah (lembaga pendidikan) dapat menjadi *environment* (lingkungan) yang kaya bagi kegiatan belajar. Sebagaimana konsep pendidikan sebagai penyediaan lingkungan untuk anak dapat tumbuh berkembang (*growth*) dari John Dewey bahwa dengan alat-alat yang aktif yang dimiliki oleh lingkungan akan mengundang respon dari para siswa yang melibatkan minat dan kebutuhan belajar mereka. Misalnya tersedianya fasilitas belajar laboratorium kimia yang aktif diselenggarakan oleh sekolah maka akan mengundang minat anak untuk belajar kimia. Lingkungan sekolah yang aktif menyelenggarakan (memfasilitasi) bermacam-macam kegiatan belajar yang bermakna bagi siswa yang memiliki kebutuhan dan minat belajar yang beragam akan menjadikan lembaga pendidikan sekolah sebagai lingkungan yang hidup menumbuhkan dorongan belajar para siswa.

Dalam memfasilitasi siswa (anak) belajar secara aktif maka meletakkan anak sebagai subjek (aktor) belajar yang aktif mencari dan menemukan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kebutuhan dan minat dirinya. Model pengelolaan pengajaran yang statis di mana siswa dari pagi sampai sore (siang) hari belajar di satu tempat (ruang kelas) kurang sesuai dengan kebutuhan anak yang dinamis. Model pengelolaan pengajaran yang dinamis seperti model pengajaran moving kelas, lebih sesuai dengan karakteristik anak yang aktif, di mana siswa bergerak pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk mengikuti pengajaran yang mereka minati dan dibutuhkan.

Selama ini oleh karena proses pengajaran didominasi oleh model pemindahan pengetahuan dari guru pada siswa maka seolah-olah siswa (anak) sudah menjadi kenyang (penuh) terisi oleh pengetahuan dari luar dirinya. Oleh karena belajar yang mekanis tidak melibatkan proses penghayatan dalam diri anak, karena tidak melibatkan emosi anak, maka peserta didik tidak memiliki kebutuhan untuk merefleksikan apa yang dirasakan atau menyampaikan kebermaknaan dari pengetahuan yang dipelajari. Belajar yang sebenarnya adalah kebermaknaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh bagi pemecahan masalah kehidupan maka metode refleksi sebagaimana di atas telah disinggung sangat dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Makna belajar yang sebenarnya adalah kebermaknaan bagi diri (*self*), bagi pengembangan kecerdasannya tetapi juga bagi pengembangan kepribadian pembentukan karakternya maka merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah dialami dibutuhkan agar individu anak dapat *sharing* atau berbagi pengalaman dengan orang lain.

Dengan dikembangkan metode refleksi maka memungkinkan subjek (anak) didik belajar dari pengalaman, di mana pengalaman sebagai sumber belajar dapat digunakan untuk memunculkan minat pribadi, karena merefleksikan pengalaman adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Dalam kehidupan modern dan global seperti sekarang ini setiap orang setiap hari bahkan setiap jam memperoleh pengalaman, pengalaman dari apa yang sengaja dilakukan atau pengalaman dari kejadian yang tidak sengaja (yang terjadi menimpa dirinya). Belajar secara alami dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi secara tidak sengaja dan bersifat belajar insidental atau informal

(informal dan insidental *learning*). Merefleksikan pengalaman yang dialami adalah merupakan cara atau alat untuk memperoleh makna pelajaran pengalaman yang dapat digunakan untuk menghadapi pengalaman baru yang mungkin terjadi dalam kehidupan selanjutnya.

4. Harmonisasi Kegiatan Pendidikan di Sekolah dan Pengembangan Budaya Belajar Sepanjang Hayat

Dalam kehidupan modern, global seperti sekarang ini pendidikan untuk peningkatan harkat kemanusiaan (humanisasi) semakin dirasakan pentingnya karena semakin tumbuhnya kesadaran manusia akan hak-hak mereka untuk memperoleh penghargaan dan perlindungan harkat martabat kemanusiaannya. Dapat dikatakan semua institusi dalam masyarakat, keluarga, sekolah, organisasi sosial, tempat kerja, institusi agama semakin dituntut untuk meningkatkan penghargaan dan perlindungan hak azazi manusia. Sekolah sebagai tempat berkumpul bermacam-macam individu dari berbeda-beda kelas sosial, etnis, agama, bahasa, budaya dituntut untuk menjadi terbuka terhadap perbedaan dan memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak mereka.

Konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) yang diaplikasikan di sekolah menuntut lembaga sekolah memberi kesempatan anak-anak untuk belajar atau menerima pendidikan tanpa dibeda-bedakan kelas sosial, etnis, agama, bahasa, budaya mereka. Adalah menjadi tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan memelihara harmonisasi dengan menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan dan belajar yang memadai dan mendorong semua yang berbeda untuk dapat menikmati kesempatan pendidikan yang diberikan sekolah. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk memperbaiki sarana dan fasilitas sekolah seperti gedung-gedung sekolah yang bersih dan indah, ruang kelas yang menarik untuk kegiatan belajar, transportasi yang murah bagi siswa untuk pergi dan pulang dari sekolah, pemenuhan kebutuhan makan dan minum di siang hari di sekolah, pemeriksaan kesehatan, dll., sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan yang menyenangkan belajar di sekolah.

Lebih jauh apabila ditafsirkan secara filosofis konsep pendidikan untuk semua juga harus diartikan "semua untuk pendidikan" (*all*

for education), maknanya adalah semua kehidupan di sekolah maupun di masyarakat adalah untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan untuk semua orang. Dengan demikian tidak hanya kegiatan dan fasilitas di sekolah yang digunakan bagi aktivitas pendidikan tetapi semua aktivitas kehidupan seperti di pertokoan, pasar, kereta api, bus, rumah makan, di jalan-jalan, sungai, hutan, kantor pos, bank, dll., harus memiliki peran kontribusi bagi pengembangan kegiatan pendidikan. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pejabat publik untuk merancang pembangunan semua sektor kehidupan agar semuanya memiliki kontribusi bagi pengembangan kegiatan pendidikan.

Kondisi sekolah kita sampai sekarang belum dapat menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai bagi semua anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam kenyatannya sekolah belum dapat melakukan peran harmonisasi di antara perbedaan-perbedaan kondisi yang dibawa anak dari rumah ke sekolah. John Dewey menyatakan tiga fungsi sekolah dalam kehidupan modern adalah:

- a. Peradaban yang kompleks (dari masyarakat modern) adalah terlalu kompleks untuk dipindahkan pada anak-anak secara keseluruhan bersama. Sekolah berperan menyampaikan peradaban yang kompleks dari masyarakat modern itu secara bagian-bagian, gradual, dan cara bertingkat. Pendidikan menyampaikan sesuatu yang sederhana yang dapat ditangkap oleh anak-anak, kemudian dibangun sesuatu pemahaman peradaban yang lebih tinggi dan kompleks pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Sekolah membangun lingkungan yang bersih dan menyeleksi pengaruh dari luar untuk menghindari pengaruh jelek masuk sekolah, sehingga sekolah menjadi lingkungan yang baik untuk pendidikan. Sekolah menyeleksi pencapaian peradaban masyarakat dan menciptakan lingkungan bagi anak-anak agar dapat membangun kehidupan yang baik di masa datang.
- c. Sekolah menciptakan lingkungan yang harmoni dan dapat menyeimbangkan bermacam-macam elemen kehidupan sosial anak-anak, dan menciptakan kesempatan anak-anak dari kelompok sosial dapat bergaul lebih luas sehingga

dapat membebaskan belenggu kelompok sosial yang sempit. Kehidupan sekolah berfungsi memperluas kehidupan sosial anak dan membebaskan dari kelompok sosial yang sempit.

Berdasarkan konsep ini sekolah mempunyai peran untuk menciptakan lingkungan yang membangun harmoni di antara bermacam-macam kelompok sosial, dan memberi kesempatan pada semua elemen sosial untuk dapat membangun kehidupan lebih luas lewat sekolah, dan mungkin menghindarkan belenggu kehidupan keluarga yang sempit. Peran sekolah seperti di atas yang harus dikembangkan dalam kehidupan modern global sekarang ini, dan menghindarkan kehidupan sekolah yang menyenangkan bagi kelompok sosial tertentu.

Terakhir yang penting digarisbawahi adalah aktivitas pendidikan sepanjang hayat. Dalam kehidupan modern yang kompleks cepat mengalami perubahan ini menuntut setiap orang untuk dapat terus menerus menghargai pentingnya kegiatan belajar dan melakukan kegiatan belajar terus menerus sampai meninggal. Pendidikan sekolah tentu saja harus memikul tanggungjawab untuk membangun sikap menghargai dan menyenangi kegiatan belajar serta dorongan melakukan kegiatan belajar. Belajar tidak berhenti sesudah selesai suatu jenjang sekolah, karena pengetahuan yang diterima di sekolah akan menjadi usang setelah seseorang tamat sekolah karena perubahan yang sangat cepat kehidupan di masyarakat. Pendidikan dan belajar tidak terbatas pada belajar formal, tetapi dapat diperoleh secara informal atau insidental melalui berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan. Dalam kehidupan modern yang cepat mengalami perubahan semacam ini maka sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya membangun harmonisasi bermacam-macam kegiatan belajar yaitu belajar formal melalui pembelajaran guru dalam ruang-ruang kelas dan belajar informal melalui partisipasi bermacam-macam kegiatan yang tersedia untuk menjangkau belajar yang lebih alami dan kreatif. Lembaga pendidikan sekolah harus mengembangkan harmonisasi kegiatan belajar formal yang dirancang guru di dalam kelas, dan bermacam-macam kegiatan belajar informal sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, di mana sekolah menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan.

Di sini arti pentingnya pengembangan budaya sekolah dan budaya belajar di sekolah, sehingga anak-anak dapat memperoleh kesempatan belajar informal (insidental) dari kehidupan sekolah sebagai masyarakat kecil ideal, di samping belajar formal. Harmonisasi kegiatan pendidikan di sekolah untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda dan pengembangan budaya belajar adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan modern global sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Douglas. (1977). *From Communication to Curriculum*. Auckland New Zealand. Penguin Books, Ltd.
- Dewey, John. (2001). *Democracy and Education*. A Penn State Electronic Classics Series Publication. The Pennsylvania State University.
- Guttek, Gerald Lee. (2004). *Philosophical Alternatives in Education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Heafford, Michael. (1967). *Pestalozzi, His Thought and Its Relevance Today*. London: Methuen & Co, Ltd.
- Illeris, Knud. (2004). *The Three Dimensions of Learning*. Florida: Krieger Publishing Company.
- Knowles, Malcolm S., Holton III Elwood F., Swansen, Richard A. (2005). *The Adult Learner*, sixth edition. California, USA, Elsevier.
- Knight, George R. (1982). *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan: Andrew University Press.
- Kuntoro, Sodik A. (2011). *Pendidikan dalam Kehidupan dan Untuk Perbaikan Kehidupan*. Seminar Nasional S3 Ilmu Pendidikan, PPS UNY (tidak diterbitkan).
- Merriam, Sharon B. (2001). *The New Update on Adult Learning Theory*. San Francisco: Jossey - Bass.
- Stephenson Joan, Ling Lorraine, Burman Eva, Cooper Maxine. (1998). *Values in Education*. London: Routledge.

TANTANGAN GURU PADA ABAD KE - 21 (DARI PERSPEKTIF POLITIK LOKAL)

Putut Wiryawan

Wakila Ketua Komisi D DPRD DIY Periode 2009-2014

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY

1. Pendahuluan

INDONESIA sudah 68 tahun merdeka, tetapi persoalan yang menyelimuti dunia pendidikan dapat dikatakan tidak pernah selesai. Upaya menyelesaikan persoalan dalam dunia pendidikan, yang dirumuskan sebagai strategi kebijakan melalui kurikulum pendidikan, secara periodik berubah. Selama masa pemerintahan Orde Baru saja, dengan rezim penguasa negara tetap, strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terus berubah. Bahkan kemudian muncul istilah “ganti menteri ganti kebijakan” atau “ganti menteri ganti aturan”. Pada tingkat implementasi, keadaan tersebut menyebabkan guru dan peserta didik hampir pasti menjadi korban. Daerah-daerah yang relatif dekat dengan pusat kekuasaan pun, memerlukan waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan proses belajar-mengajar agar sesuai dengan kebijakan yang ada. Dapat dibayangkan daerah-daerah dengan jaringan infrastruktur belum memadai, daerah pedalaman, pulau-pulau terpencil, daerah transmigrasi, sering terjadi sebuah kebijakan di bidang pendidikan belum dilaksanakan, sudah ada kebijakan baru yang diterapkan.

Zaman yang berubah dari waktu ke waktu telah memberikan tantangan yang semakin beragam bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, sudah menjadi komitmen dasar bagi para pendiri bangsa sejak negara ini diproklamasikan. Tujuan berdirinya negara Indonesia, sebagaimana tegas dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Bahkan, dalam perubahan keempat UUD 1945, perhatian terhadap dunia pendidikan semakin nyata sebagaimana disebut pada pasal 31, ayat (4), *negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran*

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.¹

Sadar bahwa posisi guru cukup strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah kemudian mulai memperhatikan kesejahteraan guru dengan membuat regulasi tentang sertifikasi guru (termasuk dosen). Langkah ini didahului dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di ketentuan teknisnya juga mengatur tentang honorarium guru dan tenaga yang lain.

Zaman yang sudah menapaki abad 21, telah menyebabkan bergesernya paradigma belajar akibat pesatnya perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan. Pergeseran itu menyangkut ciri maupun model pembelajaran.² Ada empat ciri abad 21, yakni *informasi* yang tersedia di mana saja dan kapan saja, *komputasi* yaitu penggunaan mesin yang menyebabkan semuanya lebih cepat, *otomasi* yang mampu menjangkau semua pekerjaan rutin serta *komunikasi* yang semakin cepat dapat dilakukan dari mana saja dan ke mana saja.

Ciri Informasi memaksa model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi dan bukan diberi tahu. Ciri komputasi mengharuskan pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya) dan bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab). Ciri otomasi membuat pembelajaran harus diarahkan untuk melatih berfikir analitis (pengambilan keputusan) dan bukan berfikir mekanistik (rutin). Dan ciri komunikasi menuntut pembelajaran menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setjen MPR-RI, cetakan kesepuluh, 2011.

² Laman Kemendikbud RI
<http://www.kemdikbud.go.id/uji-publik-kurikulum-2013-2.html>, 2 Oktober 2013.

Di tengah arus perubahan yang relatif cepat itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini populer sebagai daerah dengan kualitas pendidikan baik, mencanangkan target bahwa pada tahun 2025 menjadi daerah pendidikan terkemuka se Asia Tenggara. Upaya menuju ke sana, tentu memerlukan prasyarat. Salah satunya adalah dengan Renaissance Yogyakarta, yang antara lain menyangkut sektor pendidikan. Kebangkitan kembali pendidikan itu dengan upaya merevitalisasi model-model pendidikan yang pernah dikembangkan di Yogyakarta sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Model dimaksud adalah model pendidikan barat (yang dikenalkan oleh penjajah Belanda), model yang dikembangkan Tamansiswa, model pendidikan pesantren, model pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah dan model pendidikan di lingkungan Keraton Yogyakarta.³

2. Kepercayaan dan Keteladanan

Guru, dalam terminologi Jawa sering dimaknai sebagai *digugu* (dipercaya) dan *ditiru* (diikuti, ditirukan). Guru akan dipercaya oleh murid-muridnya, manakala dia memiliki kompetensi yang setidaknya cukup meyakinkan (tentu lebih baik sangat meyakinkan) bagi para murid. Ada empat kompetensi yang dipersyaratkan oleh pemerintah bagi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.⁴

Data yang dilansir oleh laman Kemendikbud menyebutkan, hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2012 menunjukkan masih rendahnya nilai kompetensi guru. Kompetensi Pedagogik Guru SD dalam kategori guru kelas secara rerata nasional hanya 40 (dari skala 100) atau setara dengan 4 dari skala 10. Rerata nilai kompetensi pedagogik guru kelas SD enam provinsi di Pulau Jawa juga menunjukkan masih di bawah 50. Jawa Timur 44,22; Jawa Barat 42,99; Jawa Tengah 45,54; DKI Jakarta 44,40; Banten 41,73

DIY 48,60.⁵ Data yang lebih memprihatinkan ditunjukkan oleh hasil UKG untuk kompetensi pedagogik mata pelajaran IPS tingkat SMP. Nilai rerata nasional hanya mencapai 36,08 dan nilai rerata di Provinsi Jawa Timur 37,68, Jawa Barat 38,55, Jawa Tengah 38,88, DKI Jakarta 37,76, Banten 37,21 dan DIY 38,39. Nilai kompetensi pedagogik mata pelajaran PKN tingkat SMA rerata nasional hanya 46. Nilai rerata untuk Provinsi Jawa Timur 49,20, Jawa Barat 49,69, Jawa Tengah 51,27, DKI Jakarta 50,63, Banten 53,89 dan DIY 53,89. Sedang untuk mata pelajaran Geografi rerata nasional 48, Provinsi Jawa Timur 51,54, Jawa Barat 50,82, Jawa Tengah 52,72, DKI Jakarta 51,58, Banten 52,10 dan DIY 53,96.⁶

Paparan data tersebut jelas menunjukkan bahwa kemampuan pedagogik guru kelas SD, guru IPS SMP, guru PKN SMA dan guru Geografi SMA masih kurang dan kalau disetarakan dengan nilai kelulusan siswa yang minimal harus mencapai angka 50,50 untuk bisa disebut lulus, guru-guru tersebut secara rata-rata tidak lulus. Tren nilai yang sama juga ditunjukkan untuk kompetensi profesional maupun kompetensi gabungan (nilai semua kompetensi). Padahal kemampuan (kompetensi) guru berpengaruh secara signifikan terhadap hasil proses pembelajaran siswa. Kualitas pembelajaran dipengaruhi kualitas guru yang dapat dilihat dari hasil pencapaian kompetensi guru yang dikuasai (Sugiarti, 2008).⁷ Sedang menurut Jusuf Mudzakkir, kemampuan guru, motivasi profesional guru, kesesuaian waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas, berpengaruh positif terhadap perolehan NEM dengan besar pengaruh 90,31. Faktor kemampuan guru merupakan faktor yang dominan berpengaruh terhadap perolehan NEM siswa.⁸

Fakta empiris menunjukkan, bisnis kursus bimbingan belajar, semakin hari

⁵ Laman Kemendikbud

<http://ukg.kemdikbud.go.id/info/> diolah, 3 Oktober 2013

⁶ Ibid.

⁷ Sugiarti dalam laman

<http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012>, 3 Oktober 2013

⁸ Jusuf Mudzakkir dalam laman

<http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012>, 3 Oktober 2013

³ Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Visi Misi Calon Gubernur DIY 2012 - 2017*, Yogyakarta, September 2012

⁴ Victor Uji Kurnia - Sabtu, 13 Juli 2013 - <http://koffieenco.blogspot.com/2013/07/4-kompetensi-guru-profesional.html#sthash.x7WAKGTW.dpu>

semakin menjamur dengan tawaran fasilitas yang semakin mewah. Ketika penulis menanyakan kepada beberapa siswa sekolah negeri, mengapa mereka mengikuti bimbingan belajar, jawabannya sama, ingin mencapai NEM tinggi dan dapat diterima di sekolah favorit. Realitas ini setidaknya mengindikasikan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan termasuk di dalamnya guru, cukup rendah. Mereka tidak yakin dapat mencapai NEM tinggi dan diterima di sekolah favorit, manakala mereka tidak mengikuti bimbingan belajar. Proses pembelajaran yang terjadi di lembaga bimbingan belajar, relatif sama dengan proses transfer ilmu pengetahuan di sekolah, ditambah langsung berpraktik mengerjakan soal-soal. Kadang-kadang, masih dilengkapi dengan kiat-kiat (strategi) mengerjakan soal dalam ujian. Model seperti inilah, yang dalam pandangan Ki Hajar Dewantara disebut pengajaran dan bukan pendidikan. Sebab, pendidikan mengandung maksud menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.⁹

Konsep pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara, kemudian melahirkan filosofi *Ing Ngarsa Asung Tuladha, Ing Madya Amangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Di depan memberikan contoh keteladanan, di tengah membangun kehendak, menggagas ide dan di belakang memberdayakan. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *Tut Wuri Handayani* tentu harus dibaca secara utuh mulai dari depan, tengah sampai belakang. Dan ini yang mestinya juga menjadi pedoman profesi para guru.

3. Mencari Guru Abad ke - 21

Kita sudah berada di garis depan abad ke-21. Realitas kondisi guru sudah tergambar jelas. Suka atau tidak, itulah produk dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ada. Siapa pun dapat dengan mudah mengetahui, di mana letak titik koordinat guru dalam bentangan peta zaman yang sedemikian pesat. Setiap guru memiliki titik koordinat

masing-masing. Apakah dia berada pada lintasan yang tepat untuk dapat mengantarkan anak-anak menapaki masa depan? Ataukah dia berada di luar lintasan yang bakal terlindas zaman? Pada zaman ketika informasi dapat tersaji dalam waktu cepat, setiap anak-anak membutuhkan guru yang memenuhi sejumlah prasyarat tertentu. Setidaknya saat ini ada empat kompetensi sebagai prasyarat wajib yang harus dipenuhi. Menaikkan nilai rerata empat kompetensi guru profesional itu bukan perkara mudah; bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sekali pun yang relatif geografis wilayahnya berada dalam satu jangkauan. Penyebabnya adalah tata kelola pemerintahan yang berbasis otonomi daerah dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur kewenangan urusan di bidang pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA. Andai kewenangan itu dilaksanakan secara bertanggung jawab, kabupaten/kota tersebut masih dapat diharapkan kontribusinya untuk menaikkan nilai kompetensi guru. Sayangnya, model pemilihan kepala daerah secara langsung telah menyeret birokrasi ke dalam pusaran politik yang langsung berpengaruh kepada manajemen pemerintahan seperti asal menempatkan pejabat tanpa kompetensi atau memecah Satuan Kerja Perangkat Daerah karena akan menempatkan tim suses atas dasar alasan balas budi. Atau malah mengangkat guru-guru baru tanpa melihat peta kebutuhan tenaga guru yang dikaitkan dengan kesempatan pemenuhan jam mengajar bagi guru-guru yang sudah ada agar tidak kehilangan tunjangan sertifikasi. Menurut Dewi Zulaekah, pada umumnya sertifikasi guru memberikan dampak yang baik terhadap kualitas pembelajaran siswa pada kegiatan belajar dan mengajar (KBM).¹⁰

Upaya meningkatkan kualitas guru agar dapat memenuhi kebutuhan guru pada abad ke-21, tidak dapat lagi mengandalkan model pendekatan yang selama ini dijalankan untuk meng-*upgrade* guru. Perlu ada terobosan baru, agar uang rakyat yang diwadahi dalam APBN maupun APBD tidak terbuang sia-sia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah, apabila guru tidak memiliki nilai tinggi dalam uji kompetensi atau dengan kata lain tidak lulus,

⁹ KARYA KH DEWANTARA, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2004.

¹⁰ Dewi Zulaekah, dalam laman <http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012> 3 Oktober 2013.

guru bersangkutan tidak lagi diizinkan mengajar sampai dia selesai memperbaiki diri dan kembali lulus uji kompetensi. Ada dua kompetensi yang seyogyanya diberi standar kelulusan cukup tinggi, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Mengapa? Kalau kita masih mempercayai bahwa pendidikan adalah investasi masa depan, maka jangan mempertaruhkan masa depan anak-anak kita untuk dididik oleh guru-guru yang tidak memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik. Guru, adalah profesi dengan prasyarat panggilan jiwa. ***

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setjen MPR-RI, cetakan kesepuluh, 2011.
Laman Kemendikbud RI
<http://www.kemdikbud.go.id/uji-publik-kurikulum-2013-2.html>, 2 Oktober 2013.
Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Visi Misi Calon Gubernur DIY 2012 – 2017*, Yogyakarta, September 2012

Victor Uji Kurnia - Sabtu, 13 Juli 2013 -
<http://koffieenco.blogspot.com/2013/07/4-kompetensi-guru-profesional.html#sthash.x7WAKGTW.dpuf>
Laman Kemendikbud
<http://ukg.kemdikbud.go.id/info/> diolah, 3 Oktober 2013
Sugiarti dalam laman
<http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012>, 3 Oktober 2013
Jusuf Mudzakkir dalam laman
<http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012>, 3 Oktober 2013
KARYA KH DEWANTARA, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2004.
Dewi Zulaekah, dalam laman
<http://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/proses?q=kualitas+guru+tahun+2012> 3 Oktober 2013.

TANTANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM ABAD - XXI

Sumarno, MA, PhD
Dosen PPS – UNY dan UAD

Abstrak

Abad XXI diwarnai dengan derasnya globalisasi yang menghasilkan berbagai tantangan; dan rumitnya tantangan ini tidak akan memadai kalau hanya dihadapi dengan paradigma konvensional. Paradigma teknosains merupakan sebuah keniscayaan; dan pendidikan perlu memiliki komitmen tinggi terhadap paradigma tersebut. Kurikulum sebagai salah satu instrumen haruslah yang diyakini mampu menghasilkan manusia terdidik yang cakap dan arif mewujudkan kehidupan yang cerdas, bermoral, religius. Sementara itu pengembangan kurikulum berada di dalam konteks multidimensional, melalui proses-proses politik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan; sehingga tidak dapat dihindari munculnya sejumlah isu: a) perubahan masyarakat yang diharapkan dan konsekuensinya bagi kualitas peserta didik yang perlu dipersiapkan; b) strategi dan metode pendidikan yang cocok untuk mencapainya; dan c) cara penilaian, pemantauan, dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa pendidikan berlangsung dengan baik dan benar.

1. Pendahuluan

Abad XXI sebagai awal dari milenium III belum dapat memberikan gambaran jauh kedepan bagaimanakah kiranya kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini puluhan/ratusan tahun mendatang. Yang sudah pasti adalah bahwa sedang terjadi perubahan yang semakin pesat dan semakin besar skalanya; dengan ending yang belum dapat ditebak. Di dalam kondisi demikian, terpapar dua pilihan: a) menunggu dengan resiko untung-untungan, menjadi korban atau menikmati yang tersajikan oleh perubahan; b) berupaya semampu mungkin untuk mengarahkan dan mewarnai perubahan sehingga sudah ada upaya untuk tidak terpuruk dalam kehancuran. Pilihan pertama bersifat "pasrah", dapat fatalistik, mencerminkan ketidakberdayaan atau kelumpuhan. Pilihan kedua mencoba berpikir positif-optimistik dengan penuh kesadaran bahwa kemampuan dan upaya itu ada batasnya, dan lebih banyak kekuatan yang di luar jangkauan kita.

Pendidikan sudah seharusnya memilih pilihan kedua, karena disadari bahwa banyak kekuatan berusaha mempengaruhi, mengganggu, membelokkan kehidupan bangsa ini, dengan motif yang sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak; baik dari dalam maupun kekuatan dari luar. Pendidikan mengemban amanah melakukan berbagai upaya agar kehidupan hari ini dan hari depan gemilang, sebagai perorangan, kelompok masyarakat, bangsa, bahkan kehidupan kemanusiaan. Peradaban perlu

dikawal, diisi, dan ditingkatkan; bukan yang terjadi setiap kali harus dimulai dari titik nadir, nol lagi. Perusakan, pembersihan, genosida, adalah peristiwa yang senantiasa berulang dalam sejarah peradaban manusia; dan pertanyaannya, haruskah demikian?, tidak adakah cara lain yang lebih menampilkan kemuliaan peradaban?. Pendidikan dengan urusan pokok memanusiakan manusia, perlu optimis mengemban kewajiban mencari jawaban atas pertanyaan kedua.

Kurikulum sebagai salah satu instrumen utama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan menyelamatkan kemanusiaan dari kehancuran yang tidak perlu, dan membantu, mendorong, mengarahkan, menuju kehidupan dan peradaban yang sarat dengan nilai-nilai luhur.

2. Pengembangan Kurikulum Sebagai Proses Politik

Pengembangan kurikulum tidak akan pernah netral dari pengaruh ideologi, politik, dan teori (Steller, 1980; Mutch, 2001; Hansen, 1995). Ungkapan tersebut dapat dipahami dengan baik, bila disandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: Pendidikan untuk siapa dan untuk apa? Pendidikan oleh siapa atau tanggungjawab siapa? Bagaimana pendidikan melaksanakan fungsinya dengan cara yang sesuai dengan keputusan pendidikan untuk apa dan untuk siapa tersebut. Dalam praktik, kurikulum pasti dipersiapkan oleh pihak atau berbagai pihak tertentu yang dipercaya untuk mempersiapkan kurikulum yang cocok dengan misi dari keberadaan pendidikan itu

sendiri. Pemberi tugas, dan pengemban tugas, pastilah memiliki gambaran, minimal memiliki harapan; cerminan dari ideologi, politik, dan konsep yang diyakini.

Sejumlah pihak yang dipercaya melakukan perumusan kurikulum yang pertama dilakukan adalah memformulasikan platform kurikulum yang mencakup paling tidak tiga hal berikut:

- Konsep, yakni mengenai kondisi yang ada dan kondisi yang dimungkinkan ada, sebagai dasar untuk mengidentifikasi apa saja yang kiranya perlu dapat dilakukan.
- Teori, formulasi kurikulum memerlukan landasan pertimbangan teoretik mengenai berbagai hal termasuk karakteristik peserta didik, proses belajar dan strategi pembelajaran, dan cara penilaian kemajuan belajar.
- Tujuan, adalah bagian utama dari setiap kurikulum yang memiliki konsekuensi terhadap komponen lain dari kurikulum, misalnya mengenai bahan dan sumber belajar, indikator keberhasilan, serta cara mengenali tingkat capaian dan kemajuan peserta didiknya.

Formulasi ketiga hal tersebut melalui proses diskusi dari berbagai pihak yang berkepentingan, bukan hanya tim terbatas yang dipercaya untuk merumuskan platform kurikulum.

3. Harapan dan Tantangan Abad - XXI

Abad XXI ditandai dengan kuatnya paradigma teknoains yang telah menjadi keniscayaan karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (ipteks). Perkembangan ipteks ini tidak lagi aditif linier selayaknya deret hitung, melainkan mengikuti pola eksponensial yang semakin pesat pula. Energi yang dikandung oleh perkembangan ipteks ini sangat besar dan dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, baik di ranah privat maupun publik; bahkan ada urusan privat disadari atau tidak masuk ke ranah publik. Berbagai media sosial seperti facebook dan twitter memungkinkan terpaparnya urusan privat di media publik.

Energi yang ditimbulkan oleh perkembangan ipteks sangat besar, kalau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan positif dampak positifnya sangat besar; sebaliknya kalau dipakai untuk kepentingan negatif dampaknya pun akan sangat luar biasa. Dengan kata lain nilai energi sangat bergantung pada

penggunanya atau yang menguasainya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dapat terjadi efek bumerang, pemegang atau pengguna menjadi korban atas produk ipteks yang dipakainya sendiri. Adanya kemungkinan penyalahgunaan ipteks, maka korban ipteks dapat karena perilakunya sendiri, dapat pula karena perilaku pihak lain, yang dengan sengaja atau tidak menimbulkan efek yang mencelakakan. Tidakkah berlebihan dikatakan bahwa telah terjadi bukan hanya efek berantai tetapi juga multiparadok dari kemajuan ipteks.

Menghadapi kompleksitas dan kecepatan perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan ipteks diperlukan kapabilitas agilitas dan adaptabilitas. Agilitas atau kelincahan untuk melakukan manuver ke segala arah secara tepat, akurat, selamat, dan menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan agilitas tersebut diperlukan pula adaptabilitas, artinya kecakapan untuk melakukan penyesuaian diri secara tepat. Aktualisasi dari prinsip agilitas dan adaptabilitas memang rentan menghadapi resiko kesalahan atau kesesatan, sehingga yang terjadi dapat berupa perilaku yang membahayakan diri dan atau mencelakakan pihak lain. Di sinilah diperlukan sistem kendali agar supaya pada setiap pembuatan keputusan, baik pada posisi longgar maupun posisi terdesak, senantiasa tidak mudah tersesat atau kesalahan yang dapat berakibat buruk.

Satu-satunya sumber kekuatan pengendali yang dapat mengarahkan penggunaan ipteks adalah nilai-nilai moral dan etika yang memiliki komitmen kuat untuk menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran, kebaikan, kesantunan, kejujuran, kepedulian, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai luhur tersebut diinternalisasikan ke setiap orang sampai pada level otonomi moral; dan diwujudkan ke dalam berbagai pranata kelembagaan. Dengan demikian perilaku individual dengan koheren atau dukung mendukung dengan tuntutan perilaku organisasional kelembagaan.

Menghadapi masadepan tidak cukup hanya dengan pengalaman masa lampau, karena masa depan tidak sekedar lanjutan linier dari masa lampau. Kontinyuitas dan diskontinyuitas silih berganti dengan pola yang belum selalu dikuasai oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu berkembanglah paradigma teknoains, yang mengedepankan perlunya dikuasai berbagai pendekatan, yaitu:

- Positivistik; mengedepankan bahwa ada realitas objektif, dengan konsekuensi bahwa penguasaan berbagai konsep itu sangat membantu kita untuk menghadapi persoalan, dengan pola pemikiran deduktif; namun karena masadepan tidak hanya selalu hasil ekstrapolasi dari masa kini dan masa yang lalu, maka pola pemikiran deduktif linier itu saja belum cukup.
- Relativistik; mengedepankan bahwa kebenaran itu subjektif oleh karenanya bersifat relatif. Pemahaman atas apa yang terjadi di masa depan tidak lepas dari subjektifitas masing-masing orang; dan orang itu lebih banyak merespon berdasarkan pemahaman dan pemaknaan subjektif tersebut.
- Fenomenologik; pandangan ini menuntut kemampuan manusia untuk menangkap makna dari fenomena yang bermunculan yang tidak selalu beraturan, namun manusia dituntut untuk dapat menangkap polanya. Dengan kata lain memerlukan kemampuan penyimpulan secara induktif.

Kombinasi paradigma tekno-sains dengan dukungan penguasaan pengetahuan yang mumpuni, dengan kearifan etis-moral yang sarat nilai, diharapkan dapat menampilkan kelincuhan dan keluwesan berfikir, berperasaan, dan bertindak yang peduli terhadap perkembangan perdaban; tidak didominasi oleh kepentingan sesaat, wawasan sempit, dan kecerobohan dalam pembuatan keputusan.

Persaingan yang semakin ketat, dalam kondisi ketersediaan kesempatan dan sumberdaya yang semakin langka, dapat membuat orang melupakan berbagai dasar pertimbangan di dalam pembuatan keputusan. Peserta didik dipersiapkan untuk dapat mempersiapkan diri agar dapat menghadapi kehidupan ini dengan benar, berhasil, dan berperan aktif di dalam memajukan perdaban. Agama mengajarkan berlomba dalam kebaikan, menegakkan kebaikan, dan menjauhi kemungkaran

Komisi kurikulum Australia (CSCNEPA, 2007) mengidentifikasi beberapa fitur konteks global sebagai berikut:

- Perkembangan globalisasi ekonomi ditandai dengan pergeseran pusat ekonomi dunia ke Cina dan India.
- Kebergantungan pada pasar global, mengharuskan pada pengusaha dan pekerja untuk memiliki wawasan global dan kompetensi internasional.
- Degradasi lingkungan, menghendaki kerjasama internasional untuk menghasilkan solusi global di dalam memecahkan problem kekurangan air dan energi, pemanasan global, serta gejala telah terjadinya pandemi.
- Keamanan bangsa-bangsa, memerlukan adanya kerjasama keamanan nasional dan internasional, untuk memahami dan menghadapi berbagai isu konflik.
- Internasionalisasi ketenagakerjaan, telah mempercepat migrasi antar negara dan meningkatnya peran perusahaan multinasional, menuntut tenaga kerja untuk memiliki penguasaan bahasa internasional, pemahaman tentang keragaman budaya, serta keterampilan interpersonal yang lebih rumit.
- Knowledge economy diyakini akan menjadi kunci kesejahteraan dan lapangan kerja, sehingga tenaga kerja memerlukan kecakapan untuk bekerja dengan tim multidisipliner, menghadapi tugas dengan dimensionalitas kompleks, kreatif menghasilkan gagasan baru.

Sederet karakteristik tantangan tersebut mengharuskan kurikulum mampu menghasilkan manusia dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai; kalau tidak, tentu akan menjadi sumber masalah bagi diri-sendiri dan masyarakatnya.

4. Tantangan Pengembangan Kurikulum Abad - XXI

Di samping isu etika - moral dan konsekuensi dari perkembangan ipteks masih ada berbagai aspek lain yang perlu menjadi dasar pertimbangan di dalam pengembangan kurikulum. Paradigma tekno-sains tersebut menjelaskan pertimbangan konteks sosial dan pertimbangan filosofis/ideologis, di mana kemajuan ilmunya pengetahuan dan teknologi sangat mewarnai kehidupan, baik pada ideologis maupun level kehidupan nyata.

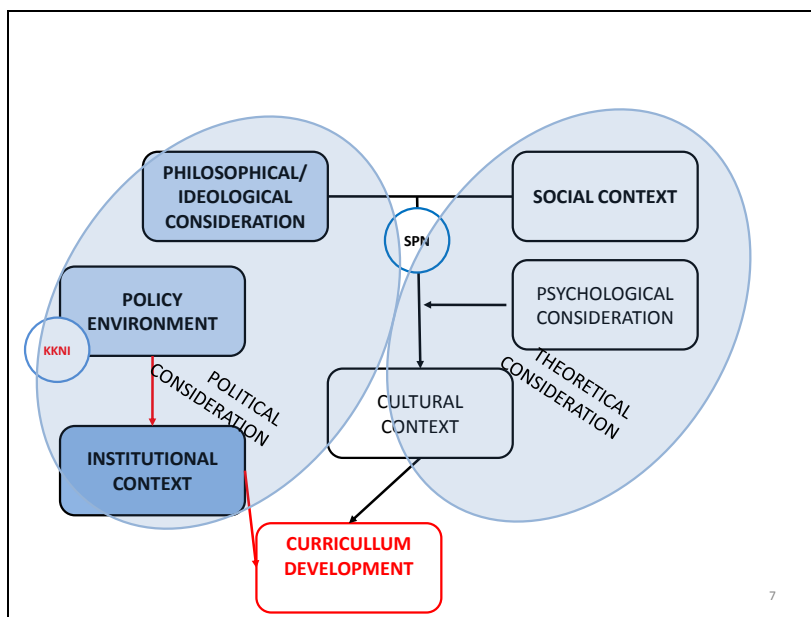


Figure 1. Dasar-dasar pertimbangan pengembangan kurikulum (diadaptasikan dari Brady,1992)

Kehidupan masyarakat yang sarat dengan muatan ipteks, mengharuskan setiap orang senantiasa belajar tentang berbagai hal baru, kalau dia tidak ingin terpinggirkan dari arus utama kehidupan. Kondisi yang demikian menyebabkan bahwa secara psikologis ada keragaman kesiapan belajar di masyarakat, ada yang sangat siap di satu ujung dan ada yang sudah apatis tidak lagi mau belajar. Pendidikan bertugas memfasilitasi kesiapan belajar sesuai dengan tingkat perkembangan manusia dan tingkat kemajuan masyarakatnya. Kebutuhan dan kemampuan belajar anak usia dini, kemampuan belajar anak usia dini, berbeda dengan anak usia remaja, dewasa, dan kelompok orang dewasa juga memiliki karakteristiknya sendiri.

Tingkat kemajuan masyarakat tercermin pada konteks kultural dari masyarakat tersebut. Lingkungan kultural secara garisbesar mencakup: a) keyakinan nilai-nilai luhur, termasuk nilai luhur yang mengacu pada agama; b) artefak atau benda-benda produk budaya, yang dengan sendirinya mencerminkan berbagai nilai luhur yang diyakini; dan c) aktivitas budaya termasuk adat istiadat dan berbagai organisasi sosial semua bidang kehidupan yang tentunya juga sarat dengan nilai budaya yang diyakini masyarakatnya. Aktivitas kehidupan ini termasuk: a) dalam bidang ekonomi dengan orientasi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan; b) bidang sosialbudaya dengan orientasi

pembinaan jatidiri budaya masyarakatnya; dan c) bidang politik yang berurusan dengan penataan sistem kekuasaan. Dalam kaitannya dengan konteks kultural ini pendidikan perlu memperhitungkan trend perkembangan masyarakatnya, tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja yang relevan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga bahwa pendidikan jangan mengasingkan anak dari lingkungan akar budaya masyarakatnya agar terjadi penguatan jatidiri masyarakat; serta tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendidikan juga ikut bertanggung jawab dalam pendidikan politik untuk peningkatan kualitas pembangunan politik bangsa.

Pengembangan kurikulum akhir-akhir ini sudah banyak mempertimbangkan kebutuhan pembangunan kesejahteraan, misalnya pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kejuruan, pembukaan program studi yang jelas orientasi ketenagakerjaan lulusannya. Masyarakatpun sudah mulai cerdas memilih pendidikan untuk anak-anaknya, dipilih jurusan yang jelas bidang kerja lulusannya. Mengenai dimensi kebudayaan sebagai dasar orientasi pendidikan, baru dimulai. Jogjakarta mengedepankan pendidikan berbasis budaya yang bermakna pendidikan tentang kebudayaan, dengan pendekatan budaya, dan terjadi di dalam lingkungan kebudayaan. Pendidikan berbasis budaya bukan sekedar muatan lokal tentang senibudaya, dan juga bukan sekedar menjadi matapelajaran

senibudaya atau bahasa daerah; melainkan berbagai muatan kebudayaan yang mencakup tiga komponen (nilai, artefak, aktivitas) kebudayaan dapat diwujudkan sebagai bagian terintegrasi dengan matapelajaran lain, kegiatan sekolah, dan lingkungan budaya sekolah.

Sebagai pembanding, komisi kurikulum Australia (CSCNEPA, 2007) konsep dasar dalam pengembangan kurikulum, yakni apa yang akan dicapai, bagaimana mengatur proses belajarnya, dan bagaimana cara mengetahui bahwa yang dilakukan mengarah pada hasil dan perubahan yang diharapkan.

- Tujuan perubahan yang diharapkan dari pengembangan kurikulum adalah dihasilkannya manusia dengan tiga kecakapan: *Successful learners, Confident individual, dan Responsible citizens*. Untuk itu setiap anak harus sehat, aman, gembira, mampu berkontribusi positif, dan akhirnya mencapai kesejahteraan; dan pembelajaran difokuskan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta pemahaman.
- Seluruh kegiatan belajar ditandai dengan seperangkat nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang luas. Berbagai pendekatan dipakai di dalam pembelajaran yakni: siswa aktif; humanis; koheren dengan lingkungan; perhatian terhadap perkembangan spiritual, moral, kultural, emosional, intelektual, serta fisik; bila diperlukan penambahan waktu, sampai setiap anak memperoleh layanan sesuai dengan sifat masing-masing personal. Layanan yang demikian dapat diwujudkan dengan menyediakan konteks pembelajaran yang komprehensif, mengandung unsur-unsur penting: identitas dan diversitas kultural, gaya hidup sehat, peranserta masyarakat, enterprise, dimensi-dimensi global dan pembangunan berkelanjutan, teknologi dan media, serta berfikir kritis-kreatif.
- Proses belajar dan mengajar senantiasa diupayakan lebih efektif, anak memahami kualitas dan cara meningkatkannya. Untuk itu dilakukan asesmen yang memiliki karakteristik: terpadu dengan KBM, menjangkau berbagai macam bukti kemajuan anak, menekankan kurikulum yang luas dan kesungguhan anak, memaksimalkan kemajuan anak, memberikan umpanbalik kepada anak dan semua pemangku kepentingan, membantu perhatian lebih fokus pada

target, menjaga keterkaitannya dengan standar nasional, menghasilkan informasi untuk perencanaan dan pengajaran ke depan, memakai tes dan berbagai bentuk tugas secara tepat, dan mendorong terjadinya asesmen diri asesmen oleh teman sebaya.

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari komisi kurikulum Australia.

Pertama, apa yang ditulis di dalam kertaskerja komisi pembaharuan kurikulum Australia tersebut menggambarkan penerapan pendekatan *logical framework*, di mana di dalam perencanaan diawali dengan rumusan yang jelas mengenai perubahan apa yang akan dicapai; kemudian rumusan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan rancangan operasional untuk mencapainya. Dengan demikian mudah pula identifikasi dan formulasi ukuran akuntabilitas dari perubahan kurikulum, di antaranya ketercapaian dan peningkatan standard, perilaku dan kehadiran siswa, peranserta masyarakat, pilihan gaya hidup sehat; dan semua bermuara pada partisipasi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.

Kedua, perumusan perubahan yang dikehendaki didahului dengan mengidentifikasi analisis prakiraan kecenderungan perubahan pada tingkat global, karena posisi strategis peran kunci Australia di peta ekonomi, politik, dan budaya global; yang merupakan keniscayaan untuk mempersiapkan generasi mudanya berperan aktif dalam konteks global.

Ketiga, dari segi substansi sebagai konsekuensi imperatif konteks global tersebut anak tidak hanya dipersiapkan sebagai individu yang percaya-diri dan pembelajar yang sukses, melainkan juga sebagai warga yang bertanggungjawab (*responsible citizen*). Nampaknya tidak sebatas state/federal citizen, tetapi juga world citizen, warga dunia. Salah satu indikator berbunyi: "...understand own and others' cultures and traditions and have a strong sense of their own place in the world." (p.12)

Sejalan dengan isi substansi tersebut adalah simpulan Sumarno (2013) dalam pidato dies natalis UNY tentang urgensi pencerahan pendidikan diarahkan untuk membangun kepribadian bangsa yang mandiri secara kultural, ekonomi, politik, bahkan juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemandirian dimaknai berdaulat atas dirinya, otonom yang refleksif, ada kebebasan dalam

setiap pembuatan keputusan, namun kebebasan tersebut mengharuskan kehati-hatian, penuh pertimbangan matang, atas kondisi internal-eksternal, sehingga setiap keputusan diwarnai oleh *wisdom*; bukan gegabah.

5. Kurikulum Untuk Kemandirian

Pengertian kemandirian adalah kemampuan dan kinerja nyata untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menerapkan keputusan yang ditandai dengan: tidak ada pihak yang memaksakan kehendak, bebas untuk mengidentifikasi - memilih - merumuskan - melaksanakan - memantau/menilai dan menindaklanjutinya; dengan arif mempertimbangkan berbagai aspek baik kondisi internal maupun kondisieksternal. Dengan demikian kemandirian bukan keterutupan, melainkan membutuhkan keterbukaan agar supaya dapat dihasilkan keputusan yang terbaik, setelah mempertimbangkan kondisi internal dan kondisi eksternal dengan segala konsekuensinya.

Pendidikan berperan membangun kemandirian peserta didik sehingga menjadi pribadi yang otonom; bukan pribadi tertutup; tetapi pribadi yang bebas dan mampu membuat keputusan terbaik buat dirinya, kelompok/organisasinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Keputusan ini tidak mungkin terjadi tanpa mempertimbangkan berbagai aspek internal maupun eksternal. Kompetensi membuat keputusan dan melaksanakannya secara bijak dan konsekuen itulah yang perlu dipersiapkan oleh setiap lembaga pendidikan. Untuk itu pendidik membutuhkan kemampuan dan kinerja yang secara simultan melakukan dua hal. Analisis prakiraan dan antisipasi perkembangan masyarakat; kemudian berdasarkan analisis tersebut merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Namun perlu disadari bahwa analisis prakiraan selalu mengandung keterbatasan, karena tidak tertutup kemungkinan adanya kejadian tak terduga. Oleh karena itu peserta didik di samping dipersiapkan untuk menghadapi kondisi sesuai dengan asumsi prediktif pendidik, juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan keadaan yang di luar jangkauan prakiraan pendidik.

Kemandirian lembaga pendidikan di dalam pengembangan kurikulum juga sama; yakni bahwa harus memutuskan secara bijak, dengan mempertimbangkan kondisi internal lembaga pendidikan itu sendiri, dan lingkungannya, termasuk lingkungan kebijakan, karena berada di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Misalnya, secara nasional dirumuskan Kurikulum 2013, maka setiap lembaga pendidikan perlu menyesuaikan dan mempersiapkan diri, agar dapat melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan semangat kebijakan nasional, dengan cara yang sesuai dengan kondisinya sendiri.

Agak sulit kiranya suatu lembaga pendidikan menghendaki pesertadidiknya mandiri, akan tetapi lembaga pendidikan itu sendiri tidak cakap menampilkan kemandirian yang arif yang dipercaya masyarakat untuk mendidik generasi penerus. Dengan kata lain antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain yang sejenis, pasti ada kesamaan karena menjadi bagian dari satu sistem pendidikan nasional; dan pasti ada perbedaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan peluang yang disediakan dalam oleh rambu-rambu kebijakan nasional dan daerah. Sebagai contoh DIY menggariskan pendidikan berbasis budaya, maka implementasi kurikulum 2013 akan diwarnai dengan makna pendidikan berbasis budaya; kemudian antar satu sekolah dengan sekolah lain akan bervariasi, karena kondisi dan lingkungan budayanya juga bervariasi.

6. Manajemen Pengembangan Kurikulum Dalam Sistem Desentralisasi

Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan multidimensi, termasuk besarnya skala layanan yang harus tersedia untuk seperempat miliar penduduk yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, budaya, bahasa, dengan bermacam-macam jenis pekerjaan, serta kondisi sosial-ekonomi dari yang sangat kaya sampai dengan yang sangat miskin. Lebih sulit lagi ratusan juta penduduk tersebut tersebar di lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Pada kondisi demikian, dapat dipahami bahwa dengan sistem sentralistik cenderung kurang efektif. Oleh karena itu sejalan dengan reformasi politik dari sistem sentralistik menjadi desentralistik yang berjalan satu dekade ini, pendidikan termasuk urusan yang didesentralisasikan. Tentu dengan harapan

bahwa layanan pendidikan menjadi lebih baik, karena diurus oleh pemerintah daerah yang secara fisik lebih dekat dengan rakyat, dibandingkan dengan apabila semua menjadi urusan pemerintah pusat.

Banyak negara mengalami kuatnya tuntutan desentralisasi dengan latarbelakang yang berbeda-beda, sulitnya mengelola sistem desentralisasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk terwujudnya tujuan yang didambakan oleh sistem desentralisasi, dan setelah bertahun-tahunpun tidak sertamerta berhasil. Lebih dari itu, setelah dialami dan dirasakan bahwa dengan desentralisasi bahkan muncul persoalan baru, bukan tidak mungkin masyarakat kembali merindukan sistem sentralisasi; ibarat pendulum yang berayun bolak-balik di dua posisi yaitu posisi sentralisasi dan posisi desentralisasi.

Pada dasarnya desentralisasi bukan perubahan dari semula semua urusan pusat menjadi semua urusan daerah. Desentralisasi dimulai dengan penataan atau pembagian kewenangan, sejumlah urusan tetap diurus pusat, dan sejumlah urusan lain menjadi urusan daerah. Ada urusan didelegasikan, didekonsentrasikan, atau didevolusikan. Urusan pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, senantiasa perlu dicermati aspek apa saja yang tepat didelegasikan, didekonsentrasikan, dan didevolusikan. Sebagai contoh, guru sekolah, aspek administratif kepegawaian menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, aspek keprofesian menjadi urusan Kemendikbud. Kerumitan manajemen guru bertambah manakala dipahami bahwa guru madrasah sepenuhnya urusan Kemenag; dan di lapangan harus berkoordinasi dengan guru sekolah sederajat.

Mengenai manajemen pengembangan kurikulum di dalam sistem desentralisasi diperlukan proporsi yang tepat antara kewenangan pusat, daerah, dan kewenangan satuan pendidikan. Pada umumnya satuan pendidikan mengharapkan kewenangan luas sebagai pelaksana pendidikan, namun belum tentu memiliki kemampuan cukup untuk merencanakan kurikulum yang memenuhi harapan sistem pendidikan nasional. Di sisi lain otoritas pusat sebagai penanggung-jawab sistem pendidikan nasional memiliki otoritas untuk menentukan *blue-print* atau *framework*, akan tetapi pada posisi jauh dan tidak memahami presis kondisi pelaksanaan pendidikan di lapangan. Semakin rinci dan

rijid rancangan pusat, semakin terbatas kewenangan para pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Sebaliknya, semakin global pedoman dari pusat, semakin longgar kewenangan sekolah sebagai satuan pelaksana pendidikan. Otoritas pusat sebagai penanggung-jawab rancang bangun kurikulum belajar mempercayai daerah dan satuan pendidikan, di sisi lain daerah/satuan pendidikan belajar dapat dipercaya sebagai pihak yang mengoperasional kurikulum. Di dalam perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 mengandung adanya pergeseran proporsi kewenangan pusat dan kewenangan satuan pendidikan; sebagian kewenangan yang dulu didelegasikan ke daerah dan satuan pendidikan ditarik menjadi kewenangan pusat (silabi, buku teks).

7. Penutup

Tantangan utama pengembangan kurikulum abad XXI pada dasarnya bersumber pada konteks pengembangan kurikulum yang multidimensional yakni dimensi filosofi dan ideologi pendidikan; kondisi sosial masyarakat; aspek psikologis peserta didik; lingkungan kebijakan sampai dengan kondisi satuan pendidikan. Dengan konteks yang multidimensional tersebut kurikulum diharapkan fokus pada mempersiapkan kemandirian, baik kemandirian para peserta didiknya maupun kemandirian bangsa. Bangsa yang mandiri adalah yang berdaulat dalam semua bidang termasuk sosio-budaya, ekonomi, politik, dan ipteks.

Sistem desentralisasi sebagai salah satu realisasi paham demokrasi, seringkali menjadi ajang polemik di sekitar persoalan peletakan kewenangan. Sedikit saja otoritas sentral dipandang mengambil atau mengurangi kewenangan yang diyakini sebagai hak daerah, satuan pendidikan, ataupun pendidik; dapat dipastikan mengundang polemik berkepanjangan; sejalan dengan kandungan multiparadok di era globalisasi. Contoh: menginginkan otonomi profesi tetapi dependensi pada sumberdaya pusat; menginginkan pendidikan bermutu tetapi sistem ujian sebagai satu alat kendali mutu bermasalah; mendambakan pendidikan holistik, tetapi hegemoni pendidikan berorientasi ketenagakerjaan sangat mewarnai kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brady, L.(1992) Curriculum development (4th.ed). New York: Prentice Hall
- CSCNEPA (2007) Developing a twenty-first century school curriculum for all Australian students. A working paper prepared for the Curriculum Standing Committee of National Education Professional Associations.
- Hansen, Ronald E. (1995) Five principles for guiding curriculum development practice: The Case of Technological Teacher Education. The University of Western Ontario. *Journal of industrial Teacher Education* , v 32 (n.2), winter 1995
- Mutch, C. (2001) Contesting forces: the political and economic context of curriculum development in New Zealand. *Asia Pasific Education Review*, vol.2 no.1, pp.74-84
- Sumarno (2013). Pendidikan untuk pencerahan dan kemandirian bangsa. Pidato Dies Natalis ke 49 UNY, 21 Mei 2013.
- Steller, A. (1980) Curriculum development ias politic. *Educational Leaderhsip*, Nov, 1980: pp.161-164

SEKOLAH DALAM TANTANGAN ABAD KE-21

Dr. Dwi Siswoyo, M. Hum

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Anakmu bukan milikmu.
Mereka putera-puteri Sang hidup yang
rindu pada dirinya sendiri.
Lewat engkau mereka lahir, namun
tidak dari engkau,
Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu.
Berikan mereka kasih-sayangmu, tapi
jangan sodorkan bentuk pikiranmu,
Sebab mereka ada alam pikiran
tersendiri.
Patut kau berikan rumah untuk
raganya, tapi tidak untuk jiwanya,
Sebab jiwa mereka adalah penghuni
rumah masa depan,
Yang tiada dapat kau kunjungi,
sekalipun dalam impian.
Kau boleh berusaha menyerupai
meraka,
Namun jangan membuat mereka
menyerupaimu.
Sebab kehidupan tidak pernah berjalan
mundur,
Pun tidak tenggelam di masa lampau.
Kaulah busur, dan anak-anakmulah,
anak panah yang meluncur.
Sang Pemanah maha tahu sasaran
bidikan keabadian,
Dia merentangmu dengan kekuasaan-
Nya,
Hingga anak panah itu melesat, jauh
serta cepat.
Meliuklah denggan suka cita dalam
rentangan tangan Sang Pemanah,
Sebab Dia mengasihi anak panah yang
melesat laksana kilat,
Sebagaiman pula dikasihi-Nya busur
yang mantap.
(KAHLIL GIBRAN)

1. Pendahuluan

Perubahan sosio-budaya yang sangat cepat pada dekade-dekade akhir-akhir ini, yang terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler, menghendaki guru dan tenaga pendidikan lain perlu memiliki pemahaman dan penghayatan yang utuh dan mendalam, serta tindakan yang benar dan tepat dalam menghadapi tantangan zaman. Dari sudut

pandang pedagogik perlu didudukkan kembali dunia edukatif yang akhir-akhir ini sudah mulai tereduksi, karena guru lebih banyak disibukkan pada aktivitas-aktivitas ekonomis-teknis, yang lebih berkutat pada "*the means of education*", bukan pada "*the core of education*", padahal guru berperan yang lebih luas, sentral dan strategis dalam pencerahan kemanusiaan ("*enlightenment of mankind*").

Pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas). Pendidik (guru) berkewajiban : (a). menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (b). mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c). Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Pasal 40 ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

Kalau sekolah ingin berubah dalam arti progersif, yang mula-mula harus berubah adalah guru. Guru, sebagai pembangun fondamen-fondamen hari depan jenis kemanusiaan, menghadapi berbagai tantangan untuk dapat sukses dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam konteks dinamika dunia kehidupan sekolah itu sendiri, maupun dalam konteks kehidupan nasional dan global. Kita memang gandrung untuk membangun, tumbuh dan berubah, tetapi tidak dengan harga setinggi penghancuran eksistensi dan jati diri kita sendiri. Kita ingin mengenyam, dan bila mungkin juga menyumbang untuk kemajuan dan kemenangan ilmu dan teknologi, tetapi bukan kemenangan semu yang secara "*built-in*" mengandung kekalahan total.

2. Strategi Mewujudkan Sekolah yang Baik

Strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sekolah yang baik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dirumuskan sebuah filosofi pendidikan nasional, sebagai bingkai komprehensif integral yang dinamis (bukan pembaharuan yang bersifat parsial-disintegratif, "borrowing", dan tambal sulam) , yang menjadi acuan tunggal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan nasional, baik masalah fundasional, masalah kultural, masalah struktural dan masalah operasional, maupun masalah dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, di dalam pendidikan sekolah dan luar sekolah.
 - b. Dirumuskannya ideologi pendidikan nasional, yang mengandung komitmen-komitmen untuk mewujudkan tujuan-tujuan hakiki yang dirumuskan dalam filosofi pendidikan nasional.
 - c. Dirumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional (kebijakan pembaharuan pendidikan sekolah) untuk mewujudkan pendidikan (sekolah) yang berkualitas, yang efektif, yang baik, yang sukses.
 - d. Mengadakan perbaikan mutu pendidikan baik di unit mikro (sekolah) maupun di unit yang lebih besar seperti meso dan makro memerlukan keseimbangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan sebab :
 - 1) Perencanaan program dan penyusunan anggaran (manajerial), perlu diimbangi pendekatan yang visioner (kepemimpinan), sehingga tujuan-tujuan yang dicapai tidak bias, baik tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah, maupun tujuan-tujuan jangka panjang.
 - 2) Pengorganisasian dan penyusunan staf (manajerial), perlu disertai penyampaian arah atau tujuan dalam perkataan maupun tindakan kepada mereka semua (kepemimpinan) yang kerja samanya diperlukan untuk penyusunan tim dan koalisi yang memahami visi dan strategi dan yang menerima validitasnya.
 - 3) Pengendalian dan pemecahan masalah (manajerial), perlu di-sertai pemberian motivasi dan inspirasi sehingga hambatan-hambatan besar yang dihadapi di berbagai bidang dapat diatasi secara arif dan penuh makna dalam mencapai tujuan (kepemimpinan).
 - 4) Menghasilkan sebuah taraf prediktabilitas dan keraturan dan memiliki potensi untuk secara konsisten menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tindakan yang diharapkan dalam jangka pendek oleh stakeholders (manajerial), perlu diimbangi dengan menghasilkan perubahan, yang seringkali mencapai sebuah taraf yang dramatis, dan memiliki potensi menghasilkan perubahan yang sangat bermanfaat, misalnya produk-produk baru dan pendekatan-pendekatan baru yang membantu menjadikan komunitas atau organisasi lebih kompetitif (kepemimpinan).
 - e. Dengan keseimbangan ke-mampuan manajerial dan kepemimpinan, akan terjaga konsistensi pencapaian tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan, dan akan terhindar adanya penyakit rabun dekat yaitu keuntungan semu jangka pendek yang akan menjadi bumerang bagi kerugian jangka panjang.
- 5) Membangun "*Leadership Capacity for School Improvement*" untuk mensukseskan perbaikan sekolah. Kepala sekolah dan guru adalah sebagai leader dalam lingkup dan konteks masing-masing. Kepala sekolah sebagai leader dalam lingkup sekolah dan guru sebagai leader dalam kelas, kendati dalam praktiknya perhatian mereka sebagai leader yang mengantarkan dan bertanggung jawab kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang bermakna dan bermartabat melampaui batas-batas sekolah dan kelas. Manajer berurusan dengan struktur, dan leader berkaitan dengan kultur.
 - 1) Manajer :
 - a) Sering kurang bersifat "human" (arif), karena dalam melaksanakan tugas mengutamakan prosedur.
 - b) Bekerja dengan otak (otak sebelah kiri)
 - c) Bekerja dengan struktur (aturan formal)
 - d) Tugas mengawasi sebagai tanggung jawab tunggal, bukan tanggung jawab bersama.
 - e) Mengejar pemenuhan target.
 - 2) Leader :
 - a) Mengutamakan hubungan personal

- b) Bekerja dengan hati nurani (otak sebelah kanan)
- c) Bekerja dengan kultur, sehingga berperan penting dalam membangun kultur (nilai-nilai)
- d) Visioner
- e) Bekerja sebagai tim sebagai tim
- f) Loyalitas tinggi
- g) Siap membantu.

Jika sebuah unit kerja (sekolah) langka orang yang memiliki kualifikasi manajer yang baik dan pemimpin yang baik sekaligus, perlu dibangun bersama organisasi belajar, "*capacity building*" secara sungguh-sungguh dan mengamalkan nilai yang paling esensial dari kualifikasi manajer, dan kualifikasi pemimpin, sehingga kepala sekolah benar-benar mengembangkan dirinya sebagai "*leader*" yang baik, yang memiliki kemampuan manajerial yang "*human*".

Pemimpin (kepala sekolah) hendaknya memiliki kemampuan mengembangkan diri dan orang lain dalam komunitas sekolah :

- Kepemimpinan kepala sekolah lebih baik dipahami sebagai sebuah bidang interaksi, yang lebih bersifat impersonal dari pada personal. Oleh karena itu, tugas yang sentral dari pemimpin (kepala sekolah) adalah membangun dan memelihara sebuah hubungan kerja yang solid dengan orang lain.
- Pemimpin (kepala sekolah) harus senantiasa belajar, dan belajar untuk memimpin itu sendiri merupakan sebuah proses yang panjang, seakan merentang ke belakang kembali pada masa anak-anak yang senantiasa bertanya, mendengar, membaca, memahami, menghayati, supaya lebih "*human*" dalam mengambil keputusan dan bertindak.
- Unsur kunci dalam pengembangan kepemimpinan adalah gagasan belajar bersama, dan mengkonstruksi makna dan pengetahuan secara kolektif dan kolaboratif.

- Dibangunnya organisasi belajar di sekolah, tidak dapat dihindarkan, supaya komitmen bersama meningkatkan diri dan kolektivitas dalam mewujudkan cita-cita organisasi dapat terwujud. Adalah kurang bermakna untuk perbaikan lembaga, apabila individu-individu di lembaga itu komunitas (paguyuban) yang saling berbagi pandangan, informasi, pengalaman tidak terbangun. "*Group feeling*" yang kokoh dan dinamis dalam mengemban amanah kelembagaan untuk menggapai cita-cita sangat terdukung dibangunnya organisasi belajar. Belajar individual adalah perlu tetapi bukan kondisi yang cukup untuk kecerdasan sebuah organisasi.

- f. Untuk mengadakan perubahan besar dalam perbaikan mutu pendidikan, tiga hal yang amat penting adalah "*capacity building*", "*empowerment*" dan "*critical mass*".

- 1) "*Capacity Building*" dapat dimaknai memberi kesempatan bagi orang-orang untuk bekerjasama dalam sebuah cara baru, sehingga dinamika yang secara kolektif dibangun bersama dalam perbaikan pendidikan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, inti dari "*capacity building*" adalah hubungan-hubungan kolegialitas. Dalam hal ini, komunitas, diskursus, dan kepercayaan profesional sangat penting. Dua komponen kunci dari "*capacity building*" adalah komunitas belajar profesional, dan kapasitas kepemimpinan. "*Capacity Building*" akan membangun "*mind set*" yang kodusif untuk perbaikan pendidikan.
- 2) "*Empowerment*" dapat dimaknai sebagai proses belajar, sebagai usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok sehingga mampu melakukan transformasi pendidikan.
- 3) "*Critical Mass*" adalah sekelompok orang ("*educated persons*") yang

diharapkan dapat mengimbaskan usaha-usaha perbaikan pendidikan. Dengan demikian, ketiga hal tersebut di atas berperan penting dalam memperlancar usaha-usaha perbaikan pendidikan sekolah.

g. Dirumuskannya *"local strategic planning"* yang meliputi :

- 1) Mensinergikan persepsi kepala sekolah, guru dan orang tua tentang sekolah yang baik.
- 2) Memotret prestasi akademik (*"classroom mapping"* oleh para guru dan *"school mapping"* oleh para guru dan kepala sekolah) secara periodik, sebagai alat memonitor dan aksi peningkatan prestasi akademik.
- 3) Membangun kultur sekolah yang senantiasa menggelorakan semangat perbaikan mutu akademik dengan tetap memelihara iklim sekolah yang tertib, aman, dan *"human"* sehingga kondusif untuk perbaikan.

"Culture is more than ways of doing, it also involves beliefs or interpretations Teachers need time and "permission" to talk and listen to their students and colleagues and to attend to their needs" (Joan Lippitz, 1995)

Membangun budaya sekolah. Menurut E.H Shein (1985), T.E Deal dan K.D Peterson (2009), kebudayaan sekolah adalah jaringan-jaringan kompleks dari tradisi-tradisi dan tata cara-tata cara yang telah dibangun dalam waktu yang lama sebagaimana guru, siswa, orang tua, dan administrator bekerja sama dan menghadapi krisis-krisis dan iringan-iringannya (Terrence E. Deal & Kent D. Peterson, 2009).

Budaya sekolah mempengaruhi setiap bagian usaha dari apa yang staf pengajar perbincangkan di tempat makan, hingga tipe pembelajaran yang digunakan, cara pengembangan profesional dipandang, dan kepentingan belajar bagi semua siswa. Budaya yang kuat, positif, kolaboratif memiliki pengaruh yang kuat pada banyak pada ciri-ciri sekolah. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut (Terrence E. Deal & Kent D. Peterson, 2009) :

- a) Budaya membantu perkembangan efektivitas dan

produktivitas sekolah. Guru dapat berhasil dalam sebuah budaya yang memfokuskan pada produktivitas (lebih dari pada sekedar pemeliharaan atau kesenangan kerja), kinerja (kerja keras, dedikasi, daya tahan), dan perbaikan (peningkatan dan penghalusan budi bahasa pengajaran secara kontinyu).

- b) Budaya meningkatkan aktivitas-aktivitas kolegial dan kolaboratif yang membantu pengembangan praktik-praktik komunikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik.
- c) Budaya membantu pengembangan perubahan dan usaha-usaha perbaikan.
- d) Budaya membangun komitmen dan identifikasi staf (guru), siswa, dan administrator.
- e) Budaya menguatkan energi, motivasi, dan vitalitas staf (guru), siswa, dan komunitas sebuah sekolah
- f) Budaya meningkatkan fokus perilaku dan perhatian keseharian tentang apa yang penting dan berharga.

Dalam membangun sebuah budaya sekolah, pemimpin sekolah (*"school leaders"*) secara simbolik berperan sebagai :

- a) Sejarawan (*"Historian"*) : berusaha memahami masa lampau sosial dan normatif sekolah.
- b) Detektif Antropologis (*"Anthropological sleuth"*) : menganalisis dan menyelidiki terhadap serangkaian arus norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang membatasi budaya mutakhir.
- c) Visioner (*"Visionary"*) : bekerja dengan pemimpin-pemimpin dan komunitas lain untuk menegaskan gambaran fokus nilai masa depan bagi sekolah; dimilikinya visi yang senantiasa berkembang.
- d) Simbol (*"Symbol"*) : menguatkan nilai-nilai melalui pakaian, perilaku, perhatian, kebiasaan sehari-hari.

- e) Orang yang membuat ornamen-ornamen (*"Potter"*): membentuk dan dibentuk oleh kepahlawanan-kepahlawanan, ritual-ritual, tradisi-tradisi, seremoni-seremoni, lambang-lambang sekolah, menjadikan staf yang andil dalam nilai-nilai inti.
- f) Penyair (*"Poet"*) : menggunakan bahasa untuk memperkuat nilai-nilai dan mendukung citra terbaik sekolah itu sendiri.
- g) Aktor (*"Actor"*): mengimprovisasi drama, komedi dan tragedi sekolah yang tak terelakkan. Jika "semua dunia adalah sebuah panggung", maka aspek-aspek kehidupan sebuah sekolah adalah mempesona, apakah mereka komedi, tragedi, drama, aksi.
- h) Penyembuh (*"Healer"*) : menjaga transisi-transisi dan perubahan dalam kehidupan sekolah, menyembuhkan luka-luka dari konflik dan salah pengertian.
- h. Membangun "School that learn" (Peter Senge et.al, 2000) yaitu sekolah yang "re-created, made vital, and sustainably renewed not by fiat command, and not by regulation, but by taking a learning orientation". Ini berarti melibatkan setiap orang dalam sistem dalam mengekspresikan aspirasi-aspirasi mereka, membangun kesadaran mereka, dan mengembangkan kecakapan-kecakapan mereka secara bersama-sama. Dalam "School that learn", orang-orang yang terlibat dalam komunitas sekolah, yang secara tradisional mungkin ada kecurigaan satu sama lain, mengakui menjadi taruhan bersama tentang masa depan sistem sekolah dan segala sesuatunya yang mereka dapat belajar satu sama lain.
- i. Menerapkan strategi komprehensif dalam pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai moral secara terpadu. Dua buah nilai moral yang utama menurut Thomas Lickona (1992) adalah "respect" dan "responsibility". Sedangkan nilai-nilai moral lainnya yang perlu diajarkan adalah "honesty, fairness, tolerance, prudence, self-discipline, helpfulness, compassion, cooperation, courage, and host democratic values". Regenerasi bangsa tidak cukup hanya lewat beranak cucu,

tetapi juga lewat penerusan nilai dan visi. Sebuah bangsa bertahan melebihi satu generasi karena identitas diri yang ditopang kontinuitas nilai dan visinya. Sejauh ini berkembang-biakan nilai belum menjadi fokus pendidikan nasional (Yonky Karman, Kompas 12 Mei 2007)

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariaannya, profesinya) mengajar (KBBI, 2012); "A person who teach; one who instruct" (Webster's Dictionary, 1993); "A person who teaches others, especially in a school" (Eugene Ehrlich, et.al, 1986). Mengajar adalah "to communicate skill or knowledge; to give instruction or insight" (Webster's Dictionary, 1993). Dalam arti generiknya, menurut B. OTHANEL SMITH (1971), mengajar adalah sebuah sistem tindakan yang diharapkan untuk membujuk belajar (*"teaching is a system of actions intended to induce learning"*). Jika siswa belum belajar karena sistem tindakan itu, berarti guru belum mengajar. Sedangkan RONALD T. HYMAN (1971), menyatakan bahwa mengajar harus dipandang sebagai hubungan triadic. Artinya kita harus memandang bahwa mengajar melibatkan sekurang-kurang satu guru, sekurang-kurangnya satu siswa, dan materi pelajaran yang diajarkan dan dipelajari. Guru sebagai edukator pada hakikatnya mempunyai tugas tidak hanya mengajar atau membelajarkan siswa, melainkan juga sekaligus mendidik siswa, sehingga mengajar yang baikpun disebut mengajar yang mendidik, karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan oleh guru dalam menjalani dan menjalankan tugasnya secara utuh.

Mengajar yang mendidik hanya dengan "perasaan" adalah tidak cukup. Tetapi guru harus cukup mengetahui tentang hakikat manusia, tentang motivasi manusia, tentang membangun "self-image" atau "self-concept" siswa, tentang "positive thinking" serta tentang tipe-tipe pribadi yang sukses dan yang gagal, tentang ciri-ciri "good character" dan strategi dalam penndidikannya, tentang ciri-ciri "good school", tentang iklim psiko-sosio-emosional dari seluruh kelas, tentang pengaruh "reward" dan "punishment", dan dari keberhasilan dan kegagalan, tentang keseluruhan jaringan dinamika dari hubungan interpersonal antara guru dan siswa, tentang hubungan sekolah

dan masyarakat, tentang hubungan sekolah dalam konteks nasional dan global.

Guru mengemban dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab ilmiah (akademik). Tanggung jawab moral, lebih terfokus pada pengejawantahkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa dan negara ke dalam diri pribadi guru, sehingga nilai-nilai itu senantiasa terpadu dalam dirinya, sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan tanggung jawab ilmiah (akademik), lebih terfokus pada kebenaran dan atau kemutakhiran pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang ditransformasikan kepada peserta didik. Untuk melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawab itu, guru dituntut senantiasa belajar, mendidik diri sendiri, memperluas ilmu dan memperdalam wawasan filosofisnya sebagai guru.

4. Kompetensi Guru

Dalam Oxford American Dictionary kompetensi (competency) diartikan "1. sufficiency of means for living, 2. being competent, 3. legal capacity or eligibility", sedangkan kompeten (competent) diartikan "1. having the ability or authority to do what is required, 2. adequate, satisfactory" (Eugene Ehrlich et.al, 1986), 3. "having sufficient ability; being capable" (Webster's Dictionary, 1993).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompeten diartikan : (1) cakap (mengetahui); (2) berwenang; (3) berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu. Dan kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (KBBI, 2012). Dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Gerakan menuju "*competency based or performance based education*" pada awal tahun 1970-an menembus setiap aspek pendidikan Amerika, khususnya "*the education of professionals*" diperbaharui melalui prosedur sertifikasi didasarkan pada konsep "*Competency*

Based Education" atau "*Performance Based Education*" ("*CBE/PBE*"). CBE telah dikembangkan sebagai bagian dari suatu gerakan berdasarkan budaya (W. Robert Houston, 1974).

Dua kekuatan pada masyarakat Amerika yang mendukung terhadap CBE adalah :

"*Accountability*". dan "*Personalization*". "*Accountability*": Football coaches, plumbers, teachers, physicians", dan lain-lain diharapkan dapat mempertanggung-jawabkan pelayanan yang diberikan. Mereka diharapkan tidak hanya berpengetahuan banyak di bidangnya, tetapi juga berhasil baik dalam mempraktekan pengetahuan yang dimilikinya. "*Personalization*", Alvin Toffler menyatakan bahwa sekolah-sekolah adalah institusi yang telah mendehumanisasikan siswa, mencontoh seperti pabrik-pabrik, yang menyiapkan siswa-siswa untuk kehidupan industrial. Dalam setting yang sesak dan gaduh guru mengevaluasi usaha-usaha siswa, dan siswa berkompetisi satu sama lain, para siswa dengan mudah lebih menjadi objek dari pada menjadi pribadi-pribadi (persons). Maka jiwa manusia meneriakkan untuk kebebasan, kemandirian, dan pengakuan (W. Robert Houston, 1974).

Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi yang harus dimiliki tenaga pendidik (guru) adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Namun sebenarnya yang perlu diwujudkan adalah guru yang profesional. Menjadi guru profesional, sudah semestinya guru dituntut memiliki sejumlah kompetensi, namun penulis tidak memasukkan lagi kompetensi profesional, karena guru profesional akan dapat dicapai apabila guru memiliki serangkaian kompetensi sebagai sebuah kebulatan kesatuan. Jika untuk menjadi guru yang profesional dimasukkan lagi kompetensi profesional, berarti dapat dikatakan "jeruk minum jeruk".

Profesi pada hakikatnya adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang berkualifikasi tinggi dalam melayani atau mengabdikan kepentingan umum untuk mencapai kesejahteraan insani. Ini berarti bahwa seorang profesional dalam memberikan pelayanan atau pengabdian dilandasi kemampuan/keahlian serta filosofi yang mantap. Seorang profesional dalam

melaksanakan tugasnya juga senantiasa dilandasi oleh norma-norma yang mengatur perilaku anggota-anggota profesi atau yang disebut sebagai kode etik.

Suatu profesi memiliki ciri-ciri dan sekaligus persyaratan sbb. :

- a. *Commit themselves to the ideal of service to mankind rather than to personal gain.*
- b. *Undergo relatively long periods of professional preparation to learn the concepts and principles of the specialized knowledge which earns the profession its high status.*
- c. *Meet established qualification for admission and keep up to date through in-service growth.*
- d. *Establish and adhere to a code of ethics regarding membership, conduct, and practice.*
- e. *Demand a high order of intellectual activity.*
- f. *Form organizations to improve the standards of the profession, the services of the profession, self-discipline in the profession, and the economic well-being of its members.*
- g. *Provide opportunities for advancement, specialization, and independence.*
- h. *Regard the profession as life career and consider membership in the profession as permanent (Robert W. Richey, 1979).*

Ciri-ciri dan sekaligus persyaratan profesi di atas dapat berlaku pula dalam profesi pendidikan pada umumnya, dan sekaligus profesi guru pada khususnya. Guru sebagai profesi memiliki peran sentral dalam membangun fondamen-fondamen hari depan jenis kemanusiaan. Sekolah memerlukan guru yang memiliki kompetensi mengajar dan mendidik, yang inovatif, yang kreatif, yang produktif, yang futuristik, yang human, yang cukup waktu untuk menekuni tugas profesionalnya, yang senantiasa dapat menjaga wibawanya di mata peserta didik dan masyarakat (menjaga "*professional conscience*") dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mendapatkan guru yang demikian, dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pemantapan program dan realisasi pendidikan guru (*pre-service training*) dan peningkatan dan pemantapan kualitas guru (*in-service training*) serta kesejahteraan para guru.

"Without a qualified, committed, and motivated teaching profession, there can be no quality education" (Altbach, Kelly & Weis, 1985). Persiapan untuk mengajar adalah usaha praktis, usaha profesional, yang memerlukan kerja dan usaha. Untuk ini tidak hanya membutuhkan "*seni*" dari seorang guru yang berbakat tetapi juga membutuhkan "*ilmu*" dari

seorang praktisioner yang profesional (Van Cleve Morris, 1963). Pekerja profesional berbeda dengan seniman, yang juga mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang banyak, karena ketrampilan profesional lebih didasarkan pada ilmu dan latar belakang teoritis dari pada didasarkan pengalaman yang tipis. Seseorang tidak dapat belajar menjadi profesional hanya bekerja sebagai magang,. Untuk menjadi seorang profesional memerlukan praktek tentu saja, tetapi praktek yang harus didasarkan pada teori, dan dalam praktek itu guru harus memiliki dan menggunakan teori yang benar.

Untuk menjadi tenaga kependidikan (edukator/guru) yang profesional, selain perlu dimilikinya pengetahuan "*know-how*" yang vital, yang mendukung menjadikan pendidikan secara efektif dan efisien, juga perlu dimilikinya pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan. Pengetahuan yang fundamental yang menjadi dasar pendidikan dikenal dengan rubrik fondasi-fondasi pendidikan ("*foundations of education*"). Fondasi-fondasi pendidikan adalah studi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan-kebijakan dan praktek pendidikan yang berharga dan efektif. Prinsip-prinsip ini adalah dasar dibangunnya rumah pendidikan. Jika dasar itu adalah substansial, sandaran dari struktur itu kemungkinan akan kuat, dan sebaliknya (Sanford W. Reitman, 1977).

Tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah abad ke-21 adalah perlu dimilikinya guru yang benar-benar profesional yang memiliki sejumlah kompetensi yang meliputi: kompetensi akademik, kompetensi ideologik, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi kultural, kompetensi spiritual, kompetensi kemanusiaan, dan kompetensi antispasional.

4.1 Kompetensi Akademik

Tantangan akademik yang dihadapi guru, adalah selain *kesenjangan akademik* yaitu tidak ada atau kurangnya persesuaian antara materi akademik yang diajarkan di sekolah dengan materi yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Mochtar Buchori, 1991), juga terbinanya *koherensi akademik* dari sistem (suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan) esensi substansi materi akademik antar bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik. Di samping itu guru ditantang untuk senantiasa meningkatkan

kualitas *pengalaman akademik*, sebagaimana dinyatakan oleh Frederick Mayer (1963) bahwa "*Education, I believe, demands a qualitative concept of experience. Thus, we should regard education as a process leading to the enlightenment of mankind*".

Upaya pembentukan manusia seutuhnya ("*whole man*") sulit diwujudkan kalau materi-materi akademik sebagai sebuah kesatuan isi pendidikan pendidikan diperlakukan secara parsial, apalagi kalau diperlakukan secara parial-disintegratif. Sebaliknya, materi akademik antar bidang studi hendaknya diperlakukan sebagai sebuah sistem isi pendidikan (*koherensi akademik*) yang mendukung siswa agar sukses belajar dan sukses dalam hidupnya. Untuk itu guru ditantang untuk memahami keterkaitan esensi dari substansi materi antar bidang studi dalam proses pembelajaran yang mendidik.

Di samping kesenjangan akademik dan koherensi akademik, guru juga senantiasa ditantang meningkatkan *kualitas pengalaman akademik*. Guru tidak cukup hanya "banyak makan garam", banyak pengalaman, melainkan juga yang lebih utama adalah "kualitas garam yang di makan", termasuk keragaman dan keberlakuan "garam", agar tidak "sakit gondok" (karena garam yang dimakan tidak beryodium), atau "diare yang tak berkesudahan" (karena semua yang dimakan garam Inggris). Peningkatan kualitas pengalaman guru ini, karena akan berdampak luas pada peserta didik, maka yang diperlukan bukan hanya kualitas formal semata-mata (gelar akademik), tetapi yang lebih dituntut bagi guru adalah kualitas material (kualitas diri) yang senantiasa tanggap terhadap perkembangan dan tantangan zaman. Tantangan yang disebut terakhir ini perlu mendapat perhatian bagi guru karena sekolah dilanda krisis, yang lebih mendorong mediokritas pendidikan dari pada "*excellence*" (Christopher J. Hurn, 1985).

4.2 Kompetensi Ideologik

Istilah ideologi berasal dari kata Yunani, "*eidos*" dan "*logos*". *Eidos* yang artinya melihat, memandang, berarti gambaran pandangan. Karena memikirkan itu juga mirip dengan memandang, maka *eidos* juga berarti pikiran (idea). *Logos* di sini berubah menjadi *logia*, berarti kata, pengertian, ucapan. Kita mengerti Kita mengerti kata biologi, filologi, dan sebagainya; dalam hal ini *logi* berarti pengertian atau ilmu pengetahuan. Dalam istilah ideologi,

kata *logi* tidak menunjuk ilmu pengetahuan. Ideologi adalah kesatuan idea-idea, kesatuan itu dimiliki dengan dan dalam *logos* atau pengertian. Dalam komposisi istilah itu termuat suatu renungan atau refleksi : Istilah itu menyatakan bahwa ada idea-idea dan ada pengertian tentangnya, bahkan bahwa manusia telah berpikir-pikir tentang idea-idea itu tidak hanya ada secara banyak, melainkan secara kesatuan. Idea-idea itu bukanlah sembarangan idea, tetapi idea-idea yang mendalam, yang fundamenta (Driyarkara, 2006).

Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Rumusan ini berdasarkan fakta sejarah. Dalam sejarah kita menyaksikan bahwa ideologi dianut karena "*manfaatnya*", karena efisiensinya. Tetapi penganutan itu pada prinsipnya juga berdasarkan keyakinan, bahwa ideologi yang dianut itu benar, idea-idea yang sebagai kompleks sistematis menjadi menjadi ideologi itu kita katakan : tentang manusia dan dunia. Dalam keterangan ini termuat juga pandangan tentang Tuhan, tentang manusia sesama, tentang hidup dan mati, tentang masyarakat dan negara dsb. Singkatan "*manusia dan dunia*" mengandung arti bahwa manusia itu mempunyai tempat tertentu, mempunyai kedudukan tertentu, berarti mempunyai hubungan-hubungan atau relasi. Sesuai dengan tabiat hubungan-hubungan yang diakui itu, suatu ideologi bersifat hanya "*diesseitig*" atau juga "*diesseitig*" serta "*yenseitig*" (Driyarkara, 2006).

Komunisme adalah suatu ideologi yang hanya *diesseitig*, sebab tidak mengakui Tuhan. Pancasila adalah ideologi yang *diesseitig*, juga *yenseitig*. *Diesseitig* karena merembug hidup didunia ini (demokrasi, keadilan sosial); tetapi juga *yenseitig* karena mengakui Tuhan Yang Maha Esa (Driyarkara, 2006). Pancasila mengandung *nilai-nilai religius* (sila pertama), *nilai-nilai humanis* (sila ke-dua), *nilai-nilai kebangsaan* (sila ke-tiga), *nilai-nilai demokrasi* (sila ke-empat), dan *nilai-nilai keadilan* (sila ke-lima) dalam kesatuan organis harmonis dinamis. Dewasa ini yang menjadi masalah adalah di satu pihak pengaruh ideologi neo-liberalisme dan neo-kapitalisme semakin nampak, sementara di lain pihak, ideologi Pancasila semakin direduksi.

Ideologi bukanlah hanya pengertian, melainkan juga prinsip dinamika, karena

merupakan pedoman (*pola dan norma*) dan cita-cita (*ideal*) hidup. Realisasi dari idea-idea yang menjadi ideologi itu, menurut Driyarkara, dipandang sebagai *kebesaran, kemuliaan manusia*. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melaksanakan apa yang harus, melainkan juga dengan ideologi manusia juga mengejar keluhuran. Guru mempunyai kewajiban mentransformasikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada peserta didik melalui pendidikan. Namun yang perlu senantiasa diperhatikan dan dipegang teguh oleh para guru adalah bahwa mendidik itu berarti mendidik seseorang sekaligus mendidik diri sendiri.

4.3 Kompetensi Personal

Guru harus senantiasa memiliki kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi, khususnya bagi peserta didik, umumnya bagi sesama manusia, artinya ia memiliki kepribadian yang patut diteladani, melaksanakan prinsip "*Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa*" (R.M P. Sosrokartono), "*Tut Wuri Handayani*" (Ki Hadjar Dewantara). Guru (juga kepala sekolah) sebagai pemimpin-pemimpin sekolah hendaknya memiliki, sebagaimana dikemukakan oleh WARREN BENNIS dalam bukunya "*On Becoming a Leader*" (1994), unsur-unsur dasar kepemimpinan, yaitu :

- a. "*Guiding vision*": memiliki idea yang jelas tentang apa yang ingin dilakukan secara profesional dan secara personal, dan kekuatan yang tetap teguh dalam menghadapi kemunduran, bahkan kegagalan.
- b. "*Passion*": memiliki sebuah pasi (keinginan yang besar) terhadap harapan hidup, dikombinasikan dengan sebuah pasi yang sangat khusus terhadap sebuah vokasi, sebuah profesi, sebuah alur aksi. Anda mencintai apa yang Anda lakukan.
- c. "*Integrity*": Integritas berasal dari pengetahuan diri, keterusterangan, dan kematangan. Anda mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan Anda, adalah benar terhadap prinsip-prinsip Anda, dan telah belajar dari pengalaman bagaimana belajar dari dan bekerja dengan orang lain.
- d. "*Trust*": Anda telah memperoleh kepercayaan orang.
- e. "*Curiosity*" : Anda ingin mengetahui tentang segala sesuatu dan ingin belajar sebanyak yang dapat Anda pelajari.

- f. "*Daring*" : Anda mau mengambil risiko, eksperimen, dan mencoba hal-hal baru (Joseph Boyett & Jimmie Boyett, 1998).

Sejalan dengan yang dikemukakan WARREN BENNIS di atas, BURT NANUS dalam bukunya "*The Leader's Edge : The Seven Keys to Leadership in a Turbulent*" (1989) mengemukakan "*Tujuh Megaskil*" kepemimpinan sebagai berikut :

- a. "*Farsightedness*" : Anda menjaga benar-benar pandangan Anda yang telah menetapkan horison yang jauh, bahkan waktu Anda mengambil langkah terhadapnya.
- b. "*Mastery of change*" : Anda mengatur kecepatan, arah, dan ritme perubahan dalam organisasi sehingga pertumbuhan dan evolusinya sesuai langkah peristiwa-peristiwa eksternal.
- c. "*Organization design*" : Anda adalah seorang pembangun institusi sebagai warisan sebuah organisasi yang sanggup sukses dalam merealisasikan visi yang diinginkan.
- d. "*Anticipatory learning*" : Anda adalah seorang "*lifelong learner*" yang memiliki komitmen untuk meningkatkan belajar organisasi.
- e. "*Initiative*" : Anda menunjukkan sebuah kemampuan untuk menjadikan hal-hal terjadi.
- f. "*Mastery of independence*" : Anda menginspirasi orang lain untuk berbagi idea-idea dan percaya satu sama lain, untuk berkomunikasi dengan baik dan sering, dan berusaha mencari solusi terhadap berbagai masalah secara kolaboratif.
- g. "*High standards of integrity*" : Anda adalah adil, jujur, toleran, dapat dipercaya, peduli, terbuka, setia, dan komit terhadap tradisi-tradisi terbaik masa lampau (Joseph Boyett & Jimmie Boyett, 1998).

4.4 Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik guru bukan kompetensi pedagogik yang dirumuskan dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 yang hanya bersifat teknis belaka, yaitu "*kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik ...*", karena "*pedagogy*" adalah : "(1) *the art, practice, or profession of teaching*; (2) *the systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance (largely replaced by the term education)*. *Pedagogy of action : the science or procedure of*

teaching through purposeful activities, analyzable into the following steps, each of which involves initiation, evaluation, and choice by the child : (a) preparing --- setting up of goals; (b) planning --- preparing means necessary to mrealize the goals; (c) executing --- performing the means; (d) judging --- evaluating the extent of realization of the goals and the process" (Carter V. Good, 1945). Pedagogy or paedagogy adalah : *"the art, science, or profession of teaching; esp. : the study that deals with principles and methods in formal education"* (Philip B. Gove, 1981 : 1663). Pedagogy, *"the art and science of teaching"* (G. Terry Page, JB. Thomas, AR. Marshall, 1978).

Istilah pedagogi dan pedagogik biasanya dipakai bergantian. Keduanya diartikan sebagai ilmu pendidikan. Memang asal mulanya adalah dari bahasa Yunani yang berarti para budak yang mengantar anak-anak bangsawan untuk belajar. Mereka adalah pedagogos. Lama-kelamaan ilmu yang mempelajari anak yang sedang belajar atau anak yang sedang berkembang disebut ilmu pendidikan atau ilmu mendidik. Perbuatan atau tindakan mendidik yang didasarkan teori dan konsep disebut pedagogi. Ilmu mendidik yang didasarkan kepada kajian ilmiah disebut pedagogik. Ilmu pendidikan atau ilmu mendidik atau pedagogik merupakan suatu ilmu yang bukan semata-mata bersifat ilmu murni, juga bukan suatu tindakan yang tanpa dasar, tetapi merupakan ilmu yang diarahkan kepada tindakan ilmu praktis (HAR. Tilaar, 2002).

Dengan demikian pedagogik bukan hanya melihat proses pendidikan sekadar sebagai proses pendewasaan, atau proses sosialisasi, atau proses penyesuaian budaya. Lebih dari itu, pedagogik mengkaji mengenai proses seorang manusia menjadi manusia yang sebenarnya, yang mempunyai kepribadian. Proses itu tidak lain dari proses individuasi atau menjadi individu. Individuasi bukanlah sekadar menjadi satu atom atau kumpulan atom-atom. Proses individuasi adalah pengembangan potensi yang ada pada setiap individu agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan bagi keluhuran martabatnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang bukan sekadar mengembangkan kemampuannya, tetapi juga yang dapat memanfaatkan kemampuannya itu bagi sesama manusia dan bagi pubahan sosial. Dengan kata lain, proses individuasi hanya dapat terwujud di dalam partisipasinya dalam perubahan sosial (HAR.

Tilaar, 2002). Pedagogik atau ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan; dalam arti luas pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan (Sutedjo Brodjonagoro, 1966). Guru juga perlu memahami bahwa pendidikan mencakup makna yang luas, dan tidak hanya direduksi menjadi pengajaran, atau pembelajaran. Berikut ini akan dibahas tentang apakah pendidikan itu, sehingga diperoleh pandangan yang komprehensif tentang pendidikan.

Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan, umumnya berarti daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budipekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran ("intellect") dan tubuh anak; dalam pengertian Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan *kesempurnaan hidup*, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik *sealaras dengan dunianya* (Ki Hadjar Dewantara, 1977). George F. Kneller (1967), memandang pendidikan dalam arti luas, dalam arti teknis, dalam arti hasil dan dalam arti proses :

- a. *Dalam artinya yang luas*, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran ("mind"), karakter ("character"), atau kemampuan fisik ("phisical ability") individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung seumur hidup. Kita sesungguhnya belajar dari pengalaman seluruh kehidupan kita.
- b. *Dalam arti teknis*, pendidikan adalah proses di mana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransmisi dan mentransformasi warisan budayanya, yaitu pengetahuan ("knowledge"), nilai-nilai ("values"), dan ketrampilan-ketrampilan ("skills"), dari generasi ke generasi.
- c. *Dalam arti hasil*, pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui belajar : pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan.
- d. *Dalam arti proses*, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri; dalam artian ini pendidikan sama artinya dengan perbuatan mendidik seseorang atau mendidik diri sendiri.

John Dewey (1950), dalam bukunya "Democracy and Education", mengatakan bahwa pendidikan adalah "...reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which increases ability to direct the course of subsequent experience" (rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan yang meningkatkan kecakapan mengarahkan alur pengalaman selanjutnya). Rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman, setelah adanya revisi, oleh John Dewey (1950) dinamakan pendidikan. Jadi pengalaman manusia senantiasa mengalami perkembangan, perubahan atau revisi. Dengan perkembangan, perubahan atau revisi pengalaman, orang (guru) perlu melakukan pembaharuan pendidikan, misalnya dalam arti mikro (inovasi pendidikan) yaitu tentang metode pendidikan (metode pembelajaran) yang lebih kontekstual.

Frederick Mayer (1963) dalam bukunya "Foundations of education" mengatakan bahwa "Education, I believe, demands a qualitative concept of experience. Thus, we should regard education as a process leading to the enlightenment of mankind". (Pendidikan, Saya meyakini, menuntut sebuah konsep pengalaman kualitatif. Dengan demikian, kita harus memandang pendidikan sebagai sebuah proses yang menuntun pencerahan kemanusiaan).

Dalam pendidikan, guru perlu senantiasa meningkatkan kualitas pengalamannya dengan belajar mandiri, mengikuti berbagai forum kajian pendidikan, dengan studi lanjut, agar dalam mendidik dan mengaj, dalam interaksi pendidikan, menghadirkan dalam diri peserta didik pengalaman yang berkualitas pula.

4.5 Kompetensi Sosial

Guru menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan lain, dan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Guru dalam hal ini perlu lebih menekankan aspek "leadership" ("focuses on doing the right things") yang berparadigma baru dari pada aspek manajemen ("focuses on doing things right") itu sendiri yang sering kurang "human". Menurut BARBARA L. McCOMBS & JO SUE WHISLER (1997), kompetensi sosial adalah "the ability to establish and sustain positive, caring relationships,

to maintain a sense of humor, and to communicate compassion and empathy".

4.6 Kompetensi Kultural

Kebudayaan pada umumnya adalah totalitas "way of life" yang telah berkembang melalui sejarah. Suatu kebudayaan khusus adalah bagian kehidupan total dari sekelompok orang tertentu ---- cara-cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak, sebagaimana diekspresikan dalam agama, hukum, bahasa, seni, teknologi, pengasuhan anak, dan tentu saja, pendidikan (George F. Kneller, 1971), sehingga kebudayaan itu sebagaimana kata Leslie A. White, sebagai "a symbolic, continuous, cumulative, and progressive process" (Merril & Wentworth, 1953). Guru hendaknya senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan budaya nasional pada umumnya, dan budaya sekolah khususnya yang kondusif bagi transmisi dan transformasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat bangsa dan negara. Guru-guru yang baik, kata Mayer (1963), adalah vital bagi kemajuan dan keselamatan bangsa. Guru menjadi penjaga peradaban dan pelindung kemajuan.

Gelombang globalisasi yang telah menghapuskan batas-batas ruang ditopang oleh teknologi informasi yang menghancurkan batas-batas waktu, telah mengubah tata pergaulan umat manusia. Bahkan pengertian mengenai negara-bangsa mulai berubah. Di mana-mana lahir bentuk nasionalisme baru yang dikenal sebagai etnonasionalisme atau bentuk negara "post nation state". Ada kecenderungan berkembangnya sentimen nasional beralih kepada sentimen primordial baik dalam bentuk budaya, ras, agama. Perkembangan yang baru ini tentunya memberi pengaruh terhadap sistem pendidikan yang dikenal dewasa ini (HAR. Tilaar, 2002). Sebagaimana dinyatakan oleh R. Robertson, globalisasi adalah menciutnya dunia dan intensifikasi kesadaran akan dunia sebagai keseluruhan (M. Sastrapratedja, 2001). Globalisasi merupakan proses yang dinamis dari berbagai aktor dalam sejarah manusia (HAR. Tilaar, 2003).

Menurut Anthony Giddens, globalisasi berdimensi politik, teknologi, dan budaya, dan juga ekonomi, sehingga kita perlu merestrukturisasi lembaga-lembaga yang kita miliki atau menciptakan yang baru, karena globalisasi bukan hal yang sepele dalam kehidupan kita dewasa ini. Globalisasi merupakan perubahan dalam setiap relung

kehidupan kita (HAR. Tilaar, 2002). Globalisasi adalah suatu realita yang tidak dapat dibantah dan dicegah. Persoalan kita adalah bagaimana terjun dalam arus globalisasi secara cerdas, sehingga tidak menjadi korban? Terjun ke dalam globalisasi tanpa identitas kultural yang jelas akan membuat kita larut dalam arus globalisasi, tanpa dapat turut mengarahkan arah globalisasi itu sendiri. Kita akan menjadi "kuli" belaka dari kekuatan-kekuatan besar (Muchtar Buchori, 2002).

4.7 Kompetensi Spiritual

Spiritual berkenaan dengan "*kejiwaan, rohani, batin, mental, moral*" (KBBI, 1988) yang perlu dimiliki dan didikkan oleh guru, sehingga baik guru maupun peserta didik memiliki "*good character*" ("kesalihan") yang mencakup "*moral knowing*", "*moral feeling*" dan "*moral action*" dalam kesatuan yang organis, harmonis, dan dinamis. Pendidikan (pendidikan moral), tentu saja berkait erat dengan agama (pendidikan agama). "*For the sake of education we need religion and for the sake of religion we need education : the two are fundamentally inspirable*" (John F. Gardner, 1973). Seorang salih tidak akan ditinggalkan oleh zaman dan dibiarkan oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal kebbaikannya (Ali Shariati, 1992).

4.8 Kompetensi Kemanusiaan

Pemecahan persoalan yang paling menggairahkan pada Abad ke-21, sudah lama dikatakan oleh John Naisbitt & Patricia Aburdence (1990), akan terjadi bukan karena teknologi yang spektakuler, melainkan karena suatu konsep yang berkembang mengenai apa maknanya menjadi manusia. Sampai saat ini manusia merupakan masalah yang paling rumit di alam semesta. Manusia itu sendiri yang tetap menjadi tragedi terbesar dalam abad ilmu dan teknologi (Ali Shariati, 1984). Pendidikan mengemban misi memanusiakan manusia, agar menjadi sebenar-benar manusia. Humanisasi penting karena sebagian kita masih pada tingkat peradaban yang rendah, yang dapat dilihat dalam sikap perikemanusiaan. Teknologi, penjelajah demografis serta perubahan-perubahan lain yang besar dan tiba-tiba dapat menimbulkan dehumanisasi, sehingga usaha rehumanisasi tak dapat diabaikan. Kita harus berusaha pula

agar manusia makin sempurna, lebih baik dari pada manusia kemarin (T. Jacob, 2007).

4.9 Kompetensi Antisipasional

Antisipasi mengandung, perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi, dan penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi (KBBI, 1988). Antisipasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan orientasi dan mengadakan persiapan-persiapan apa yang mungkin dilakukan seseorang serta mempertimbangkan adanya sederetan alternatif (Imam Barnadib, 1990). Hal yang penting menurut Soedjatmoko (1991) ialah kemampuan kreatif dan berinovasi terhadap tantangan baru.

5. Guru yang Baik

Guru yang baik adalah guru yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Guru senantiasa merekonstruksi pengalamannya dan memperkaya pengalamannya dengan berbagai informasi yang dapat mendukung para agar sukses dalam belajar dan sukses dalam hidupnya. Seorang guru yang baik adalah guru yang (Arthur W. Combs, 1965) :

- a. Know his subject
- b. Know much about related subject
- c. Be daptable to new knowledge
- d. Understand the process of becoming
- e. Recognize individual differences
- f. Be a good communicator
- g. Develop an inquiring mind
- h. Be available
- i. Be committed
- j. Be enthusiastic
- k. Have a sense of humor
- l. Have humility
- m. Cherish his own individuality
- n. Have convictions
- o. Be sincere and honest
- p. Act with integrity
- q. Show tolerance and understanding
- r. Be caring
- s. Have compassion
- t. Have courage
- u. Have personal security
- v. Be creative
- w. Be versatile
- x. Be willing to try
- y. Be adaptable
- z. Believe in God

Guru yang baik pada hakikatnya adalah guru yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik.

Guru dalam hal ini senantiasa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya (kompetensi akademik, kompetensi ideologik, kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kultural, kompetensi spiritual, kompetensi kemanusiaan, dan kompetensi antisipasional dalam kesatuan organis harmonis, dinamis).

Guru yang baik dapat disebut juga guru yang efektif. Jeft Jones, Mazda Jenkin & Sue Lord, 2006: 57):

- a. *professional but relaxed appearance;*
- b. *he use of exaggerated facial expression, e.g a gaze or raised eyebrows;*
- c. *Confident and relaxed non-verbal behaviours, e.g relaxed shoulders, resting on one lag, sitting down when a pupil is standing, hand loose – not clenched; Illustrative gestures to show how the class should respond;*
- d. *Kneeling or getting down to the level of the child;*
- e. *Controlling gestures;*
- f. *Smiling face;*
- g. *Self-pointing gestures;*
- h. *Calm and relaxed quality of voice for the majority of the time; and*
- i. *Resistance to pupil-instigated interruptions.*

D. Muijis & D. Reynolds (2005) dalam *Effective Teaching: Evidence and Practice*, menyimpulkan bahwa guru-guru yang efektif:

- a. *have a positive attitude;*
- b. *develop a pleasant social/psychological climate in the classroom;*
- c. *have high expectation of what pupils can achieve;*
- d. *communicate lesson clarity;*
- e. *practice affective time management;*
- f. *employ strong lesson structuring;*
- g. *use a variety of teaching methods;*
- h. *use and incorporate pupils ideas; and*
- i. *use appropriate and varied questioning (Jeft Jones, Mazda Jenkin & Sue Lord, 2006: 5):*

6. Penutup

Pada hakikatnya sekolah yang baik, sekolah yang dapat menghadapi tantangan zaman adalah sekolah yang memiliki guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Upaya menjadi lebih baik guru, senantiasa guru berusaha bekerja keras untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembangun fondamen-fondamen hari depan jenis kemanusiaan. Guru, diakui sebagai faktor kunci dalam usaha

pembaharuan pendidikan pada umumnya, dan pembaharuan sekolah pada khususnya. Namun kenyataannya, guru tetap terabaikan dalam perwujudan keberadaannya sebagai insan pendidikan. Guru lebih banyak diperlakukan sebagai objek administratif dan birokratis, sehingga keberadaannya sebagai insan pendidikan selalu terpasung dan tidak berkembang (Mohamad Surya, 2002). Pada saat yang sama guru juga terjebak pada rutinitas mengajar sehingga tidak lebih dari seorang robot dan instrumen dari target unggulan yang keliru memahami manusia. Walaupun saat ini guru jumlahnya cukup banyak, tetapi dapat dipastikan mutunya seadanya (Arief Rachman, 2002).

Guru dulu dihormati, kemudian berkurang dan cenderung disikapi sebagai pegawai biasa. Guru tidak lagi dipandang dan dipandang. Macam-macam faktor penyebabnya. Lingkungan masyarakat terbawa arus zaman, tidak lagi menempatkan guru dan jasa pengabdian dan pelayanan pada tangga yang tinggi. Masyarakat hanyut oleh semangat materialisme (Jacob Oetama, 2002). Dewasa ini selain guru dipandang sebagai “tumbal masyarakat maju” (Sindhunata, 2005), juga masyarakat mengeluh tentang “merosotnya wibawa guru dan sekolah” (Mochtar Buchori, 2005).

Pemerintah dan sekolah harus menempatkan kedudukan guru bukan sebagai “tukang” mengajar yang mendidik (hanya mengetahui bagaimana caranya proses pembelajaran yang mendidik), melainkan sebagai “insinyur” mengajar yang mendidik (mengetahui mengapa cara belajar-mengajar itu digunakan, memahami landasan filosofis, ideologis, saintifik, “*practical theories of education*”, isu nasional dan global pendidikan) memiliki otonomi akademik dan etika akademik dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga dan pembangun peradaban manusia masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syari'ati .1992. *Humanisme, Antara Islam dan Mazhab Barat*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Arief Rachman. 2002. dalam Tilaar. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta : Grasindo.
- Clark, Leonard H. 1968. *Strategies and Tactics in Secondary School Teaching*. London : The Macmillan Company.

- Boyett, Joseph & Boyett, Jimmie .1998. *The Guru Guide : The Best Ideas of Top Management Thinkers*. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Deal, Terrence & Peterson, Kent D. 2009. *Shaping School Culture*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Debdikbud R.I. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara, Ki Hadjar .(1976). "Pendidikan Nasional" dalam *Pendidikan dan pembangunan : 50 tahun Tamansiswa*. Yogyakarta : Penerbit Majelis Luhur Tamansiswa.
- Dewey, John .(1950). *Democracy and education*. New York : The Macmillan Company
- Driyarkara. 2006. Karya Lengkap Driyarkara.A. Sudiardja, dkk (ed). Yoyakarta : Penerbit Kompas, Gramedia & Kanisius.
- Drost. J. 1997. "Sain dan Humaniora". *Basis* . No. 07-08 Tahun Ke-46 Juli-Agustus 1997. Yogyakarta : Yayasan BP. Basis.
- Goodlad, John I. 1994. *Educational Renewal*. San Francisco : Jossey-bass Publishers.
- Huston, W. Robert (ed).1974. *Exploring Competency Based Education*. Berkeley : MrTutthan Publishing Company.
- Kneller, George F. 1984. *Movement of Thought in Modern Education*. New York : John Wiley & Sons.
- Marash, Colin J. 1996. *Handbook for Beginning Teachers*. Australia : Longman.
- Mayer, Frederick. 1963. *Foundations of Education*. Columbus, Ohio : E. Merrill Books, Inc.
- McCombs, Barbara L. & Whisler, Jo Sue .1997. *The Learner-Centered Classroom and School : Strategies for Increasing Student Motivation and Achievement*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Mochtar Buchori. 1991. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana
- 2005. "Erosi Wibawa Guru dan Sekolah". *Basis*, No. 07 - 08, TahunKe-54, Juli - Agustus 2005. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Mohamad Surya. 2002. "Guru : antara Harapan, Kenyataan, dan Keharusan". dalam Tilaar. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta : Grasindo.
- Morris, Van Cleve . 1963. "Education as a Field of Education" in Van Cleve Morris (ed). *Becoming An Educator*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Nelson, Jack L. : Palonsky, Stuart B. & McCarthy, Mary Rose. 2004. *Critical Issues in Education :Dialogues and Dialectics*. New York : McGraw Hill.
- Page, G. Terry & Thomas, JB & Marshall, AR. 1980. *International Dictionary of Education*. Massachusetts :The MIT Press.
- PP No. 19 Th. 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Reitman, Sanford W. 1977. *Foundations of Education for Prospectives Teachers*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Richey, Robert W. 1979. *Planning for Teaching*. New York : McGraw-Hill Book
- Santoso S. Hamijoyo. 2002. "Status dan Peran guru, Akibatnya pada Mutu Pendidikan". dalam Tilaar. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta : Grasindo.
- Senge, Peter. Et.al. 2000. *School That Learn*. London : Nicholas Brealey Publishing
- Sindhunata. 2005. "Guru : Tumbal Masyarakat Maju". *Basis*, No. 07 - 08, TahunKe-54, Juli - Agustus 2005. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- SK. Mendiknas No. 045/U/2002. *Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*
- Sergiovani, Thomas J. 1991. *The Principalship : Reflective Practice Perspective*. Boston : Allyn and Bacon.
- Soedjatmoko. 1991. *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo
- . 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- UU RI No. 14 Th. 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.

PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KEHIDUPAN MODERN

Avanti Vera Risti P., M.Pd

Program Studi PGPAUD FKIP UAD

avantivera@gmail.com

Abstrak

Pendidikan anak usia dini dalam era globalisasi semakin mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan rentang kehidupan semenjak anak lahir, semua aktivitasnya dapat dijadikan sebagai obyek yang selalu menarik untuk dikaji. Namun pada realitanya Pendidikan Anak Usia Dini masih berjalan secara tradisional, karena masih dipandang sebagai persiapan memasuki jenjang berikutnya yaitu sekolah dasar. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, dibutuhkan pendekatan yang berbeda pula agar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menghadapi era globalisasi, lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan tidak hanya memberikan layanan kependidikan saja tetapi juga memberikan layanan pengasuhan. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya kehidupan modern akibat dari globalisasi. Peran ibu, sebagai ibu rumah tangga yang berfungsi mengasuh anak bergeser menjadi pegawai, wanita karir, ataupun pengusaha. Hal tersebut juga diperkuat oleh beberapa penelitian dari para ahli yang mengungkapkan bahwa, kecerdasan tidak tetap pada waktu kelahiran. Sehingga membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Persoalan yang muncul adalah dapatkah lembaga pendidikan anak usia dini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih modern sebagai akibat dari globalisasi. Sesuai dengan tujuan pendidikan, tahun pertama kelahiran anak adalah pengembangan kepribadiannya yang dipengaruhi oleh setiap aspek kehidupan anak. Oleh karena itu, orang tua ataupun pendidik diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang memberikan rasa aman pada anak, karena berpengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian anak. Salah satunya dengan menyediakan layanan pendidikan dan pengasuhan bagi anak

Kata Kunci: Pendidikan anak usia dini, pendidikan dan pengasuhan, pengembangan kepribadian

1. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan menuju modernisasi akibat dari globalisasi merubah berbagai macam unsur kehidupan. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah pola hidup masyarakat. Dahulu peran orang tua terlihat sangat jelas perbedaannya, ayah sebagai kepala rumah tangga memiliki tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan ibu, memiliki peran mengasuh anak dirumah dan menjadi pengelola rumah tangga.

Dengan perubahan zaman menuju kearah globalisasi yang semakin modern, peran seorang ibu tidak hanya dirumah saja mengasuh dan mendidik anak. Rerjadi perubahan pola berfikir masyarakat seiring dengan perubahan pola kehidupan yang semakin modern. Kebutuhan akan pemenuhan gaya hidup, memerlukan berbagai macam penyesuaian peran setiap anggota masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah

peran ibu yang lebih kompleks. Ibu mulai ikut andil dalam proses pemenuhan kebutuhan didalam rumah. Peran yang harus dilakukan mulai bertambah yaitu menjadi wanita pekerja "*women carier*".

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, peran ibu menjadi wanita pekerja juga dipengaruhi oleh tingkat kependidikannya. Ada semacam konsekuensi atas gelar pendidikan yang diperoleh dengan menjadikan seorang wanita khususnya ibu memilih untuk menjadi wanita pekerja. Hal tersebut adalah salah satu pengaruh akan modernisasi, keinginan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya monopoli kaum laki-laki saja.

Semakin banyaknya para wanita memilih untuk ikut serta dalam perubahan modernisasi, peran seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak akan mulai tergantikan dengan figur lain. Sosok ibu yang biasa selama dua puluh empat jam menjadi pengasuh, pendidik, koki, manager keuangan, dan perawat atau dokter akan ditambah

dengan profesinya sebagai wanita karier diluar.

Menjadi ibu rumah tangga dan wanita karier bukanlah hal yang mudah, diperlukan kemampuan magerial waktu, tenaga, dan perhatian. Bagi yang memiliki dana yang lebih, peran ibu akan dibantu oleh asisten rumah tangga namun bagi rumah tangga dengan ekonomi yang pas-pasan akan memilih lembaga pendidikan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal perkembangannya.

Setiap pilihan yang dipilih, memiliki konsekuensi tersendiri. Bila memilih asisten rumah tangga, muncul kekhawatiran mengenai kompetensi yang dimilikinya. Begitu juga dengan lembaga pendidikan, dengan berbagai macam persolan yang akan ditemui. Mulai dari pendidik, fasilitas yang ditawarkan, dan biaya yang harus dikeluarkan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang ibu yang telah memilih menjadi wanita karier sebagai konsekuensinya.

Bagi lembaga pendidikan anak usia dini, dalam proses pembelajaran seorang guru tidak hanya berperan dalam hal mendidik saja, diperlukan kemampuan lain yaitu pengasuhan sebagai akibat dari kurangnya waktu yang diberikan oleh ibu dirumah. Dengan peran ganda yang harus dimiliki oleh pendidik, lembaga pendidikan juga harus memberikan sarana penunjang agar tujuan dari pembelajaran yang memberikan proses pendidikan sekaligus pengasuhan dapat dicapai.

Proses pendidikan yang menawarkan pendidikan dan pengasuhan dalam kegiatan pembelajaran tidak harus lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara *full day*. Lembaga pendidikan yang menawarkan layanan pendidikan *half day* juga bisa menyelenggarakan proses pembelajaran dengan tujuan pendidikan sekaligus pengasuhan.

Hal tersebut diperkuat oleh beberapa fakta yang menyatakan bahwa anak usia dini antara 0 – 8 tahu masih memerlukan figur seorang guru yang juga bisa memberikan kenyamanan sebagai ibu di lembaga pendidikan anak usai dini. Dengan kenyamanan yang diberikan, anak akan lebih mudah memahami proses pembelajaran meskipun tanpa ibu yang sebenarnya ada disampingnya.

Selain itu hasil penelitian para ahli teori belajar mengenai fungsi kecerdasan anak usia dini yang berkembang sangat tinggi sekitar

80% dicapai pada usia 0 – 8 tahun (sejak konsepsi – 8 tahun). Apabila anak yang memiliki ibu seorang wanita karier, pendidik adalah ibu pengganti dalam proses pengembangan kecerdasan anak tersebut dan lembaga pendidikan adalah rumah kedua anak dalam mengembangkan kepribadiannya.

Masa keemasan anak "*golden age*" yang tidak akan terjadi dua kali dalam masa perkembangannya juga dijadikan sebagai pertimbangan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. sehingga lembaga pendidikan anak usia dini tidak hanya mendidik namun juga mengembangkan kepribadian anak yang akan digunakan sampai dewasa nanti.

Persoalan tersebut harus dipikirkan dengan lebih mendalam oleh lembaga pendidikan khususnya usia dini, bukan hal mudah membuat kegiatan pembelajaran yang dapat meberikan layanan pendidikan dan pengasuhan kepda anak usia dini. Oleh karena itu, lembaga pendidikan anak usia dini harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bergerak mengikuti perubahan zaman.

2. Pembahasan

Lembaga pendidikan anak usia dini yang semakin mendapat perhatian dari masyarakat merupakan salah satu pengaruh dari perubahan kehidupan modern. Semua lapisan msayarakat mulai menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini yang sedang berada pada masa keemasannya. Batasan yang digunakan dalam mengelompokkan masa *golden age* mulai berkembang semakin luas tidak hanya mengenai pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak) tetapi batasan usai lebih ditekankan kepada tugas perkembangan yang akan dicapai anak yaitu dari lahir sampai delapan tahun, sebagaimana diungkapkan dalam George S. Morrison "*Early Childhood Education (ECE) is the education of children from birth to eight*" (Morrison, 1988:p.3).

Pada usia 0 – 8 tahun dikatakan sebagai masa keemasan "*golden age*", karena pada masa ini pertumbuhan otak anak berkembang lebih besar dibandingkan ketika dewasa nanti. Selain itu pada masa *golden age* dijadikan sebagi peletak dasar pengembangan kemampuan anak yang akan digunakan pada

masa dewasanya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bloom, pada usia tujuh belas tahun (17 tahun) seorang anak diberi tes kecerdasan dan mendapat nilai 100 (yang sering dikategorikan rata-rata). Dia mengatakan bahwa 50 % dari perkembangan kecerdasan yang dicapai itu diperoleh pada usia konsepsi sampai empat tahun (0 - 4 tahun), 30% diperoleh pada usia empat tahun sampai delapan tahun (4 - 8 tahun), dan 20% berkembang antara usia delapan dan tujuh belas tahun (8-17 tahun) (Morrison, 1988:22 - 33).

Pendidikan anak yang dilakukan sejak lahir memiliki pengaruh pada pengembangan kepribadian sebagaimana tugas utama pendidikan. Pada masa usia dini tidak diragukan lagi merupakan masa yang paling kaya. Masa ini sebaiknya digunakan oleh pendidik sebaik-baiknya, tersia-sianya masa kehidupan ini tidak akan pernah dapat dicari gantinya. Tugas pendidik adalah memanfaatkan tahun-tahun awal anak dengan kepedulian tertinggi, bukan menyia-nyiakannya.

Proses perkembangan anak usia dini paling baik melalui cara membebaskan anak untuk berkreasi sebebas-bebasnya, bukan melalui paksaan atau sengaja dibentuk. Lembaga pendidikan yang masih menggunakan gaya belajar tradisional dengan memaksa anak belajar dalam keterpaksaan tidak perlu digunakan lagi. Dengan tidak memaksa anak untuk belajar, secara tidak langsung setiap anak bisa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya.

Program pembelajaran anak usia dini, selalu menekankan akan kegiatan yang menyenangkan yaitu kegiatan bermain. Tujuan dari kegiatan bermain ini selain cara pendidik dalam memberikan materi pembelajaran, suasana menyenangkan akan menstimulus pertumbuhan otak anak agar sinaps-sinapsnya saling terkait satu dengan yang lain sehingga perkembangan anak akan maksimal.

Banyak manfaat yang didapat dari permainan yang dilakukan anak-anak. Bermain memberikan banyak keuntungan untuk anak-anak mulai dalam perkembangan secara fisik, sosial, dan intelektual.

Bagi anak usia Taman Kanak-kanak bermain merupakan cara mereka untuk mengetahui dan memahami perintah orang dewasa atau orang lain. Hal itu dikarenakan kegiatan bermain merupakan kegiatan kreatif

yang secara spontan muncul dari dalam diri anak, sehingga anak belajar mengenai kebiasaan melalui bermain tersebut.

Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada anak seharusnya mengakomodasi pendidikan dan pengasuhannya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan "full day" dengan konsep penitipan. Sekolah "half day" pun diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Kegiatan yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengasuhan yaitu pembentukan moral.

Pendidikan moral tidak hanya diajarkan sekedar melalui penyampaian informasi (pengajaran) karena pendidikan moral harus menyentuh kesadaran hati, tetapi juga pemahaman pikiran, dan tindakan untuk bertindak yang bermoral. Sesuai dengan pendapat Pestalozzi "*the language of morality could not be taught by word of mouth, it had to be taught by example. Practice not preaching, was the basis of moral education*" (M.R. Heafford, 1967:p.65). Moralitas tidak dapat diajarkan dengan kata-kata mulut, moralitas harus diajarkan melalui teladan (contoh).

Pembelajaran tentang moral baik bagi anak usia dini maupun jenjang pendidikan selanjutnya akan lebih efektif bila dilakukan dengan memberikan contoh langsung kepada anak. Pada masa ini anak lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihatnya bukan yang didengarnya.

Penanaman moral tersebut biasanya dilakukan oleh ibu sebagai individu yang paling dekat dengan anak. Peran ibu dirumah sebagai guru pertama bagi anak digantikan oleh guru disekolah. Seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang pada anak memberikan pemenuhan kebutuhan fisik untuk menjaga kelangsungan hidup menumbuhkan nilai moralitas dalam diri anak seperti perasaan mencintai, mempercayai, menghargai ibunya.

Salah satu bentuk pengembangan kepribadian anak dengan mengajarkan penggunaan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ketika guru ingin mengajarkan mengenai permintaan maaf, tolong, dan terima kasih tersebut tidak hanya memberikan melalui cerita saja. Memberikan contoh langsung kepada anak akan lebih mudah dipahami. Seorang guru bukan individu yang paling benar, tidak ada salahnya guru meminta maaf kepada anak sewaktu melakukan kesalahan. Dengan begitu anak akan merasa bahwa

meminta maaf bukan berarti hal yang memalukan.

Selain itu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu makan bersama. Dalam kisah "Toto Chan Gadis kecil di pinggir Jendela", diceritakan mengenai kegiatan makan siang bersama. Anak-anak diminta untuk membawa bekal makan yang dibuat ibunya dirumah dengan bahan dari laut dan dari gunung. Kegiatan makan bersama dilakukan di aula sekolah, sebelum makan dimulai ada salah satu anak diminta untuk bercerita apa saja. Kegiatan makan tersebut diikuti oleh semua anak dari kelas bawah sampai atas, guru, dan kepala sekolah. sehingga tercipta suasana makan bersama dengan keluarga.

Dalam kegiatan makan bersama tersebut anak belajar menghargai antar teman dengan kegiatan mendengarkan cerita dan menghargai makanan yang dibawa oleh masing-masing anak meskipun berbeda-beda. Selain itu Secara tidak langsung anak akan belajar mengenai lingkungan di darat dan dilaut. Untuk ibunya, dengan membawakan bekal kepada anak dapat menjalin ikatan yang lebih dalam dengan pemberian perhatian didalam makanan tersebut, anak pun tetap terpenuhi kebutuhan fisiknya.

Terpenuhi kebutuhan fisik anak memiliki peran dalam proses perkembangannya. Pendidikan fisik memiliki arti penting bagi pendidikan intelektual dan pendidikan moral. Melupakan pendidikan fisik akan mempengaruhi pendidikan moral dan intelektual anak. Anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan fisik akan mengalami gangguan terhadap perkembangan intelektualnya dan juga moralitasnya.

Pestalozzi mengatakan, "Indeed the moral education of child started from the moment of his birth and centered around his relationship with his mother. At first a feeling of trust was created in him merely by the satisfaction of his physical needs." Pendidikan moral dari seorang anak di mulai dari waktu kelahirannya dan terpusat sekitar hubungannya dengan ibunya. Munculnya perasaan percaya (trust) dibentuk dalam dirinya hanya oleh pemuasan dari kebutuhan fisiknya.

Sehingga membawakan bekal kepada anak, meskipun terlihat sederhana, ternyata memiliki tujuan yang sangat besar. Sedangkan tujuan makan bersama yang didahului dengan kegiatan bercerita akan menumbuhkan rasa percaya diri.

Kegiatan bercerita sebelum makan, akan menstimulus anak untuk berkembang dalam aktualisasi dirinya dengan mengungkapkan bahasanya lewat bercerita. Anak akan tumbuh rasa percaya dalam dirinya karena kegiatan bercerita tersebut tidak memaksakan akan cerita tertentu, anak bebas bercerita dengan ekspresi apapun.

Menciptakan suasana rumah didalam sebuah sekolah akan membuat anak merasa nyaman, baik dengan sekolah/lembaga pendidikan, guru, dan teman-temannya. Anak dengan orang tua yang sibuk bekerja terutama ibu tidak akan kehilangan suasana rumah ketika tidak ada ibu didekatnya. Sehingga tercipta sekolah/lembaga pendidikan yang menyenangkan bagi anak. guru tidak sungkan untuk memberikan afeksi kepada anak sesuai dengan kebutuhannya, dan anak pun merasa nyaman dengan afeksi yang diberikan kepadanya karena anak merasa nyaman dengan guru yang seperti ibunya.

Pengasuhan yang dilakukan tidak selalu dengan kegiatan yang identik dengan memberikan fasilitas anak dapat makan, tidur, atau mandi yang sering ditawarkan oleh lembaga pendidikan dengan layanan penitipan. Kegiatan pengasuhan dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan layanan *half day* yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan kepada kemandirian anak.

Kemandirian tidak hanya selalu diartikan anak mampu makan atau mandi sendiri. Kemandirian anak lebih menekankan kepada kemampuan anak untuk mampu mengetahui kebutuhannya dirinya anak juga peka dengan lingkungan sekitarnya. Melatih kemandirian anak dapat dimulai dengan kegiatan sederhana dan menyesuaikan tahap perkembangannya.

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dalam melatih kemandirian pada anak di usia *Toddler* bila ditinjau dari pendapat Erik H.Erikson, kemandirian bisa dimulai dengan melatih anak untuk *toilet training*. Melatih anak untuk *toilet training*, bertujuan untuk membangun kemandirian anak dengan mengetahui kapan anak perlu untuk mengontrol buang air besar/kecil. Dengan mengetahui apa kapan anak harus mengatakan untuk buang air kecil atau besar, merupakan salah satu indikator kemandirian anak.

Toilet training, seharusnya dilatih oleh ibu sebagai bentuk pengasuhan kepada anak. Pada saat melatih *toilet training* ajarkan pula

mengenai *sex education* pada anak sesuai dengan tahapannya. Semakin dini anak mengetahui mengenai *sex education* maka akan semakin kecil hal yang akan terjadi terkait dengan peristiwa pelecehan atau yang lainnya.

Peran ibu dalam melatih *toilet training* kepada anak akan digantikan oleh pendidik di lembaga pendidikan/sekolah anak usia dini. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya lembaga pendidikan/sekolah yang menawarkan program mulai dari 2 tahun atau *Toddler*, sehingga anak sudah sejak kecil sudah mengenal pendidikanya dibandingkan dengan gurunya karena ibunya lebih banyak menggunakan waktu untuk bekerja.

Selain kegiatan *toilet training*, anak juga berlatih untuk melakukan tanggung jawabnya sendiri dengan merapikan mainan, memakai sepatu dan kaos kaki sendiri, serta biarkan anak bebas berkreasi dengan lingkungannya. Membebaskan anak untuk melakukan hal yang disukainya akan menumbuhkan kreativitas. Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu yang membebaskan anak bermain di rumah bersama dengan teman-temannya.

Program pembelajarannya yang bersifat pengasuhan, lebih cenderung merupakan program pembelajaran yang bertujuan mengembangkan ketrampilan dasar yang dapat anak gunakan di dewasa nantinya. seperti yang diungkapkan oleh Montessori (1995:13), bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengenai penguasaan ilmu pengetahuan. Fokus pendidikan haruslah berupa pelestarian (upaya memepertahankan) kehidupan.

Proses pembelajaran yang menekankan anak harus menguasai ilmu pengetahuan ini dan itu memang baik. Namun akan lebih baik bila tujuan utama penguasaan bagaimana anak mampu bertahan hidup yang biasa diajarkan oleh orang tua terutama seorang ibu. Dengan bergesernya peran ibu yang tidak hanya mengasuh anak di rumah, maka pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini harus mampu memberikan layanan program tersebut.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengasuhan pada usia dini yang membutuhkan seorang pendidik dalam menerapkan suatu program pembelajaran adalah kontinuitas, konsisten, dan adil. Prinsip tersebut juga harus diterapkan didalam rumah oleh orang tua meskipun orang tua sibuk bekerja.

Kontinuitas, diterapkan dengan memberikan pembelajaran di jenjang sebelumnya kemudian dilanjutkan jenjang selanjutnya. Kontinuitas dapat diartikan dengan pembelajaran pengasuhan yang telah dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan dibuat dengan tahapan yang berbeda dan semakin tinggi capaian yang harus dikuasai. Contoh sederhana yang dapat dilakukan yaitu, disekolah atau lembaga pendidikan ketika makan bersama anak dilatih untuk makan sendiri di kelas Kelompok Bermain maka di kelas TK nya anak diharapkan mampu mengambil makanan baik untuk dirinya maupun temannya.

Konsisten, proses pembelajaran yang dilakukan baik di rumah atau sekolah/lembaga pendidikan dilakukan secara sama. Bila anak disekolah atau lembaga pendidikan diminta untuk memakai sepatu sendiri maka di rumah hal tersebut juga harus dilakukan. Tidak ada alasan dari orang tua karena terlalu lama, takut salah, atau menganggap anak belum bisa sebagai cara agar orang tua yang melakukannya.

Adil, dalam hal pembelajaran ditekankan pada konsekuensi akan apa yang akan didapatkan bila melakukan kesalahan. Lebih tepatnya anak akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang dilakukan baik hukuman atau hadiah. Bila memberi hukuman sebaiknya tidak merusak kepribadiannya, dengan kata-kata atau tindakan. Demikian juga dengan hadiah tidak selalu dengan materi bisa dengan pujian. Kesemuanya diberikan secara adil sesuai dengan yang dibutuhkan anak.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan atau sekolah bagi anak usia dini harus lebih jeli dalam melaksanakan program pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mendidik saja namun juga mengasuh anak selayaknya anak sendiri. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak dan pendidik adalah ibu keduanya.

3. Simpulan

Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan menuju modernisasi akibat dari globalisasi merubah berbagai macam unsur kehidupan. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah pola hidup masyarakat. Salah satu yang mengalami perubahan adalah perubahan peran ibu yang dulu identik dengan mengasuh anak. Dengan

adanya perubahan tersebut, lembaga pendidikan harus lebih menyesuaikan dengan keadaan, tujuan pembelajaran tidak hanya menitik beratkan akan pengetahuan namun juga pengasuhan. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dengan segala suasana rumah dan pendidik menjadi ibu kedua bagi anak dengan kasih sayangnya. Sehingga anak tetap memperoleh hal yang dibutuhkan sesuai dengan kodratnya yaitu diasuh oleh ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Heafford, M.R. (1967). *Pestalozzi, His Thought and It's Relevance Today*. London: Methuen&Co Ltd.
- Knight, George R. (1982). *Issue and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan: Andrew Univercity Press.
- Kuntoro, Sodik A. & Vera, Avanti (2013). *Pengembangan Kurikulum Paud Dalam Menghadapi Kehidupan Modern*. FKIP: UAD.
- Kostelnik, Marjorie J. Soderman, Anne K. & Whiren, Alice Phipps. 1999. *Developmentally Appropriate Curriculum. Best Practices in Early Childhood Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Montessori, Maria. 2008. *The Absorbent Mind*. (Terjemahan Dariyanto). New York: Henry Hold and Company. (Buku Asli diterbitkan tahun 1995).
- Morrison, George S. (1988). *Education and Development of Infants, Toddlers, and Preschoolers*. London: Scott, Foresman, and Company.

PROFIL, PERANAN, DAN TANTANGAN GURU ABAD 21

Cut Zahri Harun

Dosen: Jurusan Ilmu Pendidikan Fkip Unsyiah Banda Aceh

Abstrak

Peranan sumber daya manusia berkualitas sangat penting artinya bagi pembangunan, termasuk pembangunan bidang pendidikan. **Guru** merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Abad 21 sering di sebut eraglobalissi. Globalisasi merupakan bagian dari perkembangan yang lebih luas terkait antara satu sama lain dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan guru. Globalisasi merupakan transformasi sosial budaya dalam lingkup global. Memasuki perubahan era, akan mengalami banyak tantangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pembukaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5, yaitu: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, di masa depan, dengan **tantangan** yang begitu kompleks, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, perubahan peraturan dan kurikulum yang tak dapat dielakkan, jelas membutuhkan guru-guru yang profesional dan berkualitas di lapangan. Sehingga, undang-undang mewajibkan guru memiliki empat kompetensi, salah satu diantaranya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini, harus mampu memilah dan memilih dalam melaksanakan tugas di sekolah, tanpa kompetensi tersebut, dapat dipastikan bahwa guru akan menghadapi kesulitan dalam membentuk kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi kompetensi guru dengan menetapkan landasan yuridis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan **kompetensi** sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Peranan, Tantangan, Kurikulum, dan Kompetensi Guru

1. Pendahuluan

Memasuki eraglobalisasi, masyarakat abad 21 menuntut profesionalisme dalam bekerja di berbagai bidang. Sehubungan dengan istilah profesional, Saud (2008: 7) mengemukakan bahwa: Profesional menunjukkan pada dua hal: (1) penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, (2) menunjukkan kepada sikap dan komitmen anggota profesi.

Dalam upaya menjadi guru profesional, pemerintah telah melakukan berbagai usaha peningkatan kualitas guru, antara lain: melalui pelatihan, seminar, lokakarya, pendidikan formal (S1), dan paling nyata adalah sertifikasi guru. Upaya pemerintah tersebut, hendaknya mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Soetjipto dan Kosasi (2009:37) mengemukakan bahwa: Jabatan guru merupakan jabatan profesional, pemegang jabatan tersebut, harus memenuhi kualifikasi tertentu. Dengan demikian, maka pemerintah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik D IV atau S1.

Pasal 8 UUGD menetapkan kompetensi guru meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Keperibadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Kompetensi profesional adalah kompetensi primadona yang wajib dimiliki oleh setiap guru.

2. Pembahasan

2.1 Profil Guru

Berbicara tentang guru, Harun (2009: 31) mengemukakan bahwa: masalah guru merupakan topik yang tidak habis-habisnya di bahas dalam berbagai pertemuan atau seminar. Pekerjaan guru adalah suatu profesi yang memerlukan penanganan profesional. Hal ini dilakukan melalui sertifikasi guru dalam jabatan.

Genderang sertifikasi guru sudah ditabuh sejak tahun 2006, satu tahun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen. Pengakuan kedudukan guru sebagai

tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Seorang guru, harus menampilkan profilnya untuk dapat dicintai oleh peserta didiknya. Beberapa pakar memberi pendapat tentang profil guru ini, antara lain: Daniel Gomiua (Khalifah 2009: 36) mengemukakan bahwa: "Guru yang dicintai adalah sosok yang menerima dengan tulus dan bisa memahami murid-muridnya dan berinteraksi baik dengan mereka".

Bagaimanakah cara agar seorang guru dapat dicintai oleh murid-muridnya. Hal ini, tentunya harus nampak pada profil guru itu, misalnya: ia dapat menyenangkan murid-muridnya.

2.2 Peranan Guru dari Masa ke Masa

Kunandar (2010: 31) menguraikan bahwa peran guru dibagi dalam dua masa, yaitu: (1) Masa Penjajahan, dan (2) Masa Kemerdekaan.

Berikut uraiannya.

2.2.1 Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia tercermin dan terpatni pada guru di masa penjajahan.

2.2.2 Masa Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadikan peran guru sangat besar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan semangat proklamasi, para guru bersepakat menyelenggarakan Kongres Guru Inonesia yang berlangsung pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta.

2.3 Guru sebagai Komponen Utama dalam Sistem Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi bangsa, agar mampu berkiprah dalam tataran global. Hal ini, telah lama dikemukakan oleh Hanson dan Brembeck (1966: 21) yang menyebutkan bahwa pendidikan itu sebagai "*investment in people*", untuk mengembangkan individu dalam masyarakat dan di sisi lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

pendidikan perlu dimantapkan. Sehubungan dengan masalah guru ini, Harun (2012: 69) mengatakan bahwa: pengajar dengan kata lain disebut guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pemantapan pendidikan dilakukan melalui pemantapan guru, karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Untuk membuat pendidikan dan guru lebih baik, diperlukan perjuangan sebagai pihak.

Agar guru, betul-betul menjadi komponen yang utama dalam sistem pendidikan, Hadiyanto (2004: 31), mengemukakan empat macam perjuangan untuk meningkatkan harkat dan martabat guru, yaitu: (a) Perjuangan Politik, (b) Perjuangan Ekonomi; (c) Perjuangan Sosial; dan (d) Perjuangan Budaya".

Berikut penjelasannya:

2.3.1 Perjuangan Politik

Perjuangan politik dalam rangka perbaikan kualitas dan nasib guru harus dilakukan melalui perjuangan mengubah *image* masyarakat tentang guru melalui jalur pemerintah. Untuk Indonesia saat sekarang, perjuangan politik merupakan perjuangan yang sangat diutamakan, karena dalam situasi politik yang sering tidak menentu, dimana setiap golongan, partai politik lebih mementingkan kelompoknya. Kalau tidak ada perjuangan politik yang memperhatikan nasib guru, maka tidak akan ada perubahan.

Hal ini terlihat, perjuangan untuk menelurkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehubungan dengan masalah ini, Harun (2011:1) mengemukakan bahwa: Sebuah Undang-Undang lahir dari perjuangan panjang ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu Undang-Undang yang sangat menggemparkan saat itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2.3.2 Perjuangan Ekonomi

Perjuangan untuk meningkatkan ekonomi guru harus dilakukan untuk membuat agar guru pada saat mengajar tidak lagi perlu memikirkan apakah keluarganya kekurangan pangan, sandang, dan papan. Hal ini telah direalisasikan melalui sertifikasi guru dengan penambahan satu kali gaji pokok bagi guru yang telah disertifikasi.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 ayat (1) bahwa: Guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sehubungan dengan masalah ini, Trianto dan Titik Triwulan Tutik (2007:11) mengemukakan bahwa: "Sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas".

Sertifikasi, secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Dengan diberi sertifikat atau disertifikasi guru, maka dalam Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendidik berhak memperoleh: Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dengan demikian, guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan mashlahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar profesi.

Salah satu tunjangan dalam upaya meningkatkan ekonomi guru adalah tunjangan profesi, yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

2.3.3 Perjuangan Sosial

Perjuangan sosial, berarti mengembalikan citra guru yang status sosialnya pernah jaya. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di dalam masyarakat, apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat sekelilingnya.

Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, dan dapat memberi arahan dan dorongan kepada peserta didik.

2.3.4 Perjuangan Budaya

Perbaikan kualitas dan nasib guru dapat dilakukan melalui jalur budaya, dan perjuangan harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Pada masa lalu, guru sangat dihormati. Oleh karena itu, pada masa kini, guru harus dapat membuat dirinya dihormati, dengan bekerja secara profesional.

2.4 Guru dan Tatangan Abad 21

2.4.1 Globalisasi dan Iptek

Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang populer dengan istilah tripusat pendidikan. Walaupun dalam kenyataan, seolah-olah pendidikan di sekolah hanya tanggung jawab guru semata. Hal ini, nampak jelas, jika seorang peserta didik berhasil, orang tua akan mengatakan "anak siapa dulu", akan tetapi jika tidak berhasil, orang akan selalu menyalah guru. Miris memang.

Abad virtual adalah abad yang penuh dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan tantangan berat bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya, ditambah lagi maraknya pembelaan Hak Azazi Manusia (HAM) anak. Sehingga, membuat keterkungkungan guru dalam menjalankan tugasnya.

Abad 21 adalah eraglobalisasi, sehingga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, tantangan makin besar bagi guru-guru dalam mengikuti perkembangan tersebut. Pada setiap lembaga pendidikan, baik jenjang Pendidikan dasar, maupun Jenjang Pendidikan Menengah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), guru harus mempunyai kualifikasi S1.

Permasalahan tersebut, ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D IV) atau sarjana (S1); (2) Latar belakang Pendidikan Tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (c) sertifikat profesi guru.

Selama masa peralihan ini, tentunya merupakan suatu tantangan baru bagi lembaga pendidikan. Hal ini, telah di apresiasi oleh Pemerintah, dengan mengadakan pendidikan kualifikasi, yaitu guru-guru yang belum mempunyai ijazah S1 dapat melanjutkan studinya kembali, sesuai dengan bidang masing-masing.

2.4.2 Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkat Kreditnya

Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 yang diberlakukan Tanggal 1 Januari 2013 dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa "Guru adalah pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Guru mempunyai hak untuk kenaikan pangkat, apabila memenuhi angka kredit yang dibutuhkan sesuai dengan kepangkatannya. Jika pada masa sebelum dikeluarkan Permenpan tsb, kepada guru baru diwajibkan membuat karya ilmiah untuk kenaikan dari golongan golongan ruang IV a ke IV b, maka mulai Januari 2013, guru sejak berpangkat III b, sudah harus mempunyai karya ilmiah. Urutannya sesuai dengan usulan kepangkatannya.

Permasalahan ini, akan menjadi tantangan bagi guru-guru yang ingin mengajukan kenaikan golongan, karena tidak mudah bagi guru untuk memperoleh angka kredit dari karya ilmiah yang dimaksud. Untuk kenaikan golongan ruang dari IV a ke IV b sudah bertumpuk-tumpuk, sehingga bertahun-tahun setelah pengusulan, belum keluar hasil pemeriksaan kepangkatannya. Bahkan guru yang golongan ruang IV a telah cukup banyak yang sudah pesimis untuk bergerak ke golongan ruang lebih tinggi.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan Latihan Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan peserta sertifikasi.

Sejak tahun 2012 atau tahun keenam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, dilaksanakan kebijakan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Uji Kompetensi Awal (UKA), sebagai

persyaratan bagi guru yang sertifikasinya mengikuti pola PLPG.

Dalam Rambu-rambu PLPG tahun 2013 di sebutkan bahwa "Peserta PLPG adalah guru yang sudah lulus UKA, baik yang berasal dari guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah.

Tantangan terberat bagi guru adalah susahnyanya untuk lulus UKA. Melalui PLPG yang hanya 10 hari, disitulah penentuan kelulusan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Dalam kenyataan di lapangan, masih banyak guru-guru senior tidak lulus UKA, bahkan yang telah lulus UKA, akan tetapi berulang kali mengikuti PLPG juga tidak bisa lulus.

Kurikulum 2013

Istilah kurikulum sudah dikenal sejak tahun 1820. Hal ini sebagaimana diungkapkan Alkin (Hidayat 2011: 1), bahwa: Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun aritmatika sebagai ringkasan belajar yang didalamnya mencakup: geometri, astronomi, dan solid geometri.

Berulang kali telah terjadi perubahan kurikulum di Indonesia, terakhir sampai kepada Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan, namun dalam penerapannya tidak seperti membalik telapak tangan, perlu sosialisasi yang matang, jika tidak sulit rasanya untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Ketidaksiapan SDM dalam hal ini guru yang bergerak langsung di bidang pendidikan, merupakan tantangan terberat dalam penerapan kurikulum 2013 ini.

3. Simpulan

Guru merupakan teladan bagi peserta didik, oleh karena itu, harkat dan martabat guru perlu dijaga. Dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang guru tingkat satuan pendidikan wajib memiliki ijazah D IV atau S1, maka pemerintah mengupayakan program S1 bagi guru dalam jabatan. Guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu: pedagogik, kepribadian, social, dan profesional. Dalam

menjalankan tugas, guru menghadapi banyak tantangan, antara lain: Iptek, Peraturan-peraturan, dan Kurikulum yang sering berganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2013. Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG. Jakarta. Kemdikbud
- Khalifah, Mahmud dan Usamah Quthub. 2009. Menjadi Guru yang Dirindu: Bagaimana menjadi Guru yang Memikat dan Profesional. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Hadiyanto. 2004. Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hanson, John W. dan Cole S. Brembeck. 1966. *Educational and the Development of Nations*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Harun, Cut Zahri. 2009. *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Yogyakarta. Pena Persada.
- Harun, Cut Zahri. 2011. Sertifikasi Guru dalam Penerapan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jakarta: Jurnal Dikmen.
- Harun, Cut Zahri, 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pena Persada.
- Hidayat, Rakhmat. 2011. Pengantar Sosiologi Kurikulum. Jakarta. PT. Grafindo Perkasa.
- Kunandar, 2010. *Guru Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saud, Udin Syaefudin. 2008. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Roneka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: CV Ekojaya.
- Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: CV Tamita Utama.

DUNIA PENDIDIKAN DI ABAD KE 21 PERLU GURU PROFESIONAL

E. Handayani Tyas

Dosen FKIP UKI

tyasyes@gmail.com

Abstrak

Abad 21 dikenal sebagai abad informasi. Manusia hidup tidak cukup hanya dengan makan (makanan jasmani), melainkan informasi juga merupakan salah satu asupan yang harus dikonsumsi setiap manusia. Dunia pendidikan adalah urat nadi kemajuan bangsa dan negara. Apabila pendidikan ada di tangan pendidik yang tidak profesional, dapat dibayangkan kehancuran sudah pasti di depan mata. Tuntutan profesionalitas seorang guru dalam menjalankan tugasnya mutlak diperlukan, sebab sekali guru salah mengajar, dampaknya akan menghancurkan beberapa generasi ke depan. Begitu strategis dan vitalnya peran guru di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa yang tidak ingin tertinggal di kancah percaturan dunia yang serba cepat ini. Arah tujuan pendidikan harus solid, sebab jika tidak demikian pasti akan menemui kesulitan. Nantinya pendidikan tidak hanya berputar pada arena lokal saja, melainkan pendidikan harus mampu menjawab tantangan global. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya harus merupakan kawah candradimuka yang mempunyai misi penting untuk mengentaskan peserta didiknya menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang berhasil tentu tidak lepas dari tangan-tangan piawai para pendidik yang profesional. Pendidik dan peserta didik ibarat dua sumpit yang bekerja bersama-sama dan bersinergi (*two chopstick*). Keduanya harus sama-sama berkompeten dalam hal teknologi khususnya teknologi informasi, mampu berpikir menerobos (*think out of the box*), kreatif dan inovatif, serta mampu mengemas pembelajaran yang menyenangkan (PAIKEM). Indonesia harus bertindak cepat dengan mendidik dan melatih guru-gurunya menjadi profesional untuk menjawab tantangan abad 21.

Kata kunci: Guru, Profesional, Pendidikan, Abad ke 21.

1. Pendahuluan

Usaha peningkatan kualitas tidak pernah kenal kata selesai (*continous improvement*) sangat perlu, apalagi di dunia pendidikan. Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bermutu salah satu kuncinya adalah bahwa profesi guru menuntut keprofesionalan. Oleh karenanya jabatan guru merupakan jabatan profesional, yang penyandangannya harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Sosok guru yang sering dikenal dengan "*digugu lan ditiru*" (bahasa Jawa), benar-benar harus merupakan sosok yang dapat dipercaya dan diteladani. Ditinjau dari asal katanya GU, dimaknai gelap dan RU, dimaknai meniadakan (bahasa Sanskerta), jelas mengandung arti bahwa guru yang profesional diharapkan mampu meniadakan kegelapan/ketidaktahuan.

Peserta didik yang semula tidak tahu, dibuatnya menjadi tahu; yang tidak bisa, dibuatnya menjadi bisa dan bagi yang sudah bisa dibuatnya menjadi lebih bisa/mampu. Terjadinya suatu perubahan, mutlak diperlu-

kan, terutama perubahan yang tidak hanya menyangkut ranah kognitif melainkan ranah afektif itu sangat penting di samping juga ranah psikomotorik.

Seorang guru hendaknya mampu mengasah dan mengasuh ke tiga ranah tersebut secara totalitas (100%). Memang seorang guru profesional dituntut untuk mumpuni dan sanggup bekerja "dua puluh empat" jam dalam sehari, artinya segenap jiwa raganya mencerminkan kesiapsediaan mengajar dan mendidik peserta didiknya sesuai jabatan yang disandangnya.

Untuk itu guru harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terus menerus. Siap belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), sehingga ia dapat menjawab tantangan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Setiap guru harus siap "ditajamkan", dikembangkan dan dimuktahirkan, menjadi agen perubahan (*agent of change*).

Kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru harus direncanakan dengan matang, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang

dikehendaki. Kata “siap” dalam segala hal, baik fisik terlebih psykhis harus dipunyai seorang guru mengingat ia menghadapi berbagai perangai anak manusia yang pastinya unik dan menantang.

Dalam menghadapi tantangan itu, maka berikut akan dibahas bermacam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yakni: Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Ke empat kompetensi dimaksud hendaknya melekat pada diri setiap guru, sehingga ia dapat mengemban tugas jabatannya dengan profesional dan sanggup bertanding di kancah global.

2. Pembahasan

Seorang pendidik profesional sanggup memberi perhatian kepada peserta didiknya tentang bagaimana cara belajar (*learning how to learn*), bukan pada untuk apa belajar? Karena setiap peserta didik selalu butuh tahu bagaimana cara belajar dan seorang pendidik profesional tahu bagaimana kiat belajar yang efektif. Memang antara pendidik dan peserta didik dituntut untuk dapat bekerjasama/bersinergi dalam mengharungi proses belajar mengajar.

Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas, paling tidak ada empat kelompok besar ciri-ciri guru yang efektif, namun berikut penulis sajikan ada enam yaitu:

Pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, yang kemudian dapat dirinci lagi menjadi (1) memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada peserta didik, dan ketulusan; (2) memiliki hubungan baik dengan setiap peserta didiknya; (3) mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan peserta didiknya secara tulus; (4) menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar dan atau mendidik; (5) mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerja sama dan kohesivitas dalam dan antarkelompok peserta didik; (6) mampu melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran; (7) mampu mendengarkan peserta didik dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi; (8) mampu meminimalkan friksi-friksi yang sangat mungkin terjadi di kelas.

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, yang

meliputi: (1) memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani peserta didik yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran; (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik.

Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), yang terdiri dari: (1) mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon peserta didik; (2) mampu memberikan respons yang bersifat membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar (*slow learner*); (3) mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan; (4) mampu memberikan bantuan profesional kepada peserta didiknya yang memerlukan.

Keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, terdiri dari: (1) mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; (2) mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran; (3) mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan kekinian.

Kelima, pendidik profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam menyampaikannya. Memiliki keahlian yang meliputi bidang teori dan praktek keguruan, sehingga ia mampu membelajarkan peserta didiknya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik dan benar.

Keenam, bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdianannya kepada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga dengan senang dan sukacita ia melaksanakan tugas ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sesuai bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Mengingat peran dan fungsi guru yang sangat strategis dalam dunia pendidikan, maka agar ia tidak tertinggal oleh kemajuan arus globalisasi di abad ke 21, setiap guru perlu dibekali dengan pengembangan model-model pembelajaran yang *up to date*, akurat, faktual dan kontekstual, sehingga membuat pembelajaran semakin menyenangkan (*joyful learning*). Pendidik dan peserta didik semakin

bergairah dalam belajar/menuntut ilmu, yang kelak pasti sangat berguna dalam kehidupannya.

Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh setiap guru profesional, antara lain: Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Model-Model Pembelajaran, Model-Model Desain Pembelajaran, Model Pembelajaran Kontekstual (CTL), Model Pembelajaran Kooperatif, Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Model Pembelajaran Tematik, Model Pembelajaran Berbasis Komputer, Model Pembelajaran PAIKEM, Model Pembelajaran Berbasis Web, Model Pembelajaran Mandiri, dan Model *Lesson Study*.

Dengan menggunakan berbagai teknik dan metode pembelajaran yang variatif membuat peserta didik merasa bahwa sekolah itu penting, belajar itu sangat besar manfaatnya guna membekali dirinya untuk mandiri di kemudian hari. Semua kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, karena tugas guru bukanlah semata-mata mengajar (*teacher centered*) apalagi menggurui dan menganggap dirinya yang paling tahu dan peserta didiknya adalah sosok yang serba tidak tahu, tetapi lebih pada membelajarkan peserta didiknya (*student centered*).

Setiap peserta didik adalah subyek didik, ia bukan obyek yang dapat diperlakukan se-enak gurunya, ia memerlukan bimbingan profesional seorang guru. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu/masing-masing peserta didik. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan pada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman belajar yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang ada di sekitar peserta didik.

Sedangkan peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan peserta didik secara optimal. Ada tiga bidang layanan guru profesional, yakni:

Pertama, layanan instruksional yang menuntut setiap guru untuk menguasai isi atau materi bidang studi yang diajarkan serta wawasan yang berhubungan dengan materi itu, kemampuan mengemas materi sesuai

dengan latar perkembangan dan tujuan pendidikan, serta menyajikannya sedemikian rupa sehingga merangsang peserta didik untuk menguasai dan mengembangkan materi itu dengan menggunakan kreativitasnya.

Kedua, layanan administrasi yang berhubungan dengan membantu setiap peserta didik dalam mengatasi masalah dalam belajar pada khususnya, dan masalah-masalah pribadi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. proses belajar peserta didik di kelas sangat erat kaitannya dengan berbagai masalah di luar kelas yang seringkali bersifat non-akademik, misalnya masalah yang dihadapi peserta didik dalam lingkungan kehidupannya sehingga perlu dibantu pemecahannya melalui program bimbingan dan konseling.

Ketiga, layanan bantuan akademik-sosial-pribadi yang setiap guru harus pahami di samping kedua layanan dimaksud di atas. Guru harus memahami tentang manajemen sekolah demi kelancaran tugas-tugasnya sebagai guru, ia juga harus memahami bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan etika jabatannya, dan bagaimana ia bersikap terhadap tugas mengajar dan atau mendidik, serta dengan personalia pendidikan dan orang-orang di luarnya yang ikut menentukan keberhasilan dalam mengemban tugasnya.

Subyek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karenanya, pendidikan harus dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Pendidikan dilakukan secara intensional, yaitu secara sadar, sengaja dan berencana yang bersifat normatif atau diikat dengan norma-norma dan nilai-nilai yang universal, nasional, lokal yang merupakan acuan pendidik, dan inti pendidikan terjadi dalam prosesnya yaitu situasi interaktif yang menghasilkan peserta didik tumbuhkebang ke arah yang dikehendaki.

Hadirnya teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan, karena sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan dengan misi instrumental. Untuk menjawab masalah yang dihadapi dunia pendidikan khususnya di Indonesia, maka salah satu solusinya adalah membekali para pendidik sebagai tenaga-tenaga profesional (guru profesional) yang benar-benar memahami, menghayati dan dapat menerapkan keahliannya, sehingga di era globalisasi ini Indonesia

mampu menempatkan dirinya sejajar dengan negara-negara lain yang sudah maju bidang pendidikannya.

Berikut adalah kompetensi yang harus dimiliki setiap guru Indonesia, yang meliputi: (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) Kompetensi Sosial, (4) Kompetensi Profesional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Kompetensi Pedagogik,

Merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perencanaan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Evaluasi hasil belajar
- g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan kemampuan mengelola peserta didik di bidang pedagogik ada tujuh kemampuan yang tercakup di dalamnya yaitu:

- a. Mengetahui karakteristik peserta didik
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c. Melakukan pengembangan kurikulum
- d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik
- e. Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik
- f. Menjalani komunikasi dengan peserta didik
- g. Melakukan penilaian dan evaluasi

Adapun Sub Kompetensi Pedagogik adalah:

- a. Memahami peserta didik secara mendalam, yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

- c. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

2.2 Kompetensi Kepribadian,

Adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sosok yang benar-benar dapat dipercaya dan diteladani bagi setiap peserta didiknya. Oleh karena itu ada beberapa Sub Kompetensi dalam Kompetensi Kepribadian ini, meliputi:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma
- b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru
- c. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak
- d. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani

- e. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang dapat diteladani peserta didik.

2.3 Kompetensi Sosial,

Perlunya dimiliki Kompetensi Sosial bagi guru, karena setiap guru diwajibkan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat bergaul secara efektif dengan siapa saja, teristimewa kepada peserta didiknya, juga kepada tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus mempunyai kecerdasan interpersonal (*interpersonal smart*) sebagaimana Howard Gardner dalam teorinya *The Seven Smart*, serta semakin berkembangnya kecerdasan-kecerdasan yang lain sehingga menjadi *Multiple Smart* atau kecerdasan jamak. Dalam berpikir dan bertindak, guru harus mempedomani Kode Etik Guru dan Dosen, yang meliputi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari.

2.4 Kompetensi Profesional

Adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Adapun Sub Kompetensi dalam Kompetensi Profesional adalah:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang meliputi memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menguasai struktur dan metode keilmuan yang meliputi penguasaan langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi.

Setidaknya keempat kompetensi dimaksud di atas wajib dimiliki oleh setiap guru yang kepadanya disebut sebagai pemangku jabatan profesional. Para guru di Indonesia menyadari bahwa jabatan guru

adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai IPTEKS dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

3. Simpulan

Menjadi guru profesional membutuhkan komitmen dan motivasi, serta sikap yang terpuji untuk dapat melayani peserta didik yang memerlukan perhatian, sentuhan kasih dan iklim belajar yang menyenangkan. Di abad ke 21, di usianya yang sudah 68 tahun merdeka, Indonesia benar-benar sangat mendesak (*urgent*) memiliki guru-guru yang “mempunyai hati dan keterpanggilan jiwa” untuk mengemban profesinya sebagai guru yang profesional.

Sosok guru di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus siap menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong education*) dan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas peserta didik, memotivasi, menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Luapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak, kemajuan dan perkembangan yang dialami masyarakat yang sudah *well educated*, serta aspirasi nasional dalam kemajuan bangsa dan umat manusia di lain pihak, membawa konsekuensi yang semakin tidak mudah dan kompleks bagi pelaksana dalam sektor pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya.

Pendidikan yang baik dan benar, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, mengharuskan adanya pendidik yang profesional.

Akhirnya, benarlah rumusan definisi profesi sebagaimana Kamus Webster, 1989, bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, artinya, jabatan profesional tidak bisa

dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut, melainkan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk bidang yang diembannya. Contoh pastinya dalam hal ini ialah guru.

DAFTAR PUSTAKA

- JICA-FPMIPA UPI, 2006. *Lesson Study: Suatu Strategi untuk Meningkatkan Keprofesionalan Pendidik*. IMSTEP-JICA. Bandung, UPI Press.
- Rusman, 2011. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, 2000. *Profesi Keguruan*, Jakarta, Rineka Cipta.

TANTANGAN DALAM MENINGTEGRASIKAN TIK DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

I Kadek Budi Sandika

Mahasiswa Program Doktor Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

bsandika@yahoo.com

Abstrak

Kurikulum memang senantiasa perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh hasil analisis kebutuhan, kajian/ data monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum berjalan, hingga kesiapan *stakeholder* dan penyelenggara pendidikan dalam mengadaptasi perubahan kurikulum yang akan dilaksanakan. Isu TIK merupakan aspek penting yang menandakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki pengaruh sangat besar bagi dunia pendidikan. Namun, pada pengembangan kurikulum pendidikan nasional 2013, khususnya untuk jenjang sekolah menengah, materi TIK tidak lagi diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Selain itu, isu lainnya yang masih perlu diselesaikan adalah mengenai masalah pengangguran.

Isu-isu tersebut sebenarnya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengembangan kurikulum pendidikan nasional, terutama pengintegrasian TIK dan kewirausahaan dalam pembelajaran. Untuk itu, perlu dipahami konteks pengembangan kurikulum, politik pendidikan dan perkembangan kurikulum pendidikan nasional, keterampilan abad ke-21 dan penilaiannya, keterkaitan kecerdasan majemuk dan keterampilan abad 21, pengintegrasian TIK dan kewirausahaan dalam kurikulum, serta tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum yang terintegrasi dengan TIK dan kewirausahaan.

Upaya mengintegrasikan TIK dalam kurikulum pendidikan adalah integrasi pada subyek mata pelajaran sebagai kompetensi yang diajarkan maupun sebagai media pembelajaran. Sementara upaya mengintegrasikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan dapat melalui integrasi pada subyek mata pelajaran, integrasi pada muatan lokal, dikembangkan menjadi salah satu bentuk pelatihan ekstrakurikuler atau inkubator. Tantangan utama untuk mengimplementasikan kurikulum terintegrasi dengan TIK dan Kewirausahaan tersebut adalah kesiapan guru melaksanakannya serta dukungan sumber daya lainnya termasuk biaya.

Kata-kata kunci: pengembangan kurikulum, politik pendidikan, keterampilan abad ke-21, kecerdasan majemuk, kurikulum terintegrasi dengan TIK dan kewirausahaan

1. Pendahuluan

Kurikulum memang senantiasa harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berkembang begitu cepat dan semakin maju. Kegiatan tersebut tentu memerlukan pengkajian dan pengembangan, mulai dari identifikasi evolusi tujuan dan tata nilai dalam kurikulum, analisis dan evaluasi kendala maupun tantangan implementasi kurikulum yang sedang berjalan, hingga kesiapan *stakeholder* dan penyelenggara pendidikan dalam mengadaptasi perubahan kurikulum yang akan dilaksanakan. Secara filosofis, tujuan dan tata nilai dalam kurikulum pendidikan telah

mengalami perubahan dan mengalami pergeseran sejak masa kolonial hingga memasuki abad ke-21, seperti pola tergantung pada satu sumber (*teacher centered*) menuju belajar mandiri (*student centered*). Pengembangan kurikulum yang dilakukan perlu ditunjang oleh kesiapan sumber daya penyelenggara pendidikan yang memiliki orientasi atau pola pikir yang sesuai dengan tujuan pengembangan kurikulum tersebut. Guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan formal harus mendapat pelatihan yang memadai untuk memahami esensi pengembangan kurikulum tersebut serta langkah mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran secara efektif.

Isu TIK sebenarnya merupakan aspek penting sebagai penanda perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti perkembangan teknologi komputer pribadi, sarana telekomunikasi yang menjangkau berbagai wilayah dengan cepat, serta jejaring internet untuk mengakses informasi dengan

sangat mudah) memiliki pengaruh sangat besar bagi dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh TIK bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi salah satu keterampilan/ kompetensi yang harus dimiliki di abad ke-21.



Gambar 1. Kerangka Kompetensi Abad ke-21

(Sumber: Bab II Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Pengembangan Kurikulum 2013 di Bandung 16 Maret 2013)

Hal tersebut justru kurang diakomodasi pada pengembangan kurikulum pendidikan nasional 2013, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah, dimana materi TIK tidak lagi diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Padahal apabila dilihat dari alasan pengembangannya, tidak ada data yang menunjukkan bahwa semua guru mata pelajaran telah menguasai media TIK, tetapi mereka dituntut harus mengimplementasikan pembelajarannya berbasis TIK. Pada kurikulum 2013 juga terdapat penambahan jumlah jam belajar siswa. Alasannya adalah mempertimbangkan perbandingan jam belajar

rata-rata siswa di Indonesia dengan berbagai negara lain di dunia serta rendahnya hasil PISA dan TIMSS. Tim pengembang juga belum menunjukkan data hasil penelitian maupun evaluasi program pengajaran pada lembaga pendidikan di Indonesia yang menunjang untuk penambahan jam belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk pengembangan kurikulum 2013, belum berdasarkan data-data hasil kajian, penelitian, atau evaluasi kurikulum nasional yang komprehensif, melainkan hanya berdasarkan data perbandingan posisi Indonesia di dunia.

Kompetensi	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	3
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	3
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Kejuruan (teknologi informasi dan komunikasi)	2	2	2
B. Minat Lokal	1	2	3
C. Pengembangan Diri	2*	2*	2*
Jumlah	32	32	32

2*: Disesuaikan 2 jam pembelajaran

STRUKTUR KURIKULUM SMP				
No	Kompetensi	VI	VII	IX
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
8	Seni Budaya (termasuk musik)*	3	3	3
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan (termasuk musik)	3	3	3
10	Kejuruan (termasuk musik)	2	2	2
Jumlah		38	38	38

* Musikan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831

menjadi

dalam Sosialisasi Pengembangan Kurikulum 2013 di Bandung 16 Maret 2013)

Jumlah pengangguran di Indonesia dengan kategori sedang mencari pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan masih sangat dominan daripada kategori menunggu untuk mulai bekerja maupun mempersiapkan

Dalam bahasan berikut akan diuraikan mengenai konteks pengembangan kurikulum, politik pendidikan dan perkembangan kurikulum pendidikan nasional, keterampilan abad ke-21 dan penilaiannya, keterkaitan kecerdasan majemuk dan keterampilan abad 21, pengintegrasian TIK dan kewirausahaan dalam kurikulum, serta tantangan dalam

Dalam bahasan berikut akan diuraikan mengenai konteks pengembangan kurikulum, politik pendidikan dan perkembangan kurikulum pendidikan nasional, keterampilan abad ke-21 dan penilaiannya, keterkaitan kecerdasan majemuk dan keterampilan abad 21, pengintegrasian TIK dan kewirausahaan dalam kurikulum, serta tantangan dalam

mengimplementasikan kurikulum yang terintegrasi dengan TIK dan kewirausahaan.

2. Pembahasan

2.1 Konteks dalam Pengembangan Kurikulum

Pendidikan bertujuan memberikan kecakapan hidup bagi anak sebagai jembatan penghubung/ penyiapan anak dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja (*education for life* dan *education for earning living*). Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, berupaya mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau bekerja berdasarkan panduan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan kegiatan dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik guna membantu mereka membangun kemampuan pribadi dan sosial yang dipersiapkan untuk masa depan. Kurikulum dibuat sekolah (lembaga pendidikan) yang didalamnya memuat keseluruhan perencanaan pengalaman pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan mereka gunakan untuk hidup bermasyarakat.

Kurikulum harus selalu dikembangkan menyesuaikan dengan perubahan teknologi maupun tuntutan dunia kerja. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, antara lain (Finch & Crunkilton, 1999:18-22):

- Berdasarkan data: muatan kurikulum diputuskan setelah mengkaji berbagai data, seperti karakteristik siswa dan pekerjaan yang akan dipersiapkan.
- Dinamika pembelajaran: pengelola, pengembang kurikulum dan guru harus selalu menguji seberapa baik pelaksanaan kurikulum dalam memenuhi kebutuhan siswa dan memodifikasinya sesuai keperluan.
- Menunjukkan hasil secara eksplisit, seperti apakah siswa mencapai hasil sesuai tujuan dan bagaimana mencapai hasil tersebut.
- Artikulasi penuh, meliputi resolusi dari konflik muatan antara bidang yang berbeda atau pengembangan alur pembelajaran logis dari tahun ke tahun, terjadi di seluruh jenjang sekolah yang memungkinkan sekolah mengajarkan apa

yang terbaik, sehingga siswa dapat melakukan hal yang lebih efisien.

- Realistik, muatan kurikulum biasanya didasarkan pada peran riil dengan tugas-tugas yang relevan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang bermanfaat sebagai dasar untuk apa yang diajarkan.
- *Student-oriented*, kurikulum tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan kelompok siswa, tetapi juga memberi jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan individual siswa yang berbeda.
- Evaluasi kurikulum sebagai aktivitas berkelanjutan yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Siapapun yang terlibat dengan kurikulum harus menyadari bahwa evaluasi merupakan upaya terus-menerus. Kurikulum yang sedang dirancang harus dibuat untuk menilai dampaknya pada siswa.
- Berorientasi masa depan, pendidik dan penanggung jawab pengembang kurikulum perlu memastikan bahwa muatan dan struktur kurikulum yang sedang berlangsung dianggap ada kaitannya dengan apa yang akan atau mungkin terjadi di masa depan/ menurut perspektif orientasi ke depan. Apa perubahan teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan akan lulusan? Apa jenis laboratorium sekolah akan dibutuhkan dua puluh tahun mendatang? Pendidikan apa yang akan dibutuhkan oleh siswa di sekolah sekarang?
- Orientasi global, mengingat saat ini telah memasuki era pasar bebas, sehingga persaingan tenaga kerja antar negara pasti terjadi, maka kurikulum harus diupayakan sedemikian sehingga nantinya dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada dunia kerja dikancah internasional.

Perencanaan program pendidikan yang berhasil sangat diharapkan dengan mempertimbangkan keterlibatan beragam golongan manusia dengan berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan profesional. Selain itu, mereka harus berkolaborasi secara kooperatif sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu yang berdiri sendiri. Nasta menyatakan bahwa terdapat empat tahapan yang harus dilalui selama proses perencanaan kurikulum dengan setidaknya lima kompetensi yang wajib

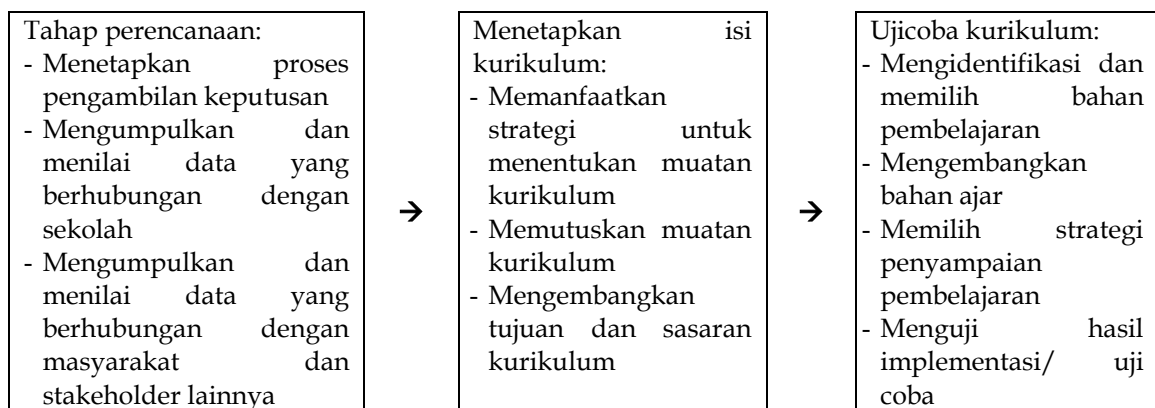
dimiliki pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut, seperti

ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Proses Pengembangan Kurikulum dan Kompetensi yang Diperlukan

Proses Pengembangan Kurikulum	Kompetensi yang dibutuhkan
Perencanaan (<i>planning</i>)	Pengelolaan kerja (<i>project management</i>)
Pengembangan (<i>development</i>)	Bekerja dalam tim (<i>team building</i>)
Pengesahan (<i>validation</i>)	Keterampilan mengelola pertemuan (<i>meetings skills</i>)
Pelaporan (<i>after validation</i>)	Administrasi dan penulisan laporan (<i>administration & report writing</i>)

Sementara itu, Finch & Crunkilton (1999:23) menggambarkan tahapan pengembangan kurikulum seperti pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Tahap Pengembangan Kurikulum

Untuk memutuskan muatan kurikulum yang akan diterapkan, Finch & Crunkilton (1999:166) memberikan formula: muatan kurikulum potensial – faktor penghambat = muatan kurikulum yang dapat diterapkan. Muatan kurikulum potensial diperoleh dari analisis dengan pertimbangan beberapa faktor dan strategi pemilihannya. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah waktu dan biaya untuk mengembangkannya, tekanan pihak internal maupun lingkungan eksternal kependidikan, kebutuhan akan muatan lokal maupun nasional, keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha, muatan konsentrasi pendidikan akademik dan kejuruan, serta jenjang pendidikan dimana materi akan diajarkan. Strategi penentuan muatan kurikulum dapat menggunakan pendekatan basis filosofis, proses introspeksi, metode DACUM, *task analysis*, *critical incident technique* dan teknik Delphi. Sementara faktor penghambat berkaitan dengan keterbatasan yang mungkin terjadi selama proses belajar-mengajar, diantaranya keadaan siswa, kesiapan pendidik dan staf pendukung di

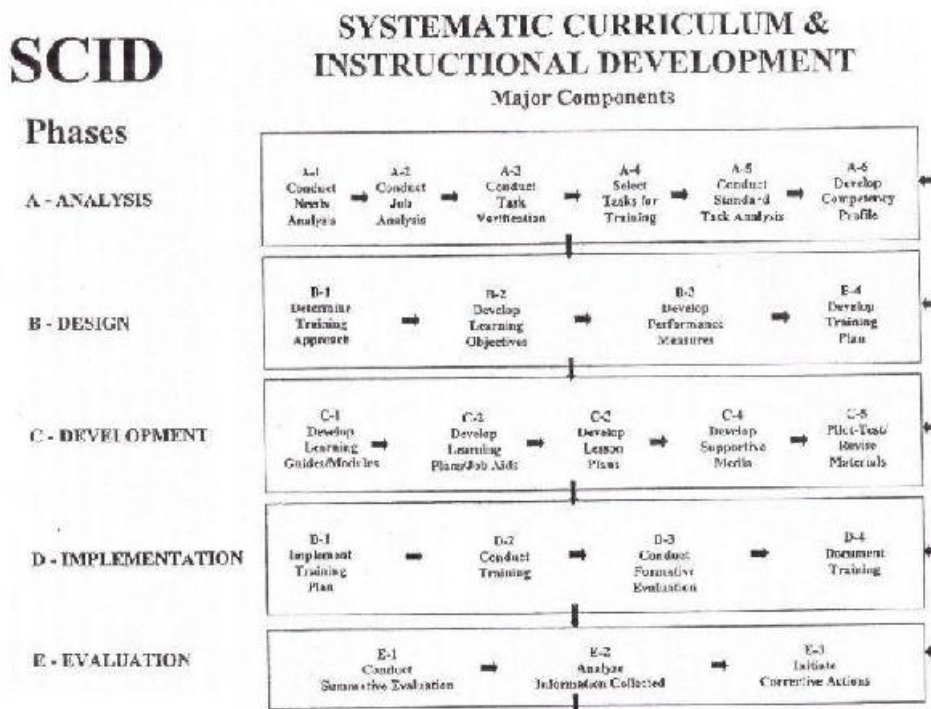
tingkat sekolah, cakupan jangkauan susunan kurikulum, serta kondisi ketenagakerjaan. Muatan kurikulum yang dapat diterapkan tersebut merupakan kerangka kurikulum baru yang dikembangkan.

Setelah semua hasil perencanaan dan pengembangan kurikulum siap, maka tahap selanjutnya adalah diseminasi hasil untuk pelaksanaan kurikulum baru. Diseminasi lebih difokuskan sebagai bentuk program in-service bagi para pendidik maupun semua staf pendukung lainnya. Setelah kurikulum baru diterapkan, perlu selalu dilakukan penilaian/ evaluasi terhadap penyelenggaraan kurikulum serta menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau peningkatan program.

Proses pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum dapat dilaksanakan melalui integrasi secara terpadu. Proses pembelajaran terpadu dapat berupa pembelajaran yang terpadu dalam satu disiplin ilmu, terpadu antarmata pelajaran, serta terpadu dalam dan lintas peserta didik. Pembelajaran terpadu akan memberikan pengalaman yang

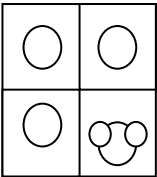
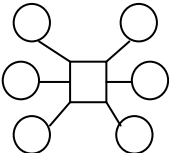
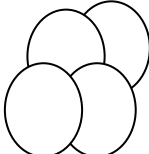
bermakna bagi peserta didik, karena mereka memahami konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep yang sudah dipahami yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari sejumlah model pembelajaran terpadu menurut Fogorty (dalam Pusat Kurikulum,

Balitbang Depdiknas), tiga diantaranya sesuai untuk dikembangkan dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu model keterhubungan (*connected*), jaring laba-laba (*webbed*), dan keterpaduan (*integrated*). Perbandingan ketiga model tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.



Gambar 4. Tahap Pengembangan Kurikulum menurut DACUM

Tabel 2. Tiga Model Pembelajaran Terpadu

Model	Karakteristik	Kelebihan	Keterbatasan
Model Keterhubungan (<i>connected</i>) 	Menghubungkan satu konsep/topik dengan konsep lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi misal-nya IPA atau IPS	Peserta didik akan lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi	Model ini kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin
Model jaring laba-laba (<i>Webbed</i>) 	Dimulai dengan menentukan tema, dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan disiplin ilmu atau bidang studi lain	Tema yang familiar membuat motivasi belajar meningkat Memberikan pengalaman berpikir serta bekerja interdisipliner	Sulit menemukan tema
Model Keterpaduan (<i>integrated</i>) 	Dimulai dengan identifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa disiplin ilmu atau beberapa bidang studi. Tema berfungsi sebagai konteks pembelajaran	Hubungan antarbidang studi jelas terlihat melalui kegiatan belajar	Fokus terhadap kegiatan belajar, kadang mengabaikan target penguasaan konsep Menuntut wawasan yang luas dari guru

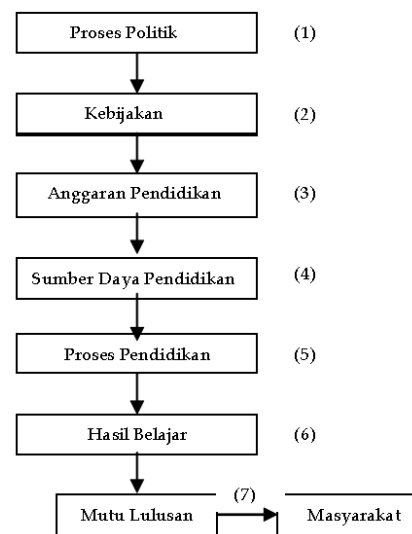
Rencana pembelajaran dan penilaian yang dikembangkan sebagai bagian dari penjabaran muatan kurikulum perlu memperhatikan beberapa aspek berikut:

- Proses pengakuan dan kriteria seleksi calon peserta didik, termasuk aturan APEL (*assessment of prior experiential learning*)
- Induksi dan panduan siswa
- Pengalaman kerja dan hubungannya dengan tujuan program dan penilaian
- Pengalaman belajar siswa dan strategi pengajaran
- Keterlibatan pengusaha dalam merancang dan melaksanakan program
- Contoh penugasan
- Metode untuk memonitor kemajuan siswa mengikuti program
- Pencatatan pencapaian siswa (ROA/ *record of student's achievement*)
- Strategi penilaian, metode dan prosedur perbandingan akademik
- Regulasi penilaian yang lebih spesifik
- Aturan mengenai tim verifikasi luar dan komposisi badan penilaian

2.2 Politik Pendidikan dan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional

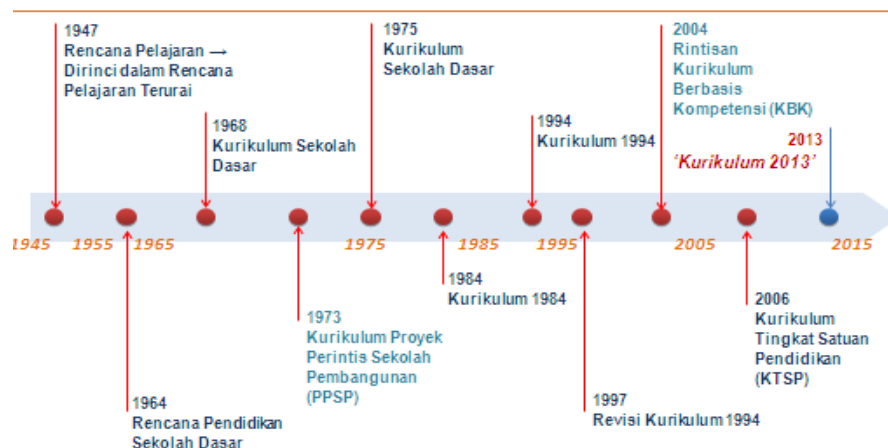
Sesuai dengan pendapat Henry M. Levin dalam Soedijarto (2008) bahwa mutu pendidikan merupakan hasil dari proses politik, seperti terlihat pada gambar 5. Mutu lulusan yang tercermin dimasyarakat ditunjukkan oleh hasil belajar yang dipengaruhi oleh proses pendidikan yang diikuti siswa,

dimana kualitas proses tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (termasuk guru), serta ditunjang oleh besarnya anggaran pendidikan, sementara anggaran tersebut diatur oleh kebijakan yang tidak lain merupakan hasil dari proses politik. Perkembangan kurikulum pendidikan nasional juga tidak terlepas dari pengaruh politik pendidikan. Peran politik pendidikan yang sangat dominan adalah dalam upaya pengesahan suatu kebijakan baru, seperti kebijakan implementasi kurikulum 2013.



Gambar 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan (sumber: Soedijarto, 2008)

Perkembangan Kurikulum di Indonesia



Gambar 6. Perkembangan Kurikulum Indonesia Sejak Masa Kemerdekaan (Sumber: Bab II Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Pengembangan Kurikulum 2013 di Bandung 16 Maret 2013)

2.3 Keterampilan Abad ke-21 (21st Century Skills) dan Penilaiannya

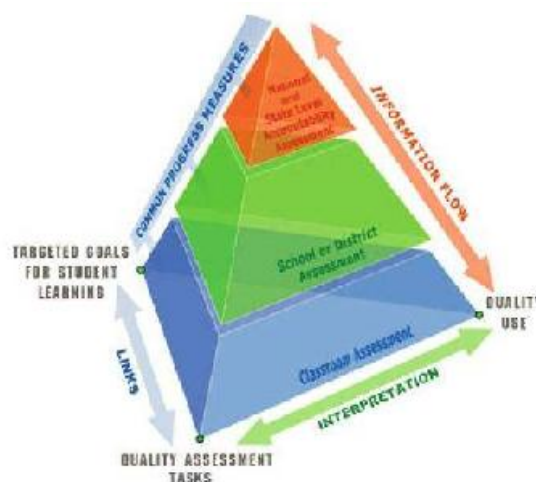
Binkley et.al. (2012:17-66) berhasil mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 sebanyak sepuluh buah dan mengklasifikasikannya menjadi empat kelompok. Bahkan

masing-masing keterampilan telah dijabarkan kedalam domain pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ tata nilai/ etika. Secara garis besar, keterampilan abad ke-21 seperti ditunjukkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Klasifikasi Keterampilan Abad ke-21

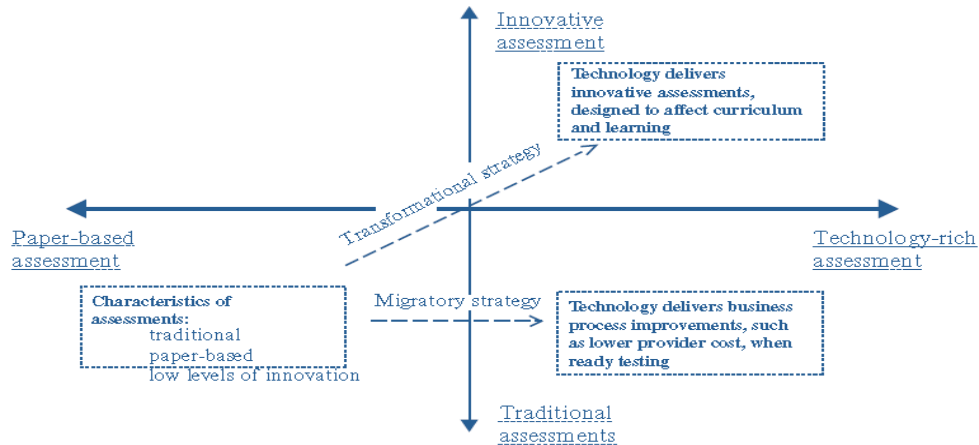
Kelompok Keterampilan	Keterampilan abad ke-21
Cara berpikir	Kreativitas & inovasi
	Berpikir kritis, memecahkan masalah & membuat keputusan
	Belajar untuk belajar
Cara bekerja	Komunikasi
	Kolaborasi/ kerjasama tim
Peralatan untuk bekerja	Literasi informasi
	Literasi ICT
Bagian kehidupan di dunia	Kewarganegaraan, lokal & global
	Kehidupan & karir
	Tanggung jawab pribadi & sosial

Untuk mengetahui tingkat penguasaan suatu keterampilan, maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian dilaksanakan mengacu pada tiga pilar/ fungsi utamanya, yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa pada mata pelajaran tertentu, mengamati kinerja siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan, dan sebagai metode interpretasi untuk menggambarkan kondisi siswa dari hasil penilaian kinerja yang diperoleh. Sistem penilaian pembelajaran terintegrasi yang umum digunakan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7. Model Penilaian Pembelajaran Terintegrasi (Binkley et.al. 2012)

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, prinsip penilaian dan penentuan standar untuk abad ke-21 juga mengalami peralihan dan transformasi menuju penilaian inovatif dan ditunjang teknologi.



Gambar 8. Dimensi Inovasi Penilaian Memanfaatkan ICT (Binkley et.al)

2.4 Keterkaitan Kecerdasan Majemuk dan Keterampilan Abad 21

Keterampilan abad ke-21 merupakan tuntutan yang harus mampu dikuasai oleh setiap orang di berbagai belahan dunia untuk dapat bersaing pada era global sekarang ini. Masing-masing keterampilan tersebut memiliki nilai guna tersendiri di dunia kerja, dan kombinasi diantara beberapa maupun keseluruhan keterampilan tersebut akan membentuk suatu profil jabatan kerja yang dibutuhkan para pengusaha. Seiring dengan berbagai tuntutan tersebut, lembaga pendidikan sebagai tempat bagi seseorang menimba pengetahuan, keterampilan dan membiasakan sikap terpuji harus berupaya mencari cara untuk mampu mengadaptasi perubahan kebutuhan masyarakat. Setiap keterampilan tersebut diupayakan dapat ditransformasikan kepada setiap peserta didik melalui penyelenggaraan aktivitas pembelajaran yang praktis dan inovatif.

Teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*) yang dikembangkan oleh Gardner merupakan salah satu terobosan yang luar biasa bagi setiap pendidik untuk mengenali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik yang memiliki keunikan masing-masing. Sampai saat ini, telah diidentifikasi sembilan tipe kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik-verbal, logis-matematis, kinestetik-tubuh, visual-spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan eksistensial. Konsep kecerdasan majemuk ternyata dapat pula dihubungkan dengan setiap keterampilan abad ke-21. Contohnya adalah keterampilan kreativitas ditunjang oleh kecerdasan visual-spasial dan eksistensial yang memungkinkan seseorang untuk menggambarkan secara jelas ide, solusi dan produk yang akan dikembangkan. Kaitan keterampilan dan kecerdasan majemuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut (McKenzie, 2005:6-33).

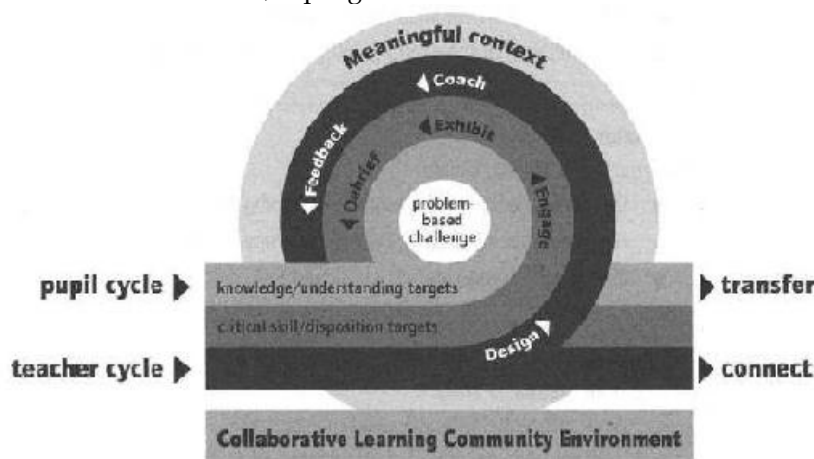
Tabel 4. Keterampilan Abad ke-21 dan Kecerdasan Majemuk yang Terkait

Kelompok Keterampilan	Keterampilan abad ke-21	Kecerdasan majemuk terkait
Cara berpikir (<i>ways of thinking</i>)	Kreativitas & inovasi	Kecerdasan visual-spasial dan eksistensial
	Berpikir kritis, memecahkan masalah & membuat keputusan	kecerdasan intrapersonal, logis, dan eksistensial
	Belajar untuk belajar, metakognisi	kecerdasan intrapersonal dan eksistensial
Cara bekerja (<i>ways of working</i>)	Komunikasi	kecerdasan interpersonal dan verbal
	Kolaborasi/ kerjasama tim	kecerdasan interpersonal dan verbal
Bagian kehidupan di dunia (<i>living in the world</i>)	Kewarganegaraan, lokal & global	Kecerdasan intrapersonal dan eksistensial
	Kehidupan & karir	Seluruh kecerdasan
	Tanggung jawab pribadi & sosial	Kecerdasan intrapersonal dan eksistensial
Sarana untuk bekerja (<i>tools for working</i>)	Literasi informasi	kecerdasan intrapersonal dan naturalis
	Literasi ICT	kecerdasan kinestetik

Setelah diketahui keterkaitan antara keterampilan abad 21 dan kecerdasan majemuk, maka akan lebih mudah untuk mengajarkan keterampilan tersebut pada proses pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk. Untuk itu, tim pengembang kurikulum dapat mengintegrasikan dan memadukannya kedalam pedoman rencana pembelajaran setiap mata pelajaran. Selain itu, keterampilan abad ke-21 tersebut dapat menjadi kompetensi inti pada setiap mata pelajaran yang relevan. Delapan keterampilan diluar keterampilan literasi informasi dan ICT apabila dipadukan merupakan skill yang dibutuhkan untuk mengembangkan karakter kewirausahaan. Oleh karena itu, peng-

integrasian keterampilan abad ke-21 tersebut pada kurikulum pendidikan nasional merupakan suatu keharusan untuk menjamin kesiapan sumber daya manusia (*human capital*) Indonesia sebagai penggerak pembangunan bangsa dimasa depan.

Proses pembelajaran yang diterapkan harus dapat membangun komunitas belajar kolaboratif dan menggunakan pengalaman belajar dan pembelajaran berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan kritis maupun karakter mendasar (*critical skills & fundamental dispositions*) seperti digambarkan pada siklus belajar kolaboratif berikut. (Fleetham, 2006:114).



Gambar 9. Siklus untuk Membangun Lingkungan Belajar Kolaboratif

Untuk dapat mengajar dengan berbasis kecerdasan majemuk (MI), guru harus memahami konsep kecerdasan majemuk, mengerti bahasa MI yang harus digunakan, membuat profil MI tiap siswa, menciptakan

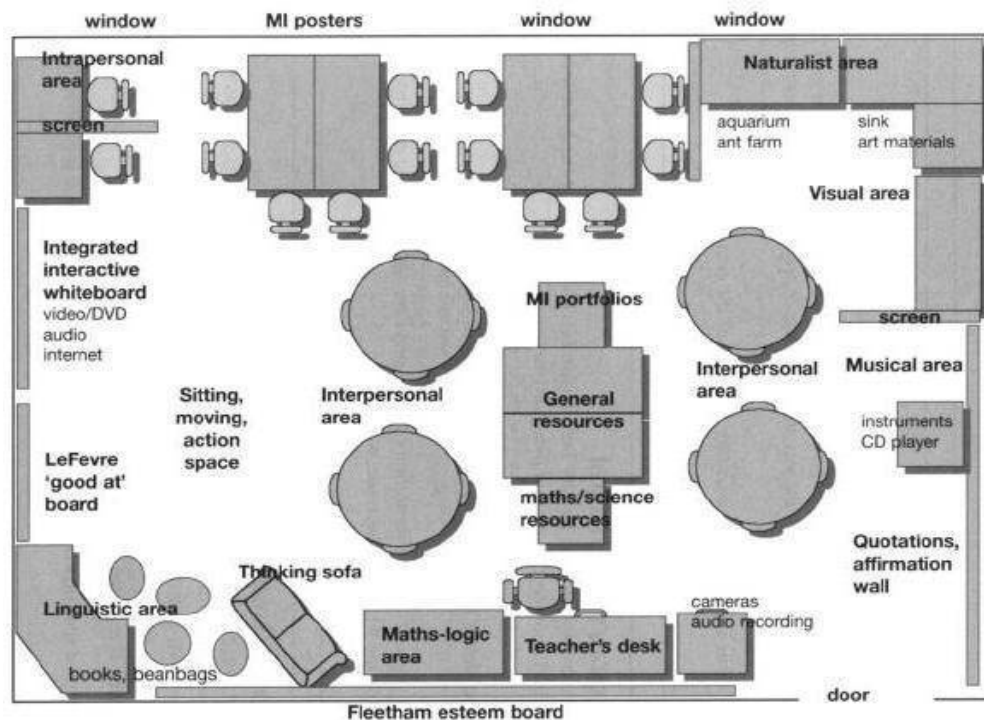
lingkungan kelas yang sesuai untuk seluruh tipe kecerdasan, serta memahami sistem belajar mengajar berbasis kecerdasan majemuk.

Tabel 5. Jalur Memahami Cara Belajar-Mengajar Berbasis MI (Fleetham)

Teaching and learning to...	
The 'building on strengths' pathway	The 'talent development' pathway
• support literacy development • 'bridge' student strengths to literacy learning	• design structured talent development opportunities • create opportunities to assess and nurture student talents
Teaching and learning through...	
The 'understanding' pathway	The 'authentic problems' pathway
• develop curricular options to enhance students' understanding • create diverse assessment options for students to demonstrate their understanding	• use real-world problems and expert roles • create authentic assessments of student learning

Tabel 6. Sumber Belajar Tiap Tipe Kecerdasan (Fleetham, 2006:82)

Intelligence	Active resources	Passive resources
Verbal/linguistic	Books, audio recording and playback equipment, writing equipment, computer	Word wall, books, publishers' posters
Logical/mathematical	Calculators, computer, science equipment	Number tables/squares, reference formulae, flow charts
Musical	CD/cassette player, percussion instruments, manuscript paper, computer	Background music, concert poster, pop star posters, orchestra/instrument posters
Visual/spatial	Camcorder; digital still camera; art materials/media; OHP, acetates and pens; computer	Maps, 2D and 3D artwork, diagrams, coloured walls, travel posters
Bodily/kinesthetic	Construction kits/games, modelling clay, computer	Sport/dance posters, 3D artwork
Interpersonal	Flexible table and chair arrangements for: paired work, group-work, teamwork, presentations, debates	Multiple intelligences posters (see Further reading and resources), photographs showing different facial expressions, pictures of successful groups/teams
Intrapersonal	Flexible table and chair arrangements for: working alone, 'hiding away', thinking quietly	Multiple intelligences posters (see Further reading and resources), pictures of successful entrepreneurs
Naturalist	Magnifying glass, microscope, blank tree diagrams/taxonomies, poster (for collecting minibeasts)	A window to the outside, ant/butterfly farm, aquarium, wildlife/nature posters, taxonomies/hierarchies
Existential	A space to think	Philosophical quotations, religious artefacts, pictures of philosophers and religious leaders



Gambar 10. Seting Ruang Kelas Berbasis MI (Fleetham, 2006:86)

2.5 Pengintegrasian TIK dan Kewirausahaan dalam Kurikulum

Mengingat begitu pentingnya mengintegrasikan TIK dan kewirausahaan

sebagai bentuk pengintegrasian keterampilan abad ke-21 tersebut pada kurikulum pendidikan nasional, maka tim pengembang kurikulum nasional perlu membuat panduan

bagi pelaksana di sekolah mengenai tahapan dan model pengintegrasian yang perlu dilakukan. Tahapan pengembangan dan pengintegrasian tersebut adalah membentuk tim pengembang kurikulum sekolah (terdiri dari berbagai unsur: pendidik, narasumber, orangtua, pelaku usaha, siswa), mengadakan pertemuan untuk konsensus bentuk pengintegrasian yang paling sesuai untuk kondisi sekolah, sosialisasi-pengembangan staf pendidik-implementasi-evaluasi.

Sementara itu model pengintegrasian TIK dan kewirausahaan dalam pembelajaran juga beragam. Upaya mengintegrasikan TIK dalam kurikulum pendidikan dapat melalui integrasi pada subyek mata pelajaran sebagai kompetensi yang diajarkan. Sebagai contohnya adalah integrasi pada pelajaran IPS, dimana pada materi sejarah disajikan sejarah perkembangan teknologi yang mengadopsi konsep era gelombang ketiga menurut Toffler yang mempengaruhi perubahan struktur masyarakat sampai membentuk masyarakat jaringan. Sementara itu pada materi ekonomi, peran teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan sistem perdagangan virtual (*e-commerce*, *bisnis online*, dan sebagainya). Selain itu, peran ICT yang telah diketahui secara luas oleh pendidik adalah sebagai media pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif.

Upaya mengintegrasikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan dapat melalui integrasi pada subyek mata pelajaran, integrasi pada muatan lokal, dikembangkan menjadi salah satu bentuk pelatihan ekstrakurikuler atau inkubator.

2.5.1 Sebagai mata pelajaran tersendiri

Endang Mulyani mengembangkan model penilaian komprehensif berbasis proyek pendidikan kewirausahaan terintegrasi di sekolah menengah kejuruan (SMK). Penerapan model penilaian ini mampu mengukur prestasi belajar siswa secara utuh, baik kemampuan akademik (kognitif, afektif dan psikomotorik) dan kemampuan kewirausahaan (sikap, minat dan perilaku wirausaha). Pendidik dituntut untuk memiliki kreativitas dalam merancang tugas proyek pendidikan kewirausahaan, selalu konsentrasi melakukan penilaian berkelanjutan, memberikan pembelajaran secara tim, serta memiliki pengalaman bisnis empiris. Model penilaian yang dikembangkan hanya berlaku pada pembelajaran kewirausahaan yang

menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, dan baru diterapkan di SMK bidang keahlian manajemen dan bisnis, serta belum melibatkan siswa melakukan penilaian diri (*self assessment*).

2.5.2 Terintegrasi dalam Subyek Mata Pelajaran

Dite Wagiyono menerapkan praktek koperasi dengan memanfaatkan koperasi sekolah dalam pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan sikap kewirausahaan siswa di SMA N 3 Purwokerto. Selama praktek, siswa memperoleh materi *marketing research*, pelayanan kepada pembeli dan pembukuan koperasi dengan pengalaman belajar secara langsung dalam mengelola usaha koperasi sekolah, disertai dengan metode diskusi dan penugasan kelompok dalam mengembangkan usaha koperasi sekolah.

2.5.3 Integrasi dalam Muatan Lokal

Rodia Syamwil mengembangkan model muatan pravokasional dan pembelajaran dalam kurikulum SMP/ MTs di sentra industri batik yang berupa kurikulum muatan lokal berbasis keterampilan batik. Kompetensi dasar yang terkandung didalamnya, meliputi (a) pengetahuan lokal dengan *core skills* keterampilan membatik, (b) keterampilan pendukung: membuat motif, menggunakan alat, kerajinan berbahan batik dan menyelenggarakan pameran, (c) kepribadian pra-vokasional: disiplin, kerja keras, kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, kewirausahaan, kesadaran lingkungan dan keselamatan kerja, serta (d) kreativitas: desain, pemecahan masalah, penyelenggaraan pameran. Muatan pra-vokasional ini diintegrasikan sebagai mata pelajaran muatan lokal yang dilaksanakan secara blok dengan bobot total 40 jam yang terbagi dalam 10 pertemuan.

2.5.4 Sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler

Hasanah mengembangkan model pembelajaran kewirausahaan untuk pembentukan jiwa entrepreneur siswa di sekolah menengah kejuruan (SMK). Pengembangan model pembelajaran ekstrakurikuler kewirausahaan yang disingkat menjadi model PKw-Ekskul yang dilakukan hanya sampai pada pengujian model, dengan perangkat dan sintaks yang masih terbatas, yakni hanya empat kompetensi dasar:

mengembangkan semangat wirausaha, mencari solusi untuk membuat keputusan, menganalisis peluang usaha dan menyusun rencana usaha. Aspek yang dinilai dalam model PKw-Ekskul ini adalah wawasan kewirausahaan (kompetensi kognitif dan afektif) serta kreativitas dan inovasi (kompetensi afektif dan psikomotor) dengan menggunakan pedoman observasi pembelajaran, penilaian unjuk kerja dan penilaian presentasi kelas.

2.5.5 Melalui pendampingan kelompok dalam suatu inkubator kewirausahaan

Suranto mengembangkan model inkubator kewirausahaan peningkatan mental kemandirian wirausaha mahasiswa yang terdiri dari empat komponen: *doing, empowering, facilitating, evaluating*. Pengembangan model dilakukan pada mahasiswa fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk program studi pendidikan matematika, matematika, pendidikan kimia, kimia, pendidikan biologi, biologi dan teknik informatika komputer. Jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menulis buku ilmiah populer dan memasarkan naskah dengan harapan bahwa mahasiswa menjadi berdaya dan profesional setelah mengikuti program tersebut. Indikator berdaya meliputi kemampuan teknis menulis/jurnalistik, kesadaran berwirausaha, memiliki motivasi berusaha untuk selalu maju, mengetahui kelebihan dan kekurangan pribadi, memiliki kemampuan melakukan akses secara mandiri pada pihak lain/*networking* dan urus permodalan. Indikator profesional yang diharapkan adalah rasa percaya diri, mandiri, ulet dan tekun, pantang menyerah, serta kreatif dan inovatif dalam menulis.

2.6 Tantangan dalam Mengimplementasikan Kurikulum Yang Terintegrasi Dengan TIK dan Kewirausahaan

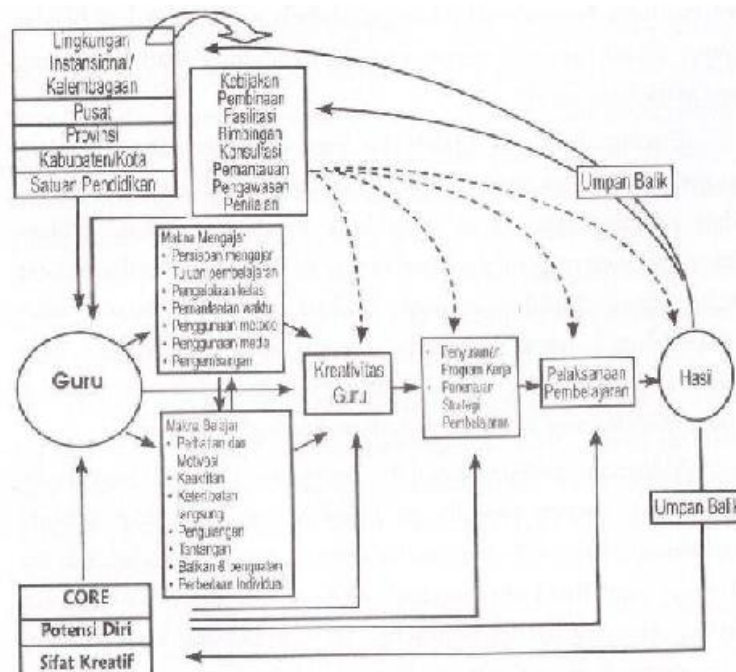
a. Terdapat berbagai alasan apabila implementasi kurikulum tidak dapat berjalan sukses. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahap pengembangan kurikulum, yaitu tahap analisis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap analisis, kegagalan penerapan kurikulum dapat diakibatkan oleh ketakutan pimpinan untuk

melakukan analisis secara eksak karena mungkin hasilnya akan memperlihatkan kelemahannya. Pada tahap perencanaan: rancangan sifatnya tidak mungkin dicapai karena kondisi khusus, rancangan begitu luas dan menunjukkan sesuatu pengharapan yang tinggi sehingga tidak mampu terjangkau oleh setiap orang. Pada fase implementasi: terjadi pergantian pemegang otoritas selama implementasi, proses perubahan menjadi sulit untuk dipahami semua orang, batas waktu untuk mempersiapkan perubahan terlampaui pendek, pelatihan staf pendidik yang dilakukan tidak diberikan sesuai harapan. Pada tahap evaluasi: tidak adanya basis data yang akurat untuk mengukur progress yang telah ditetapkan, sumber evaluasi tidak dipercaya, atau tidak ada yang bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan proses penilaian (Wiles, 2009:113-114).

- b. Tantangan utama untuk mengimplementasikan kurikulum terintegrasi dengan TIK dan Kewirausahaan tersebut adalah kesiapan guru sebagai ujung tombak pelaksana langsung melalui pembelajaran di kelas. Para guru perlu mengikuti program pelatihan dan pengembangan staf agar mampu menghubungkan kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Bentuk pelatihan terbaik adalah model teacher-to-teacher, dimana sesama guru saling berbagi pengetahuan dan keterampilan mengajar baru. Model pelatihan yang juga efektif adalah kelompok kecil guru sebagai tim (model lesson study), pelatihan dengan tujuan spesifik untuk menguasai keterampilan tertentu dan pelatihan pengembangan profil pribadi secara utuh. Sekolah (terutama guru) yang tidak mampu menghubungkan kurikulum yang telah dikembangkan kedalam pembelajaran di kelas serta tidak melakukan program pengembangan staf pendidik tentu tidak akan berhasil membelajarkan siswa (Wiles, 2009:87-97).
- c. Guru yang diharapkan adalah “guru yang memiliki CORE atau sikap selalu siap belajar dan secara kreatif mengelola segala perubahan”. CORE yang dimaksud adalah keingintahuan

terhadap gagasan/ ide baru (curiosity), keterbukaan dan sikap positif terhadap ide baru tersebut (open minded), secara eklektif inkorporatif berani mengambil resiko untuk mengadopsi ide tersebut (risk-taker), serta memiliki gairah dan hasrat untuk mengerjakan dan meng-

evaluasi efektivitasnya (energy). Upaya peningkatan kreativitas pembelajaran guru perlu memadukan makna mengajar dan belajar yang dikemas dan dikelola secara kreatif dengan didasari oleh CORE dan pemahaman terhadap potensi diri (Agung, 2010).



Gambar 11. Skema Peningkatan Kreativitas Pembelajaran Guru

2.6.1 Sumber daya dan biaya

Upaya peningkatan kualitas penerapan kurikulum tidak terlepas dari berbagai kendala sumber daya pendidikan (SDM: guru dan pengelola, prasarana dan sarana pendidikan/ media belajar serta sumber modal/ biaya penyelenggaraan pendidikan). Kurangnya upaya pengembangan diri (motivasi belajar) menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan, sementara pemenuhan prasarana dan sarana penunjang pembelajaran lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan dana untuk pembiayaan pendidikan.

2.6.2 Kebijakan pemerintah

Penyelenggaraan pendidikan tidak bisa terlepas dari pengaruh politik. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan saat ini lebih banyak berupaya mencapai hasil yang dapat terlihat dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampak jangka panjangnya.

Kebijakan implementasi kurikulum 2013 yang telah mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014 untuk beberapa sekolah terkesan dipaksakan. Meskipun kajian perubahan kurikulum telah dimulai sejak tahun 2010, tetapi sosialisasi kepada para guru sebagai pelaksana langsung di sekolah baru dilaksanakan mulai awal tahun 2013. Hal ini menyebabkan guru menjadi kelabakan apabila dituntut untuk tetap mengimplementasikannya.

Lemahnya proses monitoring dan evaluasi program pendidikan, termasuk penyelenggaraan kurikulum, juga perlu terus dibenahi sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program yang telah direncanakan.

2.6.3 LPTK

LPTK sendiri tentu belum sepenuhnya mempersiapkan mahasiswanya (calon guru) dan membekali mereka tentang bentuk kurikulum baru yang akan diajarkan di sekolah nantinya, mengingat uji publik kurikulum 2013 ini baru dilaksanakan pada

bulan November 2012. Melihat realita yang terjadi seperti ini, maka perlu dibuat strategi dan langkah taktis oleh LPTK dalam rangka menyiapkan tenaga guru menyongsong implementasi kurikulum tersebut. LPTK sebagai institusi pencetak tenaga guru harus memiliki visi, misi serta paradigma baru untuk melakukan akselerasi dalam rangka mengantisipasi tuntutan kualitas dari dunia kerja sehingga mampu menyiapkan lulusan tenaga guru yang unggul, memiliki daya saing tinggi, kredibel dan berkualitas dalam era global.

3. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan diatas, dapat diambil simpulan bahwa:

- a. Kurikulum memang harus selalu dikembangkan menyesuaikan dengan perubahan teknologi maupun tuntutan dunia kerja. Namun, dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan prosedur yang sesuai.
- b. Proses pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum dapat dilaksanakan melalui integrasi secara terpadu, seperti pembelajaran yang terpadu dalam satu disiplin ilmu, terpadu antarmata pelajaran, serta terpadu lintas peserta didik.
- c. Proses pendidikan formal termasuk pengembangan kurikulum pendidikan nasional tidak mungkin terlepas dari pengaruh politik pendidikan.
- d. Terdapat sepuluh keterampilan abad 21 yang diklasifikasikan menjadi empat kelompok. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, prinsip penilaian dan penentuan standar terhadap keterampilan abad ke-21 juga mengalami peralihan dan transformasi menuju penilaian inovatif dan sarat teknologi.
- e. Konsep kecerdasan majemuk dapat dikaitkan dengan setiap keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 tersebut akan lebih mudah diajarkan pada proses pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk
- f. Upaya mengintegrasikan TIK dalam kurikulum pendidikan adalah integrasi pada subyek mata pelajaran sebagai kompetensi yang diajarkan maupun sebagai media pembelajaran. Upaya mengintegrasikan kewirausahaan dalam

kurikulum pendidikan dapat melalui integrasi pada subyek mata pelajaran, integrasi pada muatan lokal, dikembangkan menjadi salah satu bentuk pelatihan ekstrakurikuler atau inkubator.

- g. Tantangan utama untuk mengimplementasikan kurikulum terintegrasi dengan TIK dan Kewirausahaan tersebut adalah kesiapan guru melaksanakannya. Upaya peningkatan kualitas penerapan kurikulum tidak terlepas dari berbagai kendala sumber daya pendidikan (SDM, prasarana dan sarana pendidikan serta sumber biaya penyelenggaraan pendidikan). Perlunya pembenahan proses monitoring dan evaluasi program pendidikan, termasuk penyelenggaraan kurikulum secara berkelanjutan. Perlunya dibuatkan strategi dan langkah taktis oleh LPTK dalam rangka menyiapkan tenaga guru menyongsong implementasi kurikulum 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Iskandar. 2010. *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Binkley, M.; Erstad, O.; Herman, J.; Raizen, S.; Ripley, M.; Miller-Ricci, M.; and Rumble, M. 2012. *Defining Twenty-First Century Skills*. Dalam Griffin, P., McGaw, B., and Care, E. (Eds.). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. London: Springer.
- Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Finch, Curtis R. and Crunkilton, John R. 1999. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content and Implementation*, fifth edition. United States of America: A Viacom Company.
- Fleetham, M. 2006. *Multiple Intelligence in Practice, Enhancing Self-Esteem and Learning in the Classroom*. Great Britain: Network Continuum Education.
- Groot, W. and van den Brink, H.M. 2007. *Overeducation in the Labour Market*. Dalam Hartog, J. and van den Brink,

- H.M. (eds.). *Human Capital, Advances in Theory and Evidence*. New York: Cambridge University Press.
- Hasanah. 2011. Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan untuk Pembentukan Jiwa Entrepreneur Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Pengembangan Kurikulum 2013 di Bandung*, 16 Maret 2013. Diakses dari: <http://www.upi.edu/main/file/Paparan%20Mendikbud%20Sosialisasi%20Kurikulum%202013%20Bandung%2016%20Maret%202013%20Tayang.pptx>. Pada tanggal 4 April 2013.
- McKenzie, W. 2005. *Multiple Intelligences and Instructional Technology, second edition*. Washington D.C.: International Society for Technology in Education.
- Mulyani, Endang. 2012. Pengembangan Model Penilaian Komprehensif Berbasis Proyek Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nasta, Tony. *How to Design a Vocational Curriculum*. Kogan Page.
- Norton, R.E. and Moser, J.R. 2008. *DACUM Handbook*. Ohio: Center on Education and Training for Employment, College of Education & Human Ecology, The Ohio State University.
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diakses dari: pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id.
- Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. Panduan Pengembangan IPA Terpadu Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Terdapat pada http://images.amurakidi.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R@O8-goKCtgAACeCOU01/050_Model_IPA_Trp.d.pdf?nmid=87345274. Di unduh Tanggal 24 Maret 2011.
- Soedijarto. 2008. Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional sebagai Ukuran bagi Pendidikan yang Bermutu dan Implikasinya, *Jurnal Pendidikan Penabur* No. 11 Tahun ke-7, Desember 2008 pp. 37-41. Diakses dari: <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2037-41Tercapainya%20Pendidikan%20Nasional.pdf> tanggal 25 Maret 2013.
- Suranto. 2012. *Pengembangan Model Inkubator Kewirausahaan: Peningkatan Mental Kemandirian Wirausaha Mahasiswa*. Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Suwardie. 2007. Model Evaluasi Kinerja Usaha Tamatan Pelatihan Kewirausahaan Balai Diklat Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (Dari Sudut Pandang Psikososial). Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syamwil, Rodia. 2010. Pengembangan Model Muatan Pra Vokasional dan Pembelajaran dalam Kurikulum SMP/ MTs di Sentra Industri Batik. Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Wagiyono, Dite. 2008. Peningkatan Sikap Kewirausahaan Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi melalui Media Koperasi Sekolah, *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial PPs Universitas Negeri Yogyakarta, Tidak dipublikasikan
- Wiles, J. 2009. *Leading Curriculum Development*. California: Corwin Press.

TANTANGAN GURU AGAMA PADA ABAD 21

Dr. Khairan Muhammad Arif, M.Ed

1. Pendahuluan

Abad 21 adalah abad kemajuan teknologi yang mencapai puncak keemasannya, abad yang juga disebut dengan abad millenium ini. Memiliki karakteristik yang berbeda dengan abad sebelumnya, abad 21 yang bercirikan era globalisasi ini memunculkan tantangan-tantangan multidimensional dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi, social, agama, budaya maupun pendidikan.

Dalam pendidikan, abad 21 melahirkan tantangan yang sangat besar dan rumit, system pendidikan di abad 21 mengalami perkembangan yang luar biasa, bahkan melahirkan teori-teori pendidikan modern yang memaksa setiap Negara membenahi system pendidikan mereka. diantara ranah pendidikan yang mendesak untuk selalu dikembangkan sesuai dengan tantangan abad 21 itu adalah kurikulum, teknologi pembelajaran dan kompetensi guru yang harus sesuai dengan perkembangan global, teknologi modern dan kebutuhan masyarakat modern. Makalah ini akan membahas dan memaparkan tantangan Guru Agama di abad 21 ini.

2. Abad 21 dan tantangannya

Abad adalah lama waktu/masa dalam kurun waktu seratus tahun, mulai hari pertama tahun 1 sampai hari terakhir tahun 100, sedangkan millennium adalah masa dari hari pertama tahun 1 hingga hari terakhir tahun 1000, dan millennium kedua adalah hari pertama tahun 1001 hingga hari terakhir tahun 2000, selanjutnya tahun 2001 hingga tahun 3000 nanti adalah millennium ketiga.

Abad 21 disebut juga dengan abad Millenium adalah masa tertentu dari kehidupan manusia dimana telah terjadi perubahan dunia yang sangat membawa dampak terhadap kehidupan manusia terutama dalam dunia teknologi, sehingga dimasa sekarang ini akan terjadi pula kecenderungan berpikir manusia ke arah; "Immanensi" yaitu kecenderungan manusia untuk menyimpulkan segala sesuatu dengan bertitik tolak semata-mata dari alam dan akal serta logika manusia. Penekanan hanya pada

aspek creature, time, finite quality. Artinya menolak segala sesuatu yang berciri ilahi dan hukum moralita yang teosentris. Prinsip uniformitas ini mengakibatkan manusia mengesampingkan segala yang unik dan normatif.

Kecenderungan lain abad 21 adalah berfikir eksistensialisme yaitu usaha untuk membangun sistem filsafat yang berangkat dari titik tolak manusia sebagai pembuat dan penentu atas pemikiran dan segala sesuatu yang beredar dalam lingkaran kehidupan ini. Pemeluk eksistensialisme percaya bahwa manusia memiliki kapasitas eksistensi yang potensial dalam kehidupannya. Demikian pula bahwa abad 21 dapat dilihat dari munculnya fakta tentang pluralitas kehidupan manusia yang menuntut manusia saling menghargai perbedaan dan keragaman.

Abad 21 ini juga disebut abad global atau era global yang berarti "era terbukanya hubungan dengan cepat dan tanpa batas antara Negara-negara di dunia dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, budaya, social, seni dan pendidikan dan sebagainya yang diikuti dengan kerjasama dan keterikatan antar bangsa di dunia".¹

3. Tantangan-Tantangan Pendidikan di Abad 21

Sebelum menjelaskan tantangan-tantangan abad 21 bagi guru, terlebih dahulu kita harus mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di abad ini, menurut UNESCO tantangan-tantangan pendidikan yang akan dihadapi di abad millennium ini diantaranya adalah:

- a. "Munculnya gerakan kuat dalam rangka globalisasi ekonomi yang ditandai menjamurnya perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah dan tumbuhnya perekonomian dunia yang tidak dapat diprediksi
- b. Perubahan mendasar terhadap penguasa-penguasa ekonomi dunia

¹. Lihat: Khairan Muhammad Arif, *Al-Jami'at Al-Islamiyah fii Indonesia, Tashawur Muqtarah litatwiir*, Disertasi Doktor, Ilmu Pendidikan, Universitas Liga Arab (Kairo: Univ. Liga Arab, 2008) hal 200

- akibat dari perpindahan perusahaan-perusahaan raksasa dunia.
- c. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Negara-negara berkembang yang diikuti besarnya kebutuhan manusia, sebaliknya bertambahnya usia-usia manusia di Negara-negara maju, yang membawa dampak pada kebutuhan dan permintaan pasar terhadap SDM yang memiliki strata pendidikan tertentu, hal ini berdampak pada sulitnya kesempatan kerja karena lapangan kerja yang ada membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi
 - d. Perkembangan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan ilmiah dan terapan seperti; teknologi canggih dalam bidang informasi dan komunikasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam rangka membangun link-link kerja, namun perkembangan teknologi ini diiringi kesenjangan yang sangat besar antara Negara-negara maju dengan Negara-negara berkembang, sehingga tidak semua Negara dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan
 - e. Munculnya fenomena marketing ilmu dan wawasan dari Negara maju terhadap Negara-negara berkembang”.²

Dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi dunia pendidikan di abad 21 yang disampaikan oleh UNESCO di atas, dapat disimpulkan bahwa, abad 21 atau era globalisasi adalah era kemajuan teknologi yang luar biasa dan multidimensi, setiap Negara dan bangsa harus mampu menghadapi tantangan-tantangan global ini, dunia pendidikan menjadi ranah kehidupan manusia yang sangat vital dalam menghadapi tantangan global, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan pasar, persaingan global yang mengandalkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta moralitas/karakter, tidak ada yang lain jawabannya adalah pendidikan bermutu yang dapat memproduksi SDM-SDM yang mumpuni, berkualitas dan modern sesuai kemajuan zamannya.

². UNESCO, World Conference on Higher Education, Higher Education in The Twenty First Century, (PDF) Paris: 5-9 October 1998, www.unesco.org.

4. Guru Agama dan Tantangan Pendidikan di Era Global

Guru dengan semua kompetensinya adalah ruh sebuah pendidikan, tidak ada pendidikan yang efektif tanpa guru, karena guru adalah sumber belajar utama, penggerak utama proses pembelajaran dan mengontrolnya, para profesionalisme, para sarjana dan para ahli diberbagai bidang keilmuan adalah hasil kerja dan jasa para guru, guru melahirkan SDM bahkan guru mencetak para pemimpin bangsa setiap masa, karenanya posisi guru dalam pendidikan tidak dapat digantikan oleh apapun sampai saat ini.

Para ahli pendidikan mendefinisikan bahwa guru adalah “Unsur yang aktif dalam mempengaruhi unsur-unsur lain dalam pendidikan yang memiliki fungsi sebagai pemimpin, pembimbing dan pengarah dalam proses pendidikan”³. Dalam Islam Guru adalah pemimpin, Pendidik, orang tua dan teladan dalam kehidupan anak atau manusia, sebagaimana firman Allah swt: “*Sungguh pada diri Rasulullah saw itu terdapat teladan yang baik bagimu...*” (Surah, Al-Ahzab, ayat: 21).

Fungsi guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai “Pembina karakter dan tingkahlaku anak, pemberi petunjuk, penyeru kebaikan dan pelaku dakwah di jalan Allah swt, sebagaimana guru adalah pendidik sekaligus pelatih dan motivator bagi siswanya berdasar nilai-nilai Islam dan keilmuan”⁴.

Adapun karakteristik atau sifat guru dalam Islam adalah:

- a. “Memiliki sifat Jujur dalam mengajar, yaitu jujur dalam hati yang melahirkan integritas yang meyakini bahwa kebenaran adalah kebenaran serta komitmen dengannya, jujur dalam perkataan berarti menjauhi seluruh kedustaan dan kepalsuan dalam berbicara, jujur dalam sikap perbuatan berarti ikhlas melaksanakan tugasnya dan sabar atas semua resiko dan kendala dalam semua proses pembelajaran.
- b. Memiliki sifat “penyampai” atau komunikasi efektif, dengan sifat ini guru mampu mentransfer pengetahuan

³. Muhammad At-taumi As-Syaibani, *Min Usus at-tarbiyah Al-Islamiyah*, (Tripoli: Al-Mansya’ Al-Aamah linasyri watuzi’ wal-I’lan, 1982) hal 57

⁴. Ahmad Arafat Al-Qadhi, *Al-Fikru At-tarbawi indal mutakallimin Al-Muslimin*, (Kairo: Al-Hai’ah Al-Amah lilkitab, 1996), hal 437

kepada orang yang diajarnya, sifat ini juga memberikan skill pada guru menjelaskan pelajaran dengan fasih, efektif dan efisien, perkataannya memberikan efek pengaruh yang mendalam pada siswanya

- c. Memiliki “kecerdasan” yang dimaksud kecerdasan adalah kemampuan berfikir logis, pandai, berilmu dan memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang dapat diberikan kepada siswanya, kemampuan inilah yang dimiliki oleh para Nabi dalam berdakwah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya”⁵.

Dari tiga karakteristik di atas, sebenarnya telah cukup menjadi modal utama integritas seorang guru, khususnya guru agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar sekaligus, karenanya karakteristik ini harus dimiliki oleh setia guru agama ataupun guru non agama dalam mengajar, karena banyak kegagalan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan pendidikan secara umum, ketiak para guru tidak memiliki karakter dan kompetensi di atas.

Dalam system pendidikan indonesia guru harus memiliki kompetensi sebagai guru, kompetensi itu tertera dalam *peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007: “Seorang guru harus memiliki 4 Kompetensi Dasar yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru”*⁶.

Kompetensi di atas kemudian diharapkan dapat mewujudkan kode etik guru sebagaimana berikut:

- a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila
- b. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing – masing .
- c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan .
- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan

dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik

- e. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengabdianya.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan”⁷.

Dengan kompetensi dan kode etik guru diatas, seorang guru di era Globalisasi ini diharapkan mampu menjadi faktor utama peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, menjadi leader dan teladan serta pengarah dan pembimbing yang kompeten bagi siswa-siswanya, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan, membawa Negara ini kepada kemampuan menghadapi segala tantangan dan problematika bangsanya, sesuatu perkembangan zamannya.

5. Tantangan Guru Agama di Indonesia

Tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat abad 21 tersebut dapat dibedakan menjadi tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, di antaranya penguatan nilai –nilai budaya dan karakter bangsa dan pengembangan nilai-nilai demokrasi, Pengetahuan tentang kejiwaan/ psikologi manusia modern, Teknologi Pembelajaran yang menuntut inovasi media dan sumber-sumber belajar, serta fenomena rendahnya mutu pendidikan. Sementara tantangan eksternal adalah tantangan guru profesional dalam menghadapi abad 21 dan

⁵ . Ali Abdul Halim Mahmud, *At-tarbiyah Islamiyah fil Madrasah*, (Kairo: Daar at-tauzi wannasyr, 1996) hal 368-369

⁶ . Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007

⁷ . Abdul Rahmat, *Profesi Keguruan, Studi Eksplorasi dan Pengukuhan Identitas Ilmu*, (Sukabumi: Patlot Indonesia Pres, 2007) ,hal 57

sebagai bagian dari masyarakat dunia di era global.

5.1 Tantangan Internal

Tantangan Internal adalah tantangan yang dihadapi oleh Guru dari dalam, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari internal pendidikan nasional Indonesia, diantaranya adalah:

5.1.1 Budaya dan Karakter.

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dan karakter adalah hal yang substantive yang sangat mempengaruhi kualitas dan mutu seorang guru, guru modern adalah guru yang memiliki kemampuan memahami budaya dan memiliki kekuatan karakter, budaya yang positif dan maju seperti rasa hormat, disiplin, jujur, gotong royong, malu, dan sebagainya adalah modal utama seorang guru menghadapi budaya-budaya negative, sehingga guru mampu menanamkan nilai-nilai budaya local ini kepada siswanya. Demikian pula karakter atau akhlak sangat mempengaruhi proses pendidikan dan pengajaran, guru yang berkarakter adalah guru yang “memiliki pribadi yang relative stabil yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi”⁸.

5.1.2 Pengetahuan tentang Psikologi Manusia Modern

Objek utama pendidikan adalah manusia dengan semua dimensi kemanusiaannya, ruh akal dan jasad, proses pendidikan adalah proses merubah manusia dan meningkatkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, guru sebagai penggerak utama proses pendidikan harus mengetahui dengan baik psikologi dan karakteristik manusia yang dididiknya.

Dalam rangka memaksimalkan hasil pendidikan yang baik serta pembelajaran yang efektif dan efisien ilmu psikologi pendidikan adalah ilmu dan pengetahuan yang paling baik untuk mengetahui karakter setiap anak dan bagaimana mendidik dan mengajarnya, ilmu psikologi Pendidikan menjadi ilmu yang sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini.

Ilmu Psikologi Pendidikan adalah “ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip

Psikologi dalam pendidikan”⁹. Ilmu ini telah menjadi syarat mutlak bagi guru untuk menjalankan tugasnya sebagai guru, perkembangan psikologi siswa modern menuntut adanya inovasi ilmu psikologi dan pengembangan-pengembangan teori-teori psikologi belajar modern, sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Psikologi Pendidikan modern mengajarkan para guru bahwa anak bukanlah makhluk statis yang hanya bergantung pada stimulasi dari guru sebagaimana dalam teori psikologi behaviorisme¹⁰, akan tetapi manusia adalah makhluk pembelajar aktif yang harus dilihat sebagai makhluk yang utuh, akal, ruh, jasad, social dan sebagainya, karenanya pembelajaran yang baik adalah melibatkan semua dimensi tersebut dalam proses pembelajarannya.

5.1.3 Penguasaan Teknologi Pembelajaran, Media dan Sumber belajar modern

Diantara pengetahuan dan sekaligus keahlian yang harus dimiliki oleh guru, khususnya guru agama dalam pendidikan dan pembelajaran modern adalah pengetahuan dan penguasaan Teknologi pendidikan atau pembelajaran, Para Ahli mendefinisikan Teknologi pembelajaran ini dengan “ Teori dan Praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”¹¹.

Fungsi dan manfaat Teknologi Pembelajaran ini dalam pendidikan abad 21 sangat vital sebagaimana yang disampaikan oleh Yusufhadi Miarso adalah “Terwujudnya beberapa pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkannya dan dimanfaatkannya aneka sumber, proses dan system belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, menuju terbentuknya masyarakat belajar dan

⁹ . Purwa AtmajaPprawira, *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru*, (Jakarta: Ar ruz Media, 2012)hal 29

¹⁰ . lebih jelasnya tentang psikologi Behaviorisme dapat dilihat dalam: Calvin S. Hall and Gardner Lindzey, alih bahasa: A. Supratikna, *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal 199

¹¹ . Definisi TP tahun 1994, Lihat: Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana dan Pustekom Diknas, cet. IV 2009) hal 140

⁸ . Prayitno dan Belferik Manulang, *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Grasindo, 2011) hal 47

berpengetahuan”¹². Diantara kawasan Teknologi Pembelajaran/pendidikan yang sangat membantu guru dalam proses pembelajaran yang inovatif dan efektif adalah kemampuan mengembangkan media dan sumber belajar, “Dengan media penyajian pembelajaran menjadi jelas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, serta dapat mengatasi sikap pasif siswa dan memberikan kegairahan belajar..”¹³.

5.2 Tantangan Eksternal

Diantara tantangan eksternal yang dihadapi oleh para guru dalam pendidikan di era global ini adalah:

- a. Revolusi ilmiah dalam bidang Teknologi dan Informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menjadi kebutuhan dan tuntutan yang harus dikuasai oleh setiap guru, zaman informasi dan komunikasi mendorong setiap guru untuk proaktif mengembangkan diri dan memahami lingkungan dan tantangan zamannya.
- b. Demokrasi dan kebebasan, diantara tantangan internal yang sangat penting yang dihadapi para guru adalah demokratisasi dalam semua aspek kehidupan termasuk demokrasi pendidikan, seorang guru dituntut untuk menjadi lebih demokratis dalam mengajar tidak membedakan siswanya dan menghormati serta menghargai perbedaan serta kebebasan orang lain, guru agama harus mampu membedakan anatara kebebasan yang bertanggungjawab dan kebebasan yang tidak bertanggungjawab, nilai-nilai demokrasi yang terkadang bertentangan nilai budaya dan agama harus dapat disesuaikan dengan kondisi local dengan cerdas oleh seorang guru¹⁴.
- c. Perkembangan Ekonomo Global, Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena pendidikan dan kurikulumnya harus

dapat menyesuaikan diri dan memenuhi tuntutan pasar ekonomi dunia, kebutuhan pasar dan perusahaan-perusahaan multi nasional yang membutuhkan SDM terdidik dari lembaga-lembaga pendidikan

- d. Masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah sebuah masyarakat yang tidak lagi mengandalkan produk sumberdaya alam, masyarakat ilmu hanya mengenal produksi pengetahuan, ide dan keilmuan, masyarakat ini sangat mengandalkan produk penelitian ilmiah dan penemuan-penemuan sains dalam segala bidang. Karenanya guru dituntut untuk mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan, ide, gagasan dan penelitian.

6. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tantangan guru agama pada Abad 21 adalah tantangan yang berat, kompleks dan cepat, seorang guru harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat ini khususnya dalam hal teknologi pendidikan, penguasaan informasi dan komunikasi, penguasaan teori-teori modern tentang psikologi pendidikan, pemanfaatan media informasi dan komunikasi, pengembangan media dan sumber belajar modern untuk menghadapi tantangan eksternal yang berupa, revolusi informasi dan komunikasi, demokrasi, ekonomi global dan masyarakat ilmu yang mengandalkan produk ilmu, ide, gagasan dan teori-teori daripada produk fisik dan sumberdaya alam.

¹² . Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih teknologi Pendidikan*,... hal 175

¹³ . Arif, F. Sadiman, *Media Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 17-18

¹⁴ . Khairan Muhammad Arif, *Al-Jami'at Al-Islamiyah fii Indonesia, Tashawur Muqtarah litatwiir*, Disertasi Doktor, Ilmu Pendidikan, Universitas Liga Arab, 230

PEMBELAJARAN BERBASIS SOFTSKILLS, SUDAHKAH DILAKUKAN GURU?

M. Agphin Ramadhan & Tuti Iriani
Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Harus diakui bahwa tantangan pendidikan pada abad ke-21 adalah membangun masyarakat yang berpengetahuan, terampil dan berkarakter. Artinya bahwa seseorang tidak cukup hanya memiliki kemampuan pada *hard-skills* saja tetapi juga *soft-skills*. Suatu penelitian menyebutkan bahwa kesuksesan seseorang 80 persen ditentukan oleh *soft-skills* sedangkan kemampuan intelektual hanya 20 persen. Suatu realita bahwa pendidikan di Indonesia masih memberikan persentase yang besar untuk muatan *hard-skills*, sementara pendidikan *soft-skills* menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sampai saat ini pembelajaran di kelas hanya berorientasi bagaimana meluluskan siswa dengan kemampuan *hard-skills* yang tinggi namun minim dengan kemampuan *soft-skills*. Akibatnya banyak siswa yang telah lulus dari sekolah dengan nilai kemampuan *hard-skills* yang tinggi tetapi tidak dapat bekerja sama, kurang terampil berkomunikasi, kurang memiliki etika, kurang memiliki daya juang, kecerdasan emosional yang rendah, cenderung egois, dan menjadi pribadi yang tertutup. Jika demikian, apa yang harus dilakukan guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk mengantarkan siswanya pada gerbang kesuksesan dalam *hard-skills* dan *soft-skills*? Makalah ini akan menyajikan tentang strategi pembelajaran berbasis *soft-skills* yang dapat diterapkan oleh guru sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan abad 21.

Kata kunci: Hard-skills, soft-skills, strategi pembelajaran.

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa guru adalah salah satu komponen utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut Kusnandar (2008). Tantangan pendidikan abad 21, menuntut masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*) yang memiliki: (1) keterampilan melek TIK dan media (*ICT and media literacy skillss*) ; (2) keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skillss*) ; (3) keterampilan memecahkan masalah (*problem solving skillss*) ; (4) keterampilan berkomunikasi efektif (*effective communication skillss*) ; dan (5) keterampilan bekerjasama secara kolaboratif (*collaborative skillss*). Tantangan tersebut bagi seorang guru bukan sesuatu yang mudah, karena guru tidak saja dituntut dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan kompetitif (Jalil, 2012). Dengan kemampuan tersebut, kelak peserta didik mempunyai bekal yang memadai, selain ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan tetapi juga memiliki karakter dan

kepribadian yang kuat sebagai bangsa Indonesia.

Sampai hari ini, pendidikan di Indonesia masih memberikan porsi yang besar untuk *hard-skills*. Guru lebih mengutamakan memberikan materi sebanyak-banyaknya agar semua materi pelajaran tersampaikan. Bahkan pembelajaran di kelas hanya berorientasi bagaimana meluluskan peserta didik sampai seratus persen tanpa memikirkan bagaimana tanggung jawab dan nasib peserta didik selepas mereka lulus. Menurut Widyawati (2010), penguasaan *hard-skills* yang dominan ini dikarenakan sistem yang membelenggu kreativitas guru. Adanya ujian nasional yang menguras tenaga, waktu dan pikiran serta keharusan peserta didik dalam penguasaan berbagai ketrampilan membuat guru lebih memfokuskan diri untuk memberikan *hard-skills*. Artinya penilaian yang mengacu pada ranah afektif yang menekankan pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik masih belum dilakukan, yang seharusnya ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Hariyanto, 2011). Dengan kata lain, ada sisi yang kurang diperhatikan dalam pembelajaran di kelas yaitu *soft-skills* yang merupakan pelengkap dari *hard-skills*

yang akan berperan dalam kesuksesan seseorang. Sebagaimana salah satu kajian yang pernah dilakukan di Harvard University yang menyatakan *soft skills* menyumbang 80% atas kesuksesan seseorang. Idealnya keseimbangan *hard-skills* dan *soft-skills* menjadi sangat penting agar peserta didik mampu menjadi lebih terbuka dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman.

Hadirnya kurikulum 2013 adalah disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pelajaran. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif dan lebih produktif sehingga dapat mampu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. Hal ini sejalan dengan agenda global pembelajaran di abad 21 menuntut peserta didik mampu bersaing dan sejahtera sehingga perlu belajar lebih banyak dengan cara dan teknik yang berbeda. Karena ketika peserta memasuki abad yang baru maka akan menghadapi resiko yang lebih banyak dari situasi yang penuh ketidakpastian. Untuk itu siswa memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dan menguasai keterampilan yang lebih dibandingkan generasi sebelumnya (Suryadharma, 2013). Dengan demikian, harus diakui bahwa *soft-skills* sangat penting untuk itu bagaimana memadukan pembelajaran berbasis *soft skills* dengan *hard-skills*? langkah-langkah apa yang harus dilakukan guru? Tulisan ini akan memaparkan tentang strategi pembelajaran berbasis *soft-skills* sebagai salah satu alternatif untuk menyiapkan peserta didik yang siap menyongsong abad 21.

2. Pembahasan

2.1 Pengertian Soft-skills

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian *soft-skills* seperti Berthal dalam Sailah (2008) yaitu "Personal and interpersonal behaviors that develop and maximize human performance (eg. Coaching, team building, decision making, initiative. Sedangkan Klaus (2007) mengatakan bahwa "soft skillss encompass personal, social, communication, and self management

behaviours, they cover a wide spectrum: self awareness, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, critical thinking, organizational". Hal ini sejalan dengan pendapat Tripathy (2006), yang menyatakan bahwa *soft-skills* adalah kemampuan yang bersifat afektif yang dimiliki seseorang, meliputi: awareness, attitude, initiative, empathy, confidence, integrity, self-control, leadership, problem solving, risk taking and time management. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa *soft-skills* adalah seperangkat kemampuan yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. *Soft-skills* memuat komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, membangun tim, serta kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian individu. Tentu saja kemampuan tersebut berhubungan dengan tingkah laku personal dan interpersonal yang dimiliki melalui pelatihan, pengembangan kerja, inisiatif, pengambilan keputusan dan lain-lain.

Secara garis besar *soft-skills* terbagi atas *interpersonal skills* dan *intrapersonal skills*. *Interpersonal skills* adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain sedangkan *intrapersonal skills* adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. *Interpersonal skills* bukan merupakan bagian dari karakter kepribadian yang bersifat bawaan, melainkan merupakan ketrampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. *Interpersonal skills* yang baik dapat dibangun dari kemampuan mengembangkan perilaku dan komunikasi yang asertif dan efektif, misalnya kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Seseorang yang memiliki *interpersonal skills* yang baik ditandai dengan memiliki konsep diri dan berkepribadian yang kuat; meningkatkan potensi diri menjadi pribadi yang mempunyai kompetensi dibidangnya; percaya diri dan mengasah kemampuan berkomunikasi; berpenampilan menarik dan menyenangkan; meningkatkan human relations dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi dan meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerjasama dalam team. Contoh *Interpersonal Skills* adalah *Motivation skills*, *Leadership skills*, *Negotiation skills*, *Presentation skills*, *Communication skills*, *Relationship building*, *Public speaking skills* dan *Self-marketing skills*. Sebagai contoh, jika seseorang mampu membangun hubungan

dengan orang lain, memiliki motivasi diri di dalam mengembangkan hubungan, memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri maka hal itu dapat dikategorikan sebagai dikatakan memiliki *interpersonal skills* yang baik. Tentu saja kemampuan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran untuk belajar dan mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan *Intrapersonal skills* adalah memahami diri, mengelola emosi, bertindak adaptif berdasarkan pengetahuan tentang diri sendiri. Contoh *Intrapersonal skills* yaitu: *Time management, Stress management, Change management, Transforming beliefs, Transforming character, Creative thinking processes, Goal setting and life purpose* dan *Accelerated learning techniques*. Untuk itu dalam konteks pembelajaran, *soft-skills* dapat diintegrasikan dengan materi pembelajaran yang diberikan guru di kelas. Sebagaimana Sailah (2007) menyatakan bahwa materi *soft skills* perlu dikembangkan kepada peserta didik, bukan hanya pada penanaman sikap jujur tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan komitmen. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamidah (2012) bahwa sudah saatnya pembelajaran *soft-skills* terintegrasi menjadi kebutuhan, hal ini didasari keadaan bahwa proses pembelajaran selama ini lebih menekankan aspek *hard-skills*.

2.2 Strategi Pembelajaran Berbasis Soft Skills

Dick & Carey (2001) mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama materi tersebut. Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran yaitu (1) kegiatan pembelajaran pendahuluan; (2) penyampaian informasi; (3) partisipasi peserta didik; (4) tes dan (5) kegiatan lanjutan. Menurut Seels & Richey (2004) strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dalam aktivitas pembelajaran. Sementara Gagne dan Briggs (2008) menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan penentuan urutan yang memungkinkan tercapainya tujuan dan memutuskan bagaimana untuk menerapkan kegiatan instruksional bagi masing-masing individu yang akan dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pemahaman tentang strategi pembelajaran maka dapat dikatakan bahwa sebagai suatu pendekatan yang menyeluruh dalam suatu sistem

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Terkait dengan strategi pembelajaran berbasis *soft-skills*, Amalia (2012) menyatakan bahwa *soft-skills* bukanlah suatu nama mata pelajaran yang diberikan pada saat jam pelajaran mata pelajaran itu berlangsung, tetapi *soft-skills* merupakan kemampuan non teknis bagi peserta didik yang harus diberikan pengembangannya pada setiap mata pelajaran. Seluruh guru mata pelajaran diharapkan mampu mengintegrasikan *soft-skills* dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mampu mengasah dan mengembangkan kemampuan *soft-skills* secara rutin. Adanya pembelajaran terpadu antara *hard-skills* dan *soft-skills* sangatlah diharapkan keberadaannya karena kemampuan *soft-skills* tidak kalah pentingnya dengan kemampuan *hard-skills*. Melalui strategi pembelajaran yang tepat, *soft-skills* menjadi hal yang mungkin dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan *soft-skills*.

Sailah (2008) menyatakan bahwa terdapat sedikitnya tiga cara penulisan *softskills* dalam pembelajaran, yaitu melalui:

1) *Role model* adalah dengan cara memberikan contoh kepada peserta didik. Sebagai contoh, jika akan menegakkan disiplin tepat waktu, maka seorang guru harus terlebih dahulu datang ke kelas. Apabila peserta didik diminta untuk selalu menjaga kebersihan kelas, maka guru pun harus mampu menghapus papan tulis setelah selesai mengajar. Apabila berjanji akan mengembalikan tugas dalam tiga minggu, maka jangan sampai mengembalikan lima minggu kemudian. *Role model* seorang guru juga dapat diperlihatkan dengan saling edifikasi dengan teman sejawat di depan peserta didik. Edifikasi berasal dari kata *to edify* yaitu memberikan penghargaan bagi teman sejawat. Saling menjelekkan antar guru di depan peserta didik patut dihindari. Dengan kata lain bahwa strategi pembelajaran dianggap efektif jika dalam memberikan kemampuan *soft-skills* selain dengan pembelajaran langsung harus dilengkapi dengan contoh atau model agar peserta didik dapat terjun langsung dan menghadapi situasi. Dalam hal ini siapakah yang menjadi model, sudah tentu adalah guru-guru. Artinya dengan melihat contoh guru-guru yang memiliki kemampuan *soft-skills* yang baik, peserta didik pun akan mencontohnya karena

dengan mencontoh proses pembelajaran akan lebih cepat dibandingkan dengan hanya memberikan teori. Disini guru harus bisa menjadi model dari *soft-skills* tersebut, sehingga peserta didik memiliki contoh dalam bersikap. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang guru agar dapat terus meningkatkan kemampuan *soft-skills* yang dimilikinya.

2) *Message of the week* adalah pesan moral yang diberikan pada saat jam pelajaran berlangsung. Sebelum atau saat akan mengakhiri pembelajaran, guru memberikan pesan-pesan moral tanpa bersifat menggurui. Dapat dengan cerita atau contoh-contoh yang ditemui yang dikaitkan dengan materi. Seperti rasa ingin tahu, ketelitian, tanggung jawab dan lain-lain. Pesan tersebut dapat dilakukan dengan lisan atau pun dengan gambar ataupun dengan film yang sekarang mudah di dapatkan dengan pemaknaannya dalam kehidupan, atau animasi yang mendukung dari *website* internet. Atau pun dengan memberikan kata-kata motivasi untuk memotivasi peserta didik.

3) *Hidden curriculum*. Pelajaran dari kurikulum tersembunyi ini disampaikan dengan tidak berbentuk suatu mata pelajaran tetapi selalu disampaikan sebagai kompetensi tambahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Kurikulum tersembunyi lebih ampuh karena dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik minat dan menyenangkan.

Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat diharapkan *soft-skills* dapat diintegrasikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cakap dalam kemampuan *hard-skills* saja, tetapi juga dalam kemampuan *soft-skills*.

Untuk menerapkan pembelajaran berbasis *soft-skills*, ada beberapa hal yang harus dimiliki guru yaitu :

- Sumber Daya Manusia dalam hal ini guru. Artinya bahwa guru harus memahami konsep *soft-skills* dan *hard-skills* serta menyatukan keduanya di dalam pembelajaran. Konsistensi dan komitmen guru dalam menerapkan strategi pembelajaran ini sangat penting.
- Kebijakan. Dalam hal ini pihak sekolah harus mendukung bersama-sama untuk dapat semua guru menjalankan strategi pembelajaran berbasis *soft-skills*. Menurut Suryadharma (2013) pendidikan karakter bangsa di sekolah akan menguat

jika terjadi pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan yang akan menjadi budaya sekolah.

- Keyakinan yang tinggi. Guru harus memiliki keyakinan sebagai pendidik untuk mengajarkan *hard-skills* dan *soft-skills* sekaligus. Tentunya guru harus menguasai keduanya, jika guru belum menguasainya maka guru pun sambil mengajar juga belajar meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.
- Menyusun rencana pembelajaran. Sebagaimana tugas guru adalah menyusun rencana pembelajaran maka dalam rencana ini guru dapat merencanakan *soft-skills* apa saja yang akan diberikan sehingga peserta didik dapat menguasainya. Misalnya kemampuan komunikasi yang baik, maka dalam perencanaan pembelajaran guru merencanakan kegiatan yang mengharuskan peserta didik untuk berkomunikasi di depan kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryadharma (2013) yang menyatakan bahwa strategi penguatan pendidikan karakter diawali dari kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diintegrasikan ke dalam KBM pada setiap mata pelajaran. Dengan demikian, guru harus menata ulang RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan mengaitkan unsur *soft-skills* dengan materi pembelajaran yang ditulis secara jelas dan dijabarkan bagaimana mempraktekkan *soft-skills* tersebut di kelas.
- Bimbingan. *Soft-skills* merupakan ketrampilan lunak yang mengacu kepada tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Untuk itu bimbingan dari guru sangat diperlukan. Dengan bimbingan guru, peserta didik dapat mengetahui kemampuan apa saja yang harus dikembangkan sehingga dapat memiliki kemampuan *soft-skills* yang berguna untuk dirinya sendiri. Dalam bimbingan ini, pembelajaran *soft-skills* dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diintegrasikan kedalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olah raga, karya tulis dan lain-lain.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa dalam menerapkan strategi

pembelajaran berbasis *soft-skills*, guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. Pada saat menentukan metode pembelajaran, yang utama adalah menentukan kemampuan apa yang akan diubah dari peserta didik setelah menjalani pembelajaran tersebut baik dari sisi *hard-skills* maupun *soft-skills*. Jika mata pelajaran tersebut mengharapkan peningkatan atribut *soft-skills* komunikasi, kerjasama kelompok, dan berfikir analitis dan kritis, maka diskusi kelompok diikuti dengan penyajian lisan akan menjadi pilihan untuk diterapkan.

Sejalan dengan penerapan kurikulum 2013, pendekatan SCL (*Student centered learning*) atau pembelajaran berpusat pada siswa aktif menjadi sangat penting. Untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran, keterlibatan peserta didik perlu ditingkatkan dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat memecahkan masalah, berpikir kritis, memiliki pemalaran yang baik dan lain sebagainya. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis *soft-skills* melalui pendekatan SCL, seperti *Contextual learning (CTL)*; *Small Group Discussion*; *Role-Play & Simulation*; *Case Study*; *Discovery Learning (DL)*; *Self-Directed Learning (SDL)*; *Cooperative Learning (CL)*; *Collaborative Learning (CbL)*; *Contextual Instruction (CI)*; *Project Based Learning (PjBL)* dan *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Inti pembelajaran SCL ini adalah

- a. Mengutamakan tercapainya kompetensi peserta didik (kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif secara utuh),
- b. Memberi pengalaman belajar peserta didik. (bukan hanya memberi soal ujian/tes, sedangkan proses belajarnya tidak bisa diketahui),
- c. Peserta didik harus dapat menunjukan hasil belajarnya/ kinerjanya,
- d. Pemberian tugas menjadi pokok dalam pembelajaran,
- e. Peserta didik mempresentasikan penyelesaian tugasnya, dibahas bersama, dikoreksi, dan diperbaiki, merupakan proses yang penting dalam pembelajaran SCL.

Sebagai contoh, jika kita menggunakan salah satu metode pembelajaran misalnya *Contextual Learning (CTL)* maka pemahaman terhadap metode ini menjadi sangat penting. Apa tujuan guru dalam menerapkan CTL ?

Bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran CTL ? *Soft-skills* apakah yang akan didapat dari menerapkan metode pembelajaran CTL ? Materi pelajaran apa yang sesuai dengan metode CTL ini dan lain-lain.

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan dunia luar sehingga mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemahaman tersebut Widyawati (2010) mencatat bahwa pembelajaran kontekstual meliputi penekanan pada pemecahan masalah; perlunya proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat dan tempat kerja; mengontrol dan mengarahkan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar mandiri; bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda; mendorong siswa belajar dari sesama teman dan menggunakan penilaian autentik. Dengan demikian maka melalui metode pembelajaran kontekstual ini jika kita kaitkan dengan pengembangan *soft-skills*, maka *soft-skills* yang muncul dalam diri siswa seperti berpikir kritis, rasa ingin tahu yang besar, motivasi belajar, berkomunikasi dengan guru maupun teman, kreatif, mampu memecahkan masalah, bekerja sama, mandiri dan dapat berargumentasi logis.

3. Kesimpulan

Abad ke-21 ditandai dengan arus global yang merombak seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang menghasilkan peradaban baru serta restrukturisasi dunia. Untuk menghadapi hal itu berbagai fakta mengindikasikan perlunya perubahan tatacara hidup bangsa atau perubahan budaya dan *mind set* bangsa. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan baik dari keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan. Pendidikan karakter yang sekarang menjadi pusat perhatian harus mengedepankan pemahaman bahwa peserta didik adalah bibit-bibit yang mempunyai potensi keunggulan yang beragam atau berbeda-beda satu dan lainnya dengan bermacam-macam potensi kreatifnya.

Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter inilah yang diperlukan dalam rangka mengembangkan, memproses dan menguatkan sifat mulia kemanusiaan dengan tulus ikhlas untuk mencapai diri yang terbaik. Salah satu upaya untuk menumbuhkan sifat mulia dan mampu menghadapi tantangan abad 21 adalah memberikan pembelajaran dengan memadukan *hard-skills* dan *soft-skills*. Pola pembelajaran yang cenderung menghasilkan siswa yang pasif, selalu bergantung dan menunggu asupan guru harus diubah dengan kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif mencari sumber pengetahuan, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, memiliki inisiatif dan tidak mudah putus asa. Untuk itu, ada tiga hal yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran *soft-skills* yaitu pertama, guru harus bekerja keras dan memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan pembelajaran berbasis *soft-skills* ini. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengubah keadaan yang sudah menjadi "*habits*" tetapi dengan keyakinan diri bahwa strategi pembelajaran ini dapat dilakukan demi mempersiapkan peserta didik siap menghadapi tantangan yang lebih berat. Kedua, kemandirian. Guru harus menjadi sosok yang mandiri dan teladan sebagai manusia merdeka. Tidak tergantung pada orang lain, percaya diri, konsisten dan memiliki semangat belajar, dan yang ketiga adalah kerja sama dari semua pihak termasuk orang tua harus diajak terlibat dengan pembelajaran *soft-skills* ini agar mereka mengerti akan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang jelas, guru memiliki peran besar di dalam mengimplementasikan setiap proses pembelajaran dan guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas tetapi juga adaptif terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki. (2012). Strategi Integrasi Softskillss Dalam Pembelajaran Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UNY.
- Dick W., Carey. & Carey, J (2001) *The systematic design of instruction*. (5th ed). Allyn & Bacon.
- Elfindri dkk. (2011). *Soft Skillss Untuk Pendidik*. Padang: Baduouse Media.
- Hamidah, Siti. (2012). Model Pembelajaran Soft Skillss Terintegrasi Pada Siswa SMK Program Studi Keahlian Tata Boga. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012.
- Jalil, Abdul. (2012). *Tantangan Guru di Abad 21*. <http://amachmud.blogspot.com/2012/03/tantangan-guru-di-abad-21.html> Diakses tanggal 22 Agustus 2013.
- Klaus, P. (2007). *The hard truth about soft skillss*. New York: Harper Collins Publisher.
- Sailah, Illah. (2008). *Pengembangan Softskillss di Perguruan Tinggi*. Tim Kerja Pengembangan Softskillss Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Jakarta.
- Suryadharma. (2013). *Tantangan Pendidikan abad 21 Untuk Menghadapi Era Globalisasi*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, 16 September 2013 di TMII Jakarta.
- Tripathy. (2006). *When Going Gets Tough, The Soft Get Going*. <http://www.selfgrowth.com/articles/Tripathy1.html> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.
- Widiyawati. (2010). Makalah Strategi Pembelajaran Soft-Skills dan Multiple Intelligence. Program PPS UNP.

PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA REKONSTRUKSI SOSIAL: Perspektif Filsafat Rekonstruksionisme

Mukodi, M.S.I.

Dosen PBSI STKIP PGRI Pacitan

mukodi@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research). Bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek kajian, lalu menganalisis bahasan riset. Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kajian ini bertujuan untuk membedah historisitas aliran filsafat rekonstruksionisme; pokok-pokok pemikiran filsafat rekonstruksionisme; tujuan, metode dan kurikulum pendidikan rekonstruksionisme.

Hasil kajian ini menemukan bahwa; 1) kaum rekonstruksionism melakukan rekonstruksi sosial melalui pendidikan dengan membentuk aliran filsafat rekonstruksionisme; 2) metode pengajaran ala rekonstruksionism didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis; 3) kurikulum pendidikan rekonstruksionism menekankan pada penumbuhan kesadaran kritis dan membangun kesadaran polyculture dengan mengapresiasi keragaman budaya, adat istiadat suku tertentu untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme kultural peserta didik.

Kata Kunci: rekonstruksi sosial, pendidikan dan aliran rekonstruksionisme.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, moral keserakahan ekonomi, moral, kekuasaan otoriter politik, dan moral ketikadilan hukum justru merajalela ketika pendidikan berada pada titik puncak "kemajuan". Fakta membuktikan bahwa teknologi dan industri sebagai produk pendidikan berhasil mendorong dinamika kehidupan melaju begitu cepat. Dahulu, seorang menjadi kaya harta setelah puluhan tahun sabar menunggu ternaknya beranak pinak secara alami. Kini dengan teknologi produksi, dalam waktu singkat jumlah ternaknya berlipat ganda. Apalagi, jika peralatan teknologi dipergunakan secara amoral, dalam waktu sekejap dan dengan satu unit komputer, seseorang bisa membobol bank dan mendapatkan triliunan rupiah (Suparlan, 2007: 27).

Faktor dominan munculnya kontradiksi ini diperkirakan karena pendidikan tidak difungsikan untuk mengawal teknologi sampai pada tingkat pemberdayaannya. Pendidikan tidak ditumbuhkembangkan dalam perilaku keseharian. Manusia sengaja melepaskan pendidikan atau pendidikan dilepaskan oleh manusia dari sistem pemberdayaan teknologi. Ketika terlepas dari bingkai pendidikan, teknologi dan industri otomatis memberikan keleluasaan terhadap perkembangan moral keserakahan (Suparlan,

2007: 27). Kondisi seperti ini menjadi sangat rasional. Mengingat, dulu pendidikan berbasis moral, tapi sekarang pendidikan berbasis pengetahuan. Praktis, sepanjang moral mendukung pengetahuan, maka moral akan digunakan. Sebaliknya, jika moral tidak mendukung pengetahuan pastilah moral akan disingkirkan (Suyata, 21/9/2011).

Pasar bebas dan efek domino dari globalisasi pun menyebabkan pendidikan di Indonesia pun kini menjadi sangat mahal. Ibarat menara gading, di mana para penikmat pendidikan hanyalah sekelompok orang kaya. Efek domino dari krisis multidimensional, menimbulkan depresi ekonomi yang membuat lembaga pendidikan menjadi badan otonom sekaligus menjadi lahan bisnis baru para pemilik modal. Mirip dengan depresi ekonomi yang menimpa Amerika tahun 1930-an. Sebuah kelaparan di tengah kemakmuran.

Dalam konteks itu, pendidikan sebagai upaya rekonstruksi sosial yang ditawarkan aliran rekonstruksianisme merupakan seperangkat gagasan dan tawaran pemikiran alternatif yang bisa diadapi oleh pemikir pendidikan untuk membebaskan pendidikan dari jebakan "carut-marut" sosial budaya, politik dan kepentingan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan seharusnya untuk membebaskan manusia dari "kerangkeng" kebodohan, dan hadir dalam

upaya rekonstruksi sosial pada masyarakat secara menyeluruh.

2. Sejarah Filsafat Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme sebagai sebuah sistem pendidikan, berawal dari terbitnya buku John Dewey pada tahun 1920, yang berjudul *Reconstruction in Philosophy*. Buku ini lalu dijadikan gerakan oleh George Counts dan Harold Rugg pada tahun 1930-an, melalui keinginan mereka untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai media rekonstruksi terhadap masyarakat. Pada tahun 1932, George Counts (1889-1974) mengkritik praktik-praktik sekolah yang telah mengabdikan ketidaksamaan-ketidaksamaan yang mencolok berdasarkan ras, kelas, dan etnik. Ia menegaskan bahwa sekolah-sekolah menengah umum telah menjadi milik orang-orang berkelas sosial tinggi dan keluarga yang berkecukupan.

Melalui tulisannya yang berjudul *Dare the School Build a New Social Order?*, ia lalu mencoba mempertanyakan bagaimana sistem sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu, telah menjadi persoalan yang cukup mendasar bagi masyarakat. Maka pendidikan menurutnya, harus menjadi agen perubahan bagi rekonstruksi sosial. Ia juga menkritik model pendidikan progresifisme yang telah gagal mengembangkan sebuah teori kesejahteraan sosial dan bahkan ia menegaskan bahwa pendidikan yang berpusat pada anak (*the child centered approach*) tidak menjamin bagi terciptanya ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-20.

Aliran rekonstruksionalisme pada hakikatnya sepaham dengan aliran perennialisme yang sama-sama ingin mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuhnya berbeda dengan apa yang dipakai oleh perennialisme, tetapi sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia (*restore to the original form*) (Zuhairini, dkk., 2008: 29). Aliran filsafat ini mendasarkan gagasan rekonstruksinya pada para filsuf terdahulu yang dianggap sebagai filsuf rekonstruksianis, di antaranya:

- a. Plato menegaskan bahwa pendidikan menjadi pilar utama dari pembangunan masyarakat baru dan masyarakat terbaik

yang di dalamnya terjadi ekualitas seksual, pembinaan pendidikan anak-anak secara komunal, dan diperintah oleh pemimpin yang memiliki akreditasi filosofis.

- b. Stoic seperti Marcus Aurelius, seorang raja sekaligus filsuf kerajaan Romawi, mempromosikan “negara dunia” ideal yang terbebas dari sekat-sekat nasionalisme dan chauvinisme.
- c. St. Augustine juga menawarkan upaya rekonstruksi melalui negara Kristen ideal (*The City of God*). Revolusi industri yang cenderung menjadikan teknologi memperkaya segelintir pemilik modal. Muncul pemikir seperti Comte de Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Francois Noel Babeuf, dan Edward Bellamy.
- d. Karl Marx, melihat penderitaan kaum proletar didehumanisasi oleh sistem industri kapitalis, dan berupaya merekonstruksi masyarakat dunia, dengan berdasarkan jaringan komunisme internasional.

Pendidikan sebagai instrumen utama dalam melakukan perubahan sosial, contohnya Plato yang menegaskan bahwa pendidikan sebagai *sine qua non* dari masyarakat terbaik; Marx melihat pendidikan sebagai jalan untuk membantu kaum proletar dalam mengembangkan pandangan mengenai “kesadaran sosial”. Di Amerika Serikat, sebut saja, Horace Mann, Henry Barnard, William Torrey Harris, Francis Parker dan John Dewey. Dewey (tokoh aliran pragmatisme) melihat pendidikan sebagai instrumen perubahan individu dan masyarakat. Meskipun dibangun dari aliran pragmatisme, aliran rekonstruksianisme tidak sekedar mempromosikan metode saintifik, problem solving, naturalisme dan humanisme, tapi bagaimana penerapan metode pragmatis dalam dunia pendidikan. Tidak hanya “memperbaiki” masyarakat, tetapi juga ingin melakukan perubahan sosial.

Aliran rekonstruksianisme sama dengan perennialisme dalam satu prinsip bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kepastian bagi kebudayaan zaman modern yang simpang siur saat ini (Djumransjah, 2004: 188). Aliran rekonstruksianisme mempunyai visi dan metode pemecahan masalah mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan. Sedangkan perennialisme memilih untuk

kembali ke alam kebudayaan lama (*regressive road culture*) sebagai solusi yang paling ideal (Barnaadib, 1994: 5). Mengapa aliran rekonstruksianisme muncul? Jawabnya, tentunya sangat beragam di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. terjadi kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan dan kekecewaan terhadap teori-teori umum (*general theory*) yang tidak dapat bersikap "kritis". Sehingga diperlukan teori yang membumi (*grounded theory*) yang mampu mengapresiasi aspek sosial, budaya, dan politik secara maksimal. Serangan terhadap teori umum dimulai oleh C. Wright Mills dan mengalami puncaknya pada Habermas.
- b. diperlukan suatu teori kritis yang substantif mengenai masyarakat yang dikembangkan ke taraf metateoritis dalam kaitannya dengan upaya refleksi diri terhadap teori dan metode.
- c. kepedulian yang mendalam terhadap nasib umat manusia di mana individu-individu sebagai insan sosial dikontekstualisasikan dalam totalitas sosial yang berupa kultur material dan spiritual.
- d. melakukan emansipasi sosial dan berusaha menemukan teori sosial yang mampu memikul tanggung jawab berupa perlawanan terhadap status quo.
- e. upaya kritik yang lebih luas terhadap kenyataan bahwa kultur kapitalis adalah bentuk manipulasi dan penguasaan, yang secara total meresapi struktur psikis dan sosial (Muhammad N.S., 1978: 183).

Jelasnya, aliran rekonstruksianisme mensandarkan pada dua premis mayor. **Pertama**, masyarakat membutuhkan rekonstruksi konstan atau perubahan. **Kedua**, perubahan sosial juga adalah rekonstruksi pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan adanya tatanan yang bisa mengubah, dan filsafat rekonstruksianisme menjadi pijakan. Rekonstruksianisme pun bertujuan untuk mengkonkretisasi kehidupan, dan perlu dibentuk institusi sosial yang diawasi masyarakat, anak, sekolah dan pendidikan yang sesuai tuntutan masyarakat (Zuhairini, dkk., 2008:29).

3. Pokok Pemikiran Pendidikan Rekonstruksionisme

Dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan, jika praktik-praktik pendidikan yang ada tidak segera direkonstruksi, maka peradaban dunia yang ada akan mengalami kehancuran. Krisis yang dimaksud adalah problem-problem sosial budaya yang timbul akibat semrawutnya persoalan pendudukan, sumber daya alam yang kian menipis, berakibat pada melonjaknya harga minyak dunia, kesenjangan global antara negara kaya dan miskin, kapitalisme global, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme sempit dan penyalahgunaan teknologi (George R.K., 2007: 186). Seperti diketahui, teknologi saintifik adalah penyumbang terbesar terjadinya peperangan dan bisa membunuh manusia secara efisien lebih dari sebelumnya, tingginya tingkat kematian dari kecelakaan lalu-lintas dan industri menjadi harga yang sangat mahal dari kehidupan yang serba mekanistik saat ini (Djumransjah, 2004: 188).

Teknologi saintifik juga menciptakan budaya rokok dan alkohol serta meningkatkan bahaya kimiawi yang terkandung pada makanan dan lahan pertanian. Padahal, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa "ilmu (saintifik) seharusnya membebaskan kita dari pekerjaan yang melelahkan malah menjadikan manusia budak-budak mesin...." (Suriasumantri, 1999: 243). Praktis, bangsa-bangsa dunia mempunyai hasrat yang sama untuk menciptakan satu dunia baru, dengan satu kebudayaan baru di bawah satu kedaulatan dunia, dalam pengawasan manusia (Zuhairini, dkk., 2008:29). Untuk mengatasi persoalan-persoalan global tersebut, perlu sebuah tatanan sosial semesta yaitu kolaborasi menyeluruh dari seluruh elemen bangsa dunia untuk bersatu menciptakan tata sosial baru yang berasaskan keadilan dan kepentingan kemanusiaan seluruh umat manusia, dan mengabaikan batasan-batasan primordial seperti ras, warna kulit, suku, bangsa dan agama.

Pendidikan formal adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial. Aliran rekonstruksianisme menilai sekolah-sekolah formal yang ada merefleksikan nilai-nilai sosial dominan yang hanya akan mengalihkan patologi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang saat ini mendera umat manusia. Karena nya sekolah-sekolah formal harus merekonstruksi secara mendasar peran

tradisional nya dan menjadi sumber inovasi sosial. Bagi mereka pendidikan dapat menjadi instrumen penting untuk membentuk keyakinan masyarakat dan mengarahkan peralihannya ke masa depan (George R.K., 2007: 187).

Rekonstruksianisme menekankan pada kebutuhan akan perubahan, ini adalah cita-cita dan tujuan utopis yang dihubungkan dengan kebudayaan dunia dan peradaban. Baginya tujuan spesifik dari proses pendidikan adalah untuk mengakomodir perubahan sosial dan aksi sosial. Tujuan pendidikan ini adalah sejenis perkembangan evolusioner dari paradigma Hegelianisme yang dihubungkan dengan pragmatisme Dewey. Rekonstruksianis ingin melibatkan orang-orang untuk menjadi agen perubahan, dan menolak untuk mengabstraksi filosofi pendidikan yang lebih menekankan pengetahuan (*knowing*) daripada praktik (*doing*).

Praktis, kaum rekonstruksionis tidak memandang sekolah sebagai satu-satu alat untuk melaksanakan perubahan secara tunggal. Tapi, institusi pendidikan dapat menyatukan semua elemen masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini didasari, karena sekolah telah bertahun-tahun bersentuhan dengan anak didik (George R.K., 2007: 188). Dengan demikian, bagi rekonstruksionis sekolah dijadikan alat atau media untuk mencapai tatanan yang lebih progresif dan berkemakmuran.

4. Metode Pendidikan Ala Rekonstruksionisme

Metode pendidikan merupakan komponen yang tidak boleh diabaikan dalam proses pendidikan, karena metode turut menentukan sukses atau tidaknya suatu tujuan pendidikan. Tidak heran, jika sebagian kalangan berpendapat bahwa metode itu lebih penting dari pada materi (Mukodi, 2011: 77). Bahkan, Imam Barnadib pun mengingatkan bahwa metode pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan bila dapat dipilih secara cermat akan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini didasarkan pada kodrat kemanusiaannya. Manusia sebagai yang “kompleks” dan hidup dalam masyarakat yang penuh “kompleksitas” ini dapat berkembang “melampaui” substansinya dengan “relasi-relasi” yang memadai

(Barnadib, 2002: 36). Lantas bagaimana metode pendidikan rekonstruksionisme?

Menurut perspektif rekonstruksionis, bahwa metode pengajaran hakikatnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan “asali” jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Adalah sebuah keharusan bahwa prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruangan kelas setelah para peserta didik diarahkan kepada kesempatan memilih diantara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik, sosial. Tak heran, jika Brameld dan kolega-koleganya memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap kekuatan guru sebagai instrumen utama dari perubahan sosial (George R.K., 2007: 187).

Kalangan rekonstruksionis, seperti aliran-aliran gerakan progresif lainnya, tidaklah tunggal dalam pandangan mereka tentang demokrasi sebagai sistem politik terbaik. Dari perspektif mereka, adalah sebuah keharusan bahwa prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruangan kelas setelah peserta didik diarahkan kepada kesempatan-kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik dan sosial. (George R.K., 2007: 187).

Lebih penting lagi, menurut aliran ini meniscayakan adanya kemerdekaan berfikir peserta didik. Hal ini sesuai dengan falsafah Ki Hadjar Dewantara yang memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada peserta didik. (Dewantara, 1977: 243). Brameld pun menggunakan istilah ‘pemihakan deferensif’ untuk mengungkapkan posisi (pendapat) guru dalam hubungannya dengan item-item kurikuler yang kontroversial. Dalam menyikapi hal ini, guru membolehkan uji pembuktian terbuka yang setuju dengan pendapatnya, dan ia menghadirkan pendapat-pendapat alternatif sejauh mungkin. Di sisi lain, guru dituntut agar terbuka dalam berpendapat dan mendialogkan kepada peserta didik. (George R.K., 2007: 187).

5. Kurikulum Pendidikan Rekonstruksionisme

Tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak didik ke arah kemasakan. Masak dalam arti hidup akal nya, maka akal inilah yang perlu mendapat tuntunan ke arah kemasakan itu (Barnadib,

1994:78). Menyadari tugas berat tersebut, rekonstruksianisme pun meracik dan mengorganisir kurikulumnya sedemikian rupa. Racikan inilah oleh Brameld disebut sebagai "*the wheel*" (roda) kurikulum; inti tujuan pendidikan versi rekonstruksianisme menjadi inti dari kurikulum "roda" tersebut dan menjadi tema sentral pendidikan. Kurikulum ini bersifat sentripetal sekaligus sentrifugal. Sentripetal karena akan membawa masyarakat atau komunitas bersama kepada studi yang bersifat umum. Sentrifugal karena akan meningkatkan proyeksi pendidikan di sekolah-sekolah formal ke dalam komunitas yang lebih luas. Hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan transformasi kultural di dalam hubungan yang dinamis antara sekolah dan masyarakat.

Implikasi pemikiran filosofis rekonstruksianisme dalam kurikulum diarahkan kepada penumbuhan kesadaran kritis peserta didik dengan model keaksaraan kritis pada materi yang diajarkan. Selain itu, kurikulum ditekankan pada upaya membangun kesadaran *polyculture* dengan mengapresiasi keragaman budaya, adat istiadat suku tertentu utk menanamkan nilai-nilai pluralisme kultural.

Rekonstruksianisme mengajukan kurikulum semesta yang menekankan pada kebenaran, persaudaraan dan keadilan. Mereka menolak kurikulum parokial yang sempit dan hanya membawa kepentingan ideal komunitas lokal tertentu. Contohnya, pengajaran sejarah dunia semestinya juga diarahkan pada kerja-kerja kontemporer lembaga-lembaga internasional seperti PBB, ASEAN, OKI dan lain-lain. Kurikulum juga diorientasikan pada aksi peserta didik, seperti gerakan mengumpulkan dana amal, terlibat dalam petisi, protes atau demo bersama masyarakat untuk merespons kebijakan negara yang menimbulkan problematika sosial. Peserta didik tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar pada fenomena sosial yang ada seperti kemiskinan, kerusakan alam, polusi udara, pemanasan global, pornografi dan lain-lain.

Oleh karena itu, rekonstruksianisme menjadikan aspek-aspek sosial, budaya dan isu-isu kontemporer menjadi muatan inti kurikulum, agar peserta didik memiliki kepekaan dan empati sosial. Kurikulum tersebut harus mulai diimplementasikan sejak TK pada usia yang paling peka. Dengan demikian, peserta didik dapat menjadi

penggerak utama pencerahan problem-problem sosial dan menjadi agitator utama perubahan sosial. Demikian pula proyeksi hubungan kemanusiaan dan aspek politik harus ditekankan untuk menumbuhkan kesadaran politik para peserta didik sehingga "nalar kritis" terhadap berbagai ketimpangan sosial politik yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan *status quo*, dapat menjadi modal dasar untuk melahirkan agen perubahan sosial dimasa selanjutnya.

6. Kesimpulan

Aliran rekonstruksionisme memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis sehingga perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik akan selalu diadakan dan dijadikan realita, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, agama dan masyarakat yang bersangkutan, akan tetapi perubahan yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Metode pendidikan merupakan komponen yang tidak boleh diabaikan dalam proses pendidikan, karena metode turut menentukan sukses atau tidaknya suatu tujuan pendidikan. Menurut perspektif rekonstruksionis, bahwa metode pengajaran hakikatnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan "asali" jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Praktis, inti tujuan pendidikan versi rekonstruksianisme menjadi inti dari kurikulum "roda" tersebut dan menjadi tema sentral pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinpelu, JA. (1988). *An Introduction Philosophy of Education*. London: Macmillan Published Lid.
- Barnadib, Imam. (2002). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Adi Cipta.
- (1994). *Filsafat Pendidikan; Pengantar Mengenal Sistem dan Metode*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

- Counts, George S. (1932). *Dare the School Build a New Social Order?* New York: John Day Co.
- Djumransjah. (2006). *Filsafat Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gazalba, Sidi. (1973). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Illeris, Knud. (2002). *The Three Dimension of Learning*. Florida: Krieger Publishing Company.
- Mukodi. (2011). *Pendidikan Islam Terpadu Reformulasi Pendidikan di Era Global*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Noorsjam, M. (1978). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Malang: FIP IKIP.
- R. Knight, George. (2007). *Filsafat Pendidikan*. Penerjemah, Mahmud Arif. Yogyakarta: Gama Media.
- Suriasumantri, Jujun S. (1982). *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tim Taman Siswa. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Zuhairini, dkk. (2008). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

TANTANGAN PENYIAPAN TENAGA PENDIDIK VOKASI PADA ABAD KE-21

Pramudi Utomo

Jur. Pend. Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

pramudi_ut@uny.ac.id

Abstrak

Makalah ini menyajikan pembahasan tantangan yang dihadapi ketika menyiapkan tenaga pendidik vokasi dalam abad ke-21 ini. Pembangunan nasional dalam dua dekade mendatang menghadapi tantangan besar. Penetapan visi dan misi diharapkan dapat tercapai, sehingga daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek dapat terus meningkat. Penyiapan tenaga pendidik vokasi agar tidak terjadi *mismatch* antara harapan dan realita perlu segera dilakukan. Menjelang tahun 2015 akan ada sekitar 200.000 guru yang pensiun. Penggantiannya harus dipersiapkan dengan baik. Harapan ketercapaian untuk mengisi lowongan yang ada dimulai dengan perekrutan yang lebih baik pula, dengan perbaikan pendidikan calon guru.

Pendidikan vokasi memasuki era globalisasi di beberapa Negara telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian, termasuk di Indonesia. Pendidikan vokasi juga mengalami rekonseptualisasi, berkenaan dengan sejumlah rekomendasi menyeluruh terhadap sistem kualifikasi, kualitas dan ketelitian yang tinggi. Mengajar siswa untuk menjadi sukses di abad ke-21, membutuhkan cara pengajaran yang berbeda. Tenaga pendidik dinuntut memiliki keterampilan mengajar dengan *melek informasi* dan terbiasa dengan teknologi.

Dalam menyiapkan tenaga pendidik vokasi kita dihadapkan pada dua tantangan utama (Lucas et.al.,2012). Pertama, calon pendidik (preservice) menguasai dua kemampuan/keahlian; yaitu penguasaan *subject matter*/materi dan pengalaman mengajar. Kedua, calon pendidik bisa direkrut dari para “pekerja” industry untuk mengajar. Strategi pembelajaran berkaitan dengan *outcome* pengalaman lapangan awal dan skill strategy bagi pendidikan vokasi dan pelatihan dalam abad ke-21 yaitu *knowledge need to be more relevant, high order skills, character traits, and meta-layer skills* hendaknya menjadi focus perhatian.

Keywords: pendidikan vokasi, skill ,penyiapan tenaga pendidik

1. Pendahuluan

Menjelang melinium ketiga Jones (1996) telah merumuskan tujuh belas fondasi keterampilan yang dipersyaratkan bagi semua pekerja agar dapat berkompetisi di tempat kerja berkinerja tinggi. Artinya, ketika seseorang memasuki abad ke-21 mau tidak mau suka atau tidak suka harus mempersiapkan diri dalam menuntut ilmu serta keterampilan yang mengacu kepada tuntutan jaman itu. Ketujuh belas fondasi tersebut digambarkan Jones sebagai “kunci karir”, yang meliputi *basic skills, thinking skills, people skills* dan *personal qualities*. *Basic skills* adalah keterampilan dasar yang menyangkut R3 (baca, tulis, matematika) ditambah berbicara dan mendengarkan, tentunya dalam bahasa asing internasional. *Thinking skills* menuntut seseorang berpikir kritis, mampu

memecahkan masalah, membuat keputusan serta bisa memvisualisasikan. *People skills* dapat bersosialisasi dengan humanism yang tinggi, mampu bernegosiasi, kepemimpinan yang dilandasi kejujuran, dapat bekerjasama tanpa memandang perbedaan cultural. *Personal qualities* menyangkut keyakinan dan kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki ditambah dengan pengelolaan diri yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam suatu pertemuan Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara yang tergabung pada Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000 yang lalu telah menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan Deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-*

MDGs) menempatkan manusia sebagai focus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global (Alisyahbana, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya apa yang dikatakan Jones dan Dekalarasi Milenium hendaknya dapat menjadi acuan bagi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia dan dapat digunakan sebagai perspektif dan misi bagi proses pembelajaran para calon guru di perguruan tinggi agar lulusannya mempunyai keunggulan kompetitif dan profesional di abad melenium ini (Suyanto, 2006). Pengembangan SDM tidak bisa lepas dari upaya pendidik dalam memajukan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, persiapan ke arah sana harus dilakukan secara terarah dan sistematis.

Sejumlah program prioritas nasional, di antaranya bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi. Kebijakan dan strategi yang ditempuh yaitu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru, perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. Reformasi menyeluruh akan dilakukan untuk itu yang memungkinkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial dapat berkembang dengan baik. Kurikulum dan proses pembelajaran akan diperkaya dengan pembangunan moral dan karakter. Menjelang tahun 2015 akan ada sekitar 200.000 guru yang pensiun. Penggantiannya harus dipersiapkan dengan baik. Harapan ketercapaian untuk mengisi lowongan yang ada dimulai dengan perekrutan yang lebih baik pula, dengan perbaikan pendidikan calon guru. Gelombang pension juga akan terjadi pada bidang vokasi dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.

Untuk mengantisipasi penggantian guru pensiun tentu yang dapat dilakukan adalah penyiapan mahasiswa sebagai calon pendidik. Tenaga pendidik vokasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tenaga pendidik umum lainnya. Pertanyaannya adalah sejauh mana tantangan yang dihadapi telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam menyiapkan tenaga pendidik vokasi itu agar tidak terjadi *mismatch* antara harapan dan realita?

2. Pembahasan

Dalam era globalisasi yang merupakan salah satu ciri millennium ketiga menuntut

kemampuan daya saing yang kuat pada beberapa sector, seperti teknologi, manajemen, kepemimpinan dan SDM. Permasalahan kualitas SDM, khususnya tenaga pendidik di Indonesia masih jauh dari harapan untuk bisa bersaing secara baik pada kancah global. SDM pendidik bermutu akan menentukan kemenangan dalam persaingan global. Bukti internasional menunjukkan pentingnya kualitas pengajaran sebagai factor kunci dalam menentukan hasil pendidikan. Meski adanya keterbatasan pada alokasi anggaran guna menangani masalah ini setelah diterbitkannya UU Guru tahun 2005, upaya telah dilakukan untuk memonitor kemajuan dalam kualitas pengajaran melalui asesmen rutin atas keterampilan pedagogis guru yang harus dikelola (OECD, 2012). Berikut ini akan diketengahkan poin-poin penyiapan tenaga pendidik vokasi yang dapat menjadi alternative bagi proses perbaikan kualitas penyediaan SDM di masa mendatang, dimulai dari pendidikan vokasi di era globalisasi hingga model penyiapan tenaga pendidiknya.

2.1 Pendidikan vokasi di era globalisasi

Pendidikan vokasi memasuki era globalisasi di beberapa Negara telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Tidak hanya di Amerika, Eropa, Asia, Australia termasuk di Indonesia sendiri. Pada awal 1900-an pendidikan vokasi muncul dalam menanggapi era perkembangan industri saat itu. Program dirancang untuk melatih individu dengan keterampilan kerja khusus. Pendidikan vokasi mampu mendorong mesin ekonomi bangsa (*drive nation's economic engine*) sepanjang abad ke-20, karena memang pendidikan vokasi berkaitan dengan SDM yang bisa menggerakkan ekonomi bangsa.

Di Amerika, pendidikan vokasi disebut sebagai pendidikan teknik dan karir (*Career and Technical Education/CTE*). CTE bukanlah label baru untuk sistem yang sama. Sementara CTE dibangun di atas sejarah dan tradisi pendidikan vokasi yang panjang, dan telah disesuaikan untuk memenuhi tuntutan dinamis dari ekonomi global (NASDCTEC, 2010). CTE diterapkan pada ranah tingkat menengah dan sesudahnya yang mempersiapkan individu untuk berbagai macam karir seperti perawatan kesehatan/bio-medis, energi terbarukan, perhotelan, nanoteknologi, teknik, logistik, penegakan hukum, dan teknologi informasi. Dengan demikian, CTE mencerminkan kerja modern.

Program CTE dirancang berkualitas tinggi menggabungkan standar akademik dan teknis yang ketat. Prinsip millennium benar-benar dijadikan acuan, sehingga CTE memiliki dampak positif pada prestasi siswa dan transisinya.

Pendidikan vokasi di Inggris juga mengalami rekonseptualisasi. Pada tahun 2011, *The Review of Vocational Education – The Wolf Report*, memberikan sejumlah rekomendasi menyeluruh berkaitan dengan sistem kualifikasi untuk meyakinkan kualitas dan ketelitian yang tinggi dalam pendidikan vokasi. Pengembangan fondasi teoritis dilakukan yang berguna untuk pedagogi vokasi yang akan memberikan penguatan struktur di mana tenaga pendidik vokasi dapat mengembangkan kualitas, pengajaran yang efektif dan program pembelajarannya. (Lucas et.al, 2012). Selain itu diintensifkan cara-cara pengorganisasian dunia kerja agar pembelajaran bermakna melalui realita kehidupan di abad kedua puluh satu (Evan, 2012).

Pendidikan vokasi (kejuruan) untuk masa depan Indonesia juga telah dirumuskan sejak tahun 1997 dalam suatu laporan yang dibukukan sebagai “Keterampilan menjelang 2020 untuk era global”. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan nilai tambah pada SDM dengan cara meningkatkan keterampilan dan keahlian generasi muda Indonesia yang akan memasuki dunia kerja dan melatih ulang serta meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi mereka yang sudah bekerja, agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar (Depdikbud, 1997). Pengembangan yang diusulkan adalah menyangkut rancangan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan industry. Untuk itulah diterapkan kebijakan “*link and match*” dengan mendorong industry untuk terlibat dalam menetapkan berbagai standar keahlian, pengembangan kurikulum, dan kebijaksanaan pengelolaan sistem pendidikan tersebut. Sayangnya, dewasa ini upaya yang sebenarnya cukup memberikan harapan agar pendidikan kejuruan bisa memberi andil dalam memajukan sector industry dan ekonomi tidak berlanjut seiring dengan setiap pergantian kepemimpinan.

2.2 Tuntutan keterampilan

Dewasa ini peserta didik pada dasarnya berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu.

Para peserta didik seperti yang kita lihat di dalam kelas saat ini adalah *digital natives*, mereka telah tumbuh dengan teknologi di sekitar mereka. Perubahan yang terjadi menunjukkan peran yang sangat berbeda untuk sekolah dan guru. Di antara tantangan yang paling mendesak yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, adalah apakah mereka dapat atau tidak akan secara efektif mengakomodasi teknologi dan model baru belajar (SEG Measurement, t.th). Sekolah dan guru perlu pengembangan profesional yang cukup dan pelatihan untuk mengakomodasi perubahan ini.

Dengan mengutip dari OECD (2012), Lucas dkk. menunjukkan tentang *skill strategy* agar bisa melayani pendidikan vokasi dan pelatihan dalam abad ke-21 yaitu:

- *Knowledge needs to be more relevant, and a better balance struck between the conceptual and practical,*
- *Higher order skills, such as the ‘Four Cs’ of creativity, critical thinking, communication and collaboration, are essential for absorbing knowledge;*
- *Character traits, both performance-related (adaptability, persistence, resilience) and moral (integrity, justice, empathy and ethics) need to be shaped both at school in the workplace to help individuals to be active and responsible citizens; and*
- *Meta-layer skills, such as learning to learn, building expertise, fostering creativity and making connections across disciplines, are becoming more important in a world of growing complexity.*

Mengajar siswa untuk menjadi sukses di abad ke-21, membutuhkan cara pengajaran yang berbeda. Sayangnya, banyak guru yang belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadikan sukses dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21. Salah satu dari banyak faktor yang mencegah guru dari melakukannya adalah kurangnya pelatihan teknologi. Seringkali, guru belum dibiasakan dengan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang modern. Guru tidak hanya perlu memahami bagaimana menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka, namun mereka perlu memahami bagaimana untuk membantu siswa menggunakan teknologi untuk membantu memandu pembelajaran mereka sendiri.

Keterampilan mengajar yang digambarkan oleh Pacific Policy Research

Center (2010) menuntut adanya *melek informasi*. Selanjutnya, dengan mengutip dari beberapa sumber, berikut ini dirangkumkan tuntutan keterampilan yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan pembelajaran dan pengajaran pada abad ke-21.

Langkah-langkah terbaik yang dapat digunakan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan yang ada tersebut

adalah mendorong guru dan stakeholder pendidikan lainnya untuk: a) fokus pada masalah proses dan kenyataan, b) dukungan penyelidikan berbasis pengalaman belajar, c) memberikan kesempatan dengan pendekatan pembelajaran kolaboratif, d) dan fokus pada mengajar siswa how to learn (above “what” to learn).

Tabel 1. Acuan kemampuan mengajar yang harus dimiliki

The Educational Testing Service (ETS)	The North Central Regional Education Laboratory (NCREL)	The Partnership for 21 st century skills
a) collect and/or retrieve information,	digital age literacy,	1) emphasize core subjects,
b) organize and manage information,	inventive thinking,	2) emphasize learning skills,
c) evaluate the quality, relevance, and usefulness of information, and	effective communication, and	3) use 21 st century tools to develop learning skills,
d) generate accurate information through the use of existing resources.	high productivity.	4) teach and learn in a 21 st century context,
		5) teach and learn 21 st century content, and
		6) use 21 st century assessments that measure 21 st century skills.

Sumber: Pacific Policy Research Center (2010)

2.3 Model penyiapan tenaga pendidik

Sebagaimana sering didiskusikan adalah sebuah kenyataan bahwa salah factor yaitu kualitas guru merupakan penentu utama kesuksesan belajar siswa. Meskipun masih ada banyak factor lain, peranan guru dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Ketika Amerika membandingkan kinerja siswanya yang tidak lagi kompetitif, lalu mencari guidance ke Negara lain yang sekiranya mampu menginspirasi supaya kembali berkinerja tinggi. Yang menjadi focus perbandingan adalah dalam hal perekrutan, pengembangan dan retensi guru (Sclafani, 2008). Singapura menjadi satu contoh pengembangan pendidikan guru, karena Negara ini menyediakan salah satu sistem yang paling koheren dalam pendidikan guru di dunia. Bukti yang menunjukkan itu adalah konsistennya dalam raihan prestasi pada “The Trends in International Math and Science

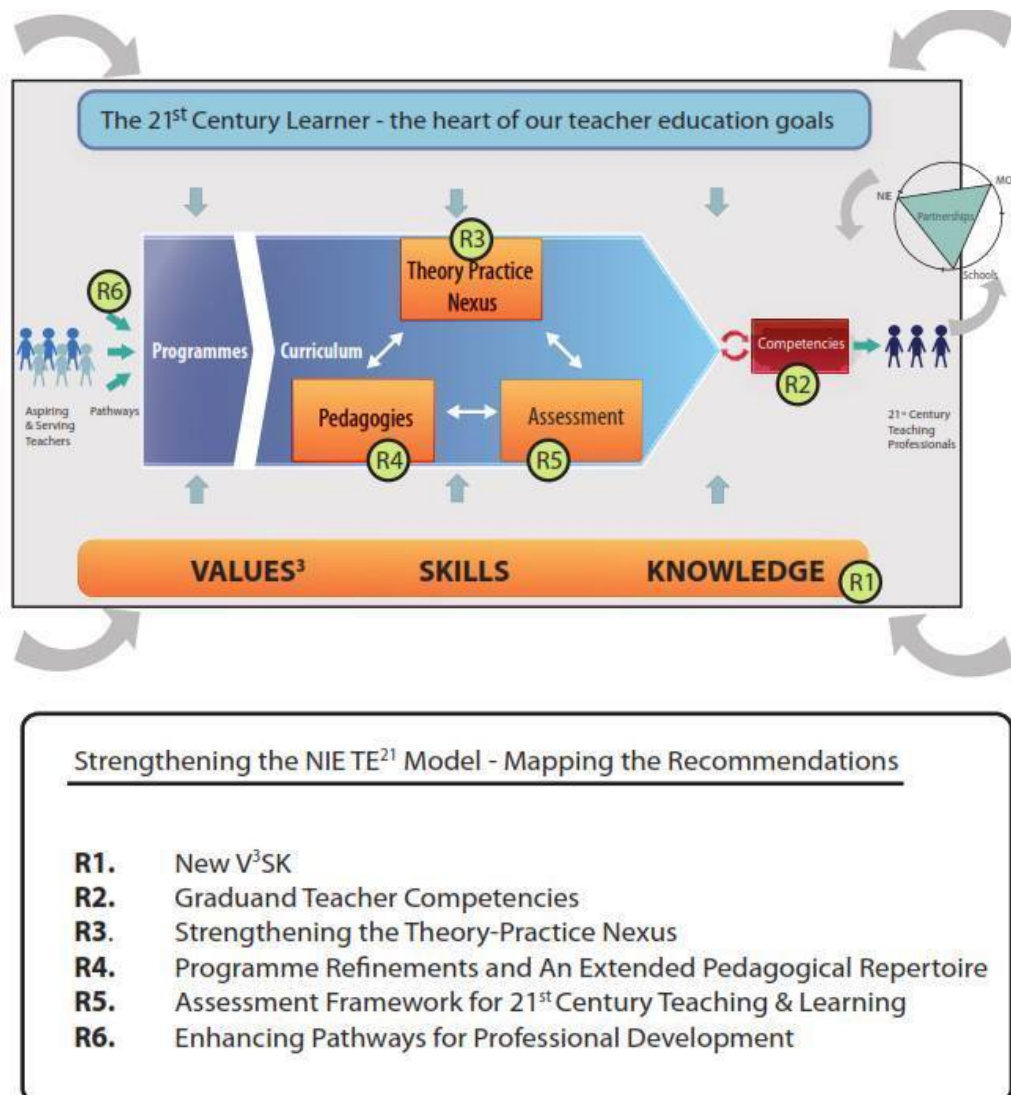
Survey (TIMSS)” secara internasional. National Institute of Education (NIE) sebagai lembaga yang mendidik calon guru menetapkan standar yang tinggi bagi calon mahasiswanya. Setidaknya mereka mempunyai rangking sepertiga terbaik say menamatkan pendidikan menengahnya. Di samping itu juga dilakukan proses wawancara yang menyangkut passion, commitment, values, willingness to learn, and communication skills to be a good teacher. Tak pelak hal ini akan menjadi bukti betapa masalah kualitas SDM merupakan tumpuan pengembangan. Pendidikan guru dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengantisipasi kekosongan guru pension di masa mendatang.

Model penyiapan tenaga pendidik di Singapore dilakukan dalam dua bentuk, yaitu university based dan school based (NIE, 2009). Perbedaannya, adalah jika university based yang dilakukan maka program pendidikan

guru sepenuhnya dirancang oleh universitas. Sementara sekolah dijadikan mitra sebagai tempat praktik mengajar. Di sisi lain, pada scholl based, sekolah merancang program dan melaksanakannya, sedangkan universitas mengakreditasinya. Kebanyakan yang terjadi dengan pendidikan guru di Indonesia mirip seperti model university based yang ada di Singapura. Berikut ini ditunjukkan pada Gambar 1. model pendidikan guru yang diutarakan di atas.

Dalam menyiapkan tenaga pendidik vokasi kita dihadapkan pada dua tantangan utama (Lucas et.al.,2012). Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan sekolah merupakan dua lembaga yang saling mendukung. LPTK menyiapkan tenaga

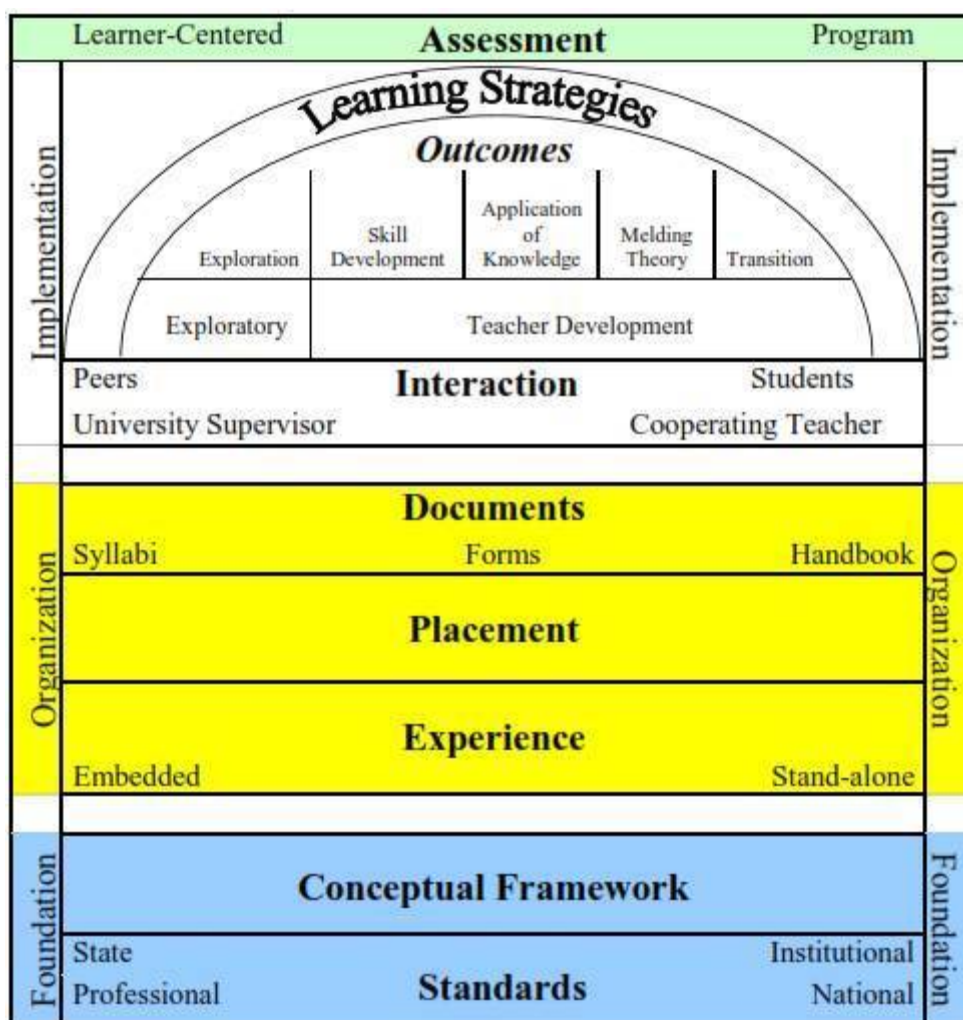
pendidik dan sekolah sebagai mitra untuk tempat berlatih mendidik. Penyiapan tenaga pendidik vokasi paling tidak bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, calon pendidik (preservice) menguasai dua kemampuan/ keahlian; yaitu penguasaan subject matter/materi dan pengalaman mengajar. Bidang vokasi menuntut penguasaan materi teoretis dan praktek, karena itu dibutuhkan dua lembaga mitra yaitu sekolah dan dunia industry. Kedua, calon pendidik bisa direkrut dari para “pekerja” industry untuk mengajar. Dalam kasus terakhir ini hanya kemampuan mengajar yang perlu lebih ditekankan kepada calon pendidik karena penguasaan praktek di industry dipandang sudah memadai.



Gambar 1. Model pendidikan guru di NIE dan enam kunci rekomendasi

Pengalaman mengajar baik di sekolah maupun pengalaman praktik di industry semestinya dapat dikelola dengan baik dan tepat (Barabasch and Watt-Malcom, 2013). Bahkan pengalaman lapangan semacam itu bisa diberikan di awal (Retallick dan Miller, 2010), dengan catatan disesuaikan perkembangan mahasiswa calon pendidik tersebut. Pengalaman lapangan awal (*early field experiences/EFE*) dapat dijadikan sebagai komponen pendidikan guru *preservice*, mengingat pengalaman ini dapat menawarkan eksplorasi karir dan ke depan dapat dijadikan sebagai moment pengembangan keguruannya.

Program penyiapan pendidik vokasi harus memperhatikan, menyediakan, memfasilitasi atau memberikan fondasi untuk terus belajar tentang mengajar dan mengembangkan fokus yang lebih besar pada kreativitas berkualitas tinggi, dan pengalaman klinis belajar. Memang, kita sadari bahwa calon pendidik vokasi perlu memahami dunia pengajaran yang kompleks, namun dengan pemahaman yang baik itu akan memudahkan dalam menganalisis dan melakukan proses pengajaran. Berikut ini digambarkan model pengalaman lapangan awal penyiapan tenaga pendidik vokasi dari Retallick dan Miller (2010).



Gambar 2. Model pengalaman lapangan awal penyiapan tenaga pendidik vokasi (Retallick dan Miller, 2010).

Menurut Retallick dan Miller (2010) strategi pembelajaran di mana hasil dari EFE terpenuhi adalah hal yang terpenting (Tabel 1). Profesi mengajar adalah *panggilan jiwa*, maka penyiapan tenaga pendidik perlu

memperhatikan strategi pembelajaran awal yang dapat digunakan untuk memenuhi hasil eksplorasi karir. Strategi pembelajaran yang berkaitan dengan *outcome* pengalaman lapangan awal ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2. Strategi pembelajaran berkaitan dengan *outcome* pengalaman lapangan awal (Retallick dan Miller, 2010)

Orientasi	Outcome	Strategi pembelajaran
Eksploratori	Eksplorasi karir	Observasi terbimbing
		<i>Journaling</i>
		Identifikasi karakteristik guru yang baik
		Dialog
		Seminar di kampus
		Wawancara/tatap muka pengelola atau konselor
Pengembangan guru	Pengembangan keterampilan	Tugas-tugas terstruktur
		Pengajaran <i>mini-lesson</i>
		Tutorial
		Analisis perbedaan gaya mengajar dan belajar
	Aplikasi	Pengembangan rencana pengajaran (<i>lesson plan</i>)
	Pengetahuan	Analisis studi kasus
		Penilaian dan analisis belajar siswa
		Pemantauan belajar dan pengajaran siswa
		Identifikasi prinsip dan strategi guru
	Penggabungan teori dan praktik	Pengembangan porofolio
		Rencana pembelajaran
		Pemanfaatan strategi penilaian formal dan informal
		Interaksi dengan guru dan pembimbing di kampus
	Transisi dari mahasiswa ke pendidik	Partisipasi dalam guru mengajar (<i>in-service</i>)/pengembangan profesi
		Refleksi melalui tulisan tentang guru
		Kritik terhadap pengajaran, lingkungan pengajaran, dan program pengajaran
		Refleksi dari observasi praktek mengajar
		Refleksi dan analisis secara sistematis
		Pemahaman etika, hukum, social, dan isu-isu kemanusiaan
		Komunikasi peran guru dalam komunitasnya
		Artikulasi pemahaman filosofi dan tujuan, kepentingan, hubungan dengan pendidikan agrikultur

2.4 Kurikulum penyiapan tenaga pendidik vokasi di Fakultas Teknik UNY

Kurikulum sebagai acuan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pendidikan vokasi disusun berdasarkan konsep berbasis kompetensi. Tuntutan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan persyaratan profesionalisme harus dapat diobservasi dan dievaluasi dari penguasaan kemampuan teknisnya. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki calon pendidik umumnya dan bidang vokasi meliputi kompetensi pedagogic, profesional, social dan

kepribadian sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007.

Sebaran mata kuliah yang digunakan dalam pendidikan calon guru/pendidik vokasi (FT UNY, 2009) meliputi kelompok mata kuliah (subject matter) dasar umum (18 sks), dasar kependidikan (13 sks), dasar kejuruan (6 sks), kependidikan fakulter (6 sks), bidang studi (78 sks) dan konsentrasi (21-28 sks). Perbandingan persentase jam pelaksanaan perkuliahan antara teori, praktik dan lapangan berturut-turut adalah 62%, 27% dan 11%. Struktur sebaran dan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan pada Gambar 3.

VIII	TA Sripsi 6 sks		Program Keahlian/konsentrasi
VII	PPL & KKN 6 sks	PI & Proyek 6 sks	
VI	Kepend. 25 sks, dasar kepend. 13 sks, kejur. 12 sks	Konsentrasi 21-28 sks	
V		Dasar umum 18 sks, fakultas 6 sks, prodi 78 sks	Dasar kependidikan dan keteknikan
IV			
III			
II			
I			
I			
			
Sem.	Strata 1 (148-153 sks)		Kompetensi

Gambar 3. Struktur sebaran dan pelaksanaan kurikulum (FT UNY, 2009)

Mencermati struktur kurikulum di atas dan kemudian dikaitkan dengan tuntutan pendidikan vokasi pada melinium ketika yang saat ini memasuki decade kedua, sekaligus disinkronkan dengan Permendinas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, nampaknya masih ada celah-celah (*gap*) yang perlu ditambah. Penambalan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi masa depan yang digambarkan sebagai tuntutan *higher order skills*, dengan '*empat K*', yaitu kreativitas, kritis berpikir, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk itu diperlukan analisis yang lebih mendalam apakah penyiapan tenaga pendidik vokasi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan jaman. Setidak-tidaknya sebagaimana Sahlberg (2010) menyiapkan tenaga pendidik perlu menguasai konten, pedagogi, dan teori kependidikan

termasuk kapasitasnya sebagai pendidik yang di-mentor oleh *veteran expert*. Kapasitas guru untuk mengajar di kelas dan bekerja secara kolaboratif dalam komunitas profesionalnya harus telah dibangun secara sistematis melalui pendidikan akademik guru.

3. Simpulan

Berikut ini disampaikan beberapa kesimpulan berkaitan dengan tantangan penyiapan tenaga pendidik vokasi pada abad ke-21, sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas SDM di Indonesia dapat mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan lebih responsif untuk menjawab tantangan dan permintaan pasar tenaga kerja.

- b. Pendidikan vokasi mengalami rekonseptualisasi, berkenaan dengan sejumlah rekomendasi menyeluruh terhadap sistem kualifikasi, kualitas dan ketelitian yang tinggi. Dalam menyiapkan tenaga pendidik vokasi, calon pendidik (preservice) menguasai dua kemampuan/keahlian; yaitu penguasaan subject matter/materi dan pengalaman mengajar atau calon pendidik direkrut dari para "pekerja" industry untuk mengajar.
- c. Profesi mengajar adalah panggilan jiwa, penyiapan tenaga pendidik perlu memperhatikan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi hasil eksplorasi karir. Strategi pembelajaran yang berkaitan dengan outcome pengalaman lapangan dapat dijadikan sebagai pengembangan tenaga pendidik itu sendiri.
- d. Tuntutan higher order skills, dengan 'empat K' (kreativitas, kritis berpikir, komunikasi, dan kolaborasi) lebih ditekankan dalam penyiapan tenaga pendidik vokasi agar sesuai dengan tuntutan jaman. Penyiapan tenaga pendidik perlu menguasai konten, pedagogi, dan teori kependidikan termasuk kapasitasnya sebagai pendidik dalam komunitas profesionalnya harus telah dibangun secara sistematis melalui pendidikan akademik guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Arminda S., 2010. Peta jalan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/ BAPPENAS.
- Barabach, Antje and Bonnie Watt-Malcom. 2013. *Teacher preparation for vocational education and training in Germany: a potential model for Canada?*. Compare. Vol. 43, No.2, 155-183. Routledge Taylor & Francis Gr
- Evans, Karen. 2012. The quest for modern vocational education-Georg Kerschens-teiner between Dewey, Weber and Simmel, by Philip Gonon, Bern, Peter Lang, 2009, 278. pp., £58 (softcover), ISBN 978-3-0343-0026-1, Journal of Vocational Education & Training, 64:4, 563-565.
- Fakultas Teknik. 2009. *Kurikulum Fakultas Teknik 2009*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lucas, Bill. Ellen Spencer, Guy Claxton. 2012. *How to teach vocational education: A theory of vocational pedagogy*. Winchester: The City & Guilds Centre for Skills Development (CSD).
- National Association of State Directors of Career Technical Education Consortium (NASDCTEC). 2010. *Reflect, Transform, Lead: A New Vision for Career Technical Education*. Silver Spring, MD. Diunduh dari www.careertech.org.
- National Institute of Education. 2009. *A Teacher Education Model for the 21st Century*. Singapore: NIE.
- OECD, Survei OECD Perekonomian Indonesia. September 2012
- Pacific Policy Research Center. 2010. *21st Century Skills for Students and Teachers*. Honolulu: Kamehameha Schools, Research & Evaluation Division.
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- Retallick, Michael S. dan Greg Miller. 2010. *Teacher Preparation in Career and Technical Education: A Model for Developing and Researching Early Field Experiences*. Journal of Career and Technical Education, Vol. 25, No. 1, Spring, 2010 - Page 62.
- Sahlberg, Pasi. 2010. *The Secret to Finland's Success: Educating Teachers*. Stanford: Director General, Centre for International Mobility and Cooperation Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
- Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan. 1997. *Keterampilan menjelang 2020 untuk era global*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- SEG Measurement. *The challenge of modeling 21st century learning*. New Hope PA: Atomic Learning.
- Susmono La Ode, dkk., 2006. Di belantara pendidikan bermoral: Biografi Pemikiran dan Kepemimpinan Prof. Suyanto, Ph.D. Yogyakarta: UNY Press.
- Sclafani, Susan . 2008. *Rethinking Human Capital in Education: Singapore As A Model for Teacher Development*. Washington DC: The Aspen Institute .

TANTANGAN GURU PKN DI ERA GLOBAL

Santoso

PGSD FKIP UMK

sentosa_mpd@yahoo.co.id

Abstrak

Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien yang muaranya akan menghasilkan lulusan yang diharapkan. Guru PKN di era global merupakan salah satu guru yang memiliki peran yang sangat penting mengingat pengaruh arus globalisasi yang bisa berdampak negatif terhadap moral siswa. Kinerja guru PKN harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin meningkat. Rumusah masalah yang akan dikaji adalah 1). Bagaimana guru mata pelajaran PKN yang profesional di era global? 2. Bagaimana tantangan guru PKN di era global?.

Guru PKN yang profesional harus memiliki empat kompetensi yang sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ke empat-empatnya merupakan komponen yang terintegrasi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang profesional. Guru PKN diharapkan tidak hanya *transfer knowledge*, tetapi harus bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan guru PKN di era global semakin berat mengingat guru PKN dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk perilaku para siswa yang memiliki moral yang baik. Untuk membentuk menjadi warga Negara yang memiliki moral yang baik tidak mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat selain berdampak positif juga negatif. Apabila peserta didik tidak memiliki moral yang kuat tentunya siswa akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif yang bisa merusak moral siswa.

Kata kunci: guru profesional, tantangan guru pkn.

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia sudah merdeka dari Tahun 1945, akan tetapi kalau kita lihat apakah tujuan Negara tersebut sudah tercapai dengan baik? Tentunya masih belum. Hal ini bisa kita lihat dari kualitas pendidikan yang masih tertinggal dengan Negara lainnya di Asia. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia (2000)*, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang

(2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program (PYP)*. Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program (MYP)* dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program (DP)*. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran (Mulyasa, 2005:5).

Berdasarkan data diatas sudah saatnya pendidikan di Indonesia segera untuk ditingkatkan kualitasnya supaya tidak ketinggalan dengan negara lainnya. Pendidikan sebagai salah satu pilar penting di era global untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompetitif maka pendidikan selayak-

nya sudah menjadi perhatian utama yang harus dibenahi, salah satunya adalah membenahi kualitas guru. Guru sebagai salah satu komponen yang penting untuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya tanggungjawab untuk memperbaiki kualitas pendidikan diantaranya ada pada guru PKn, karena guru PKn merupakan guru yang memiliki tugas yang besar untuk perbaikan moral siswa yang sekarang ini mengalami degradasi moral, apabila moral siswa baik perilaku siswa akan bisa amanah untuk menjalankan pengetahuan yang diperoleh pada mata pelajaran lainnya. Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar yang terdepan dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai warga Negara yang baik. Untuk mewujudkan warga Negara yang baik guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting untuk hal tersebut, karena salah satu tujuan adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik pada warga Negara. Akan tetapi tantangan ke depan di era globalisasi ini tidak mudah, karena pengaruh dari luar terhadap perilaku siswa juga besar. Apabila guru tidak mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan perubahan yang terjadi maka bisa saja siswa tidak termotivasi untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

2. Pembahasan

2.1 Guru Mata Pelajaran PKn yang Profesional di Era Global

Guru yang profesional pada umumnya sesuai dengan pasal 10 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Di dalam Hamalik (2002: 35), di jelaskan bahwa: Kompetensi guru merupakan alat seleksi penerimaan guru, perlu ditentukan secara umum kompetensi apakah yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi administrator dalam memilih mana guru yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasari

kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil mengemban tugasnya selaku pengajar di sekolah.

Di dalam menciptakan guru-guru yang memenuhi kualifikasi profesional, pada masa sekarang, pemerintah telah menciptakan program-program pendidikan profesi, yang dilaksanakan terhadap seluruh guru-guru di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Sebagian ahli memandang bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan ilmu. Karena tidak semua orang berilmu bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Oleh karena itu mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang termasuk pekerjaan profesional, karena di butuhkan keahlian khusus, yang di dapat melalui pendidikan di lembaga tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulis, Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional, bukan hanya terpaku pada keahlian dan kemahiran, namun juga mencakup perilaku, moralitas, dan panggilan jiwa untuk mengabdikan dan menjadi guru yang seutuhnya. Guru PKn yang profesional di era sekarang harus mampu memberikan teladan yang nyata tidak hanya teori saja.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Perguruan Tinggi (PT), merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, disebut juga sebagai mata pelajaran pembentukan kepribadian, menurut Zamroni, sebagaimana dikutip Sofhian dan Asep Sahid (2011:9), "Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat".

Sebagai sebuah mata pelajaran, PKn juga menuntut profesionalisme guru dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi profesional, namun, masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran

PKn tidak berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau lebih tepatnya tidak profesional, yang paling umum ditemui adalah ketidaksesuaian rumpun ilmu, artinya, guru yang mengajar PKn, tidak berasal dari lembaga yang khusus mendidik calon guru-guru PKn, harusnya jika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, dan mendapatkan guru yang profesional dalam mengajar, perekrutan guru tidak didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku secara umum untuk semua calon guru.

Hamalik (2002: 35) menjelaskan bahwa: Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, guru yang profesional harus mampu membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal dan malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Guru merupakan komponen dalam belajar mengajar yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, sehingga dituntut profesional. Jika memperhatikan beberapa karakteristik profesional guru, maka sudah sewajarnya bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional harus didukung oleh beberapa kompetensi sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, diantaranya

2.1.1 Guru PKn harus memiliki kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembel-

ajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru PKn harus bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Menggunakan metode pembelajaran yang kontekstual sesuai dinamika yang terjadi pada lingkungan siswa. Guru PKn tidak hanya teori tetapi mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang memberikan contoh yang relevan sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kita.

2.1.2 Guru PKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu:

Memiliki kepribadian yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki tugas mulia untuk membentuk kepribadian warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk membentuk kepribadian yang baik maka dibutuhkan guru yang memiliki kepribadian yang baik. Guru yang memiliki kepribadian yang baik berperan penting untuk memberikan contoh yang baik terhadap siswa, sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti pribadi yang baik tersebut. Apabila guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak memiliki kepribadian yang baik, tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang dapat menghambat semangat belajar siswa karena gurunya kurang bisa memberikan contoh kepribadian yang baik.

2.1.3 Guru PKn Harus Memiliki Kompetensi Sosial

Kemampuan dalam hubungan dengan kemasyarakatan, sekurang-kurangnya meliputi: berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Guru PKn ketika

di masyarakat juga harus bisa berperan dan memberikan teladan yang baik.

2.1.4 Guru PKn harus memiliki kompetensi profesional, meliputi:

Menguasai materi PKn secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Dengan demikian, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga guru PKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik.

2.2 Tantangan Guru PKn di Era Global

Di era global tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan semakin berat, karena secara langsung maupun tidak langsung globalisasi akan berpengaruh pada pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Siswa pada dasarnya tidak mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi dan siswa apabila tidak memiliki moral dan etika yang baik bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi, sehingga perilaku siswa menjadi kurang baik. Tentunya dengan adanya globalisasi tugas guru PKn untuk membentuk perilaku siswa yang baik tidak mudah. Memang di era global pendidikan harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era global.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak mudah, butuh peran serta dan kerjasama yang baik dari para guru diantara guru PKn. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menegaskan: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Rumusan pasal 3 di atas, jelaslah bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan jangka panjang yang sangat mulia, yaitu menjadikan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di samping memiliki kompetensi sifat-sifat lain yang juga sangat penting dalam rangka pencapaian kualitas manusia yang sesuai dengan karakter jatidiri bangsa Indonesia. Poin penting yang perlu diperhatikan dari pasal diatas adalah manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak atau berkarakter mulia. Ketiga kompetensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman adalah fondasi yang mendasari ketaqwaan dan karakter seseorang. Taqwa menjadi bentuk pengamalan (aplikasi) dari keyakinan seseorang terhadap Tuhan (iman). Sedangkan karakter (akhlak) sebenarnya merupakan hasil atau akibat dari pelaksanaan taqwa. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter seharusnya sudah memiliki iman yang kuat dan sudah memiliki ketaqwaan yang benar.

Berangkat dari hal tersebut diatas, secara formal guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas yang besar untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki landasan yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis akhlak yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali juga pada siswa-siswi sekolah dasar. Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya tersebut mulai dirintis melalui pendidikan nilai-nilai karakter. Dalam pemberian pendidikan nilai karakter di sekolah dasar, Kementerian Pendidikan Nasional membuat kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, antara lain; pertama, bahwa pendidikan karakter bangsa diberikan berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran. Kedua, pendidikan karakter bangsa diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran PKn, pendidikan agama, dan mata pelajaran lain yang relevan. Ketiga, pendidikan karakter bangsa terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Kebijakan tersebut pada dasarnya sudah dijalankan sekolah akan tetapi hasil yang diperoleh pada setiap siswa masih kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari kondisi yang ada di masyarakat sering terjadi hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang

ada dimasyarakat, diantaranya sering ada tawuran pelajar, mencontek massal, dan siswa kurang memiliki sopan santun.

Adanya kondisi diatas tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan semakin menantang, mengingat materi yang harus disampaikan tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan tetapi juga harus bisa mengajarkan pendidikan karakter pada siswa. Adanya penambahan materi tentunya akan menambah materi maupun jam pembelajaran tetapi alokasi jam pembelajaran dikelas tidak ada penambahan. Guru PKn merupakan guru yang dominan bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. Guru PKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik.

Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bersifat dinamis. Dalam sejarahnya Pendidikan Kewarganegaraan kita telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan. Pada tahun 1957 muncul dengan nama Kewarganegaraan. Tahun 1961 berubah nama menjadi pelajaran Civics. Tahun 1968 berganti menjadi Kewargaan Negara. Tahun 1975 berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hingga pada kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1994 berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tahun 2004 berubah dengan label baru Kewarganegaraan berdasar Kurikulum 2004, 2006 menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasarkan Standar Isi dan 2013 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali.

Barangkali di antara mata pelajaran lainnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang paling sering mengalami perubahan. Para guru yang sebelumnya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya akan mulai mengajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraani. Merupakan peluang sekaligus tantangan bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mampu mengembangkan pembelajaran sehingga berhasil sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

Dalam kurikulum Standar Nasional PKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa visi PKn adalah mewujudkan

kan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi yang diemban mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan, tuntutan, tuntutan kendali mutu yang semakin mendesak dan proses demokratisasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi pendidikan demokrasi.
- b. Memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana pedagogis untuk menghasilkan dampak instruksional dan pengiringnya wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan sehingga dihasilkan desain kurikulum yang bersifat interdisipliner.
- c. Memanfaatkan berbagai konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik mampu belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga Negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Pengembangan kemampuan atau kecerdasan warga Negara sebagai tujuan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan sosial, dan intelektual, serta partisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, upaya pengembangan kecerdasan warga negara sebagai tujuan PKn diorganisasi dalam kurikulum yaitu Kurikulum Standar Nasional PKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adanya perubahan pada materi dan tujuan pada mata pelajaran PKn membuat paradigma mata pelajaran PKn berubah. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis atau lebih dikenal dengan

masyarakat madani (*civil society*) (Muchson AR, 2003). Paradigma baru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam system pemerintahan yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi strategis dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa negara demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang baik, berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Simpulan

Guru PKn merupakan guru yang dominan bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. Guru PKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik. Guru PKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yang sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ke empat-empatnya merupakan komponen yang terintegrasi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang profesional. Guru PKn diharapkan tidak hanya *transfer knowledge*, tetapi harus bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti yang bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan guru PKn di era global semakin berat mengingat guru PKn dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk perilaku para siswa yang memiliki moral yang baik. Untuk membentuk menjadi warga Negara yang memiliki moral yang baik tidak mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat selain berdampak positif juga negatif. Apabila peserta didik tidak memiliki moral yang kuat tentunya siswa akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif yang bisa merusak moral siswa.

Materi mata pelajaran yang bersifat dinamis, dimana setiap saat materi mata pelajaran bisa berubah sesuai dengan kebijakan kementerian pendidikan nasional, sehingga guru PKn harus aktif menyesuaikan materi ajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Diva press.
- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- E. Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- E. Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- E. Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah. B. Uno. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sudarwan Darwin. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suyanto. 2006. *Di Belantara Pendidikan Bermoral*. Yogyakarta: UNY Press.
- Uzer Usman. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wuryandani, wuri dan Fathurrohman. 2011. *Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Nuha Litera
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

EKSISTENSI SEKOLAH DALAM TANTANGAN GLOBAL

Siti Irene Astuti Dwiningrum

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

ireneast@yahoo.com

Abstrak

Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Persoalan pendidikan semakin kompleks dalam tantangan global. Organisasi sekolah memiliki dinamika yang sangat variatif dalam merespon setiap bentuk perubahan masyarakat global. Adaptasi sekolah terhadap tantangan global sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sekolah.

Eksistensi sekolah dihadapkan dengan berbagai isu dan kepentingan global yang memposisikan peran sekolah semakin termajinasikan. Padahal, eksistensi sekolah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Eksistensi sekolah harus terus diupayakan dalam menghadapi berbagai kepentingan global.

Pendidikan antisipatoris merupakan salah satu strategis yang harus dilakukan oleh sekolah dalam menjaga eksistensinya dalam menghadapi tantangan global. Fungsi pendidikan antisipatoris dapat menyiapkan anak-anak didik dalam menghadapi tantangan global akan lebih optimal, dengan memberikan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas kehidupan sebagai manusia yang lebih bermakna.

Keyword : eksistensi sekolah, pendidikan antipatoris

1. Pendahuluan

Dalam memahami bagaimana sesungguhnya pendidikan dikelola masih menyisahkan persoalan yang rumit dan kompleks. Namun demikian dari analisis Jack L.Nelson dalam bukunya *Critical Issues in Education* secara garis besar dapat dipahami dengan jelas bahwa persoalan yang muncul dalam institusi pendidikan, seperti halnya menurunnya kualitas siswa, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, mahal biaya pendidikan, minimnya sarana dan prasarana disekolah yang dikelola pemerintah, atau ada kepentingan sosial akibat tidak meratanya akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menjadi area perdebatan yang terus berlangsung bersumber pada tiga masalah pokok. Dalam hal ini isu dan konflik yang berkembang adalah 1) perselisihan pendapat bagaimana seharusnya institusi pendidikan diarahkan atau dijalankan, 2) untuk kepentingan siapa lembaga-lembaga persekolahan diajukan, 3) apa yang seharusnya dikelola, muncul berbagai kelompok kepentingan didalam masyarakat (Nelson, 1995). Berdasarkan tiga persoalan tersebut, eksistensi sekolah menarik untuk dikaji secara terus-menerus, karena organisasi sekolah memiliki dinamika yang sangat variatif dalam merespon setiap bentuk perubahan.

Sekolah sebagai lembaga paling legitimate mendapat ujian ketika dihadapkan pada realitas; banyak masyarakat yang tidak mampu memperoleh pengetahuan, gara-gara tidak sanggup memenuhi tuntutan yang ditawarkan sekolah. Kritikan terhadap sekolah yakni sekolah dinilai tidak memecahkan solusi tetapi membuat kesenjangan social yang semakin melebur. Randall Collin dalam bukunya *The Credential Society: An Historical Sociology Of Education And Stratification* (1979) menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan babak-babak awal proses stratifikasi sosial. Pengetahuan diibaratkan komoditas akhirnya timbul kapitalisasi pengetahuan. Dunia pendidikan akhirnya lebih condong diperlukan sebagai 'perusahaan' yang cenderung mengabaikan mutu "inputnya" yang penting berani bayar mahal. Fenomena sosial tersebut yang memunculkan gejala komersialisasi pendidikan, akibat yang menyedihkan ketika dalam proses pendidikan mulai mengabaikan moralitas dan keluhuran nilai pendidikan. Tak heran jika eksistensi sekolah mulai banyak dikritisi oleh pakar pendidikan, khususnya dalam menganalisis peran sekolah dalam proses pembangunan pendidikan. Makalah ini akan membahas bagaimana pendidikan antisipatoris di-kembangkan oleh sekolah dalam menghadapi tantangan global ?

2. Pembahasan

Eksistensi sekolah dihadapkan dengan berbagai isu dan kepentingan global yang memposisikan peran sekolah semakin termajinasikan. Dalam hal ini sekolah belum berhasil menjalankan perannya secara fungsional yang berdampak belum semua tujuan pendidikan dapat direalisasikan dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Disamping itu dunia pendidikan dihadapkan dengan enam bahaya domestik yang mengancam ketahanan nasional seperti halnya masalah (Tilaar, 2003:20) antara lain : ketidakadilan dan kesewenang-kesewenangan, arogansi kekuasaan, arogansi kekayaan, dan arogansi intelektual, kebringasan social, perilaku sosial menyimpang, perubahan tata nilai, serta perubahan gaya hidup sosial. Jika persoalan domestik tidak dapat diselesaikan maka masyarakat akan mengalami disintegrasi sosial yang bisa berkembang menjadi disintegrasi bangsa, yang fenomena inipun sudah mulai berlangsung saat ini.

Disamping itu, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang datang dari luar yakni ide-ide asing yang membahayakan identitas budaya bangsa. Sebagai akibatnya, bangsa Indonesia semakin sulit untuk melakukan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Indonesia harus diperjuangkan didalam sekolah dan keluarga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Dalam era globalisasi, eksistensi sekolah banyak dikritisi oleh berbagai pakar pendidikan. Beberapa kritikan yang dilontarkan para pakar tersebut memberikan gambaran yang lebih empirik bahwa eksistensi sekolah telah menunjukkan ragam fungsi dan perkembangannya sebagai media untuk membudayakan kehidupan manusia. Bagi Ivan Illich (1970) , hukum memaksa semua orang untuk sekolah, meskipun banyak ketimpangan mulai dari isi sampai pada wilayah biaya. Sekolah menjadi ritus masyarakat yang membodohkan, dibayangkan hanya aktivitas monoton biaya bisa sampai dengan puluhan juta. Sekolah menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan, karena masyarakat yang mampu sekolah adalah masyarakat yang tidak miskin. Efek negatif sekolah yang terjadi saat ini adalah kuatnya

perbisnisan sekolah yang mengakibatkan banyak orang termajinkan. Sistem yang kemudian tercipta adalah yang mampu bayar yang dapat sekolah. Kesewenang-wenangan dalam menerapkan kebijakan memicu terjadinya gesekan-gesekan sosial dan berimbas pada sistem relasi social. Bentuk-bentuk marginalisasi terhadap orang miskin adalah kekerasan, yang tidak bisa ditolelir, strategi rapi untuk mengomersilkan pendidikan demi menanggapi keuntungan adalah strategi neoliberalisme. Kritikan Illich terhadap sekolah, bahwa sekolah lebih menitikberatkan produknya, yang berupa lulusan yang mengejar sekolah mengaburkan makna belajar; guru dalam prakteknya lebih memerankan dirinya sebagai hakim, pengajar idiologi sekolah tidak mengembangkan kegiatan belajar dan atau mengajarkan keadilan, sebab para pendidik lebih menekankan pengajaran sudah dipaket-paketkan dengan spesifikasi. Di sekolah kegiatan belajar dan penentuan sosial dilebur menjadi satu. Lebih lanjut, Illich menguraikan bahwasanya sekolah melupakan koridornya sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan yang beresensi memanusiakan manusia, dan bukan sebagai tempat pendoktrian dan pengabdian beberapa unsur kemanusiaan dari siswa.

Sementara bagi Freire, tokoh pendidik asal Brazil, berpendapat bahwa sekolah-sekolah yang bersifat normal merupakan tempat penindasan bagi para peserta didik. Hal itu diakibatkan karena kewajiban yang sangat memberatkan harus dijalankan oleh para peserta didik, salah satunya adalah sistem pembelajaran yang bergaya bank (*Banking Concept of Education*). Sekolah saat ini cenderung mengalami proses kapitalisme pendidikan. Bagi para pemilik modal besar, sekolah merupakan lahan subur untuk mendatangkan laba tinggi, yang kemudian ditandai dengan kecenderungan mendirikan bangunan sekolah yang serba modern dan canggih untuk menarik konsumen. Konsekuensi membayar mahal. Tak heran jika Freire menyatakan bahwa sekolah merupakan sosok kapitalis yang licik (dalam Edukasi 2005). Analisis Freire membuktikan semakin eksisnya sekolah elite dalam tatanan masyarakat global. Pada akhirnya, kapitalisasi pendidikan juga menjadi fenomena sosial yang semakin kuat.

Kritikan Bordieu yang mempersepsikan bahwa peran sentral sekolah adalah memproduksi berbagai ketidakmerataan sosial

dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah adalah faktor dalam konsensus budaya, sejauh ia mempresentasikan kebahagiaan *common sense* yang merupakan prasyarat komunikasi. Boudieu menunjukkan sistem pendidikan yang diterima di sekolah bekerja untuk mempertahankan tatanan sosial ditengah-tengah semua yang potensial untuk konflik. Sistem pendidikan memberikan sebuah kesempatan melalui sumbangannya pada reproduksi sistem hubungan kelas yang mana hubungan antar kelas dan bentuk-bentuk linguistik prestise, pendidikan yang diterima di sekolah. Dalam perspektif kekuasaan adalah mendominasi kelompok yang tidak beruntung disebut sebagai kekuatan simbolik. Kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip konstruksi realitas ini, khususnya realitas sosial dipandang sebagai dimensi utama kekuatan politik. Kepemilikan modal simbolik mempertahankan produktivitas modal pendidikan yang diperoleh pada modal pendidikan merupakan sebuah fungsi modal ekonomi dan sosial yang dapat disediakan untuk mengeksploitasinya. Analisis Bordieu, menguatkan eksistensi sekolah sebagai salah kekuatan yang strategis dalam membangun kekuatan kelas-kelas sosial yang akan menguatkan adanya dominasi kelas sosial dalam struktur sosial semakin langgeng.

Dari berbagai kritikan terhadap sekolah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka makna sekolah perlu dikritisi eksistensinya. Dalam konteks inilah sekolah perlu dikembalikan pada maknanya yakni dalam budaya kita dinamakan dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini pendidikan diartikan sebagai *educare* (membawa keluar, mendewasakan anti formalitas, *Educare* juga berarti memimpin atau menuntun. Filosofi pendidikan sebagai *educare* ini lebih mengutamakan proses pendidikan yang tidak terjebak pada banyaknya materi yang dipaksakan kepada para peserta didik dan harus dikuasai. Proses pendidikan *educare* lebih merupakan aktivitas hidup untuk menyertai, mengantar, membimbing, mendampingi. memungkinkan peserta didik sehingga tumbuh dan berkembang. Adapun perbedaan sekolah dan pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan pola interaksi manusiawi antara orang perseorangan dengan dunia diluar dirinya sebagaimana terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan sebagai proses aktualisasi potensi diri, juga tidak bisa dibeli, tidak bisa diprediksi, dikontrol sebagaimana proses produksi barang

dan jasa. Perbedaan pendidikan dan pengajaran adalah sebuah batas yang sangat jauh, berbicara pada pendidikan maka akan lebih mengarah pengembangan kepribadian, sedangkan sekolah lebih mengarah pada wilayah pengajaran. Sedangkan Ki Hadjar Dewantara memaknai pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berazas keadaban yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dalam konteks yang lebih luas pendidikan nasional ialah pendidikan yang berdasarkan garis-hidup bangsanya (cultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. (Dwi Siswoyo, 2013).

Upaya untuk mengembalikan tujuan pendidikan tidak mudah karena sistem pendidikan tak lepas dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya, pendidikan sentralistik mendapat kritikan cukup tajam. Salah satu kritikan ditujukan pada jenis standar yang digunakan dinilai sebagai upaya untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem pemerintahan dimana segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan Negara dan ditopang oleh birokrasi yang kaku, peraturan-peraturan terpusat dan tidak memberikan kebebasan didaerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa sistem pendidikan sentralistik seperti mesin besar yang digerakkan dari pusat dan lembaga-lembaga pendidikan didaerah merupakan sekrup-sekrup kecil yang berputar sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Lebih dari semua itu, proses pendidikan yang demikian hasilnya adalah pembodohan rakyat (*stupidifikasi*). Lebih jauh lagi, proses komodifikasi pendidikan memunculkan kapitalisme pendidikan karena pendidikan tidak diarahkan kepada kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan segelintir kelompok elit. Dalam hal

ini, kapitalisasi pendidikan lebih kuat perannya dibandingkan dengan pendidikan yang populis.

Kapitalisasi pendidikan menjadi fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat global. Kapitalisasi pendidikan telah mengubah peran pendidikan nasional. Peran sosial pendidikan bergeser ke peran industri dan jasa. Liberalisasi pendidikan mengurangi peluang dan kesempatan rakyat untuk memperoleh hak pendidikan untuk bersekolah yang menjadi tanggung jawab Negara. Kapitalisasi pendidikan masuk dalam semua level pendidikan nasional sebagai contohnya dengan disyahkan UU BHP yang cenderung mengembangkan nilai-nilai yang berorientasi pada penumpukan modal dan pengembangan modal yang dipertahankan dalam iklim globalisasi yang berkembang tidak adil karena monopolistik atas kekuasaan pasar. Pada akhirnya, kecenderungan pendidikan nasional di era globalisasi telah meminggirkan nilai kemanusiaan yang hakiki (Dwiningrum, 2013)

Substansi pendidikan yang bertujuan untuk memajukan tingkat kebudayaan manusia dan peradaban manusia terus menghadapi tantangan. Praktek pendidikan nasional yang berkembang dalam iklim kapitalisme yang monopolistik telah memarjinalkan eksistensi pendidikan untuk rakyat. Komersialisasi dan privatisasi pendidikan dalam prakteknya telah memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan yang dilakukan secara otonomi, sehingga pemerintah cenderung tidak campur tangan lagi dan peran investor semakin kuat. Sebagai konsekuensinya rakyat yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, akan mengurungkan niatnya, karena biaya pendidikan sangat mahal. Di sisi lain, kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal tetapi cenderung diorientasikan untuk memenuhi tuntutan pasar global (Dwiningrum, 2013). Keadaan tersebut juga mengubah kurikulum sebagai bagian proses dari perubahan kebijakan pemerintah dalam menghadapi tuntutan globalisasi.

Realitas sosial tersebut membuktikan bahwa pembangun pendidikan menjadi bagian isu politik yang dalam perkembangannya menggambarkan adanya kecenderungan bahwa pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan. Analisis yang terkait

dengan hubungan tersebut yakni adanya kecenderungan bahwa masalah dana pendidikan menjadi keputusan politik; perubahan kebijakan pendidikan menjadi masalah nasional; masalah pendidikan menjadi isu politik; keputusan politik pemerintah cenderung untuk perbaikan kualitas pendidikan anak. Dalam konteks inilah pembangunan pendidikan di Indonesia cenderung mendominasi dari salah satu kecenderungan tersebut, yang pada akhirnya akan juga berpengaruh pada struktur dan mekanisme organisasi di sekolah-sekolah.

Sebagai contohnya, dalam organisasi sekolah standar mutu merupakan aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini standar sebagai sarana pengendalian mutu, yaitu ukuran-ukuran untuk mengetahui atau mengontrol kualitas pendidikan tak lepas dari kepentingan politik. Kualitas pendidikan tak lepas dari berbagai standar yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Secara umum penentuan standar yang dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Diane Ravitch (1995) terdiri tiga jenis standar yaitu: a). Standar isi; b) Standar penguasaan; c). Standar sumber-sumber belajar. Sedangkan secara operasional, perkembangan penyusunan kurikulum dapat digolongkan kepada tiga desain, yaitu 1) yang berpusat kepada mata pelajaran (*subject matter*); 2). Yang berpusat kepada pembelajar (*leaner centered*); 3). Berpusat kepada masalah (*problem centered*). Dalam prakteknya pelaksanaan standarisasi tersebut tidak mudah untuk diaplikasikan, bahkan ada kecenderungan setiap negara memiliki patokan yang tidak sama. Bagi Indonesia yang sudah memiliki ketentuan standar pendidikan nasional sebagaimana ditentukan oleh BSNP, tetapi hasil standarisasi pendidikan dalam sistem yang desentralistik masih menjadi perdebatan konsep karena standarisasi dalam aplikasinya masih dilematis antara ukuran pada standar nasional atau standar lokal. Perdebatan inilah membawa implikasi bahwa standar mutu pendidikan antar pemerintah daerahpun menggambarkan hasil yang beragam dari kualitas pendidikan.

Secara lebih khusus lagi jika dikaitkan sekolah yang bertanggung jawab pada penerapan kurikulum sekolah menghasilkan signifikansinya. Sebagai contohnya, kurikulum sebagai sarana dari standar yang diinginkan dan ditentukan oleh negara tidak selalu mampu diterapkan secara optimal oleh

sekolah. Hal ini dikarenakan penyusunan kurikulum meminta pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan teknis agar dalam kurikulum tidak tersembunyi apa yang disebut *the hidden curriculum*, yaitu unsur-unsur kekuasaan yang tidak kelihatan dari negara yang memasuki sistem pendidikan nasional. Di sinilah sumber konflik sangat mungkin terjadi jika terjadi penyimpangan atau kesenjangan antara kurikulum nasional dan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, dalam proses perkembangannya untuk mencapai standar yang tinggi serta kurikulum yang didesain dalam perspektif baru tampaknya akan berhadapan dengan bahaya yang sedang menimpa dunia pendidikan, yakni perkembangan neoliberalisme dan neokonservatisme yang semakin kuat.

Dunia pendidikan juga berhadapan dengan kepentingan global. Efek yang terjadi dengan melemahnya peranan kekuasaan negara dalam pendidikan, maka pendidikan cenderung oleh budaya corporate. Budaya organisasi merupakan sumber, kekuasaan di dunia yang mengglobal yang semakin menghilangkan kekuasaan negara. Dalam konteks inilah pendidikan tidak hanya terbatas pada isu sentralistik dan desentralistik, tetapi juga menjadi isu global. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kesadaran kritis dimana tanggung jawab pendidikan adalah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan pendidikan sebagai hak warga, hal ini sesuai dengan isu tentang *education for all* yang dalam prakteknya semakin sulit dicapai dalam tantangan masyarakat global.

Pendidikan untuk semua belum dapat diterapkan secara maksimal. Kebijakan wajib belajar merupakan salah satu upaya untuk merespon isu global yang terkait dengan pendidikan untuk semua. Namun demikian, implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia masih menghadapi dua kendala pokok yakni kendala struktural dan kultural. Kendala struktural ditunjukkan dengan belum meratanya kesempatan pendidikan bagi semua masyarakat untuk belajar dalam semua level pendidikan. Bahkan struktur sosial masih menggambarkan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketimpangan pendidikan yang hampir terjadi pada semua level pendidikan. Padahal, semua warga

mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang sudah dibangun oleh kekuatan landasan hukum yang kuat yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada intinya memiliki ketentuan umum bahwa wajib belajar adalah program pemerintah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya, penjaminan wajib belajar sudah dirancang dengan detail yang pada intinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; Warga negara Indonesia yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan; Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan (Sairin, 2012:143-144). Dalam hal ini, proses pelaksanaan kebijakan pendidikan sesungguhnya secara obyektif tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dianalisis dalam tatanan implementasinya dengan memperhatikan dimensi program, proses, dan evaluasinya. Karena, kebijakan pendidikan tentang wajib belajar tidak cukup dengan diatur oleh UU dan PP tetapi yang terpenting adalah kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola pendidikan dasar secara profesional, dan juga membangun kesadaran masyarakat untuk merealisasikan hak pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah (Dwiningrum, 2013).

Dalam perspektif pendidikan kritis yang mempresentasikan gugatan terhadap dunia

pendidikan yang dinilai gagal melahirkan peserta didik yang kompeten, baik dari segi keilmuan, keahlian, keterampilan, dan keahlian baik untuk kehidupan individual maupun dalam kaitannya dengan kehidupan kemasyarakatannya. Kegagalan peran pendidikan dalam pemikiran Ivan Illich atau Paulo Freire bersumber oleh banyak hal, sebagaimana dijelaskan oleh Illich bahwa pendidikan modern dalam proses pendidikannya telah menghasilkan "dehumanisasi" dan kelembagaan pendidikan di negara-negara berkembang tidak akan membawa perubahan apa-apa sehingga sistem pendidikan hanya akan memperkuat struktur kelompok elit yang mapan. Oleh karena itu, Illich menyarankan sistem persekolahan harus dihapuskan (Illich, 1979 dalam Azra, 2003: 149). Kritik pun dikemukakan oleh Freire yang menyatakan bahwa pendidikan yang seharusnya mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kobodohan ternyata hanya mampu menjadi alat penindasan bagi kekuasaan. Sementara itu, *Everett Reimer* dalam artikel : *School Is Dead* menyatakan bahwa sekolah bagi kebanyakan orang adalah institusi untuk mendukung hak-hak istimewa; dan pada waktu yang sama merupakan instrument bersama untuk mobilitas vertical. Bagaimana sesungguhnya sekolah dikelola dalam menghadapi tantangan global? Adalah pertanyaan yang terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tantangan Sekolah di Era Global

Problematisasi yang terjadi dalam dunia pendidikan ada dalam tataran makro dan mikro. Pada tataran makro dihadapkan pada tuntutan global yang menjadikan peran pendidikan harus menampilkan wajah yang kompetitif dengan didukung oleh nilai-nilai global yang dominant. Sementara dalam tataran mikro, institusi pendidikan dianggap "gagal" dalam menjadikan individu yang berkarakter dan berbudaya. Kekuatan ideologi neoliberal dalam globalisasi menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan atau komoditas dan dikomersilkan. Faham, neoliberal dimana negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi keuntungan menjadikan pendidikanpun berkembang sebagai "industri pendidikan: yang terus berkembang secara kompetitif. Kebijakan privatisasi menjadi paradigma yang

terus dikembangkan dalam, mengantisipasi tuntutan global. Pandangan neoliberal sangat pragmatis dan ekonomi deterministik. Siswa adalah bagian dari modal yang harus dibekali dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dan efisien karena dunia sangat kompetitif secara ekonomi. Kebijakan neoliberal menunjukkan adanya keperpihakan pada mekanisme pasar.

Privatisasi pendidikan terus berkembang dengan masuknya korporasi dalam pengelolaan dunia pendidikan. Kuatnya pengaruh neoliberal dalam kebijakan pendidikan menjadikan diskriminasi pendidikan semakin kuat, dan peran negara semakin melemah serta "profit oriented" menjadi tujuan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Kecenderungan inipun diperkuat dengan penggunaan ISO dalam dunia industri pendidikan yakni label IB (*International Baccalaureate*) untuk pengelola program sekolah bertaraf internasional menjadi trend dalam pengelolaan pendidikan. Budaya global dan cepatnya penyebaran teknologi yang terpaket dengan struktur manajemen perusahaan baru menekan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu dan selanjutnya menjajah pendidikan dengan kekuatan bisnis.

Sementara ini pendidikan nasional belum mampu meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan anak didik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kepribadian (*nation and character building*) yang sangat diperlukan untuk menuju rekonstruksi negara dan bangsa. Padahal, pendidikan nasional merupakan sarana paling strategis untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga, negara yang demokratis dan memiliki keadaban. Reformasi di bidang pendidikan perlu dilakukan seiring dengan perubahan fenomena ekonomi dan politik global yang sangat membutuhkan respon yang proaktif bagi dunia pendidikan. Bagaimanapun, globalisasi sebagai konstruksi teoritis yang bersifat kontradiktif jangan dibiarkan membawa kehancuran tradisi lokal terwasuk didalamnya upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mengkritisi dunia pendidikan dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi internal maupun eksternal, pertama dimensi internal berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri, kelembagaan, kandungan atau muatan pendidikan, dan terakhir, proses-proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya.

Kedua, dimensi eksternal, yang berkaitan dengan kondisi di luar pendidikan yang justru mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan. Membangun pendidikan yang berkarakter adalah sebuah tantangan baik bagi keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan antara ketiga institusi tersebut harus dikuatkan kembali. Pilar pendidikan harus dibangun dikuatkan kembali antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Prinsip *educational networks* yang nyaris terputus harus dijalin secara sinergis. Keluarga sebagai pilar pokok menjadi tempat pertama anak untuk tumbuh dan berkembang harus menjadikan *school of love*, sekolah untuk kasih sayang bagi setiap anak. Sedangkan peran sekolah tidak sekedar sebagai *transfer of knowledge*, dimana guru hanya menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai lembaga yang mangusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*).

Pendidikan yang berorientasi pada nilai merupakan proses pendidikan karakter. Proses pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, *pertama* dengan pendekatan *modelling*, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan, *kedua*, melakukan pembiasaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tentang nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang akan dijadikan pedoman sikap dan perilaku. Usaha ini diiringi dengan langkah-langkah memberi penghargaan, menumbuhkan nilai-nilai baik, dan sebaliknya mencegah dan mencegah berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinue; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan membiasakan bersikap dan berprinsip baik; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diulangi secara terus menerus.

Di samping itu, perlindungan terhadap pendidikan dalam tantangan global dengan berkembangannya paham neoliberalisme dan neokonservatisme. Paham neoliberalisme menekankan kepada kekuasaan negara yang lemah, segala sesuatu dipulangkan kepada hak

privat, dan mengurangi campur tangan kekuasaan negara. Paham neokonservatisme menginginkan adanya negara yang kuat dan segala sesuatu dikembalikan kepada publik. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa liberalisme dan globalisasi mempunyai tendensi untuk memperlemah kekuasaan negara. Akibatnya, dalam dunia pendidikan terdapat empat kecenderungan, yaitu: 1). Sistem pendidikan mengacu kepada sistem ekonomi pasar bebas, artinya memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada pasar atau kekuatan pasar; 2) Nilai-nilai dalam masyarakat seperti adat-istiadat, keluarga, menjadi lemah disertai pula oleh semakin merosotnya patriotisme; 3). Terlalu menekankan kepada standar untuk mempertajam daya kompetitif agar dapat bersaing di pasar bebas; 4). Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan industri.

Perbedaan dalam wacana kehidupan bernegara inilah yang seringkali menjadi sumber konflik kepentingan negara dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam menangani masalah dan rencana pendidikan, sehingga praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan seringkali mengalami penyimpangan-penyimpangan yang berdampak tujuan pendidikan belum tercapai secara optimal. Hal inilah yang mendorong berbagai kebijakan dan praktik pendidikan perlu direformasi untuk mengembalikan peran pendidikan pada fungsi utamanya sebagai lembaga yang mampu mengantarkan dan mengembangkan potensi manusia mencapai tingkat kemandirian tertentu, sehingga di dapat dinamakan individu. Sebagaimana dikatakan oleh Kleden bahwa pendidikan bukan usaha untuk menciptakan alat atau instrument, bukan pula menciptakan instrument untuk pasar dan untuk negara. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah diarahkan untuk membangun watak emansipatoris yang lebih kuat dibandingkan dengan watak instrumental.

Pendidikan saat ini perlu didesain untuk mempersiapkan anak didik dalam menghadapi kehidupan. Pendidikan perlu dirancang tidak hanya terbatas pada mempersiapkan seseorang untuk suatu profesi tertentu, tetapi juga membekali anak didik dengan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Hasil pendidikan diharapkan tuampu mengatasi tiga tugas kehidupan yaitu tugas untuk dapat hidup (*to make living*); tugas untuk mengembangkan

kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*); tugas turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*). Dengan pendidikan yang antisipatoris diharapkan peserta didik memiliki kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan global (Buchori, 2001).

Sekolah harus mampu mempersiapkan para siswa untuk menjalani kehidupan perlu dilakukan disemua jenjang pendidikan yakni pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Sekolah harus mengajarkan makna hidup, tetapi yang sering ditekankan adalah tentang "keberhasilan hidup". Kehidupan yang bermakna adalah masalah pribadi sebagai hasil dari pengenalan diri sendiri, dan pengetahuan bagaimana menyatakan jati diri secara berarti dalam berbagai lingkungan kehidupannya. Untuk membimbing anak memahami kehidupan bermakna perlu mengembangkan *personalized education* melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan antisipatoris mengajarkan kemampuan makna. Sebagaimana dijelaskan oleh Philip H. Phouix yang menekankan pentingnya mengajarkan kemampuan makna. Pengetahuan yang tidak bermakna (*meaningless knowledge*) tidak ada gunanya, dan hanya menjadi beban hidup. Sebaliknya, pengetahuan yang bermakna (*meaningful knowledge*) merupakan sesuatu yang bersifat fungsional, dan berguna dalam kehidupan. Kehidupan modern yang penuh dengan berbagai ketimpangan, pertentangan, dan kemajuan, dapat membuat manusia kehilangan maknanya dalam hidup. Untuk itulah diperlukan suatu program pendidikan umum yang memberikan kemampuan kepada para siswa untuk menangkap berbagai jenis makna yang terdapat dalam kehidupan (Buchori, 2001). Dalam kehidupan terdapat enam jenis wilayah makna sebagai berikut:

Tabel 1.

Wilayah	Deskripsi
Symbolic	Untuk memberikan makna simbol harus diberikan pendidikan dalam bahasa matematika
Emperies	Untuk berbagai makna yang terdapat di wilayah emperies harus diberikan pendidikan tentang lingkungan fisik (fisika, kimia, biologi, lingkungan sosial, dan budaya).
Esthetics	Untuk memberikan kemampuan makna dalam wilayah esthetics, biasanya diajarkan seni suara, sastra, visual arts, dan seni gerak (<i>the art of movement</i>).
Synnoeties	Untuk memahami kemampuan makna dalam wilayah synnoeties (<i>personal knowledge atau intersubjective understanding</i>).
Ethics	Untuk memahami makna yang terletak pada wilayah ethics, perlu ditanamkan kesadaran untuk menghormati dan mematuhi secara sukarela norma-norma yang ada (<i>voluntary personal commitment to values</i>).
Synoptics	Untuk memahami makna yang terdapat dalam wilayah synoptics, mata pelajaran yang harus diajarkan adalah sejarah, filsafat dan agama

Dengan memahami jenis wilayah makna dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dalam setiap pelajaran mempunyai kontribusi dalam membangun kesadaran makna pada peserta didik. Oleh karena, pendidikan harusnya mengembangkan keenam jenis wilayah makna secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik secara bertahap mampu menangkap makna apa yang terlibat dalam semua proses kehidupan yang dijalannya, yakni menangkap makna kehidupan itu sendiri. Persoalannya, materi dan strategi

pembelajarannya belum mampu menyentuh semua dimensi maknanya secara holistik, sehingga peserta didik belum mampu kesadaran makna kehidupan secara utuh. Dalam hal ini, pendidikan antisipatoris tidak cukup ditentukan oleh substansi materinya, tetapi lebih penting adalah proses pembelajarannya yang diharapkan mampu mengubah tata nilai peserta didik. Untuk tercapai semua tujuan tersebut diperlukan nilai yang mampu mengubah setiap perilaku yang sesuai dengan perubahan yang terus terjadi.

Namun demikian, perubahan tata nilai dalam semua level kehidupan tidak mudah dilakukan. Kehidupan menjadi sulit diatasi jika terjadi perubahan nilai dalam semua level (Buchori, 2003): a) Pembaruan tata nilai pribadi (*personal value system*), terkait dengan kemampuan memahami nilai-nilai apa saya yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pribadi. b) Pembaruan tata nilai kelompok (*group value system*), perlu dikaji nilai-nilai yang disepakati bersama dalam kehidupan kelompok; c) Pembaruan tata nilai bangsa (*national value system*), perlu mengkaji ulang nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan dari kehidupan nasional, berbangsa dan bernegara

Proses perubahan tata nilai tidak mudah. Proses perubahan tata nilai cenderung terjadi kesenjangan yang terus terjadi antara tata nilai yang tertulis dalam teks (*textual values system*), dengan tata nilai yang benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari (*actual value system*). Ketimpangan antara kedua nilai ini jika tidak diminalkan akan menjadi sumber dari berbagai perilaku sosial yang merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti halnya : perilaku munafik, perilaku hipokrit dll. Dalam hal ini sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan tata nilai, sehingga pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan kultural yang turut membentuk masa depan bangsa; bahwa pendidikan bukan menjadi instrument mati, tetapi pendidikan pada instansi terakhir sebagai ekspresi dari hati nurani bangsa. Dalam konteks inilah, peran sekolah khususnya dalam tantangan global harus menjadi *agent of change* dalam mengembangkan aktivitas belajar kedalam semua wilayah makna untuk dapat dikembangkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Diskusi tentang peran sekolah dalam tantangan global masih belum akhir, karena kajian ini masih menjadi pekerjaan para pendidik dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan bahwa membangun proses pendidikan yang bermakna yang harus diletakkan dalam pilar keluarga, sekolah dan masyarakat secara sinergis, sehingga eksistensi pendidikan dalam era globalisasi tetap menjadi kekuatan untuk membudayakan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Globalisasi telah menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sosial. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan untuk tetap mempertahankan peran utamanya. Eksistensi sekolah dalam mempertahankan tujuannya dihadapkan pada berbagai kepentingan politik yang memarginalkan fungsi dan peran pendidikan.

Dunia pendidikan menghadapi dua masalah yakni dalam tataran makro dan mikro. Pada tataran makro dihadapkan pada tuntutan global yang menjadikan peran pendidikan harus menampilkan wajah yang kompetitif dengan didukung oleh nilai-nilai global yang dominan. Sementara dalam tataran mikro, institusi pendidikan dianggap "gagal" dalam menjadikan individu yang berkarakter dan berbudaya. Persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan telah melemahkan eksistensi sekolah jika sekolah tidak mampu merespon tuntutan global.

Pendidikan antisipatoris merupakan salah satu strategis yang dapat dikembangkan oleh sekolah dengan mengembangkan kemampuan makna pada peserta didik. Pendidikan antisipatoris memerlukan perhatian sekolah untuk mengembangkan enam wilayah makna secara komprehensif dan sinergis agar berhasil secara maksimal. Pendidikan antisipatoris juga memerlukan perubahan tata nilai dalam semua level yakni level personal, level kelompok dan level bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Efendi (2004), "*Meruntuhkan Kekuasaan Sekolah Atas Pengetahuan*", EDUKASI, Volume II, Nomer 2, Desember 2004, Halaman 205.
- Buchori, Muchtar (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dwi siswoyo (2013), *Membangun Pendidikan Sebagai Ilmu Untuk Pencerahan Kemanusiaan*, dalam *Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Penerbit Ash-Shaff.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2013), *Kapitalis Pendidikan VS Pendidikan: Pendekatan Kultural dan Modal Sosial Dalam Membangun Masyarakat Terdidik*. dalam *Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Penerbit Ash-Shaff.

- Collins, Eandall (1979), *The Credential Society An Historical Sosiology of Education adn Stratification*, New York: American Press.
- Fauzuk (2005), *"Mengembalikan Fungsi Sekolah Menuju Human Welfare"*, EDUKASI, Volume II, Nomer 2, Desember 2004, Halaman 205.
- Illich, Ivan (1970), *Descholling*, Mexico: CIDOC
- Nelson, Jack L., Keneth Carlson, Stuart Palonsky (1996), *Critical Issues in Education, A Dialectic Approach*, United State: McGraw-Hill Companiers.
- Ravitchm, Diane (1995), *National Standards in American Education: A Citizen's Guide*, Brooking Instituion press.
- Reimer , Everett (2007), *School Is Dead* , University of California
- Tilaar (2003), *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: INDONESIAITERA.

SOLUSI TANTANGAN GURU ABAD 21 MELALUI PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENEMUAN TERBIMBING

Siti Nuriyatin, Heny Sri Astutik

Abstrak

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, para pendidik atau guru dituntut untuk selalu meningkatkan diri baik dalam pengetahuan maupun pengelolaan proses pembelajaran. Kurikulum abad 21 memposisikan siswa sebagai pembelajar aktif. Ciri dari pembelajaran abad 21 yaitu bahwa siswa didorong untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, siswa diharapkan mampu untuk merumuskan masalah bukan hanya menyelesaikan masalah, siswa diarahkan berpikir analitis bukan berpikir mekanistik, dan menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Tantangan pembelajaran tersebut diharapkan dapat dicapai seiring dengan peningkatan kualitas karakter siswa yang menjadi ciri kepribadian bangsa, seperti yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menghadapi hal itu maka diperlukan suatu pembelajaran sebagai alternatif dalam menjawab tantangan pendidikan abad 21 yang berkarakter yaitu melalui penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing ini memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan menempatkan guru sebagai fasilitator. Dalam penemuan terbimbing, karakter yang dibangun yaitu karakter yang menumbuhkan rasa keingintahuan intelektual sebagai modal dalam mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai nilai kejujuran dengan bingkai kesopanan dan kesantunan.

Keyword: penemuan terbimbing, karakter

1. Pendahuluan

Pendidikan abad 21 yang menekankan guru sebagai fasilitator tidak mengharapakan bahwa pembelajaran yang terjadi di dalam kelas masih didominasi oleh guru (*teacher center*). Kondisi pembelajaran yang demikian mengindikasikan diperlukannya usaha yang lebih optimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya yaitu melalui pembelajaran, seperti yang disampaikan dalam lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang salah satu pilar belajar bahwa belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang dibutuhkan yaitu pembelajaran yang dapat memaksimalkan pengembangan pengalaman siswa dan mengaktifkan siswa di dalamnya.

2. Penemuan Terbimbing

Pembelajaran merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan pada diri seseorang atau siswa. Seperti yang dikatakan

oleh Slavin (2006: 134) bahwa *"learning is usually defined as a change in an individual caused by experience"*. Pembelajaran merupakan perubahan dalam individu yang dipengaruhi oleh pengalaman. Kualitas dari pengalaman tersebut tidak lepas dari peran desain yang dirancang dalam memfasilitasi proses pembelajaran. *"The best strategy was a hybrid in which student received the some-context examples first and then the varied-context examples"* (Slavin, 2006: 230). Strategi awal yang terbaik bagi siswa dalam pembelajaran adalah mencontoh dengan cara menerima contoh pada konteks yang sama pada awalnya, berikutnya menggunakan contoh pada konteks yang berbeda.

Dalam proses perkembangan kognitif, siswa mempunyai karakteristik yang berbeda dalam memahami apa yang ada di sekitarnya. Hal ini senada dengan yang dikatakan Bruner, *"Research on the intellectual development of the child highlights the fact that at each stage of development the child has a characteristic way of viewing the world and explaining it to himself"* (1977: 33). Dalam proses perkembangan kognitif, siswa mempunyai karakteristik yang

berbeda dalam memandang dunia dan menjelaskannya pada diri mereka sendiri. Hal ini memberikan informasi bahwa dalam merancang suatu pembelajaran sangatlah penting mempertimbangkan latar belakang dan kondisi siswa agar pembelajaran yang dilakukan dapat mengoptimalkan potensi yang seharusnya dimiliki setiap siswa.

Menurut Piaget, seorang anak mengalami perkembangan kognitif melalui empat tahapan. Tahapan ini merupakan tahapan pengkonseptualisasian perkembangan kognitif. Empat periode tahapan perkembangan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1 Sensorimotor Stage (dari lahir sampai dua tahun).

Piaget (Slavin, 2006: 32) mengatakan bahwa "The earliest stage is called sensorimotor, because during this stage babies and young children explore their world by using their senses and their motor skills". Menurut Piaget tahap ini terjadi mulai dari lahir sampai dua tahun. Tahap sensorimotor ini ditandai dengan adanya kegiatan eksplorasi dunia anak itu sendiri melalui indera dan keterampilan motoriknya. Interaksi dengan lingkungan adalah interaksi sensorimotor dan hanya berkaitan dengan keadaan saat ini. Anak-anak pada tahap ini bersikap egosentris karena memandang segala sesuatu berdasarkan kerangka referensi dirinya sendiri, dan dunia psikologis mereka adalah satu-satunya dunia yang ada. Pada akhir tahap ini, anak mengembangkan konsep kepermanenan objek. Dengan kata lain, mereka mulai menyadari bahwa objek tetap ada meski mereka tidak melihatnya.

2.2 Preoperational Thinking (sekitar dua sampai tujuh tahun).

Piaget (Slavin, 2006: 34) mengatakan "During the preoperational stage, children's language and concepts develop at an incredible rate". Pada tahap ini bahasa dan konsep anak berkembang secara luar biasa. Salah satu yang merupakan penemuan penting Piaget dalam tahap ini adalah anak tidak memiliki pemahaman konservasi. "One of Piaget's earliest and most important discoveries was that young children lacked an understanding of the principle of conservation" (Piaget, melalui Slavin, 2006). Konservasi didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyadari bahwa jumlah, panjang, substansi, atau luas akan tetap sama walaupun mungkin hal-hal seperti itu direpresentasikan

kepada anak dalam bentuk yang berbeda-beda. Slavin (2006: 36) mengatakan bahwa "*Centration, or focusing on only one aspect of a situation, helps to explain some errors in perception that young children make*". Fokus pada satu aspek dari suatu kondisi akan membantu siswa menjelaskan beberapa kesalahan persepsi anak.

2.3 Concrete Operations (sekitar tujuh sampai sebelas atau dua belas tahun).

Meskipun perbedaan antara kemampuan mental praoperasional dan operasi konkrit jelas, namun anak operasi konkrit masih belum berpikir seperti orang dewasa. Anak dapat melakukan operasi pada masalah yang agak kompleks selama problem itu konkret dan tidak abstrak. Slavin (2006: 38) mengatakan bahwa "*They are very much rooted in the world as it is and have difficulty with abstract thought*". Anak lebih banyak menghafal dan masih mengalami kesulitan dengan berpikir abstrak.

2.4 Formal Operations (Sekitar 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun).

Pada tahap ini pemikiran anak mulai berkembang menjadi bentuk yang merupakan karakteristik dari orang dewasa. Anak mulai mampu berpikir abstrak. Anak-anak pada usia ini bisa menangani situasi hipotesis, dan proses berpikir mereka tak lagi tergantung hanya pada hal-hal yang langsung dan riil. Pada tahap ini pemikiran semakin logis dan merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Mereka dapat menggeneralisasikan pemikiran, membuat kesimpulan dan menggunakan penalaran obyektif, mampu berfikir fleksibel dan kreatif.

Slavin (2006: 30) mengatakan "*effective teaching strategies must take into account students' ages and stages of development*". Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pembelajaran yang efektif harus memperhatikan tahap perkembangan siswa. Bruner menyarankan agar dalam pembelajaran yang dilakukan hendaknya siswa belajar dengan berpartisipasi secara aktif dan melakukan eksperimen-eksperimen untuk memperoleh pengalaman yang mengizinkan mereka untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip itu sendiri. Pembangunan konsep oleh siswa ini selaras dengan konsep Konstruktivisme dimana siswa membangun ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang ada.

Konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran aktif dan melibatkan transformasi informasi, memaknai pengalaman, membentuk hipotesis, dan pengambilan keputusan.

Dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis memerlukan pengetahuan awal dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Menurut Piaget (1969) bahwa pada pembelajaran dengan pendekatan Konstruktivisme, pengetahuan dikonstruksi melalui tiga mekanisme, yaitu asimilasi yaitu mencocokkan pengalaman baru dengan struktur mental yang telah ada; akomodasi yaitu mencocokkan skema yang terbentuk karena pengalaman baru yang diperoleh; dan keseimbangan yaitu menyeimbangkan asimilasi dengan akomodasi. *Piaget's theory of development represents constructivism, a view of cognitive development as a process in which children actively build systems of meaning and understandings of reality through their experiences and interactions* (Slavin, 2006: 33). Dari pendapat tersebut mengatakan bahwa siswa membangun pemahaman melalui pengalaman dan interaksi yang mereka alami.

Dalam pandangan Konstruktivisme, belajar bukanlah semata-mata mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam form yang baru. Proses pembangunan ini bisa melalui asimilasi atau akomodasi (McMahon, 1996). Diperlukan kegiatan awal untuk merangsang siswa menggunakan konsep-konsep yang sudah dimiliki untuk mengkonstruksi konsep baru dalam pembelajaran, karena pada pendekatan Konstruktivisme akan lebih efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual, oleh karena itu pendekatan Konstruktivisme harus tersusun menurut urutan yang logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. (Chujaemah, 2012: 4).

Dalam pendekatan Konstruktivisme yang dikembangkan berdasarkan gagasan Piaget dan Vygotsky (melalui Slavin, 2006) mengatakan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsep-konsep yang telah dipahami sebelumnya diproses melalui suatu kondisi ketidakseimbangan dalam memahami informasi baru. Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi dari diri kita sendiri. Konstruktivisme memandang bahwa dalam belajar, siswa

mengkonstruksi pengetahuan secara terus menerus dengan memeriksa pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak berlawanan dengan aturan-aturan lama, dan kemudian merevisi aturan-aturan lama jika sudah tidak sesuai lagi (Slavin, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa Konstruktivisme melihat pembelajaran dari sudut pandang pemrosesan informasi. Pembelajaran dengan pendekatan Konstruktivisme melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya hafalan saja. Namun merupakan proses aktif dan konstruktif dimana siswa mencoba untuk menyelesaikan masalah sebagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas.

Pendekatan Konstruktivisme yang menjelaskan kegiatan siswa yang aktif dalam pembelajaran juga disampaikan oleh Bruner (2006:58) yang mengatakan bahwa *"The students is not a bench-bound listener, but is taking a part in the formulation and at times may play the principal role in it"*. Hal ini menunjukkan bahwa para siswa bukanlah pendengar yang pasif, tetapi mereka mengambil bagian dalam perumusan dan terkadang memainkan peran utama dalam pembelajaran. Walaupun demikian peserta didik masih memerlukan bimbingan dalam proses pembelajarannya (Permendiknas, 2006: 345). Mereka perlu dibimbing secara bertahap untuk memahami konsep yang disampaikan.

Menurut Slavin pembelajaran penemuan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, membangkitkan rasa keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk terus bekerja dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Sehingga salah satu metode yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui kegiatan penemuan. Namun kegiatan pembelajaran penemuan bukanlah hal yang mudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Siswa yang mengalami peralihan perkembangan kognitif dari tahap operasi konkrit menuju operasi formal mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran melalui penemuan. Oleh karena itu diperlukan suatu bantuan atau solusi yang dapat memfasilitasi proses peralihan tahapan tersebut yaitu dengan cara memberikan bimbingan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran penemuan

tersebut atau melakukan penemuan terbimbing dalam pembelajaran. Carin (1989: 97) juga mengatakan bahwa "*guided discovery teaching provides opportunities for greater involvement, giving children more chance to gain insights and better develop their self-concepts*". Melalui penemuan terbimbing inilah siswa mendapat kesempatan untuk terlibat secara lebih besar, dan memberikan kemudahan dalam menjembatani kondisi siswa yang berada pada proses peralihan perkembangan kognitifnya sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Pembelajaran dengan penemuan terbimbing ini juga dapat mengurangi kendala yang dialami selama pembelajaran penemuan seperti yang diungkapkan oleh Slavin berikut.

Discovery learning has several advantages. It arouses students' curiosity, motivating them to continue to work until they find answers. Students also learn independent problem-solving and critical-thinking skills, because they must analyze and manipulate information. However, discovery learning can also lead to errors and wasted time. For this reason, guided discovery learning is more common than pure discovery learning. In guided discovery the teacher plays a more active role, giving clues, structuring portions of an activity or providing outlines. (Slavin, 2006: 248)

Slavin (2006: 248) mengatakan bahwa "In guided discovery the teacher plays a more active role, giving clues, structuring portions of an activity or providing outlines". Dalam penemuan terbimbing guru memainkan peran yang lebih aktif, memberikan petunjuk, serta memberikan arahan atau bimbingan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi guru disini adalah sebagai fasilitator dan pengaruh dalam pembelajaran.

Kelebihan dalam penemuan terbimbing yang disampaikan oleh Bruner (1961: 21-32) yaitu sebagai berikut.

Intellectual potency.

Bruner mengatakan bahwa siswa belajar dan mengembangkan kemampuan berpikirnya menggunakan potensi intelektualnya. Akibat dari penemuan yang berhasil yaitu akan membuat siswa merasakan penghargaan intrinsik atau kepuasan pribadi, sedangkan penghargaan ekstrinsik biasanya diperoleh dari guru. Namun jika guru menginginkan siswa belajar dengan menyenangkan, mereka harus merancang

pembelajaran yang membuat siswa merasakan penghargaan intrinsik. Bruner menekankan bahwa satu-satunya cara seseorang belajar teknik penemuan adalah dengan cara menghadirkan kondisi dimana siswa memiliki kesempatan untuk menemukan. Melalui penemuan terbimbing, siswa secara perlahan dapat belajar bagaimana mengorganisasikan dan melakukan penemuan. Salah satu keuntungan terbesar dari penemuan terbimbing ini yaitu dapat menyimpan ingatan yang lebih baik.

Intrinsic and extrinsic motives.

Pembelajaran terjadi karena adanya penghargaan; seorang anak belajar karena menghindari kegagalan; atau anak belajar karena kombinasi dari dua alasan tersebut. Penemuan terbimbing membantu siswa menjadi lebih percaya diri, mandiri, bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajarinya. Siswa akan lebih termotivasi ketika mereka belajar dengan menemukan daripada hanya mendengarkan. Mereka dapat belajar untuk memanipulasi lingkungan dengan lebih aktif. Mereka mencapai kepuasan setelah dapat mengatasi masalah yang diberikan. Motivasi ekstrinsik mempunyai hubungan yang tidak terlalu kuat dalam pembelajaran, sedangkan motivasi intrinsik lebih bersifat pribadi, motivasi ini berbeda setiap orang. Dalam hal ini, diperlukan usaha untuk mengarahkan motivasi yang dimiliki siswa dari motivasi ekstrinsik menuju motivasi intrinsik, sehingga guru perlu mempersiapkan pembelajaran menyenangkan yang melibatkan siswa di dalamnya. Guru perlu memberikan siswa kesempatan untuk mencoba sesuatu tanpa adanya rasa takut akan hukuman.

Learning the heuristics of discovery.

Bruner (1961: 26) mengatakan "*...the student is not a bench-bound listener, but should be actively involved in the learning process.*" Seorang siswa bukanlah subyek pendengar pasif, namun mereka harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti aktif dalam mendengar, berkomunikasi, membaca, melihat dan berpikir, jika pikiran mereka terlibat dengan apa yang sedang mereka pelajari. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Piaget bahwa tidak ada pembelajaran tanpa tindakan. Hal ini hanya dapat terwujud melalui pemecahan masalah melalui

penemuan dimana siswa akan belajar menemukan secara menyeluruh (*learning how to learn*).

Conservation of memory.

Sikap dan kegiatan yang dilakukan siswa dalam menemukan untuk diri mereka sendiri memiliki efek yang besar dalam ingatan siswa.

Selain kelebihan yang telah disampaikan oleh Bruner, menurut Moore (2009: 183) pembelajaran dengan penemuan terbimbing mempunyai keterbatasan sebagai berikut.

1. Pembelajaran ini bergantung pada kerjasama antara guru dalam mengarahkan dan siswa sendiri.
2. Pembelajaran ini kurang efektif dalam materi yang luas.

Beberapa poin tersebut memberikan informasi kepada guru untuk memper-timbangkan ketika melakukan pembelajaran dengan penemuan terbimbing. Guru harus memilih materi yang sesuai jika akan menggunakan penemuan terbimbing dalam pembelajaran. Kelemahan tersebut juga memberikan informasi kepada guru mengenai diperlukannya persiapan yang tepat sebelum melakukan pembelajaran dengan penemuan terbimbing karena kegiatan ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan kerjasama yang sinergis antara guru dan siswa.

3. Pendidikan Karakter Bangsa

UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari pembangunan karakter yaitu untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai pancasila. Ruang lingkup pendidikan ini meliputi keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Karakter bangsa ini merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia diciptakan dengan kelengkapan akal pikiran serta hati yang dapat memilah kebaikan dan keburukan

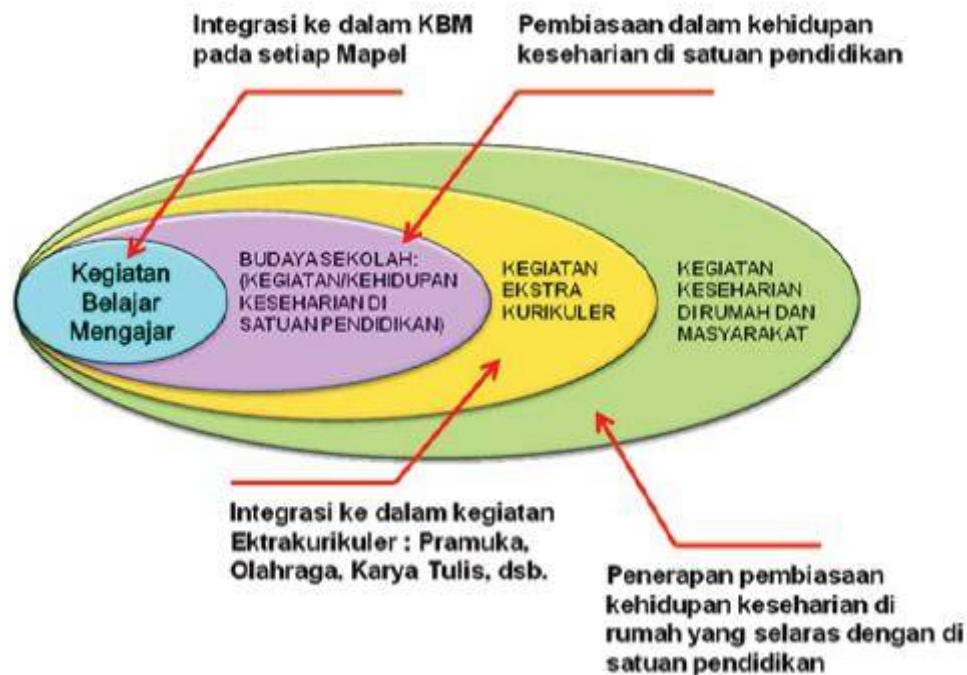
dalam kehidupannya. Hal inilah yang akan membentuk jati diri seseorang yang selanjutnya dalam proses kesehariannya berinteraksi dengan lingkungan sekitar akan membentuk karakter berupa perilaku keseharian. Karakter-karakter individu inilah yang menyumbang terbentuknya karakter suatu bangsa.

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan karakter bangsa ini yaitu melalui dunia pendidikan terutama sekolah. Penanaman karakter tersebut dapat diimplementasikan melalui proses pendidikan melalui olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Pendidikan karakter yang dimaksud bukan hanya pembangunan karakter berupa sikap kesopanan, namun karakter yang dimaksud yaitu karakter bangsa yang menumbuhkan sikap keingintahuan intelektual (*intellectual curiosity*) dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dijiwai nilai kejujuran dengan bingkai kesopanan dan kesantunan.

Karakter-karakter pada satuan pendidikan ini meliputi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Pusat Kurikulum, 2009: 9-10). Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun tiap satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangan karakter sesuai dengan kondisi tiap satuan pendidikan. Jadi antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lainnya boleh berbeda jenis nilai karakter yang dikembangkan.

4. Pendidikan Karakter dan Penemuan Terbimbing

Penanaman pendidikan karakter diupayakan dilaksanakan dalam setiap jenjang. Dalam lingkungan sekolah, pembiasaan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan dalam keseharian lingkungan sekolah, lebih dari itu penanaman karakter diharapkan diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.



Sumber : Kemdiknas (2010)

Proses penanaman karakter dicanangkan merupakan tugas semua perangkat satuan pendidikan yang salah satunya yaitu guru yang berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Seorang guru harus mempunyai metode atau strategi dalam mempersiapkan dan menyajikan pembelajaran yang dapat menanamkan pendidikan karakter di dalamnya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran melalui pembelajaran penemuan terbimbing. Pembelajaran penemuan terbimbing ini dapat menempatkan siswa pada situasi dimana mereka diarahkan untuk memperoleh dan meraih kebutuhan belajar melalui kompetensi yang sudah dirancang oleh guru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran penemuan terbimbing ini, siswa diarahkan untuk mampu menganalisis, membuat dugaan, mengumpulkan informasi, menemukan, bekerjasama, dan menyimpulkan. Dalam kegiatan penemuan terbimbing, siswa akan belajar tentang bagaimana saling mempertanggungjawabkan apa yang telah dipelajari bersama dalam kelompok, saling mempercayai antar anggota kelompok, dan sikap jujur dalam menemukan antara kebenaran dugaan awal yang diambil dengan kenyataan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa

dihadapkan pada kondisi dimana mereka bebas dalam mengumpulkan data, membuat dugaan (*hipotesis*), mencoba-coba (*trial and error*), mencari dan menemukan keteraturan (*pola*), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Dalam pembelajaran penemuan terbimbing siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas sedangkan guru juga aktif memberikan bimbingan (*scaffolding*) secara bertahap.

5. Kesimpulan

Pendidikan karakter merupakan salah satu usaha untuk memperkuat jati diri guna menentukan identitas bangsa. Karakter bangsa ini dapat terwujud diantaranya melalui penanaman karakter di sekolah. Kurikulum abad 21 memposisikan siswa sebagai pembelajar yang aktif dimana siswa didorong untuk mencari informasi dari berbagai sumber, mampu untuk merumuskan masalah, berpikir analitis, kerjasama dan kolaborasi menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran di kelas. Metode yang dapat digunakan dalam penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran yaitu melalui metode penemuan terbimbing. Dalam

pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kondisi dimana mereka bebas dalam mengumpulkan data, membuat dugaan (*hipotesis*), mencoba-coba (*trial and error*), mencari dan menemukan keteraturan (pola), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Hal ini sesuai karakter yang akan dikembangkan berdasarkan agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruner, J.S. (1961). The act of discovery. (pp. 21-32) In Search of pedagogy Volume I
- Carin, A.A. 1989. Teaching Science Through Discovery. Canada: Merrill Publishing Company
- Chujaemah, Nurul; Yuliana, Septi; Utaminingsih, Suci; Triyono; Budi, H. Setyo. 2012. PENGGUNAAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV MATERI BANGUN RUANG. Jurnal
- <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/viewFile/524/245>
- McMahon, M. (1996). Social Constructivism in the World Wide Web, a Paradigm of Learning. Google site, <<http://N.vnv.scu.edu.au/ausNveb96/edu/en/wild/paper.html>>
- Moore, K.D. (2009). Effective Instructional Strategies: From Theory to Practice. USA: SAGE Publication
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
- Pusat Kurikulum. (2009). Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah
- Kemdiknas (2010) Grand Design Pendidikan Karakter.
- Slavin, R. E. (2006). Educational psychology: theory and practice. United State of America: Pearson.

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR MENUJU GURU ABAD 21 MELALUI PELATIHAN MODEL *'TRAINING AND DEVELOPMENT PERSONNEL'* BESERTA FAKTOR PENENTU KEBERHASILANNYA

Slameto

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
slameto_uksw@yahoo.com,

Abstrak

Hasil penelitian World Bank menyatakan bahwa guru Indonesia merupakan terendah di Asia dalam peranannya sebagai agen perubahan; Guru abad 21 adalah guru yang inspiratif siap sebagai pendorong perubahan; oleh karena itu perlu adanya model pemberdayaan guru. Salah satunya adalah pelatihan model 'Training and Development Personnel'. Tujuan penelitian ini adalah menguji efisiensi dan efektifitas model pelatihan serta menemukan faktor determinan penentu guru abad 21 yang juga sebagai agen perubahan. Model ini dikembangkan melalui 3 tahap yaitu: 1) studi pendahuluan, 2) pengembangan model diklat guru, dilanjutkan 3) validasi model dengan evaluasi efisiensi dan efektifitas model. Pelatihan bagi guru Sekolah Dasar ini diikuti 37 orang berlangsung di sanggar Kelompok Kerja Guru Kabupaten Wonosobo tanggal 2 -10 Mei 2013. Berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh bahwa selama ini workshop yang pernah diikuti para guru Sekolah Dasar dipersepsi belum efisien dan belum efektif serta belum sampai menyiapkan kompetensi guru abad 21. Model pelatihan yang dikembangkan ini terbukti efisien dan efektif; Terdapat 2 model determinan berpengaruhnya: 1) kebiasaan positif dan 2) elaborasi pengetahuan (yang baru) terhadap kemampuan guru abad 21.

Kata Kunci: Diklat guru Sekolah Dasar Model "Training and Development Personnel", Determinan Guru abad 21, Efisiensi dan Efektifitas, Kebiasaan Positif, Elaborasi Pengetahuan.

1. Latar Belakang

Memasuki abad 21, Guru, dituntut harus mampu mengubah cara berpikir anak didiknya menghadapi segala rintangan yang mereka alami, tetapi juga punya peran heroik yang tidak mudah digantikan; betapa pentingnya peran guru bagi masa depan anak-anak didiknya. Peran guru abad 21 lebih kompleks daripada era sebelumnya. Kompleksitas itu ditunjukkan, misalnya, bagaimana seorang guru mesti merespon beragam kebutuhan anak didik yang berubah, perkembangan teknologi yang demikian cepat merambah dan mengisi dunia, atau tuntutan meraih keunggulan dari masyarakat, serta perubahan konstruksi sosial di dalam masyarakat dan globalisasi (Sri Setyowati & M. Arifana, 2004).

Kualitas anak didik di masa depan sangat ditentukan oleh peran guru di sekolah masa kini. Hingga saat ini sekolah masih merupakan satu-satunya institusi sosial yang secara khusus dan terorganisir mengembangkan anak didik menyiapkan masa depan generasi

bangsa ini. Itulah mengapa, sekolah dan guru di dalamnya diharapkan mengembangkan dan memperbaharui diri terus menerus agar mampu mengimbangi gerak cepat perubahan dalam diri anak didik dan kebutuhan masyarakat. Salah 1 peran guru abad 21 adalah sebagai agen perubahan. Guru diharapkan mampu memainkan peran membawa perubahan-perubahan positif bagi anak didik dan sekolahnya. Disamping peran yang dijalankan dalam konteks kurikulum, pembelajaran dan evaluasi, seorang guru juga diteladani oleh anak didiknya dalam kaitan dengan kebiasaan pribadi yang dilakukannya (Putu Sudira, 2012). Hasil penelitian World Bank menyatakan bahwa guru Indonesia merupakan yang terendah di Asia dalam peranannya sebagai agen perubahan (Hidayat Jaya Giri. 2012), produktifitasnya sangat rendah (World Bank. 2006); dan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Dengan menjadi guru abad 21 diharapkan ada sosok yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa, agar siswa mampu mengoptimalkan setiap potensi yang mereka

memiliki sehingga berguna bagi masa depan mereka nanti. Guru abad 21 adalah pendorong perubahan; namun bagaimana dengan kondisi guru kita yang digambarkan oleh penelitian Bank Dunia tersebut? oleh karena itu perlu pemberdayaan guru. Jika demikian, model pelatihan guru yang mana? Salah satu model pelatihan pemberdayaan guru adalah pelatihan model "*Training and Development Personnel*" dari Otto dan Glaser (Mustafa Kamil, 2003), yang dipandang cukup efektif. Permasalahan lebih lanjut faktor apa sajakah yang mempengaruhi serta bagaimana model hubungan antar faktor demi peningkatan profesionalitas guru, terlebih guru lulusan program Pendidikan Jarak Jauh?

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan pelatihan guru model *Training and Development Personnel* mampu mengembangkan guru abad 21? Faktor apa saja yang menjadi penentu/determinan, serta bagaimana model serta besarnya sumbangan terhadap keberhasilan menyiapkan guru abad 21?

Tujuan penelitian ini adalah menguji efisiensi dan efektifitas model pelatihan *Training and Development Personnel* serta menemukan faktor determinan penentu keberhasilan menjadi guru abad 21 yang juga sebagai agen perubahan.

2. Teori

Guru pada abad 21 dan abad selanjutnya ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran dan pengelolaan kelas, pada abad ini harus sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto (Didik, 2012), terdapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu: 1) *Teaching in multicultural society*, 2) *Teaching for the construction of meaning*, 3) *Teaching for active learning*, 4) *Teaching and technology*, 5) *Teaching with new view about abilities*, 6) *Teaching and choice*, dan 7) *Teaching and accountability*.

Abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Secara umum, Tilaar (Didik, 2012) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat lagi menerima guru yang tidak profesional. Hal ini sesuai dengan rekomendasi UNESCO tentang 3 tuntutan, yaitu: 1) guru harus dianggap sebagai pekerja profesional yang memberi layanan kepada masyarakat, 2) guru dipersyaratkan menguasai ilmu dan keterampilan spesialis,

dan 3) ilmu dan keterampilan tersebut diperoleh dari pendidikan yang mendalam dan berkelanjutan.

Guru di abad 21 memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap, 2) mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya, 3) berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi, 4) memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan, 5) memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi, 6) dan mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding. Berbeda sedikit dengan tuntutan Muhammad Surya (Didik, 2012) dengan 9 karakteristik citra guru yang diidealkan yaitu guru yang: 1) Memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap, 2) Mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek, 3) Mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain, 4) Memiliki etos kerja yang kuat, 5) Memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir, 6) Berjiwa profesionalitas tinggi, 7) Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan nonmaterial, 8) Memiliki wawasan masa depan, dan 9) Mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu.

Dalam perannya sebagai seorang agen perubahan, seorang guru abad 21 setidaknya perlu memiliki karakteristik dan watak dasar atau kemampuan yang selaras dengan tuntutan tersebut. Kemampuan itu digambarkan secara indah oleh Fullan (1993), dengan empat kapasitas dasar yang harus melekat dalam diri seorang guru sebagai agen perubahan memasuki abad 21. Adapun 4 kapasitas dasar watak itu adalah: pengembangan visi pribadi, kebiasaan *inquiry*, pentingnya penguasaan dan kolaborasi.

Berdasarkan paparan di atas, ciri/karakter yang akan dikembangkan pada sosok guru abad 21 melalui pelatihan itu ditentukan dari Antusias guru menjadi profesional yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, reflektif dan anticipative yang dikembangkan melalui kegiatan belajar cooperative-anticipative.

Diklat sebagai suatu sistem yang integral merupakan seperangkat komponen atau unsur-unsur atau sub sistem yang saling berinteraksi untuk mengubah kompetensi

guru sehingga ia dapat berprestasi lebih baik sesuai tuntutan dalam jabatannya. Pendekatan sistem dalam Diklat dapat menggunakan bagan arus mulai dari input (masukan), proses, output (keluaran), dan out come (dampak). Masukan (Input) adalah peserta diklat dan widyaiswara dengan kompetensi yang dimilikinya, anggaran, waktu, sarana dan prasarana (bangunan) diklat. Proses sebagai sub sistem dalam sistem Diklat adalah proses belajar mengajar, evaluasi pra dan pasca Diklat, penataan sarana dan prasarana kelas dan sebagainya. Produk adalah hasil setelah Diklat selesai, antara lain makalah/materi Diklat, penguasaan kapasitas khusus. Keluaran (out put) adalah peserta (lulusan) Diklat yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan, sertifikat, keterangan masuk dunia kerja, SIM. Dampak (out come) antara lain adalah peningkatan produktivitas lulusan/kontribusi yang diberikan kepada organisasi.

Berdasarkan analisis kebutuhan maka sasaran pelatihan ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dapat bersifat teknis akan tetapi dapat pula menyangkut keprilaku. Pada pelatihan harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan sasaran yang telah dilakukan. Penerapan prinsip belajar yang baik agar berlangsungnya proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cepat. Pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar pada lima hal yaitu partisipasi, repetisi, relevansi, pengalihan dan umpan balik.

Tepat tidaknya teknik mengajar yang digunakan tergantung pada berbagai pertimbangan yang ingin ditonjolkan, seperti kehematan dalam pembiayaan, materi program, tersedianya fasilitas tertentu, preferensi dan kemampuan peserta, preferensi dan kemampuan pelatih dan prinsip-prinsip belajar yang hendak diterapkan.

Setelah program pelatihan dilaksanakan maka dapat diidentifikasi manfaat yang diperoleh guru, misalnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaan suatu program pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta terjadi transformasi, dengan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos kerja. Komponen ini saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan diklat yang kredibel.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru abad 21 adalah penyelenggaraan diklat kompetensi yang efektif. Struktur program diklat untuk memenuhi kompetensi yang dituntut tersebut perlu dirancang secara komprehensif. Pengembangan struktur diklat yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik abad 21. Secara internal beberapa hal yang harus dikembangkan dalam penyelenggaraan diklat, mencakup: Identifikasi informasi terkait dengan kompetensi ideal/abad 21, kompetensi riil yang dimiliki guru di lapangan. Peta kompetensi ini menjadi dasar perumusan tujuan, materi diklat, pengalaman yang perlu dikembangkan, sumber belajar, hingga alokasi waktu diklat.

Hal berikutnya adalah penggunaan strategi/pendekatan yang relevan dengan karakteristik peserta diklat; Pengemasan bahan ajar diklat menjadi bentuk-bentuk fasilitasi pembelajaran yang aktif, menyenangkan, berbasis pengalaman, berbasis kompetensi yang dikembangkan, merancang scenario pelatihan yang efektif, terkontrol, dan akuntabel. Relevansi diklat dibutuhkan agar dalam pelaksanaan memperoleh respon positif dari peserta.

Penggunaan strategi penyampaian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penerapan pendekatan andragogi Berbasis pada pengembangan pengalaman dan kinerja; Pengalaman peserta diklat perlu dikembangkan melalui bentuk pembelajaran aktif, memungkinkan peserta diklat menjadi subjek aktifitas dalam proses pembelajaran. Diklat dilaksanakan secara menarik, mengesankan, dan menyenangkan, serta dievaluasi secara cermat.

Agar terjadi perubahan perilaku sebagai implementasi dimilikinya kompetensi oleh seseorang maka system pelatihan yang dilaksanakan hendaknya menggunakan perlakuan yang menyentuh persepsi, konsep diri, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Penguatan, pengulangan, dan pengarahan dibutuhkan. Monitoring, pengawasan, pendampingan perlu dilaksanakan agar perilaku cerminan penguasaan kompetensi guru abad 21 meningkat.

Dalam perpektif Diklat sebagai suatu sistem, dapatlah diidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan guru abad 21 itu bisa berasal dari input maupun proses pelatihan itu sendiri. faktor yang

dimaksud seperti: kejelasan dan kebermaknaan tujuan/tugas, kualitas metode belajar kelompok berbasis pengalaman yang dimiliki guru, pembelajaran kooperatif dengan materi yang terkait dengan tuntutan abad 21, tingkat partisipasi guru, pemajangan hasil, elaborasi pengetahuan yang baru dan kebermaknannya, membangun citra yang baik dan kebiasaan yang positif.

3. Pengembangan Model

Ada banyak model desain sistem pembelajaran. Diantaranya ada model yang berorientasi sistem, seperti model Dick & Carey, Model ADDIE, dan lain-lain. Ada pula model desain pembelajaran yang berorientasi produk, karena untuk menghasilkan produk pembelajaran, seperti model Hannaffin & Peck atau model prototipa cepat (rapid prototype model). Juga, ada model yang berorientasi kegiatan belajar mengajar di kelas, diantaranya adalah model ASSURE (Smaldino, dkk) atau model ICARE.

Secara umum, langkah-langkah desain pelatihan dimulai dari tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Evaluasi, bisa dilakukan untuk tiap langkah mulai dari analisis sampai evaluasi. Sistem pelatihan ini memungkinkan peserta pelatihan dapat menyerap informasi/pengetahuan, melakukan keterampilan, berinteraksi memperdalam pengetahuan dan keterampilan, serta merefleksikan apa yang telah dipelajari. Kelima hal di atas adalah merupakan syarat suatu desain pelatihan yang berhasil.

Otto dan Glaser (Mustafa Kamil, 2003) mengemukakan model pengembangan strategi latihan dengan istilah *Model Training and Development Personnel*. Model ini terdiri atas 5 langkah kegiatan:

- a. menganalisis masalah latihan
- b. merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan latihan
- c. memilih bahan latihan, media belajar, metode dan teknik latihan
- d. menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan
- e. menilai hasil latihan.

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengahnya. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dalam membangun

sebuah model pelatihan yang efektif dan efisien. Persyaratan tersebut diantaranya adalah kebutuhan/masalah belajar peserta pelatihan. Tahap analisis biasanya meliputi beberapa tahapan, diantaranya adalah analisis sistem; yaitu menggambarkan secara umum klien yang meminta untuk mendesaian pelatihan. Analisis pekerjaan tersebut tidak perlu lagi dilakukan jika yang bersangkutan telah memiliki profil yang memadai. Perumusan tujuan peserta mengikuti pelatihan dan tugas yang ditetapkan, biasanya diikuti dengan refleksi. Setelah pemilihan bahan dan media, diikuti kualitas metode pelatihan sesuai inspirasi guru peserta pelatihan. Setelah kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan ditetapkan dan pelatihan dilaksanakan, perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah tujuan program pelatihan tercapai atau tidak, serta untuk menentukan apakah isi dan administrasi pelatihan memuaskan atau tidak, menentukan manfaat dan biaya finansial program serta untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai program pelatihan guna memilih program mana yang paling baik.

Model *Training and Development Personnel* yang terdiri atas lima langkah ini dikembangkan melalui 3 tahap yaitu studi pendahuluan, pengembangan model diklat guru, dilanjutkan validasi model dengan evaluasi efisiensi dan efektivitas model dalam bentuk penilaian diri peserta pelatihan. Pelatihan bagi guru Sekolah Dasar ini diikuti 37 orang dan berlangsung di sanggar Kelompok Kerja Guru Kabupaten Wonosobo tanggal 2 -10 Mei 2013.

4. Pengukuran dan Hasil

Konteks model *Training and Development Personnel* ini terdiri atas lima langkah kegiatan seperti dipaparkan diatas, dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Studi Pendahuluan yang meliputi menganalisis masalah latihan
- b. Perencanaan dan Pengembangan Model yang mencakup langkah: merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan latihan, memilih bahan latihan, media belajar, metode dan teknik latihan dan menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan, serta melaksanakannya
- c. Validasi Model termasuk langkah menilai hasil latihan yang selanjutnya dijadikan

pijakan dalam mengembangkan model dan strategi pembelajaran.

Setelah langkah pertama dan kedua terlaksana, dilakukan validasi model. Langkah validasi model *Training and Development Personnel* ini adalah dengan melakukan pengukuran proses dan hasil pelatihan guru SD, yang mencakup pengukuran tingkat

efisiensi, dan keefektifan/ keberhasilan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penilaian diri oleh peserta terhadap proses pelatihan yang mereka ikuti dan hasil pelatihan yang mereka rasakan. Hasil penilaian diri peserta seperti tabel 1 berikut ini menjadi bukti mengenai tingkat efisiensi dan keefektifan pelatihan.

Tabel 1. Deskripsi Variabel Proses dan Hasil Pelatihan Model Training and Development Personnel

Variabel	Mean	Median	Std. Deviation
Efficiency	3,33	3	0,63
Abad_21	3,1071	3	0,38

Mengingat besarnya mean lebih dari median, maka dapat dinyatakan bahwa pelatihan Model Training and Development Personnel ini efisien dan efektif terdukung data. Dengan demikian Model Training and Development Personnel ini dapat mengembangkan profesionalisme guru sekolah dasar. Selanjutnya deskripsi 12 variabel independen yang diduga menjadi penentu yang mempengaruhi profesionalisme guru sekolah dasar dalam pengembangan pelatihan model ini adalah seperti berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis seperti pada tabel di bawah, ternyata dari 9 variabel yang diteliti, sebagian besar, 8 variabel, mengalami peningkatan cukup berarti seperti: 1) belajar kelompok berbasis pengalaman, 2) pemajangan hasil, 3) partisipasi guru peserta pelatihan, 4) citra yang baik, 5) kebiasaan yang positif, 6) cooperative & correlative, 7) kejelasan & kebermaknaan tujuan, dan 8) ciri guru abad 21. terdapat hanya 1 variabel yang kurang berkembang dengan baik melalui pelatihan ini, yaitu elaboration pengetahuan.

Tabel 2. Deskripsi 9 Variabel penelitian

Variabel	Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1. Belajar klp berbasis pengalaman	3,3571	3,0000	,63332	2,00	4,00
2. Pemajangan hasil	3,2143	3,0000	,42582	3,00	4,00
3. Partisipasi	3,2143	3,0000	,57893	2,00	4,00
4. Citra yang baik	3,2857	3,0000	,61125	2,00	4,00
5. Kebiasaan yang positif	3,0000	3,0000	,55470	2,00	4,00
6. Cooperative correlative	3,2857	3,0000	,72627	2,00	4,00
7. Kejelasan & kebermaknaan tujuan	3,0714	3,0000	,61573	2,00	4,00
8. Elaborasi pengetahuan	2,9286	3,0000	,73005	2,00	4,00
9. Ciri Guru abad 21	3,1071	3,0000	,37614	2,50	3,75

Selanjutnya untuk menemukan faktor determinan/penentu kualitas profesionalisme guru sebagai agen perubahan dilakukan Uji

Regresi Model Step Wise yang hasilnya tersaji dalam tabel 3 seperti berikut ini.

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.495	.453	.37991
2	.823 ^b	.677	.619	.31707

a. Predictors: (Constant), Elaborasi pengetahuan

b. Predictors: (Constant), Elaborasi pengetahuan dan Cooperative-correlative

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti di atas, dari 8 variabel independen, ternyata diperoleh hanya 2 model determinan berpengaruh variabel independen terhadap karakter guru abad 21 sesuai standar errornya masing-masing. Besarnya pengaruh variabel elaborasi pengetahuan (model 1)

terhadap tingkat kualitas guru abad 21 adalah 45,30%. besarnya pengaruh variabel elaborasi pengetahuan dan cooperative-correlative (model 2) terhadap tingkat kualitas guru abad 21 adalah 61,90%. Guna mengetahui seberapa tinggi tingkat signifikansi setiap model dapatlah diperiksa pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Anova^c Untuk Uji Signifikansi Pengaruh 2 Variabel Independen

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.697	1	1.697	11.755	.005 ^a
	Residual	1.732	12	.144		
	Total	3.429	13			
2	Regression	2.323	2	1.161	11.552	.002 ^b
	Residual	1.106	11	.101		
	Total	3.429	13			

a. Predictors: (Constant), Elaborasi pengetahuan

b. Predictors: (Constant), Elaborasi pengetahuan, Cooperative-correlative

c. Dependent Variable: Ciri guru abad 21

Berdasarkan hasil uji ANOVA seperti tersaji pada tabel 4 di atas, dari 8 variabel independen, hanya diperoleh 2 model dengan hanya 2 variabel yang menjadi determinan variabel pengembangan guru abad 2, sementara 6 variabel yang lain dikeluarkan dari model, karena tidak signifikan. Model 1 diperoleh $F = 11,755$ dengan tingkat signifikansi = 0,005; ini berarti variabel Elaborasi pengetahuan menjadi determinan pengembangan guru abad 21 dalam pelatihan model *Training and Development Personnel* dengan pengaruh sebesar 45,30%. Pada Model 2 diperoleh $F = 11,552$ dengan tingkat signifikansi = 0,002; ini berarti variabel elaborasi pengetahuan dan cooperative-correlative menjadi determinan yang signifikan atas pengembangan guru abad 21 dalam pelatihan model *Training and*

Development Personnel dengan pengaruh sebesar 61,90%.

5. Pembahasan

Pengembangan model *Training and Development Personnel* yang semula terdiri dari 5 tahapan, dilakukan modifikasi menjadi tiga tahap yaitu: 1) studi pendahuluan (menganalisis masalah latihan), 2) perencanaan dan pengembangan model (merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan pelatihan, memilih bahan latihan, media belajar, metode dan teknik latihan dan menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan, serta melaksanakannya) 3) validasi model (menilai hasil latihan). Setelah langkah pertama dan kedua terlaksana, dilakukan validasi model (langkah 3) dengan

melakukan pengukuran proses dan hasil pelatihan guru SD, yang mencakup pengukuran tingkat efisiensi, dan keefektifan/ keberhasilan pelatihan. Ternyata bahwa model pelatihan *Training and Development Personnel* ini efisien dan efektif terdukung data.

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dan dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan guru peserta pelatihan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dua variabel penentu keberhasilan pelatihan yang terbukti memberi sumbangan hampir 62% menjadi prioritas dalam pelatihan yaitu Elaborasi pengetahuan dan Cooperative-correlative. Ini berarti bahwa Model Training and Development Personnel akan berhasil jika 1) kurikulum atau kualitas materi dan metode pelatihan memungkinkan peserta membangun pengetahuannya yang baru dan bermakna (elaborasi), serta 2) menerapkan cooperative learning yang mana materi pelatihan terkait dengan permasalahan SD dimana guru bertugas. Temuan ini memperkuat teori konstruktivisme yang terbukti efektif dalam pelatihan Model Training and Development Personnel.

Model pelatihan yang terdiri atas lima langkah kegiatan yang kemudian dimodifikasi menjadi 3 tahap ini memungkinkan guru peserta pelatihan dapat bukan hanya menyerap pengetahuan, melakukan/terampil, berinteraksi memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka, serta merefleksikan apa yang telah dipelajari, tetapi juga membangun pengetahuan yang baru dan bermakna bagi kehidupan guru; dengan kata lain 5 hal tersebut merupakan syarat suatu desain pelatihan yang berhasil telah terpenuhi. Sehingga memang layak jika pelatihan ini berhasil mengembangkan profesionalisme guru abad 21 sebagai agen perubahan yang didukung oleh 2 variabel independen yang cukup berarti Elaborasi pengetahuan dan Cooperative-correlative.

Seorang guru terlebih alumni program PJJ UKSW dengan visi pribadi yang "kuat" senantiasa bertanya, dan bertanya lagi, untuk memperjelas intensi mengapa yang bersangkutan sampai memilih profesi menjadi guru. Seorang guru akan mencintai perubahan dan siap menghadapi tantangan abad 21 sehingga selalu memperbaharui tugas pokok dan fungsi sebagai guru yang profesional. Guru tersebut kalau mengikuti pelatihan dimana pelatihan yang dijalani relevan dengan

tugas pokok dan fungsinya beserta permasalahannya, dilakukan secara kooperatif dengan dukungan materi yang memacu untuk membangun pengetahuannya yang baru akan membantu mengembangkan kemampuan inspirasinya sebagai agen perubahan. Apalagi didukung oleh kemampuan berpikir kritis dan kreatif; Jika tugas-tugas pelatihan yang diikuti berkualitas maka wajar jika berpengaruh cukup tinggi terhadap kemampuan profesionalisme guru abad 21.

6. Simpulan

Model pelatihan *Training and Development Personnel* bagi guru SD alumni program PJJ Gugus Wonosobo ini efisien dan efektif terdukung data; berdasarkan hasil analisis data, ternyata dari 9 variabel yang diteliti, sebagian besar, 8 variabel, mengalami peningkatan cukup berarti seperti: 1) Belajar kelompok berbasis pengalaman, 2) Pemajangan hasil, 3) partisipasi guru peserta pelatihan, 4) Citra yang baik, 5) Kebiasaan yang positif, 6) Cooperative & correlative, 7) Kejelasan & kebermaknaan tujuan, dan 8) ciri Guru abad 21. Terdapat hanya 1 variabel yang kurang berkembang dengan baik melalui pelatihan ini, yaitu: Elaboration pengetahuan. Terdapat 2 model determinan/berpengaruhnya variabel independen terhadap pengembangan profesionalisme guru abad 21: elaborasi pengetahuan (model 1), elaborasi pengetahuan dan cooperative (model 2). maka dari itu, model ini dapat direplikasi di kelompok lain untuk peningkatan kualitas guru memasuki abad 21 demi peningkatan kemajuan pendidikan khususnya SD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adie Nugroho, 2013. *Menjadi Guru Inspiratif*. <http://adienugrohozone.blogspot.com/2013/03/menjadi-guru-inspiratif.html>
- Didik, 2012. *Guru Abad 21*. <http://areknerut.wordpress.com/2012/12/20/guru-abad-21-2/>
- Fullan, M. G. 1993, Why Teachers Must Become Change Agent. *Education Reform*. Educational leadership Mar 1993, 50, 6
- Hidayat Jaya Giri. 2012. *Pendidikan Usia Dini Masa Emas*. www.hidayatjayagiri.net/-/2012/12/pendidikan-usia-dini-masa-emas.html

- Martaningsih Sri Tuttur, 2011. Optimasi Diklat Kompetensi pendidik Sebagai Upaya Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan. Seminar Nasional "Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan" Dalam Rangka Pengukuhan *Active Learning Facilitator Association (Alfa)* Salatiga Tanggal 5 Juli 2011
- Mustafa Kamil, 2003. *Model-Model Pelatihan*. Bandung: UPI
- Putu Sudira, 2012. *Guru Sebagai Agen Modernisasi Pendidikan Dalam Dimensi Sosio-Kultural Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan*.
<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/656>
- Saprilina, 2013. *Menjadi GURU Inspiratif, Modal Berharga Bagi Masa Depan Siswa*.
<http://saprilina.blogspot.com/2013/03/menjadi-guru-inspiratif-modal-berharga.html>
- Setyowati & M. Arifana, 2004. Studi Keefektifan Pengembangan Pendidikan Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Dasar* Volume 5 No 2 September 2004
<http://dikdas.jurnal.unesa.ac.id>
- Vincent, P. Costa dkk, (2000), *Panduan Pelatihan Untuk Pengembangan Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- World Bank. 2006. *Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan*.
<http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/IDNstu06a.pdf>

WACANA KURIKULUM VISIONER BERBASIS LINGKUNGAN BERORIENTASI SDM ABAD 21

Sri Sumarni

Lektor Kepala pada FITK UIN Sunan Kalijaga
marniuiinsuka@yahoo.com

Abstrak

Alam berubah, kehidupan manusia berubah, pendidikan juga harus berubah. Paradigma dalam pendidikan membangun manusia dengan satu jenis kecerdasan saja yaitu IQ. Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada kecerdasan kreativitas (CQ) dan kecerdasan-kecerdasan lain yakni EQ, SQ, AQ. Pembangunan SDM merupakan tanggung jawab bidang pendidikan.

Kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia adalah membangun SDM yang berkualitas yang mampu hidup di era abad 21 dan hidup di manapun di seluruh belahan bumi ini. Istilah abad 21 memberikan semangat baru kurikulum yang ada. Relevan dengan era 21 atau masa depan, maka melalui tulisan ini, nama kurikulumnya adalah kurikulum visioner.

Kurikulum visioner adalah kurikulum yang berorientasi pada science, berbasis object study, implementasinya menyenangkan dan mengaktifkan siswa, dengan model evaluasi autentik. Lingkungan merupakan sumber pembelajaran agar pendidikan fungsional untuk kehidupan. SDM hasil pendidikan melalui kurikulum visioner sebagai berikut: mengakui kekuasaan Allah SWT, menjadi manusia sosialis berbudaya, serta tidak melakukan perusakan.

Kata Kunci: Kurikulum Visioner Lingkungan, SDM abad 21.

1. Pendahuluan

Suatu keniscayaan, kebijakan terbaru di bidang pendidikan akan menghantarkan anak bangsa menjadi manusia yang berkualitas yang mampu menghadapi tantangan hidup di abad 21. Dengan adanya perubahan kurikulum secara dinamis dari tahun ke tahun, anak-anak Indonesia dan bangsa Indonesia akan menjadi manusia berkualitas yang mampu hidup di berbagai wilayah di belahan bumi ini. Manusia yang berkualitas yang dimaksudkan adalah manusia yang memiliki *hard* dan *soft skill* yang handal. Kurikulum 2013 ini merupakan kebijakan yang relatif paling akhir di bidang pendidikan yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun sebenarnya kurikulum 2013 tidak berbeda secara prinsip dengan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP dan KBK, namun dalam implementasinya kurikulum 2013 telah dilengkapi dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan model evaluasi.

Sebelum kurikulum 2013 diprogramkan oleh pemerintah sebenarnya telah banyak pakar pendidikan yang berinisiasi memformulasikan implementasi kurikulum sebelumnya yaitu

KBK dan KTSP, bahkan jauh sebelum Indonesia menerapkan kurikulum KBK UNESCO telah memprogramkan strategi pembelajaran yang PAKEM dengan metode Inquiry.¹ Pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran yang berbasis obyek/persoalan belajar.² Strategi pembelajaran yang berbasis obyek persoalan belajar tidak lain adalah *problem based learning*. Aplikasi metode pembelajaran yang disebut di atas merupakan upaya pencapaian kompetensi peserta didik. Inti kurikulum KBK, KTSP dan Kurikulum 2013 adalah kompetensi. Hasil pendidikan melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sesuai tujuan pembelajaran.

Kita semua telah mengetahui bahwa dunia pendidikan tidak mungkin terlepas dari kurikulum. Kurikulum menghantarkan peserta didik untuk dapat mencapai tujuan yang dicanangkan oleh penyelenggara pendidikan. Melalui kurikulumlah peserta didik dapat mencapai (1) *to know*, (2) *to do*, (3)

¹ UNESCO

² Djohar. 2007

to be, (4) to live together.³ Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Apabila kurikulum tidak berubah maka pembelajaran dan pendidikan tidak ada gunanya bagi anak-anak bangsa. Apabila pendidikan tidak berubah berarti merampas masa depan anak-anak bangsa.⁴ Perubahan kurikulum seharusnya mengikuti perubahan zaman dan alam. Kita semua telah mengetahui bahwa alam telah mengalami perubahan, oleh karenanya agar manusia penghuni alam tidak tergilas oleh alam, maka manusia seharusnya juga menyesuaikan perubahan yang terjadi.

Perubahan dasar arah paradigm alam, dari dominant paradigm menuju emergent paradigm.⁵ Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: dari paradigm simple menuju complex, hierarchy menuju heterarchy, mechanical menuju holographic, determinate menuju indeterminate, linierly menuju mutually, assembly menuju morphogenesis, objective menuju perspective. Uraian dan penjelasan lebih lengkap tentang paradigma di atas lebih jelas melalui diskusi dalam forum mulia ini.

Perihal yang penting untuk disampaikan dalam tulisan ini adalah mengajukan pertanyaan "kurikulum yang seperti apakah yang mampu mengantisipasi masa depan?". Dalam uraiannya tentu tidak lepas dari manusia yang seperti apakah yang akan dicetak melalui kurikulum visioner? Visioner menjadi kata kunci dalam makalah ini. Visioner maksudnya adalah kurikulum yang seperti apakah yang mampu mengantisipasi "membangun" manusia masa depan. Penulis berasumsi pendidikan yang fungsional untuk penyelesaian kehidupan manusia adalah pendidikan yang kontekstual. Pendidikan yang kontekstual dapat dicapai melalui lingkungan kehidupan manusia. Terdapat tiga kata kunci dalam tulisan ini: (1) Kurikulum visioner, (2) Lingkungan, (3) Sumber Daya manusia (SDM) abad 21.

2. Paradigma Lama Pendidikan

Ketidakseimbangan pencapaian tiga domain tujuan pembelajaran yaitu (1) domain kognitif, (2) domain afektif, dan (3) domain psikomotorik terjadi pada paradigma lama.

Domain kognitif lebih banyak dicapai oleh peserta didik, sedangkan dua domain lainnya kurang. Pertanyaan yang sesuai untuk paradigm lama adalah "Apa yang diketahui peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran?". Mereka "tahu" namun belum tentu memiliki kompetensi untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang dipelajari, apalagi sampai dengan memberikan value terhadap apa yang dipelajari. Padahal seharusnya pertanyaan yang dikemukakan untuk ditanyakan kepada peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran adalah "mampu apakah kamu?". Pertanyaan seperti ini, jawabannya mengandung makna mengetahui, mengaplikasikan dan diharapkan mampu memaknai pengetahuan tersebut. Ketidakseimbangan tiga domain di atas, disebabkan oleh (1) intensitas materi, (2) proses pembelajarannya, serta (3) model evaluasi. Seperti apakah proses pembelajaran pada paradigm lama?

Pembelajaran paradigm lama sebagai berikut; (1) tekstual, (2) berorientasi pada produk baik proses pembelajarannya maupun evaluasinya, (3) delivery, (4) membangun peserta didik untuk berpikir linier, sistematis, dan rasional, regiditas, (5) tekanan pada IQ saja.⁶

3. Paradigma Baru Pendidikan

Sorotan miring tentang pendidikan di Indonesia masih terus bergulir baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat awam. Sorotan miring ini ditandai dengan ranking HDI yang berada pada urutan lebih dari 150, di bawah Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Ketika berbicara tentang kualitas SDM, yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas SDM atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas SDM, jawabannya adalah bidang pendidikan. SDM seperti yang telah diuraikan di atas, yang mampu hidup di era kapanpun dan di manapun dapat dibangun melalui kurikulum. Selanjutnya tulisan ini menggunakan terminology visioner. Kurikulum yang visioner adalah kurikulum yang dinamis dan fleksibel. Gambaran kurikulum visioner diuraikan di bawah pada tulisan ini. Satu tesis yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah "Kurikulum yang visioner akan mampu membangun manusia yang

³ UNESCO

⁴ Zamroni.2011

⁵ Schwartz & Ogilvy.2007

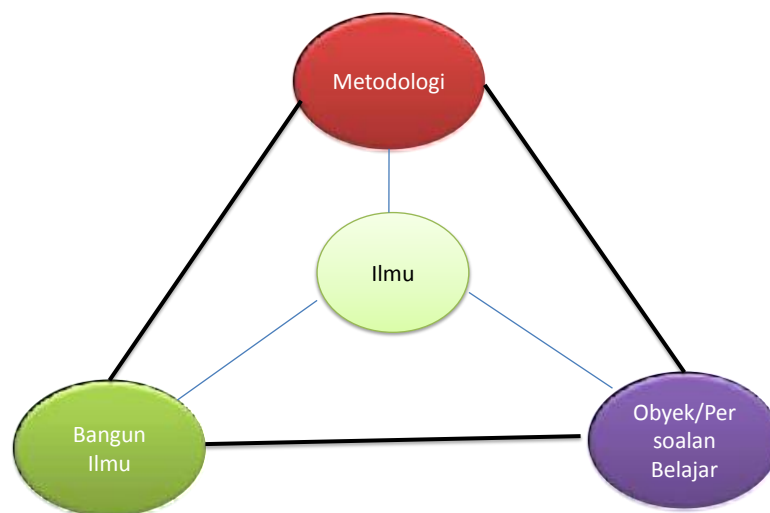
⁶ Djohar. 2004

berkualitas yang mampu menghadapi abad 21". Proses pembelajaran sangat mempengaruhi hasil belajar. Adapun pendidikan dan lebih khusus pembelajaran pada paradigma baru sebagai berikut: (1) factual/kontekstual/konseptual; (2) mengedepankan proses; (3) pembelajaran inkuiri; (4) mengutamakan cara/pola berpikir alternative, sistemik, kreatif; (6) fleksibel; (9) tekanan pada *creativity, emotional, spiritual, adversity quotient*,

4. Kurikulum Visioner

Terminologi visioner mengandung makna masa depan. Setelah memahami arah

perubahan alam, serta perubahan pembelajaran, maka kurikulum juga seharusnya mengalami perubahan. Kurikulum yang mampu mengantisipasi masa yang akan datang disebut kurikulum visioner. Kurikulum yang visioner adalah kurikulum yang (1) *based on scientific*. Landasan filosofis pembelajaran yang based on scientific adalah surat Al-Alaq ayat 5 yang artinya Allah SWT akan memberikan ilmu kepada manusia yang belum pernah diketahui sebelumnya. Belajar adalah bangun ilmu. Untuk lebih jelasnya kurikulum yang *based on scientific* diilustrasikan pada gambar di bawah.



Gambar 1. Konsep Bangun Ilmu

Based on scientific artinya adalah belajar itu tujuannya membangun ilmu. Ilmu dimaknai beraneka ragam dari ilmu baru yang benar-benar ilmu baru, sampai dengan ilmu yang telah ada. Namun yang penting dari perspektif pembelajaran bangun ilmu ini dimaknai sebagai proses pencapaian bangun ilmu. Dari sudut pandang membangun diri orang, bangun ilmu ini dimaknai sebagai proses membangun ilmu. Kemampuan berpikir dan berbuat adalah fokus pendidikan. Adapun tahapan membangun kerangka pikir peserta didik sebagai berikut: (1) kemampuan metodologis, (2) kemampuan konseptualisasi, (3) kemampuan paham konsep, (4) kemampuan mengaplikasi konsep yang ditemukan, dan (5) kemampuan memberikan value atau nilai terhadap konsep tersebut.⁷

Empat aspek kemampuan peserta didik yang diperoleh melalui proses pembelajaran diuraikan dalam makalah lain dan untuk lebih jelasnya dilakukan diskusi.

Konsep kurikulum visioner yang kedua adalah (2) *based on object study*. Object study atau diartikan berbasis pada persoalan belajar. Melalui persoalan belajar, siswa aktif dan guru berperan sebagai organisator (organisasi) persoalan belajar. Siswa diarahkan untuk dapat memecahkan persoalan belajar dan menemukan konsep ilmu melalui proses pembelajaran. Obyek persoalan belajar diperoleh melalui kajian kurikulum. Hasil kajian kurikulum sebagai berikut: struktur konsep, peta konsep, konsep esensial, bahan ajar, dan persoalan belajar. Ketika guru sedang melakukan proses pembelajaran, yang disajikan kepada siswa adalah obyek/persoalan belajar.

⁷ Djohar. 2001



Gambar 2. Kajian Kurikulum – Obyek Persoalan Belajar

Konsep ketiga terkait dengan implementasi kurikulum visioner adalah (3) pembelajaran yang PAKEM.⁸ Slogam pendidikan nasional Indonesia “Tut Wuri Handayani” dengan pengejawantahan sistem among yakni mengikuti kemampuan anak dengan keragaman dan perbedaan masing-masing dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum yang visioner. Selanjutnya konsep keempat adalah model evaluasi pada kurikulum visioner adalah (4) evaluasi autentik dengan catatan portofolio untuk merekam kinerja siswa dan hasil dapat dijadikan data untuk menentukan arah kecenderungan kemampuan siswa dan potensinya. Ini dapat diimplementasikan untuk pendidikan menengah ke bawah. Sedangkan untuk pendidikan di tingkat perguruan tinggi, evaluasi autentik dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi mahasiswa. Hasil evaluasi dijadikan sebagai data masukan bagi dosen untuk memberikan fasilitasi sesuai dengan kecepatan belajarnya.

Konsep kelima kurikulum visioner adalah (5) subtansinya. Subtansi diharapkan dinamis dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Subtansi diharapkan mengikuti perkembangan kehidupan manusia dan perubahan alam. Dinamika dan dasar-dasar pengembangan kurikulum sebagai berikut: (1) Membaca kurikulum, (2) Menyusun kurikulum, (3) Dinamika penyusunan kurikulum

5. Lingkungan sebagai sumber belajar – wujud pembelajaran yang kontekstual

Lingkungan merupakan sumber belajar. Landasan filosofis terkait dengan Lingkungan sebagai basis pembelajaran adalah Iqro’. Obyek persoalan belajar dapat diperoleh melalui Lingkungan. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kehidupan manusia dapat dijadikan sebagai obyek/persoalan belajar. Pembelajaran yang berbasis lingkungan merupakan pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran yang kontekstual pada gilirannya kelak menjadi pembelajaran atau pendidikan yang fungsional. Belajar melalui teori saja (teori yang telah ada) bukanlah pembelajaran yang fungsional. Pembelajaran yang teoritis tanpa memperhatikan lingkungan hasilnya hanya pengetahuan yang tidak dapat digunakan sebagai pemecahan masalah kehidupan manusia.

Iqro’ yang berarti bacalah. Dalam ayat Al Quran surat Al Baqoroh jelas tertulis bahwa Alloh memerintahkan kepada manusia untuk membaca. Membaca dalam pengertian ini bukanlah tekstua/, membaca teks yang ada. Membaca dalam iqro surat Al-Baqoroh ini adalah membaca dalam arti luas. Membaca segala sesuatu yang terjadi di alam, bukan membaca secara tektual. Salah satu pendapat dari pakar Amerika “*study nature not book*”.

Pembelajaran yang berbasis lingkungan sebagai sumber belajar kenyataannya lebih efektif bahkan realistik. Selain itu dapat menjadikan peserta didik lebih termotivasi, dikarenakan menyenangkan dan mengasyikkan. Cara-cara seperti ini lebih memiliki resitensi kuat pada pikiran peserta didik.

6. SDM abad 21

Satu kata kunci dalam menguraikan SDM abad 21 yaitu SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Terminologi kualitas memiliki makna yang sangat luas, namun di dalamnya adalah SDM yang kreatif. Kreativitas dapat tercapai bagi SDM yang memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk dapat mempertahankan hidup, tidak tergilas oleh alam dan oleh zaman, manusia perlu memiliki kreativitas. Dengan kata lain SDM yang kreatif-lah yang mampu *survive the life*.

Tujuan akhir dari proses pembelajaran dan ini merupakan tujuan pendidikan adalah membangun manusia yang cerdas dan

⁸ UNESCO

memiliki etos kerja dengan indikator: (1) berkembang spiritual, (2) kreatif, (3) Etos kerja menuju sikap dan kebiasaan kinerja, (4) membangun manusia sosial dan ekonomi. Indikator pertama dicapai melalui pendidikan yang menekankan pencapaian afektif dengan mengoptimalkan fungsi hati. Indikator kedua dicapai melalui pendidikan yang holistic kinestetik. Indikator ketiga dapat dicapai melalui pendidikan yang menekankan pencapaian adversity quotient/kecerdasan terhadap ketertepaan problem kehidupan. Indikator keempat dicapai melalui pendidikan yang sosio-edukatif dan memberikan teladan hidup efisien dan efektif.⁹

Profil SDM abad ke -21 adalah manusia yang bermartabat dengan ciri sebagai berikut: (1) kaitannya hubungan secara vertikal kepada Allah SWT, mempercayai kepada sang causa prima; (2) kaitannya hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk, mampu hidup bersosial; (3) kaitannya sebagai makhluk penghuni alam, tidak melakukan perusakan kepada siapapun dan apapun.

Indikator profil pertama yakni hubungan vertikal kepada sang pencipta, Allah SWT sebagai berikut: (a) patuh terhadap semua ajaran agama sesuai dengan agama yang dipilihnya, (b) menjauhi laranganNYA dan menjalankan perintahNYA. Sedangkan indikator profil kedua yakni sebagai makhluk sosial: (a) suka hidup damai, (b) saling menolong, (c) memiliki etos kerja, (d) memiliki mental entrepreneurship dalam rangka mempertahankan kehidupannya, misal mampu membaca peluang, kreatif, inovatif, dan fleksibel berfikir. Indikator untuk profil ketiga yakni tidak melakukan perusakan: (a) memelihara ciptaan Allah SWT yakni semua makhluk ciptaanNYA, misalnya menyayangi binatang, memelihara kebun, hutan, dan lain-lain, (b) tidak suka konflik yang mengarah pada destruksi, (c) tidak zalim. Indikator yang disebutkan di atas tentunya masih dapat diperluas lagi, penulis hanya menuliskan indikator inti saja.

7. Penutup

Sebagai kesimpulan dari tulisan di atas sebagai berikut:

1. Alam mengalami perubahan
2. Manusia sebagai penghuni alam juga harus menyesuaikan perubahan alam

Dalam dunia pendidikan juga harus mengalami perubahan: tujuan pendidikan, proses pembelajarannya dan kurikulumnya. Apabila model pembelajaran tidak mengalami perubahan berarti merampas hak mereka.

3. Tujuan pendidikan adalah membangun manusia yang kreatif, memiliki etos kerja dan memiliki berbagai kecerdasan (IQ, EQ, SQ, CQ, AQ). Tercapai keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4. Proses pembelajarannya: mengaktifkan peserta didik melalui obyek/persoalan belajar, media, metode yang mengaktifkan peserta didik..
5. Kurikulum yang visioner adalah kurikulum yang dinamis.
6. Pendidikan yang fungsional adalah pendidikan yang kontekstual dengan memperhatikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Harwadi. 2003. IQ, EQ, CQ, & SQ Kriteria Sumber Daya Manusia Berkualitas. Jakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Djohar. 2004. *Arah Perubahan Paradigma Pendidikan*. Makalah disajikan pada hari Pendidikan Nasional. Yogyakarta. UST
- , 2005. Pencerahan spiritual, Kearifan Budaya Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan, Kreativitas dan Etos Kerja. Makalah disajikan dalam seminar Budaya di Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Gibson. 1997. Ed. *Rethinking The Future*. London. Nicholas Breadly
- Istiningsih. 2013. *New Paradigm In Learning*. Dalam Proses, Kontrak telah dilakukan. New York. International Institute of Science, Technology and Education
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kurikulum 2013*. Jakarta. PusKur Kemendikbud
- Schwartz & Ogilvy. 2007. *New Paradigm of Nature*. New York. Schwartz & Ogilvy Co.
- Total Quality Management.
- UNESCO. Belajar Harta karun Di dalamnya.
- Zamroni. 2011. *Menuju Sekolah abad Ke-21*. <file:///C:/Users/DELL/Desktop/pendidikan%20abad21.htm>. Diakses pada 20 Februari 2013.

⁹ Djohar. 2005

ALIRAN HUMANISME DAN “PEDAGOGI HITAM” (Reorientasi Pendidikan di Indonesia)

Taat Wulandari

Dosen di Jurusan PIPS Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Terdapat banyak komentar bernada negatif tentang apa yang terjadi di dalam proses pendidikan di Indonesia, sebagai contoh: “ketika anak masuk ke dalam proses pendidikan, bukannya tambah pintar, tetapi justru menjadi bodoh”; sementara yang lain mengatakan: “pendidikan kita merupakan proses pembodohan massal”; “ketika anak mulai sekolah, jangan heran jika anak kemudian gampang sakit”, dan masih banyak ungkapan yang mencerminkan kondisi pendidikan di Indonesia. Sementara itu tantangan global menuntut beberapa persyaratan, supaya generasi kita dapat menghadapi kekuatan arusnya yang siap menghempaskan siapa saja yang tidak kecerdasan dan kemampuan. Dalam konteks ini, mutu pendidikan, khususnya pada tataran proses pembelajaran sangat menentukan kualitas generasi muda Indonesia. Pendidikan memerlukan penggerak yang sadar akan hakikat anak didik, di sinilah peran guru yang profesional menentukannya. Pendidikan sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip humanisme, sehingga pendidikan tidak terjerembab ke dalam pedagogi hitam yang justru akan berdampak pada proses pembodohan.

Kata Kunci: Humanisme, Pendidikan, Pedagogi Hitam

1. Pendahuluan

Humanistik merupakan suatu kata yang menunjukkan sifat humanis (kemanusiaan). Banyak wacana tentang humanisme yang diberikan oleh banyak ahli sesuai dengan kepakarannya. Pada akhirnya muncul topik humanisme pendidikan, humanisme Kristiani, humanisme Kultural, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu humanisme memiliki cakupan yang sangat luas.

Ketika gejala zaman baru telah mulai tampak di akhir zaman abad pertengahan, di mana gejala tersebut berkaitan erat dengan terjadinya beberapa perubahan pada sektor kehidupan ekonomi, sistem politik dan sistem ketatanegaraan, pertumbuhan kota sebagai pusat perdagangan dan industri, mulai melemahnya kekuasaan kelompok bangsawan dan makin bertambah kokohnya kedudukan raja, maka dalam kehidupan masyarakat Barat pada waktu itu muncul suatu gerakan kemanusiaan yang terkenal dengan sebutan Humanisme.

Gerakan humanisme ini adalah merupakan motor penggerak dari zaman baru yang melanjutkan zaman abad pertengahan yang dijiwai oleh kehidupan beragama. Gerakan ini disebut dengan Humanisme atau kemanusiaan, sebab sasaran utama dari gerakan ini adalah untuk mengembalikan

martabat manusia yang telah kehilangan bentuknya sebagai akibat tekanan dari kehidupan beragama yang dipaksakan dalam kehidupan sistem sosial dan sistem politik. Gerakan Humanisme ini, mula-mula berusaha melepaskan diri pembelajaan rohani gereja, tetapi kemudian berkembang menjadi suatu gerakan yang bergerak secara ofensif menyerang cara berpikir yang dogmatis dan fanatik yang diletakkan oleh gereja pada setiap individu dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan Humanisme bertujuan memberi bentuk baru bagi kehidupan manusia di dunia ini. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai perasaan dan pikiran yang tidak pernah statis dalam pertumbuhannya. Manusia harus bebas menentukan alternatif apa yang terbaik dalam kehidupan yang akan dipilihnya. Pikiran manusia adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia, sebab itu pikiran manusia tidaklah dapat dibelenggu baik oleh kekuatan atau kekuasaan maupun oleh agama. Sehingga gerakan Humanisme ini berusaha mengembalikan martabat dan harga diri manusia yang telah rusak jiwanya oleh ajaran agama yang fanatik dan dogmatis. Gerakan Humanisme adalah gerakan kemanusiaan yang telah berjaya menempatkan kembali kedudukan manusia yang telah kehilangan bentuk, kehilangan kepribadiannya, martabatnya, sebagai akibat sistem

yang dipaksakan dalam kehidupan kemasyarakatan. Meskipun dalam perkembangannya kemudian, gerakan Humanisme ini telah terpecah dalam melihat arti dan peranan agama dalam kehidupan manusia. Karenanya berbicara tentang Humanisme adalah suatu topik yang 'licin'.

2. "Pedagogi Hitam"

Istilah pedagogi hitam sebenarnya penulis temukan ketika membaca majalah Basis, nomor 01-02, Tahun ke-50, Januari-Februari 2001. Istilah tersebut dilontarkan oleh Prof. Kurt Singer (seorang ahli pedagogi dan psikologi anak dari Universitas Munchen), yang digunakan untuk memberi nama proses pendidikan yang banyak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Diantara kritik yang ditujukan kepada dunia pendidikan Indonesia di atas, saya kira sejalan dengan potret pendidikan yang ditangkap oleh Romo Sindhu (panggilan untuk Sindhunata). Dikatakan bahwa pendidikan melalui sekolah-sekolah adalah tempat di mana anak-anak menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Anak-anak bisa bermain, belajar, berteman, dan mengembangkan serta menjadi dirinya. Mereka juga aman untuk mempersiapkan masa depannya.

Mengapa muncul istilah pedagogi hitam? Hal ini dikarenakan, apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita justru berlawanan dari fungsi pendidikan ideal di atas. Di sekolah anak-anak muram karena dibebani banyak mata pelajaran. Di sana mereka kehilangan kegembiraan dan terisolir dari banyak teman. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk menjadi anak-anak yang hidupnya diwarnai dengan bermain. Di sekolah anak-anak sudah mulai resah gelisah, tidak tahu nasib apa yang bakal menimpanya di masa depan. Situasi tersebut masih ditambah dengan pekerjaan yang harus dibawa sepulang dari sekolah. Lengkap sudah penderitaan mereka, derita di sekolah dan bersambung di rumah. Nasib demikian terjadi di Indonesia dan juga anak-anak sekolah di luar Indonesia.

3. Humanisme dalam Pendidikan

Pendidikan humanis tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi dengan tiga prinsip sebagai berikut

- a. Dalam proses pendidikan, pengembangan hati dan pikiran harus berjalan secara bersama-sama;
- b. peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal;
- c. dalam pendidikan harus ada kerjasama erat antara peserta didik dan pendidik, juga antara teori dan praktek.

Beberapa tokoh yang gigih memperjuangkan kembalinya pendidikan yang humanis seperti Paolo Freire (*Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy of Hope*), Kurt Singer (*Wenn Schule krank macht*), maupun Ki Hajar Dewantara. Freire (A. Sudiarja, 2007: 8) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, ia mengkritik tentang pendidikan yang tidak kritis, yakni pendidikan yang diarahkan untuk domestifikasi, penjinakan, penyesuaian sosial dengan keadaan penindasan. Inilah pendidikan yang lazim dilakukan selama ini oleh pemerintah-pemerintah negara. Pendidikan dianggap investasi material untuk meneruskan tradisi dan kekayaan bangsa kepada generasi penerus. Maka Freire menyebut model pendidikan semacam ini sebagai banking education. Dalam pola pendidikan ini, hubungan guru-murid bersifat kontras dan vertikal. Murid adalah objek yang digarap guru, bodoh, pasif, tak berpengetahuan. Sementara guru, adalah subjek aktif, yang menjadi panutan. Seluruh kekayaan pengetahuan dan nilai-nilai ada pada guru. Karena itu identitas yang ditanamkan pada murid harus meniru identitas guru.

Kurt Singer juga memberikan penjelasan panjang lebar gejala-gejala sekolah yang membuat sakit. Menurut Singer, sekolah bukan lagi tempat yang nyaman bagi peserta didik. Sistem pendidikan sekolah mau tak mau menjadikan guru sebagai agen yang mengawasi, menindas, dan merendahkan martabat siswa. Sekolah menjadi lingkungan penuh sensor yang mematikan bakat dan gairah anak untuk belajar. Pekerjaan dan kewajiban sekolah menjadi senjata pemusnah massal yang mampu memusnahkan kemampuan anak untuk belajar melainkan tempat untuk mengadili dan merasa diadili. Singer menyebut pendidikan sekolah, yang mengakibatkan kegelisahan dan ketakutan itu, sebagai *schwarzer Paedagogik* (Pedagogi Hitam). Pendapat Singer tersebut bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Sudah banyak pengkritik pendidikan yang menyebutkan hal

tersebut. Diantaranya seperti Paolo Freire yang sudah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya.

Ki Hajar Dewantara (Ki Mohamad Said Reksohadiprodjo, 1989: 10-13) menggunakan istilah *Mandireng Pribadi* untuk menyebut kondisi tercapainya tujuan pendidikan humanis dalam proses pendidikan. Menurut beliau, pendidikan hendaknya dapat mengusahakan agar orang dapat membina dan mengembangkan dirinya menjadi manusia *mandireng pribadi* yang merasa bertanggungjawab atas terwujudnya makna eksistensi sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berbudi dan bermasyarakat. *Mandireng pribadi* berarti mampu untuk berpikir, bersikap, dan bertindak atas kehendak dan keyakinan sendiri, mampu untuk percaya kepada kekuatan diri sendiri di dalam mengusahakan sesuatu, mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu untuk memelihara rasa harga diri dan kekuatan pribadi dalam keadaan apa pun, dan oleh karenanya mampu untuk bertanggungjawab penuh atas cara hidupnya atau cara ia bereksistensi di dunia ini, secara sukarela dan ikhlas, bebas dari rasa terpaksa dan bebas dari kecenderungan untuk menyalahkan dan menyesali apa pun dan siapa pun.

4. Perlunya Reorientasi Pendidikan di Indonesia

Pedagogi hitam yang melekat dalam dunia pendidikan kita harus segera dilepaskan. Humanisme dengan para pendukungnya bertekad untuk mengembalikan spirit humanis dalam proses pendidikan. Kaum humanis berusaha untuk mengembalikan manusia kepada kodratnya yakni bebas berpikir, bersikap, bertindak, untuk mengembangkan dirinya. Apa yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah apa yang terjadi dalam masyarakat riil yang dikendalikan oleh kekuatan kapital, yakni penindasan mereka yang kuat terhadap yang lemah dan tak berdaya. Daya penindasan ini terjadi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Bahkan dalam hal yang kelihatannya paling netral dalam pendidikan, yakni dalam membaca dan menulis. Di sana peserta didik sudah ditekan dan diperalat sedemikian rupa seperti seorang budak yang diperalat oleh kekuasaan tuannya untuk menggarap apa pun yang dikehendakinya.

5. Rekomendasi

Dalam proses pendidikan maupun proses pembelajaran yang menjadikan filsafat humanis menjadi ruhnya, maka:

- Pendidikan harus mampu membangkitkan kesadaran tentang kebebasan untuk memilih serta makna tanggungjawab sesuai pilihannya tersebut.
- Pendidik harus dapat mengajak peserta didik berfilsafat tentang makna kehidupan, cinta kasih, dan kematian.
- Pendidik harus bisa membuat pertanyaan dan memberikannya kepada peserta didik. Proses bertanya diformulasikan dalam bentuk dialog antar kelompok-kelompok peserta didik. Harus diingat dan dipahami bahwa jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh guru akan sangat personal dan subyektif bagi setiap individu.
- Kurikulum pendidikan humanis harus terdiri dari materi-materi dan pengalaman-pengalaman berupa dialog antar peserta didik. Kurikulum humanis juga harus mengedapankan integrasi antara teori dan praktek, terutama dalam pelajaran sains sehingga peserta didik dapat belajar banyak mengenai *problem solving*. Demikian pula dengan pelajaran ilmu-ilmu sosial. Kondisi di Indonesia saat ini rata-rata peserta didik banyak dijejali dengan hapalan teori yang sangat minim dengan praktek. Penerapan Teori Humanis Dalam Kurikulum Pendidikan Menurut Gage dan Berline beberapa prinsip dasar dari pendekatan humanistik yang dapat kita pakai untuk mengembangkan kurikulum pendidikan adalah : (1) Murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Saat mereka telah mengembangkan kemampuan untuk menganalisa apa dan mengapa sesuatu penting untuk mereka sesuai dengan kemampuan untuk mengarahkan perilaku untuk mencapai yang dibutuhkan dan diinginkan, mereka akan belajar dengan lebih mudah dan lebih cepat. Sebagian besar pengajar dan ahli teori belajar akan setuju dengan pernyataan ini, meskipun mereka mungkin akan tidak setuju tentang apa tepatnya yang menjadi motivasi murid, (2) Mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan

banyak pengetahuan. Dalam kelompok sosial, dewasa ini di mana pengetahuan berganti dengan sangat cepat, pandangan ini banyak dibagi di antara kalangan pengajar, terutama mereka yang datang dari sudut pandang kognitif, (3) Evaluasi diri adalah satu satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan murid. Penekanan di sini adalah pada perkembangan internal dan regulasi diri. Sementara banyak pengajar akan setuju bahwa ini adalah hal yang penting, mereka juga akan mengusung sebuah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan murid untuk berhadapan dengan kemauan eksternal, (4) Perasaan adalah sama penting dengan kenyataan. Banyak tugas dari pandangan humanistik seakan memvalidasi poin ini dan dalam satu area, pengajar yang berorientasi humanistik membuat sumbangan yang berarti untuk dasar pengetahuan, (5) Murid akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Ini adalah salah satu area dimana pengajar humanistik telah memiliki dampak dalam praktek pendidikan. Orientasi yang mendukung saat ini adalah lingkungan harus tidak mengancam baik secara psikologis, emosional dan fisik. Bagaimanapun, ada penelitian yang menyarankan lingkungan yang netral bahkan agak sejuk adalah yang terbaik untuk murid. Menurut aliran humanistik, para pendidik sebaiknya melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan pendidikan dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan ini. Beberapa psikolog humanistik melihat bahwa manusia mempunyai keinginan alami untuk berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar. Jadi sekolah harus berhati-hati supaya tidak membunuh bakat dan kreatifitas dengan memaksakan anak belajar sesuatu sebelum mereka siap. Jadi bukan hal yang benar apabila anak dipaksa untuk belajar sesuatu sebelum mereka siap secara fisiologis. Dalam hal ini peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memenuhi kebutuhankebutuhan yang lebih tinggi, bukan sebagai konselor seperti dalam Freudian ataupun pengelola perilaku seperti pada behaviorisme.

- (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PTncvekpL5kJ:www.scribd.com/doc/21542328/humanistik+curruculum+kritik+terhadap+humanisme&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id>).
- e. Minimalkan menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dengan cara ceramah. Teknik ceramah ini secara langsung sudah membatasi kebebasan peserta didik untuk memberikan ide-ide mereka. Penggunaan teknik pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dengan bebas mencari sendiri infoemasi yang mereka butuhkan.
 - f. Optimalkan fungsi pendidik sebagai fasilitator. Pendidik menjadi fasilitator tempat peserta didik bertanya jika mereka mengalami kesulitan. Di Indonesia, dialog interaktif antar pendidik dan peserta didik rata-rata hanya terjadi bila pendidik memberikan kesempatan pada peserta didik, itupun di akhir ceramahnya saat jam pelajaran nyaris berakhir.
 - g. Kegiatan belajar tidak terbatas pada dinding-dinding kelas saja. Upayakan peserta didik tidak hanya belajar dengan bimbingan pendidik di kelas namun bebas belajar dimana saja sehingga suasana kegiatan belajar mengajar menjadi sangat fleksibel dan lebih nyaman.
 - h. Kaitannya dengan sarana pendidikan, sarana pendidikan disediakan untuk memenuhi tuntutan suatu pendidikan yang humanis. Bukan berarti peserta didik harus duduk di kelas yang ber-AC, lantai dari keramik yang mengkilat, dsb., bahkan mungkin kelas seperti itu tidak perlu. Karena peserta didik bebas belajar dimana saja, di sudut ruangan manapun dengan mempelajari mata pelajaran apapun. Pokok perhatian juga diberikan untuk buku pelajaran. Peserta didik seharusnya tidak boleh terbebani dengan mahalnnya buku pelajaran yang harus dibeli oleh orangtua siswa. Sekolah harus mampu menyediakan buku teks pelajaran gratis.
 - i. Sekolah harus menyediakan pula fasilitas seperti playground untuk peserta didik yang tidak hanya digunakan pada saat jam sekolah namun juga saat jam sekolah telah usai.

6. Penutup

Aliran humanisme dalam pendidikan menjadi sesuatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Terlebih dalam suasana kehidupan demokrasi saat ini. Pendidikan adalah suatu proses membangun manusia seutuhnya. Peserta didik tumbuh menjadi generasi yang kreatif dan mandiri. Humanisme yang diidealkan akan membantu membentuk manusia yang bebas dan merdeka. Mengkritisi pendidikan saat ini, dimana masih memposisikan peserta didik sebagai sosok yang perlu diisi dengan berbagai hapalan dan teori, justru pada akhirnya hanya akan menghasilkan generasi-generasi "Pak-Turut", jauh dari kreativitas dan kemandirian.

Humanisme yang dijadikan ruh dalam proses pendidikan akan menyadarkan kita semua bahwa pendidikan kita telah banyak menyeleweng dari tugasnya yang paling dasar. Pendidikan harus membuat manusia terkejut, sadar akan potensi dalam dirinya. Memang, suatu tujuan yang baik, menuntut upaya yang besar baik tenaga maupun biaya. Pendidikan pun harus membuat manusia bebas, tidak mau diperalat oleh kekuatan yang telah lama memperdayai sistem pendidikan kita. Apabila pendidikan masih belum mampu menunjukkan dirinya sebagai sebuah sistem yang bebas, maka janganlah kita bermimpi demokrasi akan terwujud apabila kita tidak mengusahakan suatu sistem pendidikan yang membebaskan manusia untuk dapat menjadi dirinya, *mandireng pribadi*. Aliran humanisme dalam pendidikan diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara cita-

cita dan tujuan pendidikan, yakni pendidikan yang berhasil membuat peserta didik bebas, kreatif, dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mark Olsen, John Codd, & Anne-Marrie O'Neill. 2004. *Education policy: globalization, citizenship, and democracy*. London: SAGE Publication Ltd.
- Martin Carnoy. 1974. *Education and cultural imperialism*. New York: Longman.
- Sudiarja, A. 2001. Pendidikan radikal tapi dialogal dalam *Basis*: Nomor 01-02, Tahun ke-5, Januari-Februari 2001.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Membenahi pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imam Barnadib. 1976. *Filsafat pendidikan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- _____. 1996. *Dasar-dasar kependidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ratna Wilis Dahar. tt. *Teori-teori belajar*. tp.
- Roestiyah. 2001. *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Syafii Maarif. 2007. Bangsa tunailmu. Republika: *Resonansi*, Selasa, 11 September 2007.
- Sumber Internet:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PTncvekpL5kJ:www.scribd.com/doc/21542328/humanistik-curruculum+kritik+terhadap+humanisme&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id>

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING BERBASIS *BLENDED LEARNING* MELALUI *LESSON STUDY* UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI, KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS, SIKAP ILMIAH, DAN HASIL BELAJAR GENETIKA PADA MAHASISWA BERKEMAMPUAN BERBEDA

Waris

(Dosen FPMIPA IKIP PGRI Jember)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *Blended Learning* melalui *Lesson Study* untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis, hasil belajar kognitif dan psikomotor pada mahasiswa yang berkemampuan akademik berbeda. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen evaluasi.

Model penelitian yang digunakan *research and development*. Prosedur penelitian dan pengembangan mengikuti 4D. Analisis data menggunakan statistik *gain score*. Subjek penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Biologi IKIP PGRI Jember berjumlah 54.

Hasil analisis data diperoleh: 1) Konsensus pakar/ahli terhadap pengembangan silabus = 88,71% (sangat baik), pengembangan RPP = 87,47% (sangat baik), pengembangan bahan ajar = 79,95% (baik), pengembangan instrumen evaluasi = 86,50% (sangat baik). 2) Adanya peningkatan motivasi belajar 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik bawah dan 0,72 (tinggi) pada kelompok akademik atas. 3) Adanya peningkatan sikap ilmiah 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik rendah dan 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik tinggi. 4) Adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis 0,71 pada kelompok akademik rendah dan 0,73 pada kelompok akademik tinggi. 5) Adanya peningkatan hasil belajar kognitif 0,72 pada kelompok akademik rendah dan 0,73 pada kelompok akademik tinggi. 6) Adanya peningkatan hasil belajar psikomotor 0,72 pada kelompok akademik rendah dan 0,72 pada kelompok akademik tinggi.

Kata kunci: inkuiri terbimbing, *Blended Learning*, *Lesson Study*, motivasi, berpikir kritis, sikap ilmiah dan hasil belajar kognitif.

1. Pendahuluan

Keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah, akses informasi dan pengelolannya, pengambilan keputusan, kolaborasi, kerja sama dan penggunaan berbagai teknologi perlu dikuasai oleh mahasiswa (Galbreath, 1999). Tiga dasar tugas pendidikan di masyarakat untuk menghadapi abad 21 yang sarat dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu: mempersiapkan mahasiswa untuk siap kerja, sebagai warga negara, dan siap menghadapi kehidupan sehari-hari (Kulthau, 2007).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Bab IV, Standar Proses, Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa "Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa".

Kenyataan yang ada selama ini praktik pembelajaran di perguruan tinggi belum sepenuhnya dikembangkan untuk memberikan peluang belajar cerdas, kritis, kreatif, dan memecahkan masalah pada mahasiswa. Proses pembelajaran masih berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*), searah dan tidak menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif mahasiswa (Dirjen Dikti: 2008). Hal seperti itu juga masih terjadi di IKIP PGRI Jember, dari 15 dosen biologi yang disurvei sebagian besar dosen masih menempatkan

mahasiswa sebagai obyek belajar, masih sering menggunakan strategi pembelajaran yang didominasi oleh dosen. *Sharing* antar dosen juga belum dilakukan, pemanfaat teknologi informasi sebagai media pembelajaran masih kurang. Inovasi dan kreativitas mahasiswa juga kurang dikembangkan untuk memproses informasi dan menemukan sendiri pemaknaan pengetahuan. Proses pembelajaran masih bersifat klasikal yang menganggap kemampuan seluruh mahasiswa sama, kurang memberikan perhatian pada mahasiswa yang berkemampuan akademik rendah supaya bisa sejajar dengan mahasiswa yang berkemampuan akademik tinggi.

Dampak dari proses pembelajaran seperti yang disebutkan di atas menimbulkan suatu permasalahan yaitu motivasi belajar mahasiswa kurang, rasa percaya diri atas kemampuan dirinya untuk memecahkan suatu permasalahan juga masih kurang, keterampilan berpikir kritis mahasiswa kurang berkembang, hal ini ditunjukkan jika mahasiswa dihadapkan pada permasalahan lingkungan hidup yang terkait dengan pengetahuan genetika, mahasiswa masih sangat minim menemukan solusi dan pemecahan masalah tersebut. Sikap ilmiah mahasiswa juga masih kurang, hal ini tampak pada saat menyelesaikan tugas, mahasiswa masih kurang objektif dan kurang jujur, karena masih sering meniru atau menyalin pekerjaan orang lain. Hasil belajar mahasiswa kurang maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dari latar belakang dan permasalahan-permasalahan seperti di atas, dosen dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan dosen yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. Dalam pembahasan ini dikembangkan perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* melalui *lesson study*. Diharapkan dengan dikembangkannya perangkat pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, menumbuhkan sikap ilmiah yang tinggi dan meningkatkan hasil belajar kognitif maupun psikomotor yang tinggi pula, yang dapat mengubah proses pembelajaran dari *teacher center* menjadi *student centered*, dari *outside-guided* menjadi *self-guided* dan dari *knowledge-as-possession* menjadi *knowledge-as-construction*.

2. Metode Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis *Blended Learning*

Perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* dikembangkan menggunakan model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974) yang terdiri dari 4 tahap yaitu:

2.1 Tahap Pendefinisian (*define*)

Tahap ini dimaksudkan untuk mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran, dengan menganalisis kurikulum yang akan dikembangkan perangkatnya. Langkah-langkah pada pendefinisian adalah: 1) Analisis ujung depan yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Dengan analisis ujung depan akan didapatkan gambaran fakta, harapan, dan alternatif penyelesaian masalah dasar, yang memudahkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Analisis ujung depan dalam pembahasan ini dilakukan untuk menetapkan masalah-masalah dasar dalam perkuliahan genetika sehingga bisa sebagai pertimbangan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran genetika berbasis *blended learning* melalui *lesson study*. 2) Analisis mahasiswa (*learner analysis*) yang dilakukan dengan menelaah karakteristik mahasiswa, yaitu latar belakang kemampuan akademik (pengetahuan), perkembangan kognitif mahasiswa, keterampilan-keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, dan media pembelajaran. Hasil analisis tersebut dijadikan kerangka acuan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 3) Analisis tugas (*task analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang akan dikaji. Keterampilan-keterampilan ini bersifat menyeluruh yang ada dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti mengkaji keterampilan berpikir kritis mahasiswa, dan keterampilan motorik dalam melakukan eksperimen-eksperimen dalam pembelajaran genetika. 4) Analisis konsep (*concept analysis*) yang dilakukan adalah identifikasi konsep-konsep utama dari materi yang akan diajarkan. Konsep-konsep tersebut lalu disusun secara sistematis, dan dikaitkan satu konsep dengan konsep yang lain yang relevan sehingga membentuk suatu konsep yang kompleks sehingga dapat digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan

standar kompetensi. 5) Perumusan tujuan (*specifying instructional objectives*) yang merupakan rangkuman hasil analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek dalam bentuk standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Perilaku objek menjadi dasar untuk menyusun tes yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang dikembangkan.

2.2 Tahap Perancangan (*design*)

Tahap perancangan dilakukan melalui *lesson study* tahap *plan* untuk menyiapkan prototip perangkat pembelajaran. Menurut Thiagarajan (1974) tahap ini terbagi menjadi 4 langkah yaitu:

2.2.1 Penyusunan Standar Tes

Penyusunan standar tes merupakan langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian (*define*) dengan tahap perancangan (*design*). Standar tes disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci jawaban dan pedoman penskoran setiap butir soal.

2.2.2 Pemilihan Media

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi dan strategi pembelajaran. Pemilihan media disesuaikan dengan analisis konsep, analisis tugas, dan perilaku objek penelitian. Pemilihan media yang tepat berguna untuk membantu mahasiswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Artinya, pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengembangan bahan ajar.

2.2.3 Pemilihan Format

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi belajar, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi

kriteria menarik, memudahkan dan membantu dalam pembelajaran.

Format perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi: silabus, RPP, bahan ajar, sintak stritegi inkuiri terbimbing, dan instrumen evaluasi. Format yang digunakan mengikuti atau disesuaikan dengan format yang telah dikembangkan oleh BNSP dan mengacu pada Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.

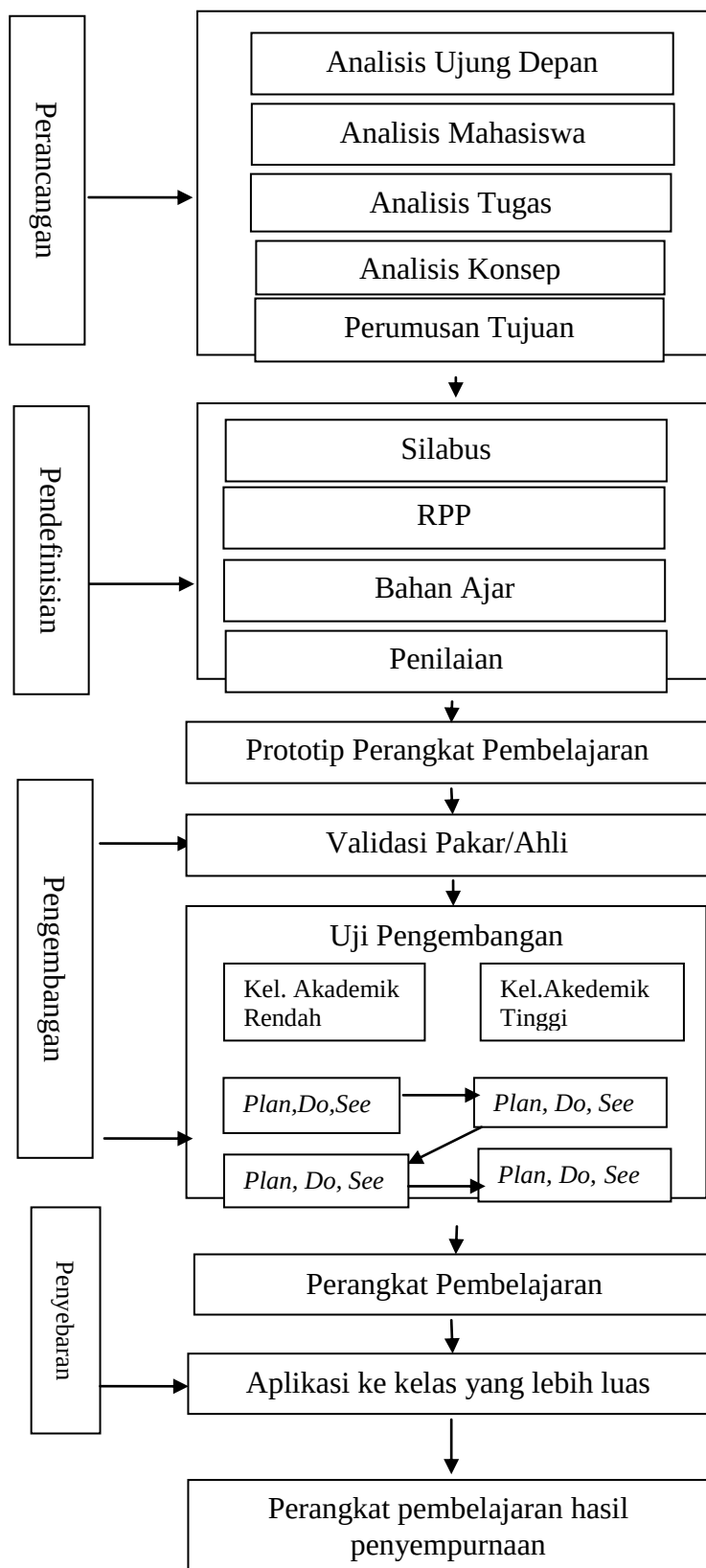
2.3 Tahap Pengembangan (*develop*)

Tujuan tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang telah tervalidasi oleh pakar/ahli pembelajaran. Pakar/ahli pembelajaran sebagai validator memberikan masukan-masukan terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Hasil penilaian dari pakar pembelajaran tersebut dianggap representatif untuk acuan dalam memutuskan bahwa perangkat pembelajaran telah memenuhi syarat validitas. Hasil penilaian pakar merekomendasikan bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan tanpa revisi, dapat digunakan dengan revisi atau tidak dapat digunakan.

2.4 Tahap Desiminate (Penyebaran)

Pada tahap penyebaran dilakukan uji pengembangan dengan melibatkan mahasiswa sebagai pengguna produk. Uji pengembangan dimaksudkan untuk mengkaji tingkat keterlaksanaan strategi pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk keperluan penyempurnaan, serta untuk melihat ada tidaknya peningkatan motivasi belajar, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif dan psikomotor mahasiswa. Uji pengembangan perangkat pembelajaran merupakan aplikasi tahap kedua (*do*) dan tahap ketiga (*see*) dari kegiatan *Lesson Study*.

Secara bagan model pengembangan 4D yang dimodifikasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Pengembangan Perangkat Pembelajaran

3. Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inkuiri Berbasis *Blended Learning*

Berdasarkan hasil analisis setiap tahapan-tahapan dalam prosedur pengembangan model 4D yang dimodifikasi dan hasil uji pengembangan, maka tersusunlah perangkat

pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* untuk mata kuliah genetika sebagai berikut.

3.1 Silabus

Silabus yang dikembangkan disesuaikan dengan sintak strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu inkuiri terbimbing berbasis *blended learning*. Silabus yang dihasilkan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Format Silabus Hasil Pengembangan

SILABUS									
A. Identitas Matakuliah									
Nama Mata Kuliah		:							
Kode/Jumlah SKS		:							
Kelompok Matakuliah		:							
Prasyarat		:							
B. Deskripsi Matakuliah		:							
C. Standar Kompetensi		:							
No	Kompetensi Dasar	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Strategi Belajar	Indikator	Sifat Blended Learning	Penilaian		Sumber Belajar	Alokasi Waktu
						Teknik	Bentuk		
1			Inkuiri terbimbing		On line Off line				
2									

3.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi yang dijabarkan dalam silabus. RPP yang dikembangkan sesuai dengan

strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu inkuiri terbimbing berbasis *blended learning*. Penyusunan RPP dilakukan melalui kegiatan *lesson study* yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *plan*, *do* dan *see*. Format RPP hasil pengembangannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Format RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Program Studi :

Nama Matakuliah :

Kode/Jumlah SKS :

Semester :

Alokasi Waktu :

Dosen Pengampu :

A. Standar kompetensi

B. Kompetensi dasar

C. Indikator

D. Tujuan Pembelajaran

E. Materi Pembelajaran

F. Metode Pembelajaran

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Sifat <i>Blended</i>	Alokasi waktu
1.Tahap awal				
2. Tahap inti				
3.Tahap akhir				

H. Sumber Belajar

I. Penilaian

3.3 Sintak strategi pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning*

Sintak strategi pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* hasil

pengembangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sintaks Strategi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis *Blended Learning*

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa
Tahap Perencanaan	Tim LS menyusun dan merancang desain pembelajaran dengan menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar serta sejumlah indikator pencapaian untuk mata-kuliah genetika dan merancang media pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat digunakan/dipelajari sendiri/kelompok oleh mahasiswa.	Mencari informasi/ pengetahuan yang relevan dengan materi yang akan dipelajari melalui media teknologi informasi atau literatur lain.
Tahap Pelaksanaan/ Proses	1. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis <i>Blended Learning</i>. 3. Membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 mahasiswa. 4. Menjelaskan topik-topik pembelajaran sesuai dengan silabi dan RPP. 5. Membimbing mahasiswa untuk merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. 6. Dosen bergerak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, mengamati kemajuan dan memberikan bantuan yang diperlukan. 7. Dosen memberikan tugas untuk pengayaan pengetahuan dan melakukan inkuiri.	1. Mengamati suatu objek yang ditampilkan dalam media yang dirancang oleh dosen atau mencari informasi melalui internet. 2. Merancang suatu kegiatan mulai dari merumuskan masalah, menyusun hipotesis, kemudian mengumpulkan data melalui pengamatan, menganalisis data, membuat kesimpulan. 3. Membuat laporan secara tertulis, mempresentasikan di depan kelas, dan mengunggah ke <i>Blended Learning</i>.
Tahap Refleksi	1. Dosen (tim L S) mendiskusikan hasil dan menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan belajar mahasiswa. Tim melakukan <i>sharing</i> atas temuan-temuan yang ada. 2. Tim merevisi pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari merumuskan hasil belajar yang akan dicapai, mendesain pembelajaran, dan menentukan siapa yang menjadi dosen model dan yang menjadi observer.	1. Belajar mandiri/ kelompok menggunakan media teknologi informasi yang dirancang oleh dosen secara <i>online</i> atau mencari informasi melalui internet.

3.4 Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan mencakup pokok bahasan – pokok bahasan yang mengacu pada SK dan KD yang ada dalam silabus. Dalam hal ini bahan ajar yang dikembangkan disusun dalam bentuk *Power Point* (PPT) dilengkapi dengan suara yang menggunakan program Kamtasia dan *video file* (AVI) sehingga dapat dibuka dengan program *GOM Player*. Hal ini akan memudahkan mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar secara mandiri, dan berulang-ulang.

3.5 Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi dikembangkan dalam bentuk *test essay*, rubrik, kuesioner, dan lembar observasi unjuk kerja. *Test essay* dan rubrik digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis. Kuesioner dirancang dengan model skala Likert digunakan untuk mengukur motivasi belajar. Hasil belajar psikomotorik diukur menggunakan lembar observasi unjuk kerja. Sebelum instrumen evaluasi di gunakan, terlebih dahulu diuji cobakan dan divalidasi setiap butir soalnya. Hasil validasi butir soal instrumen evaluasi yang dikembangkan menunjukan pada kategori “cukup” dan “tinggi”.

Perangkat pembelajaran yang disusun pada tahap perancangan sebelum diuji pengembangannya pada tahap pengembangan, terlebih dahulu divalidasi oleh ahli/pakar pembelajaran. Hasil validasi ahli/pakar menunjukan bahwa pengembangan silabus = 88,71% (sangat baik), pengembangan RPP = 87,47% (sangat baik), pengembangan bahan ajar = 79,95% (baik), pengembangan instrumen evaluasi = 86,50% (sangat baik). Berdasarkan hasil validasi tersebut ahli/pakar merekomendasikan bahwa perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* dapat digunakan.

Uji pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan melalui proses pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan RPP yang dikembangkan. Uji pengembangan melibatkan pengguna produk yaitu mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi IKIP PGRI Jember yang menempuh mata kuliah genetika sebanyak 54 mahasiswa yang terbagi menjadi dua kelompok belajar. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah

dan kelompok kedua adalah mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi.

Data hasil uji pengembangan berupa hasil tes motivasi belajar, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis, hasil belajar kognitif dan psikomotorik, kemudian dianalisis dengan menggunakan *gain score* ternormalisasi diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Adanya peningkatan motivasi belajar 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik bawah dan 0,72 (tinggi) pada kelompok akademik atas. 2) Adanya peningkatan sikap ilmiah 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik rendah dan 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik tinggi. 3) Adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis 0,71 (tinggi) pada kelompok akademik rendah dan 0,73 (tinggi) pada kelompok akademik tinggi. 4) Adanya peningkatan hasil belajar kognitif 0,72 (tinggi) pada kelompok akademik rendah dan 0,73 (tinggi) pada kelompok akademik tinggi. 5) Adanya peningkatan hasil belajar psikomotor 0,72 (tinggi) pada kelompok akademik rendah dan 0,72 (tinggi) pada kelompok akademik tinggi.

4. Pembahasan

Perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* yang disusun melalui *lesson study* untuk mata kuliah genetika, ternyata berdasarkan validasi pakar hasilnya menunjuk “baik” dan “sangat baik”, serta hasil analisis tes motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, sikap ilmiah dan hasil belajar kognitif dan psikomotor pada uji pengembangan menunjukan kategori “tinggi”.

Terjadinya peningkatan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, sikap ilmiah dan hasil belajar kognitif dan psikomotor yang tinggi pada kelompok mahasiswa akademik rendah maupun kelompok mahasiswa akademik tinggi untuk perkuliahan genetika terjadi karena: 1) Proses pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* dapat mengembangkan sejumlah keterampilan proses pada mahasiswa seperti mengobservasi, merumuskan permasalahan, menyusun hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data serta menginterpretasikan data, mengambil kesimpulan berdasarkan bukti autentik dan mengkomunikasikan hasil kegiatan inkuirinya. Kulthau (2007) menyatakan bahwa melalui implementasi inkuiri terbimbing, mahasiswa dapat melakukan investigasi, eksplorasi,

mencari, meneliti, mengejar, dan belajar. Dalam Strait & Wike (2002), Schepler, *et al* (2003), Depdiknas (2003a) juga dinyatakan bahwa pembelajaran inkuiri merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran konstruktivistik yang menekankan pada keaktifan belajar mahasiswa. Melalui kegiatan inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* mahasiswa dengan tingkat perkembangan atau kemampuan yang berbeda dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah sejenis dan berkolaborasi untuk menemukan pemecahannya. Dalam proses inkuiri pembelajar termotivasi untuk terlibat langsung atau berperan aktif secara fisik dan mental dalam kegiatan belajar. 2) Proses pembelajaran yang mengaplikasikan *blended learning*, karena dengan *blended learning* proses pembelajaran dapat dilakukan secara *on line* maupun *off line*. Melalui *blended learning* proses pembelajaran tidak hanya mengembangkan interaksi pembelajar, tetapi juga memberikan lingkungan belajar yang positif (Koesnandar, 2008). Demikian juga bahan ajarnya dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi media pembelajaran yang menarik dan mudah dipelajari oleh mahasiswa. Dalam hal ini bahan ajar disusun dalam bentuk PPT yang dilengkapi dengan suara yang rekam menggunakan program Kamtasia dan dikemas/disimpan menggunakan program AVI (*video file*) yang dapat diputar/dibuka dengan menggunakan program GOM Player, sehingga bahan ajar dapat dipelajari kapan saja secara berulang-ulang. 3) Perangkat pembelajar yang dihasilkan merupakan hasil *sharing* dari tim *lesson study* yang terdiri dari 5 orang. Secara praktik *lesson study* dilakukan dengan 3 tahapan yaitu: *plan*, *do*, *see*. Pada tahap *plan*, tim *lesson study* secara kolaboratif berbagi ide menyusun rancangan pembelajaran untuk menghasilkan cara-cara pengorganisasian bahan ajar, proses pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu pembelajaran. Pada tahap ini ditetapkan prosedur pengamatan dan instrumen yang diperlukan dalam pengamatan. Pada tahap *do* salah satu anggota tim sebagai dosen model, dan anggota tim yang lain sebagai observer yang akan mengamati, memperhatikan mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar saat berinkuiri, baik secara mandiri atau berkelompok. Pada tahap *see* tim *lesson study*

melakukan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil validasi pakar/ahli dan analisis hasil uji pengembangan dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* melalui *lesson study* dengan menggunakan metode 4D yang dimodifikasi dapat meningkatkan motivasi belajar, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif dan psikomotor pada mahasiswa yang berkemampuan akademik rendah maupun pada mahasiswa yang berkemampuan akademik tinggi untuk perkuliahan genetika. Dengan demikian perangkat pembelajaran hasil pengembangan ini dapat digunakan/diaplikasi untuk kelas yang lebih luas lagi.

6. Saran

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam pembahasan ini masih terfokus pada satu mata kuliah yaitu genetika, sehingga penulis menyarankan perlunya pengembangan perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis *blended learning* untuk mata kuliah-mata kuliah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Rath, J. and Wittrock, M.C. (2001) *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, Complete edition, New York: Longman.
- Arikunto, S. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 2)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Bodzin, Alec M; Waller, Patricia L; Lana Edwards Santoro; Kale, Darlene. 2007. Investigating the Use of Inquiry & Web-Based Activities with Inclusive Biology Learners. *The American Biology Teacher*, 69 (5) : 273-279.
- BSNP. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
- Cartier, J.L., J.Stewart & B. Zoellner. 2006. *Modelling and Inquiry in a High School*

- Genetic Class. *Jurnal The American Biology Teacher*. 68(6): 334-340.
- Depdiknas. 2003a. kurikulum 2004 SMA. *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Biologi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional.
- Gagne, R.M. 1995. Learning processes and instruction. *Training Research Journal* 1: 17-28
- Garrison, D.R. & D.Archer. 2004. Inquiry and Critical Thinking-Reflective Inquiry. (Online), (<http://www.commonsonline.ca>). diakses 12 Oktober 2011.
- Galbreath, J. 1999. Preparing the 21 st Century Worker:the Link Between Computer-Based Technology and Future Skill. *Educational technology*. Desember:14-22.
- Joko, S., 2011, Compact Disk Online (Cd-O) Sebagai Multimedia Interaktif Pembelajaran Fisika Berbasis Proyek, JP2F,2 (1): 56-70
- Joyce, B., M. Weil & E. Calhoun. 2000. *Model of Teaching*. 6th edition. Allyn Bacon. Boston. United State of America.
- Keefer, R. 1999. Criteria for Designing Inquiry Activities that are Effective for Teaching and Learning Science Concepts. *Journal of College Science Teacher*. 24(5): 159-165.
- Koesnandar, 2008, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web*, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Depdiknas, Jakarta
- Kulthau, C.C., Maniotes, L.K., Caspari, A.K. 2007. *Guided Inquiry: Learning in the 21st Century School*. Westport, CT: Libraries Unlimited.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Scapler, J.A., Sethakorn, N. & S. Styer. 2003. Cultured Inquiry. *The Science Teacher*. 6 (2) : 56-61.
- Schmidt, M.S. 2003. Learning by Doing, Teaching the Process of Inquiry. *Science Teacher*. 6(2) : 56-61.
- Straits, W.J. & R.R. Wilke. 2002. Practical Consideration for Assessing Inquiry Based Instruction. *Jurnal of College and Science Teaching*. 31(7) : 432-435.
- Sudjana,N. 2007. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sutikno, 2010, Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Multimedia Menggunakan Metode Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*. Nomor 6, 58-62.
- Thiagarajan, 1974, *Instructional Development for Trainin Teacher of Exceptional Children: A Sourcebook*, Indiana Univ. Washington.

MODEL KOORDINASI PENGELOLAAN GURU PNS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA ERA OTONOMI DAERAH

T. Sulistyono
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: (1) kapan dimulainya koordinasi; (2) bagaimana model koordinasi dari awal sampai akhir dalam mengelola guru PNS; (3) apa yang dijadikan pedoman koordinasi; (4) apakah ada *deprofesionalisasi* melalui *politisasi* terhadap guru-guru oleh para pejabat; dan (5) apakah koordinasinya telah berjalan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), interview dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan pola pikir induktif, dan deduktif (reflektif).

Hasil penelitian diperoleh model koordinasi sebagai berikut: (1) baik koordinasi internal maupun eksternal telah dimulai sejak tahap perencanaan kebutuhan guru PNS dan selalu ada pada tahap-tahap berikutnya hingga tahap pemberhentian; (2) koordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan lembaga-lembaga lain sesuai dengan tahapannya, misalnya DPDPK, Bagian Organisasi-Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Trantib, DPRD Kota Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota, BKD Pemerintah DIY, Disdikpora DIY, Kemenegpan dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara; (3) ada pedoman koordinasi, yaitu komitmen membedakan politik dengan pendidikan, kultur dan aturan-aturan hukum baik secara nasional maupun lokal yang dipakai sebagai pedoman koordinasi sesuai tahap-tahapnya; (4) tidak diperoleh data *deprofesionalisasi* melalui *politisasi* terhadap guru-guru PNS oleh pejabat dilingkungan Kota Yogyakarta; (5) secara keseluruhan koordinasi guru PNS pendidikan dasar dan menengah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun kadang ada kebijakan pusat yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah.

Kata Kunci: Koordinasi, Guru PNS, Otonomi Daerah, Desentralisasi

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa hal berikut. Pertama, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada awal 1999, yaitu ketika terjadi era transisi menuju demokrasi, yang melahirkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dan diikuti peraturan pelaksanaan lainnya. Di dalam otonomi daerah menggunakan paradigma desentralisasi. Menurut Unesco (1991), desentralisasi merupakan pemindahan perencanaan, pengambilan keputusan atau

manajemen dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga atau organisasi di bawahnya, atau pada organisasi-organisasi yang bukan pemerintahan. Bentuknya dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Di Indonesia, pengertian desentralisasi sesuai dengan pasal 1 ayat 7 UU No. 32 tahun 2004, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sri Probo Sudarmo dan Brasukra G. Sudjana (2009), disain desentralisasi Indonesia berusaha untuk mengintegrasikan tujuan administratif dan politik, yang kerap kali terjadi pertentangan atau konflik. Di era otonomi daerah, ada keterkaitan yang hilang antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke sekolah, yang menurut UNDP Indonesia tulisan Sri Probo

Sudarmo dan Brasukra G. Sudjana (2009) terjadi *missing link* atau keterkaitan yang hilang. Slamet PH. (1999) menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan memerlukan sistem/struktur, kultur dan figur (pelaku) yang berbeda dengan sentralisasi, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi, rekulturisasi, dan refigurisasi, supaya diperoleh SDM yang *the right man on the right place* (Slamet, 2008). Ini berarti diperlukan *mind set*, *hard set* dan *skill set* (Slamet, 2012). Masalahnya, otonomi daerah sering dipahami tidak secara benar, yang akibatnya dapat menimbulkan masalah yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan koridor NKRI, dapat melahirkan raja-raja kecil dalam NKRI. Dalam pelaksanaan tidak selamanya desentralisasi berjalan dengan mulus (Slamet, PH., 2008). Kedua, koordinasi dalam manajemen apapun, menurut penulis sangat penting. Kegagalan suatu program sangat mungkin terjadi ketika tidak ada koordinasi atau setidaknya tidaknya koordinasinya sangat lemah di antara para pelakunya, sehingga hasilnya tidak efektif. Ketiga, guru PNS sebagai salah satu sumber daya pendidikan merupakan komponen dan atau faktor yang sangat penting dalam sistem pendidikan, tanpa mengabaikan petingnya faktor-faktor lain. Mengabaikan faktor ini orang dapat membayangkan kalau kegiatan pendidikan tidak akan berhasil. Misalnya tahun 2014 Kota Yogyakarta tidak memperoleh formasi, padahal yang persiun 240 orang. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

1.2 Fokus Masalah

Fokus masalah meliputi: (a) pada tahap apa dimulainya koordinasi; (b) jika pada tahap perencanaan telah dimulai koordinasi, bagaimana model koordinasinya; (c) bagaimana model koordinasi tahap pengangkatan dan penempatan ; (d) bagaimana model koordinasi tahap pemindahan; (e) bagaimana model koordinasi tahap pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ; (f) bagaimana model koordinasi tahap pembinaan dan pengembangan ; (g) bagaimana model koordinasi tahap pemberhentian; (h) adakah pengorbanan profesionalisasi; (i) apakah koordinasi pengelolaan guru sudah berjalan baik ?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Epistemologi penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif atau naturalistik dengan ciri-ciri sebagaimana ciri penelitian naturalistik (Nasution, 2002). Sebenarnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif postpositivistik phenomeno-logik-interpretif. Namun karena perlu menyesuaikan dengan pedoman tata tulis lembaga, maka nampak seperti pendekatan pertama, yaitu pendekatan positivistik, dan termasuk model A (Noeng Muhadjir, 2002).

1.3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dengan pertimbangan kota ini sangat lekat dengan budaya Jawa. Inilah yang dipakai sebagai alasan menggunakan penelitian kualitatif.

1.3.3 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan yaitu data tentang koordinasi pengelolaan guru PNS pendidikan dasar dan menengah (TK,SD, SMP, SMA, SMK) mulai tahap perencanaan sampai tahap pemberhentian.

1.3.4 Metode Pengumpulan Data

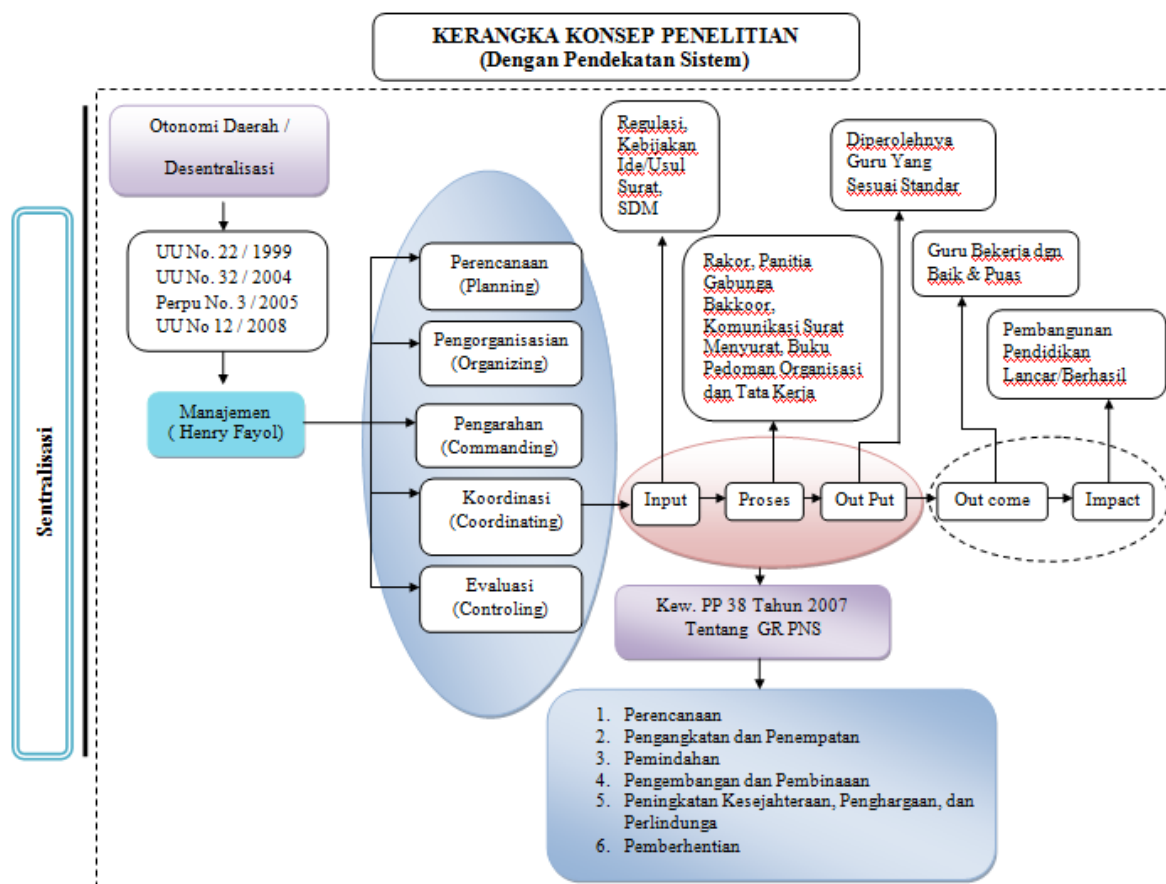
Untuk mengumpulkan data digunakan *Focus Group Discussion* (FGD), interview dan dokumentasi. Penggunaan FGD sesuai dengan pandangan Dawson, Manderson dan Tallo, 1993 (dalam Irwanto, 2006), dan sesuai karakteristik FGD dari Richard A, Krueger, (1994), David, W. Stewart, & Prem N, Shamdasani (1990). FGD dilakukan dua kali setelah dinyatakan jenuh. Namun untuk triangulasi, dilakukan juga interview dan dokumentasi pada kesempatan lain. Dawson, Manderson dan Tallo, 1993 (Irwanto, 2006)

1.3.5 Metode Analisis Data

Analisis dan interpretasi temuan dilakukan menurut Mitchell Besty <http://www.orau.gov/cdcynergy/cdcynergy30/default.htm> (diunduh 20 Desember 2010). Karena pelaksanaan kelompok fokus menggunakan rekaman audio, maka didapatkan transkripsi dari hasil diskusi diskusi. Karena itu kemudian dilakukan analisis terhadap catatan-catatan/ transkrip. Pola pikir yang dipakai merupakan gabungan dari pola pikir induktif dan deduktif (reflektif), Pola pikir ini sesuai

dengan berbagai pola pikir dari pola pikir klaster A sampai klaster L seperti yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir (2002).

Kerangka konseptual penelitian ini disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Pembahasan

2.1 Temuan Penelitian Tahap Dimulainya Koordinasi

Pertama, sesuai dengan teori yang dipakai, koordinasi internal yaitu koordinasi intern di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan jajarannya hingga UPT TK-SD, dan sekolah-sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK). Koordinasi eksternal adalah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik dengan jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta maupun lembaga-lembaga atau instansi-instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta. *Kedua*, koordinasi internal dan eksternal telah dimulai pada tahap perencanaan kebutuhan guru. Teori yang ada menyebutkan koordinasi menjadi salah satu fungsi manajemen, dan ada pada tahap pelaksanaan. Misalnya teori Henri

Fayol, Stephen P. Robbins, Hoyle, Rue & Byars, Mc Namara, dan Oey Liang Lee, Luther Gullick, dan Lyndall F. Urwick (Onisimus Amtu, 2011). Abstraksi teoritis yang dapat dilakukan ialah bahwa koordinasi bukan lagi fungsi, tetapi sudah menjadi jiwa dari manajemen, sehingga mulai dari perencanaanpun sudah dimulai.

2.2 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Merencanakan Kebutuhan Guru PNS

Pertama, koordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan, yaitu kepala-kepala sekolah TK, SD SMP, SMU, SMK diminta menyediakan data kondisi/kebutuhan guru-guru, dan merencanakan kebutuhannya dengan koordinasi UPT bagi TK dan SD, kemudian diverifikasi/divalidasi/direkonsiliasi bersama dalam suatu rapat koordinasi di kantor Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta. Bentuk koordinasinya berupa instruksi/permintaan, dan rapat koordinasi. *Kedua*, koordinasi eksternal dilakukan oleh kepala dinas dengan jajaran pemkot melalui BKD kota dan Kantor Kemenag Kota. BKD Kota Yogyakarta beserta jajaran Pemerintah Kota yang relevan, yaitu Bagian Organisasi Setda dan DPDPK Kota Yogyakarta, melakukan analisa beban kerja, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Analisa jabatan. Selanjutnya dikoordinasikan dengan BKD Pemerintah DIY, Disdik Pemerintah DIY, BKN dan Kemenegpan dan RB.

2.3 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Pengangkatan dan Penempatan Guru PNS

Pertama, koordinasi internal ketika pendaftaran, pelaksanaan/seleksi dilakukan ketika Dinas Pendidikan Kota diminta membantu menyediakan tempat untuk seleksi. *Kedua*, koordinasi eksternal dilakukan ketika pendaftaran, pelaksanaan/seleksi, pemberkasan dan penempatan. Ketika tahap ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan BKD, sedangkan BKD berkoordinasi dengan Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan, dengan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Kota Yogyakarta, dengan DPRD Kota Yogyakarta, BKD Provinsi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan KEMENEG PAN & RB.

2.4 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Pemindahan Guru PNS

Pertama, koordinasi internal dilakukan oleh Kepala Dinas/Kasubbag Kepegawaian Disdik Kota Yogyakarta ketika melakukan sosialisasi dan minta data tentang guru se Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hasil pembahasan di UPT kemudian diverifikasi/divalidasi/direkonsiliasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Kedua*, koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan BKD, Baperjakat, Kantor Kemenag Kota, Disdikpora Pemerintah DIY, Kemendiknas, Menegpan & RB, dan BKN. Koordinasi eksternal berlangsung setelah usulan disampaikan ke Walikota Yogyakarta melalui BKD untuk dibahas dalam suatu rapat koordinasi. Mutasi atau perpindahan guru PNS ada bermacam-macam, misalnya mutasi karena kenaikan jabatan, mutasi karena mendapat tugas

tambahan, mutasi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, mutasi dari satu tempat (sekolah) ke tempat (sekolah) lain, dan mutasi karena hukuman sebagai pembinaan dan mutasi untuk penataan dan pemerataan.

2.5 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Pemberian Penghargaan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan kepada Guru PNS

Pertama, koordinasi internal dilakukan ketika merencanakan pelatihan-pelatihan misalnya penulisan karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas, ketika membuat usulan ke BKD Kota Yogyakarta, dan melakukan program kemitraan untuk SMA dan SMK serta pemanfaatan MGMP, KKG. Pemberian perlindungan kepada guru dilakukan dengan uji kompetensi dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum di tingkat kota Yogyakarta, sesuai PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. *Kedua*, koordinasi eksternal dilakukan dengan BKD, selanjutnya BKD berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), LPMP, UNY, UGM, DPRD Kota Yogyakarta, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta, Kemeneg Pan & RB.

2.6 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Pembinaan dan Pengembangan Guru PNS

Pertama, koordinasi internal dilakukan ketika Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan perencanaan atau menentukan guru-guru yang akanikutsertakan dalam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Misalnya mereka yang harus segera naik pangkat, atau yang sudah menduduki golongan IV/a, dan ketika melaksanakan program kemitraan di SMA dan SMK. Demikian kalau ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru PNS, dan menetapkan menjatuhkan hukuman disiplin. Koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan BKD Kota Yogyakarta, Kemenag Kota Yogyakarta, LPMP, UNY, UGM, APIP, Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekretaris Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Tim Pencermatan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dan Dirjen PMPTK.

2.7 Temuan Penelitian Model Koordinasi Tahap Pemberhentian Guru PNS

Pertama, koordinasi internal dilakukan ketika jajaran Dinas pendidikan membuat usulan nominatif guru PNS yang akan berhenti atau diberhentikan. Mereka yang berkoordinasi yaitu atasan langsung Kepala Sekolah (bagi guru SMP, SMA, SMK), Kepala UPT bagi Guru TK dan SD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, personil Dinas Pendidikan Kota yang ditunjuk misalnya Kasubbag Kepegawaian, Tim Pemeriksa Dugaan terjadinya Pelanggaran yang dibentuk. *Kedua*, koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Walikota cq Kepala BKD, Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah dan BKN.

2.8 Temuan Penelitian Pengorbanan Profesionalisasi Melalui Politisasi guru PNS oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Tidak ditemukan pengorbanan profesionalisasi guru PNS melalui politisasi guru PNS, semuanya dilakukan secara profesional dan proporsional. Kritik bahwa pada era otonomi, ada politisasi berdasarkan kepentingan baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif, tidak terjadi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Mengapa demikian, karena para pejabat memegang teguh pada: (1) komitmen memisahkan kegiatan pendidikan dengan politik; (2) budaya atau kultur jawa bahwa jabatan adalah amanah yang pada saatnya harus dilepaskan; (3) aturan-aturan yang ada baik secara nasional maupun lokal.

2.9 Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Guru PNS

Temuan yang diperoleh, koordinasi pengelolaan guru PNS pendidikan dasar dan menengah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada era otonomi daerah telah berjalan dengan baik atau lancar. Hal ini disebabkan semua komponen menjalankan fungsinya sesuai dengan tiga komitmen, yaitu (1) memisahkan kegiatan pendidikan dengan politik; (2) budaya atau kultur jawa bahwa jabatan adalah amanah yang pada saatnya harus dilepaskan; dan (3) aturan-aturan yang ada baik secara nasional maupun lokal.

3. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Koordinasi internal dan eksternal telah dimulai pada tahap perencanaan kebutuhan guru. Abstraksi teoritis yang dapat dilakukan ialah bahwa koordinasi bukan lagi fungsi yang ada pada tahap pelaksanaan, tetapi sudah menjadi jiwa dari manajemen, ada dalam tiap tahapan manajemen.

Model Koordinasi Tahap Merencanakan Kebutuhan Guru PNS. Koordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan, yaitu kepala-kepala sekolah TK, SD SMP, SMU, SMK diminta menyediakan data kondisi/kebutuhan guru-guru, untuk merencanakan kebutuhannya kemudian diverifikasi/divalidasi/ direkonsiliasi bersama dalam suatu rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota. Koordinasi eksternal dilakukan dengan jajaran Pemkot melalui BKD dan Bagian Organisasi Setda dan DPDPK Kota Yogyakarta membuat analisa beban kerja, kemudian dirumuskan dalam bentuk Analisa jabatan. Hasil perhitungan, selanjutnya dikoordinasikan dengan BKD Pemerintah DIY, Disdik Pemerintah DIY, BKN dan Kemenegpan dan RB.

Model Koordinasi Tahap Pengangkatan dan Penempatan Guru PNS. Koordinasi internal ketika pendaftaran, pelaksanaan/seleksi, ketika Dinas Pendidikan Kota diminta membantu menyediakan tempat untuk seleksi. Koordinasi eksternal dilakukan ketika pendaftaran, pelaksanaan/seleksi, pemberkasan dan penempatan. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan BKD, sedangkan BKD berkoordinasi dengan Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan, dengan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Kota Yogyakarta, dengan DPRD Kota Yogyakarta, BKD Provinsi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemeneg PAN & RB.

Model Koordinasi Tahap Pemindahan Guru PNS. Koordinasi internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi dan minta data tentang guru se Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hasil pembahasan di UPT kemudian diverifikasi/divalidasi/direkonsiliasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan BKD, Baperjakat, Kantor

Kemenag Kota, Disdikpora Pemerintah DIY, Kemendiknas, Menegpan & RB, dan BKN.

Koordinasi Tahap Pemberian Penghargaan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan kepada Guru PNS. Koordinasi internal dilakukan ketika merencanakan pelatihan-pelatihan, membuat usulan ke BKD Kota Yogyakarta, dan melakukan program kemitraan untuk SMA dan SMK serta pemanfaatan MGMP, KKG. Pemberian perlindungan kepada guru dilakukan dengan uji kompetensi dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum di tingkat kota Yogyakarta, sesuai PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Koordinasi eksternal dilakukan dengan BKD, selanjutnya BKD berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah LPMP, UNY, UGM, DPRD Kota Yogyakarta, Kemenag Kota Yogyakarta, dan Kemeneg Pan & RB.

Model Koordinasi Tahap Pembinaan dan Pengembangan Guru PNS. Koordinasi internal dilakukan ketika Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan perencanaan atau menentukan guru-guru yang akanikutsertakan dalam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Kalau ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru PNS, dan menetapkan menjatuhkan hukuman disiplin. Koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan BKD Kota Yogyakarta, Kemenag Kota Yogyakarta, LPMP, UNY, UGM, APIP, Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekretaris Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Tim Pencermatan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dan Dirjen PMPTK.

Model Koordinasi Tahap Pemberhentian Guru PNS. Koordinasi internal dilakukan ketika jajaran Dinas Pendidikan Kota (Kepala Sekolah Kepala UPT, Pendidikan Kota Yogyakarta, Tim Pemeriksa) memeriksa dugaan terjadinya pelanggaran. Koordinasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Walikota cq Kepala BKD, Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah dan BKN.

Pengorbanan Profesionalisasi Melalui Politisasi guru PNS oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak ditemukan pengorbanan profesionalisasi guru PNS melalui politisasi guru PNS, semuanya dilakukan secara professional dan

proporsional. Politisasi kepada guru PNS berdasarkan kepentingan elit politik maupun elit eksekutif, tidak terjadi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sebabnya, para pejabat memegang teguh pada: (1) komitmen memisahkan kegiatan pendidikan dengan politik; (2) budaya atau kultur jawa bahwa jabatan adalah amanah yang pada saatnya harus dilepaskan; (3) aturan-aturan yang ada baik secara nasional maupun lokal.

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan guru PNS pendidikan dasar dan menengah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada era otonomi daerah telah berjalan dengan baik atau lancar. Yang menyulitkan kadang ada aturan atau kebijakan pusat yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah.

3.2 Saran

Koordinasi baik internal maupun eksternal hendaknya tetap dilakukan pada setiap tahap penelolan guru PNS, sebagaimana telah dilakukan.

Sepanjang ada kabupaten/kota memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka model ini dapat diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tersebut.

Perlu dilakukan penelitian dan perbaikan regulasi/kebijakan agar sesuai dengan kepentingan daerah. Misalnya di daerah banyak guru yang pensiun (kota Yogyakarta tahun 2014 ada 240 guru pensiun), tetapi tidak memperoleh jataah formasi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi daerah*. Bandung: Alfabeta
- Irwanto, 2006. Focused group discussion (FGD). Sebuah Pengantar Praktis. Jakarta: Obor.
- Krueger, Richard A. (1994). *Focus groups: A practical guide for applied research* (2 nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
<http://www.slideshare.net/nicoletanpang/focus-group-discussion-fgd> (diunduh 10 Desember 2010).
- Mitchell, Betsy, t.th. *Focus Groups – Key Activity Checklist*.
<http://www.orau.gov/cdcynergy/cdcynergy30/default.htm> (diunduh 20 Desember 2010).
- Nastution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tasito.

- Noeng Muhadjir. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi V Revisi. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Slamet, PH. 2005. *Pengembangan Kapasitas Untuk Mendukung Desentralisasi Pendidikan Kejuruan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- , 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bahan Sosialisasi, Workshop dan Pelatihan Direktorat Pembinaan SMP 2007. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- , 2008. *Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Handout 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- , 2008. *Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Handout 2*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- , 2012. *Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan*. Makalah Seminar ISPI-Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 21-22 Januari 2012. Yogyakarta: ISPI DIY.
- Sudarmo, Sri Probo dan Sudjana, Brasukra G. 2009. *The Missing Link. The Province and Role in Indonesia's Decentralisation*. Jakarta: United Nations Development Programme-Indonesia.
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Depdagri.

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Mami Hajaroh

Abstrak

Pendidikan dipandang sebagai strategi yang paling efektif dalam membangun kehidupan yang bekesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah mengeluarkan Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam permendiknas ini menyebutkan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Untuk mengimplementasikan permendiknas ini diperlukan pemahaman dan ketrampilan dalam melakukan analisis kebijakan oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) pendidikan. Juga pemahman terhadap pengarusutamaan gender dan alur analisis gender (*gender analysis pathway*) dalam perencanaan lkebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Kebijakan, Pendidikan

1. Latar Belakang

Sebagian masyarakat kita memahami gender identik dengan perempuan. Sehingga sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa memperbincangkan gender adalah memperbincangkan perempuan dan dilakukan oleh perempuan saja. Sebagian lagi memandang gender sama dengan emansipasi wanita, sebuah upaya membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki dan karena itu pejuang gender mesti ditentang oleh laki-laki. Belum dipahaminya konsep gender secara benar oleh masyarakat ini juga menimbulkan sikap sinis baik dari perempuan maupun laki-laki jika mendengar tentang gender.

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Secara umum gender didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas sosial masyarakat.

Perbedaan gender laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan masalah. Namun perbedaan laki-laki dan perempuan dipermasalahkan karena dipandang relasi

antara keduanya melahirkan ketidakadilan gender. ketidakadilan gender termanifestasi dalam bentuk diskriminasi, stereotipi, beban ganda, marginalisasi maupun Bentuk-bentuk ketidakadilan ini lebih banyak berdampak negatif terhadap perempuan. Dan hal ini menjadi masalah. Untuk itu penting upaya mengeliminasi kesenjangan yang terjadi antar gender tersebut melalui kebijakan guna mengatasi masalah tersebut. dengan kebijakan diharapkan tercapai tujuan relasi laki-laki dengan perempuan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Upaya pemerintah mewujudkan relasi kehidupan yang setara dan adil gender dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender mainstreaming*) dalam Pembangunan Nasional pada tanggal 19 Desember 2000. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjut Inpres no 9 tahun 2000 tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjutnya, yakni Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pedoman Umum pelaksanaan PUG di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangun-

an, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pendidikan dipandang sebagai strategi yang paling efektif dalam membangun kehidupan yang bekesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk mewujudkan itu maka dikeluarkan Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Permendiknas ini menyebutkan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Dengan adanya Permendiknas No. 84 tahun 2008 semestinya Kebijakan pendidikan pasca tahun 2008 telah mengintegrasikan responsif gender dalam kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun tingkat satuan pendidikan. Apabila kebijakan pendidikan belum mengimplementasikan PUG setelah permendiknas No. 84 tahun 2008, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kalangan pembuat kebijakan pendidikan (*policy maker*) mungkin belum memahami tentang PUG, atau bisa jadi belum paham bagaimana mengimplementasikan PUG dalam analisis kebijakan untuk pembuatan kebijakan pendidikan (*analysis for policy*) yang berbasis responsif gender.

2. Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pendekatan baru dalam pembangunan yang berperspektif gender. Strategi ini berupaya menjawab adanya ketidakadilan gender dengan mengintegrasikan kerangka analitis gender yaitu kerangka konseptual yang dilandasi

kesadaran adanya kemungkinan perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki di dalam setiap tahap pembangunan di berbagai sektor maupun lintas sektor. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan memperhatikan kemungkinan perbedaan tersebut. Dalam manual petunjuk implementasi gender mainstreaming dalam pembangunan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2002 : 4) disebutkan:

Gender mainstreaming is one of the development strategies performed to achieve gender equality and gender equity, through the integration of women and men experiences, aspirations, needs, and issues in the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policy, programs, projects, and activities in various life and development fields. The objectives of gender mainstreaming are to make certain both women and men have equal access to, participate in, control over, and gain benefit from development. By performing gender mainstreaming, gender gap can be identified which led the rising of gender issues. Thus, the final objective of gender mainstreaming is to narrow and even to erase gender gap.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek gender yakni melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subyek dan obyek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan (Ernanti, 2003:7). Tujuan pengarusutamaan gender sebagaimana tertuang dalam Inpres no. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah: Terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan strategi pembangunan ini dapat untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan :

- a. Berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan
- b. Mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya
- c. Memiliki peluang yang sama dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan.
- d. Memperoleh keuntungan/*benefit* yang sama dalam pembangunan

Dengan demikian kesenjangan gender dapat dipersempit bahkan ditiadakan sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pengarusutamaan gender.

Strategi *Gender Mainstreaming*/ pengarusutamaan gender diperluas pada responsif gender (*Gender-Responsif*) dalam pengembangan kebijakan, program, proyek, dan aktifitas yang mempersempit kesenjangan gender yang mendorong pada perwujudan kesetaraan dan keadilan gender (*equality and equity gender*). Disamping itu strategi Gender Mainstreaming meningkatkan akuntabilitas pemerintah (*Minister of Women Empowerment, 2002: 4*).

<i>analysis for policy</i>			<i>analysis of policy.</i>	
<i>Policy advocacy</i>	<i>Information for policy</i>	<i>Policy monitoring and evaluation</i>	<i>Analysis of policy deternimation</i>	<i>Analysis of policy content</i>

Gordon (1997) dalam Bell and Stevensen (2006: 10) dari Gordon (1997)

Berbagai tipe analisis kebijakan tersebut adalah:

- a. *Policy advocacy* berkenaan dengan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan (*promote and advance*) satu kebijakan yang spesifik atau satu set kebijakan.
- b. *Information for policy* adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan kepada *polycymaker* informasi dan advice yang akan menjadi alasan pada kebutuhan tindakan dan mungkin mengantarkan pada kebijakan baru atau modifikasi dari kebijakan yang sudah ada.
- c. *Policy monitoring and evaluation* merupakan bentuk umum penelitian kebijakan ini, terutama dalam iklim sekarang dari level tinggi secara akuntabilitas dan

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan pada level nasional akan memperoleh kepercayaan baik oleh dunia internasional maupun nasional. Artinya ratifikasi yang telah dilakukan pemerintah terhadap konvensi hak-hak perempuan telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu secara nasional, berarti pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Yang kesemuanya itu tentunya tanpa membedakan seluruh warga negara dalam perspektif gender.

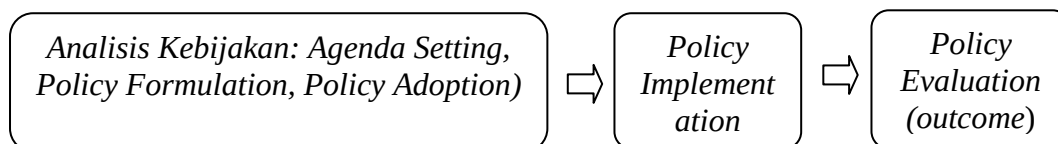
3. Analisis Kebijakan

Policy analysis dapat dilakukan pada berbagai bentuk sebagaimana di tulis oleh Gordon (1997) dalam Bell and Stevensen (2006: 10) yang mengidentifikasi beberapa tipe dari riset kebijakan yakni *analysis for policy* dan *analysis of policy*. Menurut Bell and Stevensen (2006: 10-12) menuliskan berbagai tipe dari analisis kebijakan.

- d. *Analysis of policy deternimation* menekankan pada proses kebijakan tidak pada dampak kebijakan tetapi bagaimana kebijakan dikembangkan dalam dengan cara yang tepat.
- e. *Analysis of policy content* merupakan riset yang dilakukan untuk kepentingan akademik lebih dari dampak publik.

Dalam analisis konten menekankan pada pemahaman asal usul, tujuan dan pembedahan terhadap kebijakan yang spesifik. Tipe umum yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan format studi kasus dan muncul pertanyaan penting tentang kelayakan dari metode dalam riset kebijakan.

Analisis Kebijakan (*Analysis for Policy*) dapat juga dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun atau mengembangkan kebijakan. Analisis untuk kebijakan merupakan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu data-data penelitian digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan.



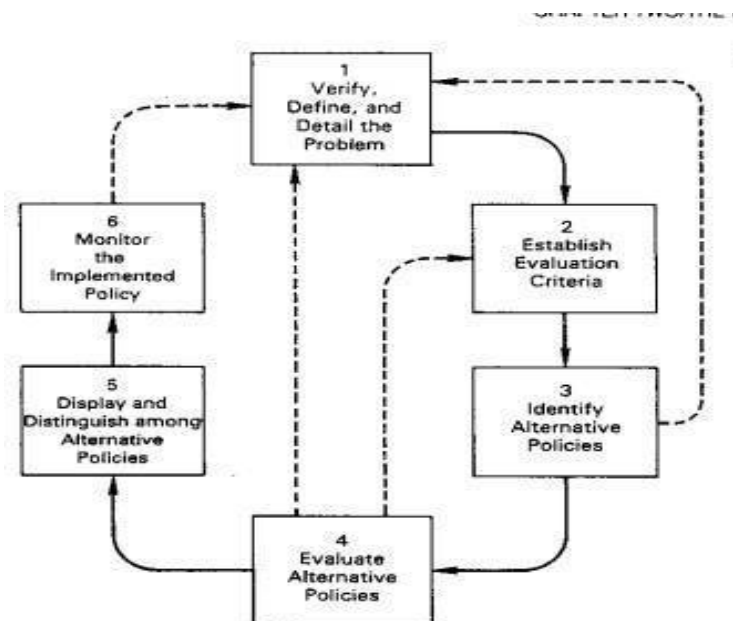
Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan. Dalam tahap ini masalah didefinisikan dan di berikan solusi pemecahannya melalui kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki (1993:53) analisis kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Verify, Define, and Detail the problem*
- b. *Establish Evaluation Criteria*
- c. *Identify Alternative Policies*

- d. *Evaluate Alternative process*
- e. *Display and Distinguish among Alternative Policies*
- f. *Monitor and Implemented Policy.*

Tahap-tahan analisis kebijakan ini bukan merupakan proses yang bersifat linier tetapi merupakan proses yang bersifat siklik. Proses siklik tersebut oleh Patton dan Sawicki digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Basic Policy Analysis Process (Patton and Sawicki, 1993:53)

Tahap analisis yang dimulai dengan melakukan verifikasi, definisi dan mendetailkan problem yang membutuhkan kebijakan, menetapkan kriteria evaluasi,

mengidentifikasi kebijakan alternatif, mengevaluasi kebijakan alternatif, mendisplay dan membedakan antar kebijakan alternatif sampai tahap monitoring dan implementasi

kebijakan. Setelah tahap Monitor dan Implementasi kebijakan akan kembali ke tahap awal melakukan verifikasi, definisi dan mendetailkan problem yang membutuhkan kebijakan. Tahapan analisis kebijakan ini semestinya dilakukan oleh pembuat kebijakan baik di tingkat satuan pendidikan, pemda kabupaten/kota, pemda propinsi maupun tingkat nasional ketika membuat perencanaan kebijakan pendidikan.

4. Membuat Perencanaan Kebijakan Pendidikan Responsif Gender.

Responsif gender (*Gender-responsif*) adalah perencanaan yang disusun dengan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman, cita-cita, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dari laki-laki dan perempuan dalam proses formulasi kebijakan. Untuk itu menyusun sebuah perencanaan yang responsif gender, penting untuk melengkapinya dengan analisis gender pada setiap pengembangan kebijakan, program, proyek dan aktifitas. Makna dari kebijakan adalah semua kebijakan mikro dan makro, kebijakan nasional, kebijakan propinsi dan kebijakan regional (*Minister of Women Empowerment, 2002: 8*).

Dalam menyusun perencanaan untuk mengembangkan kebijakan, program, proyek dan aktifitas, dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)*. GAP adalah salah satu perangkat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS yang dapat digunakan untuk membantu perencana dalam menyusun gender mainstreaming dalam perencanaan pengembangan kebijakan, program, proyek dan aktifitas. Dengan menggunakan GAP perencana kebijakan, program, proyek dan aktifitas dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan isu-isu gender dan juga memformulasikan perencanaan kebijakan, program, praktek dan aktifitas yang diarahkan pada mempersempit atau menghapus kesenjangan gender.

GAP dibangun dengan menggunakan metodologi yang simpel dan mudah dipahami oleh perencana. Terdapat 8 langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan GAP. Langkah-langkah itu dikelompokkan dalam 3 fase:

- Analisis Kebijakan Responsif Gender.
- Perumusan Kebijakan Responsif Gender.
- Rencana Tindakan Responsif Gender.

Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai salah satu perangkat analisis gender dapat digunakan untuk membantu perencana dalam menyusun *gender mainstreaming* dalam perencanaan pengembangan kebijakan, program, proyek dan aktifitas, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagai tindak lanjut Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjutnya, yakni Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pedoman Umum pelaksanaan PUG di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Secara nasional dalam hal akses terhadap layanan pendidikan, penduduk laki-laki dan perempuan sudah memiliki peluang yang hampir setara. Namun kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah. Dalam proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar sepenuhnya responsif gender. Seperti proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan, juga materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender atau netral gender. Selain itu lingkungan fisik sekolah juga belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. Pengelolaan pendidikan perlu dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang

seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Dengan melaksanakan PUG Bidang Pendidikan ini diharapkan seluruh aspek pembangunan pendidikan menjadi responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

Dalam permendiknas No. 84 tahun 2008 disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan yang responsif gender pada berbagai tingkatan, yakni pelaksana di Propinsi, pelaksana di Kabupaten/kota dan pelaksana pada tingkat satuan pendidikan. Pelaksana di propinsi adalah gubernur sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya Gubernur menetapkan Dinas Pendidikan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi. Salah satu tugasnya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Pendidikan di provinsi yang mencakup: PUG dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan; PUG dalam siklus pembangunan bidang pendidikan; penguatan kelembagaan PUG Bidang Pendidikan; dan penguatan peran serta masyarakat untuk pendidikan, serta mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan penggerak kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

Sedangkan pelaksana PUG di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di kabupaten/kota. Tanggung jawab Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dalam penyelenggaraan kabupaten/Kota adalah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota yang memuat: PUG dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan; PUG dalam pembangunan bidang pendidikan; penguatan kelembagaan PUG Bidang Pendidikan; dan peran serta masyarakat bidang pendidikan.

Pelaksana PUG di tingkat Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab dalam

penyelenggaraan Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di unit kerjanya. Untuk pelaksanaan PUG pada tingkat satuan pendidikan penting untuk membuat setiap perencanaan kebijakan di sekolah memperhatikan kebutuhan gender. Untuk itu pemahaman mengenai proses analisis kebijakan pendidikan dan konsep pengarusutamaan gender dalam pendidikan harus dimiliki oleh para pembuat kebijakan pendidikan dan penentu keputusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Pembuat kebijakan (*policy maker*) di tingkat satuan pendidikan semestinya menguasai setiap tahapan dari analisis kebijakan pendidikan yang responsif gender. Hanya seberapa *policy maker* dan *decition maker* kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan menguasai *gender analysis pathway* penting untuk diungkap agar praktek analisis kebijakan dapat dimonitoring dan dievaluasi.

Dengan adanya Permendiknas No 84 tahun 2008 tersebut penting bagi seluruh jajaran tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan memahami *Gender Analysis Pathway* sebagai alat untuk melakukan analisis dalam rangka implementasi PUG dalam pendidikan. Dengan menggunakan GAP perencanaan kebijakan, program, proyek dan aktifitas pendidikan di berbagai tingkat dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan isu-isu gender dan juga memformulasikan perencanaan kebijakan, program, praktek dan aktifitas yang diarahkan pada mempersempit atau menghapus kesenjangan gender dalam bidang pendidikan.

Analisis kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang adil gender merupakan bagian penting dari proses eliminasi kesenjangan gender. Dengan analisis kebijakan pendidikan yang menggunakan GAP (*gender analysis pathway*) maka kebijakan, program, proyek dan aktifitas pada tingkat satuan pendidikan diharapkan lebih adil gender.

5. Kesimpulan

Upaya pemerintah mewujudkan relasi kehidupan yang setara dan adil gender dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender mainstreaming*) dalam Pembangunan Nasional pada tanggal 19 Desember 2000. Pengarusutamaan Gender

merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai strategi yang paling efektif dalam membangun kehidupan yang bekesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah mengeluarkan Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam permendiknas ini menyebutkan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

Untuk mengimplementasikan permendiknas ini diperlukan pemahaman dan ketrampilan dalam melakukan analisis kebijakan oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) pendidikan. Juga pemahaman terhadap pengarusutamaan gender dan alur analisis gender (*gender analysis pathway*) dalam perencanaan kebijakan pendidikan. GAP adalah salah satu perangkat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencana dalam menyusun gender mainstreaming dalam perencanaan pengembangan kebijakan, program, proyek dan aktifitas pendidikan. Dengan menggunakan GAP perencana kebijakan,

program, proyek dan aktifitas dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan isu-isu gender dan juga memformulasikan perencanaan kebijakan, program, praktek dan aktifitas yang diarahkan pada mempersempit atau menghapus kesenjangan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, less and Stevenson, Howard. 2006. *Education Policy: Proses, Theme and Impact*. London and new york: Routledge.
- Ernanti Wahyurini, dkk. 2003. *Pastikan partai anda jadi pilihan*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan.
- Minister of Women Empowerment. 2002. *The Manual of implemetation guidelines on gender mainstreaming in national development*. as an annex of Circular of Minister of Women Empowerment no. B-89/Men.PP/Dep.II/IX/2002, dated September 4, 2002.
- Patton, Carol V., and Sawicki, David S. 1993. *Basic mehod Of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Permendagri no 15 tahun 2008 tetang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

PERAN GURU SEBAGAI INTELEKTUAL TRANSFORMATIF UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS

Rukiyati

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
ruki1961@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan pada hakikatnya adalah wahana mengasah sikap kritis dan politis peserta didik untuk menciptakan masyarakat demokratis yang sesungguhnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal selama ini lebih dimaknai sebagai penerus *status quo*, tetapi sesungguhnya peran sekolah dapat lebih bermakna, yaitu sebagai ruang publik yang demokratis, yang di dalamnya guru berperan penting sebagai intelektual transformatif. Dalam konteks transformasi, guru bertindak sebagai perancang kondisi kelas dan pembimbing bagi peserta didik untuk terlibat dalam dialog kritis yang menyadarkan siswa akan perannya saat ini dan di masa depan dalam masyarakat demokratis. Guru dapat berperan sebagai intelektual ketika sistem persekolahan memberi peluang guru untuk berbeda, berkreasi dan berinovasi dengan berbasis pada pengetahuan multikultural.

Kata kunci: peran guru, intelektual transformatif, sekolah.

1. Pendahuluan

Pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ketika seorang anak manusia lahir ke dunia, ia dibekali dengan berbagai potensi yang harus diakutualisasikan. Proses aktualisasi potensi secara sengaja inilah yang merupakan proses pendidikan. Thomas Armstrong (2006: 39) mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan peserta didik sebagai manusia yang utuh (*a whole human being*). Sejalan dengan itu, Muchtar Buchori (2001:50) berpendapat bahwa peserta didik harus dipersiapkan untuk menghadapi tiga tugas kehidupan, yaitu: 1. Untuk dapat hidup (*to make a living*); 2. Untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meeningful life*); 3. Untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*).

Selanjutnya, Gerald L. Gutek (1988: 4) mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian yang sangat luas adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Spesies manusia secara biologis melakukan reproduksi sebagaimana halnya makhluk hidup lainnya, tetapi dengan hidup dan berpartisipasi dalam sebuah kebudayaan, manusia secara bertahap mengalami proses "menjadi" sebagai penerima dan partisipan dalam sebuah kebudayaan.

Gutek juga mengatakan bahwa pendidikan dalam arti yang lebih formal dan sempit terjadi di sekolah, yaitu suatu agensi khusus yang dibentuk untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Di sekolah terdapat guru-guru yang dipandang ahli dalam proses pembelajaran. Program pengajaran, kurikulum dan metode mengajar harus dikaitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang mengidealkan demokrasi, sudah sewajarnya bila diharapkan pihak sekolah dan guru yang terlibat di dalamnya berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan mengoptimalkan peran guru di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Peran guru dan sekolah demikian penting dalam upaya menciptakan masyarakat demokratis sesungguhnya. Salah satu gagasan penting tentang peran guru dan sekolah dalam mewujudkan masyarakat demokratis adalah guru sebagai intelektual transformatif dan sekolah sebagai ruang publik belajar demokrasi. Pemikiran ini dikemukakan oleh Henry Giroux, seorang pemikir pedagogi kritis murid Paulo Freire. Bagaimana fungsi sekolah sebagai ruang publik untuk belajar demokrasi? Bagaimana peran guru sebagai intelektual transformatif di sekolah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dijawab di dalam tulisan ini.

2. Pembahasan

2.1 Sekolah sebagai ruang publik untuk belajar demokrasi

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi penciptaan kemampuan warga negara yang kritis di dalam suatu masyarakat demokratis. Terlebih lagi ketika warga negara harus berhadapan dengan tantangan masyarakat dan penguasa yang mengesahkan korupsi, kerakusan dan ketidakadilan (Giroux, 2010: 3). Pendidikan harus dipandang sebagai praktik moral dan politis yang selalu menyangsikan apa-apa yang membentuk pengetahuan, nilai-nilai, kewargaan, cara-cara memahami dan pandangan tentang masa depan.

Pendidikan hendaknya dipahami sebagai pedagogi kritis dan sekolah harus menjadi ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik dapat belajar pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja atau sebagai lembaga garis depan dalam pertempuran pasar internasional dan kompetisi asing. Sekolah justru memberikan syarat material dan ideologis yang penting untuk mendidik seorang warga negara dalam dinamika keberaksaraan kritis dan keberanian warga. Fungsi sekolah yang demikian ini akan menjadi basis untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam masyarakat demokratis (Giroux, 1988: 5).

Pandangan tentang fungsi sekolah dalam mewujudkan masyarakat demokratis bukanlah hal baru dalam pemikiran pendidikan. Apa yang disampaikan oleh Giroux sebenarnya diilhami pemikiran Dewey tentang demokrasi (1916: 45), tetapi dalam beberapa hal melampaui pandangan Dewey. Wacana demokrasi, baik sebagai acuan bagi kritik maupun sebagai hal ideal mendasarkan pada pengertian dialektis dari hubungan sekolah dan masyarakat; sebagai referensi bagi kritik, teori dan praktik demokrasi,

Untuk memperdalam pemahaman, dapat dikemukakan ilustrasi sebuah model analisis bagaimana sekolah-sekolah selama ini telah menghalangi dimensi ideologis dan dimensi material dari demokrasi.

Fenomena sekolah-sekolah yang ada baik di negara maju maupun negara berkembang justru merupakan representasi dominasi dibandingkan representasi demokrasi. Dominasi tampak dalam berbagai bentuk: pengetahuan, organisasi sekolah, ideologi guru dan hubungan guru-siswa. Sekolah memproduksi masyarakat yang lebih luas sambil juga memberikan ruang untuk mempertahankan logika dominasinya.

Sebagai sebuah ideal, seharusnya sekolah berfungsi untuk memberdayakan peserta didik dengan memberikan mereka pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkannya untuk mampu berfungsi dalam masyarakat yang lebih luas sebagai agen kritis. Selain itu, sekolah juga berfungsi untuk memberikan bekal bagi peserta didik untuk melakukan aksi transformatif. Transformasi artinya adalah perubahan positif ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan yang dinamis dan meningkat dalam hal transformasi sosial ekonomi, budaya, bahkan transformasi dunia-akhirat (Prayitno, 2009: 250-251) dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal ini, sekolah berfungsi sebagai ruang bagi upaya mendidik siswa untuk mengambil resiko, untuk berjuang bagi perubahan kelembagaan, dan berjuang melawan penindasan dalam arena sosial yang lebih luas. Implikasinya, mewujudkan demokrasi memerlukan dua perjuangan: pemberdayaan pedagogis dan transformasi pedagogis. Sekolah adalah tempat penting yang mewakili perjuangan itu. Sekolah sebagai ruang publik yang demokratis dibangun untuk membuka pertanyaan kritis peserta didik yang menghargai dialog bermakna dan sebagai agensi kemanusiaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi sekolah sebagai ruang publik demikian penting untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang kritis dan transformatif untuk mewujudkan kehidupan demokratis yang sesungguhnya.

2.2 Guru sebagai Intelektual Transformatif

Sekolah sebagai ruang publik bagi pembelajaran kritis dan demokrasi tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika guru tidak mempunyai komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab untuk mewujudkan proses pembelajaran dalam situasi pendidikan yang demokratis pula. Kekuatan pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Prayitno (2009: 219) justru terletak pada terjadinya sinergi

optimal dari tiga kekuatan: peserta didik, lingkungan (sekolah) dan pendidik. Ketiganya saling memperkuat. Apabila proses pembelajaran hendak dibina dengan energi yang tinggi, maka ketiga komponen pendidikan itu harus menjadi perhatian penuh. Guru adalah ahli yang bertanggung jawab menyatukan dan memanfaatkan sebesar-besar kepentingan perkembangan peserta didik melalui proses pembelajaran. Bagaimanapun kondisi peserta didik, tetaplah guru bertanggung jawab untuk memanfaatkan energi yang ada dalam diri peserta didik agar menjadi optimal. Guru di dalam mengajar bersifat mengarahkan bagi berbagai upaya membentuk peserta didik sebagai agen khusus pembaharuan dan memperluas pemahaman mereka, khususnya tentang tugas masa kini dan masa depan yang akan dihadapi. Dalam kaitan inilah guru berperan sebagai intelektual transformatif.

Guru berperan sebagai intelektual menjalankan tugas mendidik dengan syarat tertentu. Ia merumuskan suatu fungsi sosial dan politis, membentuk basis bagi pemberdayaan peserta didik dan perluasan praktiknya sebagai intelektual. Terkait dengan peran tersebut, Giroux (1988:16) mengatakan bahwa:

"Academic labor at its best flourishes when it is open to dialogue, respects the time and conditions teachers need to prepare lessons, research, cooperate with each other and engage valuable community resources. Put differently, teachers are the major resource for what it means to establish the conditions for education to be linked to critical learning rather than training, embrace a vision of democratic possibility rather than a narrow instrumental notion of education and embrace the specificity and diversity of children's lives rather than treat them as if such differences did not matter. Hence, teachers deserve the respect, autonomy, power and dignity that such a task demands."

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan akademik berjalan sangat baik ketika terbuka bagi dialog, dengan melihat kondisi yang ada guru mempersiapkan pelajaran, penelitian dan bekerja sama dengan sesama guru serta ikut aktif dalam suatu komunitas untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Guru itu sendiri adalah sumber daya utama untuk

mempertahankan kondisi pendidikan agar tetap melaksanakan pembelajaran kritis, bukan sekedar pelatihan. Pembelajaran kritis memungkinkan bagi visi demokrasi, bukan dalam arti pendidikan sebagai instrumen sempit. Pembelajaran kritis menghargai keunikan dan keragaman hak hidup peserta didik, daripada memperlakukan mereka seolah-olah perbedaan itu tidak masalah. Jadi, guru berhak mendapatkan respek, otonomi, kekuasaan dan martabat karena tuntutan tugas yang diembannya.

Dalam kondisi yang terburuk, guru hanya dipandang sebagai penjaga gerbang yang sifatnya hanya mengontrol peserta didik. Yang terbaik, guru merupakan profesi yang sangat dihargai, karena telah mendidik generasi masa depan dengan berbagai wacana, nilai-nilai, dan hubungannya dengan pemberdayaan yang demokratis. Guru tidak sekedar dipandang sebagai teknisi yang tidak disenangi; tetapi guru harus menjadi intelektual yang berkehendak membuat kondisi kelas yang dapat memberikan pengetahuan, keahlian dan budaya bertanya yang dibutuhkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam dialog kritis dengan masa lalu, otoritas, dan perjuangan terus menerus dengan relasi kekuasaan. Guru mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang aktif dalam inter-relasinya dengan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global.

Dengan guru sebagai intelektual, siswa dapat dibimbing untuk belajar wacana tentang organisasi umum dan tanggung jawab sosial. Wacana yang demikian ini menangkap kembali ide tentang demokrasi kritis sebagai sebuah gerakan sosial yang mendukung kebebasan individu dan keadilan sosial. Lebih lanjut, meninjau sekolah sebagai ruang publik yang demokratis memberikan sebuah alasan logis untuk mempertahankannya karena sejalan dengan bentuk-bentuk pedagogi yang progresif dan guru bekerja mengambil bagian atau peran penting di dalamnya. Praktik guru ditunjukkan sebagai layanan jasa publik yang penting.

Guru harus mampu untuk mengkonstruksi cara-cara yang melibatkan waktu, ruang, aktivitas dan pengetahuan diorganisasikan dalam kehidupan sekolah setiap harinya. Guru harus menciptakan syarat struktural dan ideologis yang dibutuhkan untuk dirinya agar dapat menulis, meneliti dan bekerja dengan orang lain dalam

menghasilkan kurikulum yang baik dan kekuatan bersama. Guru perlu mengembangkan sebuah wacana dan menentukan asumsi bahwa mereka dibolehkan untuk menjalankan fungsinya secara lebih khusus yaitu sebagai intelektual transformatif. Sebagai intelektual, mereka mengkombinasikan refleksi dan aksi untuk kepentingan pemberdayaan siswa dengan kecakapan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melenyapkan ketidakadilan dan untuk menjadi pelaku kritis yang teguh mengembangkan sebuah dunia yang bebas dari penindasan dan eksploitasi. Intelektual yang demikian sekaligus memperhatikan prestasi individual siswa atau memajukan siswa mencapai tangga karir, dan memperhatikan sekali upaya pemberdayaan siswa sehingga mereka dapat membaca dunia dengan kritis dan mengubahnya bila diperlukan.

Dalam melaksanakan perannya sebagai intelektual transformatif, guru perlu melakukan suatu tindakan yang disebut Paulo Freire sebagai *tindakan belajar* (2006: 23). Bagi Freire, belajar adalah sebuah tugas sulit yang memerlukan sikap kritis sistematis dan disiplin intelektual yang hanya bisa diperoleh melalui praktik. Lebih lanjut, Freire mengemukakan bahwa mendasari sifat-sifat praktik ini adalah dua asumsi pendidikan penting. Pertama, pembaca teks (peserta didik yang sedang membaca teks) berasumsi tentang peran subjek di dalam tindakan belajar. Kedua, tindakan belajar tidak semata-mata merupakan hubungan dengan perantara teks; sebaliknya, di dalamnya terkandung pengertian yang luas bahwa tindakan belajar ini merupakan sebuah sikap terhadap dunia.

Belajar memerlukan pemahaman tentang pengondisian historis pengetahuan. Belajar adalah sebuah bentuk penemuan kembali, penciptaan kembali, penulisan kembali, dan semua ini adalah tugas subjek bukan objek. Lebih jauh, dengan pendekatan ini pembelajar sebagai pembaca tidak bisa memisahkan dirinya sendiri dari teks karena ia akan mengakui sikap kritis terhadap teks. Oleh karena tindakan belajar adalah sikap terhadap dunia, maka tindakan belajar tidak bisa direduksi menjadi hubungan pembaca dengan buku atau pembaca dengan teks. Pada kenyataannya, sebuah teks mencerminkan konfrontasi penulis dengan dunia. Teks mengungkapkan konfrontasi ini. Seseorang yang belajar tidak akan pernah berhenti

melainkan selalu ingin tahu tentang orang lain dan realitas. Mereka adalah orang-orang yang bertanya, mereka yang berusaha menemukan jawaban dan mereka yang terus melakukan pencarian.

2.3 Tantangan yang Dihadapi Guru

Guru berperan sebagai intelektual transformatif adalah sebuah ideal, tetapi banyak tantangan yang dihadapi. Tidak sedikit kurikulum sekolah yang ada di berbagai negara selama ini hanya sebagai alat mereproduksi nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan masyarakat dominan (kapitalis) sejak awal abad 20. Teori dan desain kurikulum secara tradisional mengacu pada rasionalitas teknokratis. Bentuk rasionalitas seperti inilah yang telah mendominasi bidang kajian kurikulum sejak awal dengan berbagai varian dalam karya-karya Tyler, Taba, Saylor dan Alexander, Beauchamp dan yang lain. William Pinar mengatakan bahwa 85-95 persen dari ahli kurikulum memberikan perspektif kajian yang menunjukkan dominasi berpikir rasionalitas teknokratis. Para ahli kurikulum dipengaruhi oleh perkembangan ilmu manajemen sejak tahun 20-an dan peletak dasar awal ahli kurikulum seperti Bobbit dan Charters yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Metafora sekolah sebagai pabrik memiliki sejarah panjang dalam kajian kurikulum. Akibatnya, moda bernalar, *inquiry*, karakteristik penelitian dalam bidang kurikulum dibangun dengan model yang didasari asumsi-asumsi dalam sains yang terikat pada prinsip-prinsip prediksi dan kontrol (Giroux, 1988: 12).

Sebenarnya sekolah-sekolah mampu berbuat lebih baik dari itu dan memang ada kemungkinan untuk itu di samping juga bahayanya. Untuk menghadapi tantangan semacam itu, para pendidik kritis harus mengembangkan sebuah wacana kritis yang dapat digunakan untuk meneliti fungsi sekolah selama ini, yaitu sekolah sebagai wujud material dan ideologis sebuah jaringan hubungan kompleks di antara budaya dan kekuasaan, juga sebagai tempat persaingan yang terbangun secara sosial, dan aktif terlibat di dalam produksi pengalaman-pengalaman yang dihayati.

Biasanya, penguasa berusaha melanggengkan tatanan yang diinginkan dengan cara manajemen kontrol di sekolah. Para birokrat dan kepala sekolah tidak hanya

menggunakan waktu untuk solusi masalah-masalah administrasi dan kontrol, mereka juga cenderung mengevaluasi elemen-elemen lain, seperti kinerja para guru. Kriteria evaluasi berkaitan dengan: 'Apakah kinerja dan kemampuan mereka dapat mempertahankan tatanan yang ada? Apakah para guru memberikan sumbangan atau gagal memberi sumbangan pada pemeliharaan tatanan yang ada tersebut? Di dalam wacana ini pengalaman guru bersama peserta didik tidak begitu penting. Pengalaman tersebut justru direduksi menjadi perantaraan kinerja guru dan hanya berarti bila dapat diukur, dijalankan, didaftar, dan dikontrol. Kekhasannya, putusannya, kualitasnya yang telah dihayati; semuanya dilarutkan di dalam ideologi kontrol dan manajemen. Masalah penting yang berhubungan dengan sudut pandang ini adalah bahwa para guru yang sepaham dengan sistem pengetahuan yang disusun semacam itu tidak menjamin para siswa akan memiliki ketertarikan pada praktek pendidikan yang dihasilkan, terutama karena pengetahuan tampak tidak banyak berhubungan dengan pengalaman-pengalaman keseharian para siswa itu sendiri. Lebih jauh, para guru yang bertindak sebagai intelektual transformatif biasanya menghadapi banyak masalah di sekolah-sekolah negeri, terutama sekolah-sekolah di perkotaan. Kebosanan belajar tampak menjadi ciri utamanya.

Tak dapat dipungkiri bahwa guru yang tidak menjalankan peran intelektual transformatif itu sendiri adalah korban dari sistem yang ada (dominan). Berbagai model akuntabilitas, manajemen sesuai dengan tujuan, materi kurikulum yang telah teruji, dan persyaratan sertifikasi yang dimandatkan oleh negara merupakan contoh-contoh dari sistem kontrol yang ada. Yang jelas, dengan kontrol ketat ini, para guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran kritis. Seharusnya guru dilibatkan di dalam menyusun kurikulum sesuai konteks kultural dan sosial masyarakat tempat mereka mengajar, cara mengevaluasi yang dikaitkan dengan kondisi awal peserta didik dalam menerima pelajaran. Sebaliknya, para birokrat pendidikan percaya bahwa bahwa kualitas sangat baik dari hasil belajar adalah kualitas yang harus tampak terutama pada nilai membaca dan matematika sehingga perilaku dan tindakan guru harus dikontrol dan dibuat konsisten agar dapat diprediksi hasil belajarnya mencapai kualitas terbaik. .

Hasil untuk sistem sekolah yang mengadopsi ideologi dominan tidak hanya berkembangnya bentuk otoritarian kontrol sekolah dan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih standar dan lebih mudah dikelola, tetapi tipe kebijakan sekolah ini juga dibuat untuk relasi-relasi publik yang lebih luas. Artinya, birokrat pendidikan seolah dapat menyediakan solusi-solusi teknis untuk masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang dihadapi oleh sekolah-sekolah mereka, sementara pada saat yang sama dimunculkan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai indikator keberhasilan.

3. Simpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah adalah ruang publik untuk wahana mengasah sikap kritis dan politis peserta didik untuk menciptakan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi semu dalam masyarakat kapitalis-elitis; sekolah dipandang dalam bahasa politik sebagai lembaga yang memberikan syarat material dan ideologis yang penting untuk mendidik seorang warga negara dalam dinamika keberaksaraan kritis dan keberanian warga.
2. Guru adalah intelektual transformatif. Peran ini dalam pembelajaran kritis sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Guru dapat berperan sebagai intelektual transformatif ketika sistem persekolahan memberi otonomi dan peluang untuk berbeda, berinovasi dengan kurikulum yang dikembangkannya berbasis pada pengetahuan multikultural.
3. Peran guru sebagai intelektual transformatif menghadapi tantangan ketika sistem tatanan masyarakat dominan menjelma menjadi manajemen kontrol dan birokratis di dalam sistem pendidikan.

4. Daftar Pustaka

- Armstrong, Thomas. 2006. *The Best School. – How Human Development Research should Inform Educational Practice*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Darmiyati Zuchdi. 2008. "Potret Pendidikan Karakter di Berbagai Jenjang Sekolah".

- Proceeding. Seminar dan Lokakarya Nasional Restrukturisasi Pendidikan Karakter.* Yogyakarta: UNY. 29 Juli 2008.
- Dewey, John. 1916. *Democracy and Education*. Diambil pada tanggal 25 Februari 2010 dari [http://en.wikisource.org/wiki/Democracy and Education](http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education).
- Giroux, Henry A. 1988. *Teachers as Intellectual - toward a Critical Pedagogy of Learning* New York: Bergin & Garvey.
- Giroux, Henry A. 2010. *In Defense of Public School Teachers in a Time of Crisis* dalam <http://fightbacktenj.wordpress.com>. Diunduh pada 14 April 2011.
- Gutek, Gerald L. 1988. *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Muchtar Buchori. 2001. *Pendidikan antisipatoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Freire, Paulo. 2001. *Pedagogi Hati*. Yogyakarta: Kanisius.

Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan: Tantangan Guru Pada Abad 21

Wasitohadi

Alumni S3 Ilmu Pendidikan UNY,

Dosen FKIP UKSW Salatiga

Abstrak

Salah satu tantangan guru pada abad 21 adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa teknologi berwajah ganda. Pada satu pihak, teknologi memberi banyak kemudahan dan manfaat, sehingga ada guru yang mengandalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Namun, pada pihak lain, teknologi juga dapat memberi dampak negatif pada pendidikan. Penggunaan *scaffolding* berupa teknologi, dapat menghilangkan esensi dari pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi sebagai topangan pendidikan harus disertai dengan kesadaran untuk tetap mengakomodasi dan mempertahankan esensi tersebut. Esensi pendidikan bukan hanya menyangkut transfer pengetahuan, tetapi juga memberi keteladanan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, membina karakter, menumbuhkan potensi “keunikan” setiap anak didik, memberi motivasi, dan rupa-rupa “*hidden curriculum*” yang lain. Hal semacam itu tak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan topangan teknologi, tetapi butuh interaksi intersubjektif yang manusiawi antar guru-siswa, antar siswa, dan antar guru dan siswa dengan sumber belajar. Oleh karena itu, sebuah pemikiran mengenai “penggunaan topangan teknologi dalam pembelajaran, namun tetap memberi “esensi” pendidikan”, perlu dengan kesadaran dilakukan oleh guru. Bila tidak, akumulasi dampak negatif jangka panjang dari penggunaan topangan teknologi dalam pendidikan, akan sangat besar. Kita mungkin justru akan kehilangan “hal yang penting” dalam pendidikan. Fenomena reduksionisme dalam pendidikan, yang bertumpu pada buku ringkasan materi plus soal-soal latihan yang sepertinya sudah menggejala dan membudaya, mungkin menunjukkan telah semakin hilangnya esensi pendidikan.

Kata kunci: teknologi, teknologi pendidikan, penggunaan teknologi ICT, interaksi intersubjektif edukatif manusiawi.

1. Pendahuluan

Teknologi yang merupakan bagian hasil kebudayaan (Koentjaraningrat, 1985), sudah hadir di bumi ini hampir sepanjang sejarah peradaban manusia. Bermula dari sekedar alat atau sistem peralatan, teknologi pada awal sejarah peradaban manusia masih demikian sederhana dan digunakan untuk kepentingan praktis tertentu. Istilah ini pada mulanya mempunyai arti yang amat elementer, yakni segala tindakan baku manusia untuk merubah alam, termasuk badannya sendiri atau badan orang lain. Namun setelah terjadi proses industrialisasi pada abad XVIII, pengertian teknologi mengalami perubahan yang pada pokoknya bertitik tolak dari pengertian penerapan ilmu bagi kesejahteraan hidup, yang kemudian oleh Plilip, pengertian itu diubah sedemikian rupa sehingga teknologi dinyatakan sebagai “*description of art expecially the mechanical*” (Arifin, 1990:4). Sedangkan menurut A. Baiquni, teknologi diartikan

sebagai hasil penerapan sistematis dari sains, yang merupakan himpunan rasionalitas insan kolektif untuk memanfaatkan lingkungan hidup dan mengendalikan gejala-gejala di dalam proses produktif yang ekonomis. Penciptaan teknologi dengan demikian merupakan cara untuk menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang melingkupi hidup insan kolektif tersebut.

Kemudian, teknologipun semakin berkembang seiring dengan jumlah tantangan yang dihadapi manusia. Dengan pertumbuhan jumlah manusia yang membesar, manusia semakin membutuhkan ketersediaan kebutuhan hidup mereka dan lingkungan baru yang sesuai untuk dihuni dalam kuantitas dan kualitas yang bagus pula. Sumber daya alampun telah dimanfaatkan dan karenanya menimbulkan perubahan-perubahan lingkungan, tetapi toh kebutuhan-kebutuhan manusia tetap belum terpenuhi. Akhirnya, muncul kesadaran manusia, bahwa dengan kondisi lingkungan alam yang demikian,

manusia tidak dapat hidup secara layak. Manusia harus lebih giat lagi mengembangkan potensi-potensi akalinya dan menyalurkan potensi-potensi tersebut lewat penciptaan teknologi agar kesulitan-kesulitan dan tantangan yang menghadang kehidupan manusia dapat diatasi. Demikian seterusnya, kehadiran satu teknologi untuk mengatasi masalah tertentu, akan disusul oleh kehadiran teknologi lainnya, yang (dianggap) lebih maju untuk mengatasi persoalan yang baru pula, hingga suatu ketika muncul teknologi modern di dunia Barat.

Fenomena seperti itu terjadi secara menonjol berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Di bidang ini, muncul istilah *e-learning* sebagai bentuk penerapan ICT dalam pembelajaran oleh para guru. Mengamati apa yang terjadi di lapangan, tampak bahwa ada variasi tingkat kemampuan guru dalam memanfaatkan ICT untuk kepentingan pendidikan/pembelajaran di sekolah/kampus. Sebagian besar guru baru menyadari akan pentingnya ICT untuk pendidikan/ pembelajaran, namun belum berupaya untuk menerapkannya. Sementara, pada sebagian kecil guru lainnya, telah "*using ICT to learn*", bahkan ada guru yang mengandalkan penggunaannya dalam pembelajaran, seolah pemanfaatan ICT tersebut dapat mengatasi semua problem pendidikan.

Atas dasar itu, makalah ini akan membahas tentang tantangan guru pada abad 21, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pendidikan. Pertama-tama akan diuraikan secara singkat mengenai tantangan guru pada abad 21, kemudian dibahas mengenai teknologi, penggunaan, serta dampak-dampak/keterbatasannya dalam pendidikan, serta solusi bagaimana agar pemanfaatan teknologi tersebut tetap dapat mengakomodasi dan mempertahankan esensi pendidikan.

2. Tantangan Guru Pada Abad 21

Menurut Winarno Surakhmad (1999:2), ada empat sifat yang muncul di abad 21 yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia, yaitu:

1. Bahwa akan terjadi perubahan yang besar di dalam hampir semua bidang kehidupan, dan bahwa perubahan tersebut akan berlangsung semakin hari semakin terakselerasi.
2. Bahwa peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil posisi yang sentral yang langsung mempengaruhi bukan saja gaya hidup manusia sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai seni, moral dan agama.
3. Bahwa pertarungan dan persaingan hidup antara bangsa-bangsa tidak akan terbatas di bidang ekonomi saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk bidang budaya dan ideologi.
4. Bahwa karena pengaruh ilmu dan teknologi, nilai-nilai moral dan agama akan langsung tercabut dan bukan mustahil akan menimbulkan sistem nilai yang berbeda dari apa yang dikenal sampai saat ini.

Seiring dengan sentralnya peranan Iptek, perkembangan industri berbasis iptek akan berkembang dengan cepat. Sementara itu, ada tantangan untuk menghadapi persaingan global. Kemampuan bersaing tersebut amat ditentukan oleh pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya dapat memenuhi standar nasional, melainkan untuk memenuhi standar internasional agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain selain mampu menjadi "tuan" di negeri sendiri. Oleh karena itu, materi yang diberikan oleh lembaga pendidikan, tidak bisa lagi bersandar pada standar lokal maupun nasional, tetapi harus mengarah pada standar internasional.

Atas dasar tantangan demikian, dalam memasuki era globalisasi yang menjadi acuan adalah standar internasional agar mampu bersaing secara internasional. Lebih lanjut, agar Indonesia dapat mendudukkan diri secara bermartabat dalam masyarakat global, pendidikan nasional harus mampu menciptakan proses pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan, sikap, kepribadian dan watak yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Menurut Laporan BSNP tahun 2010 dengan Judul Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 (BSNP, 2010; Kemdikbud, 2012), pergeseran paradigma pendidikan abad 21 meliputi:

1. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa;

2. Dari satu arah menuju interaktif;
3. Dari isolasi menuju lingkungan jejaring;
4. Dari pasif menuju aktif menyelidiki;
5. Dari maya/ abstrak menuju konteks dunia nyata;
6. Dari pembelajaran pribadi menjadi menuju pembelajaran berbasis tim.
7. Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan;
8. Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru;
9. Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif.
10. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan;
11. Dari usaha sadar tunggal menuju jamak;
12. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak;
13. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan;
14. Dari pemikiran faktual menuju kritis.

Sementara itu, menurut Kemendikbud RI (2013), ada empat ciri abad 21 yang berimplikasi pada bidang pembelajaran. **Pertama**, tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, berimplikasi bahwa model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber informasi dan bukan diberi tahu. **Kedua**, ciri komputasi, yaitu penggunaan mesin yang menyebabkan semuanya menjadi lebih cepat, mengharuskan pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya) dan bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab). **Ketiga**, ciri otomasi, yang mampu menjangkau semua pekerjaan rutin, membuat pembelajaran harus diarahkan untuk melatih berfikir analitis (pengambilan keputusan) dan berfikir mekanistik (rutin). Dan, **keempat**, ciri komunikasi yang semakin cepat, menuntut pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Suyanto, 2013:3). Lebih lanjut, Suyanto menyatakan bahwa oleh karena dalam abad 21 ada banyak alternatif sumber belajar yang tersedia, maka ciri pembelajaran abad 21 meliputi: (a) guru bukan satu-satunya sumber belajar, (b) belajar tidak harus di kelas, (c) murid dapat belajar lebih dulu sebelum diajar guru, (d) guru berperan sebagai tutor, dan (e) proses pembelajaran berubah dari *teaching and learning* menjadi *learning and tutoring*.

Sejalan dengan adanya dominasi peran teknologi dan terjadinya pergeseran paradigma pendidikan dan pembelajaran tersebut, guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi abad 21. Dari segi kehidupan dan karier, abad 21 menuntut guru untuk fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, memiliki ketrampilan sosial dan budaya, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Dari segi pembelajaran dan inovasi, guru harus kreatif dan inovatif, berfikir kritis menyelesaikan masalah, serta komunikasi dan kolaborasi. Dari segi informasi, media dan teknologi, guru harus melek informasi, melek media, dan melek TIK. Uraian tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran abad 21 tidak cukup hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, serta didukung dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Penggunaan teknologi ICT dalam Pendidikan

Munculnya teknologi modern, juga teknologi informasi dan komunikasi, berkenaan dengan dinamika masalah kehidupan manusia beserta cara mengatasinya. Dari segi hakekat dan fungsinya, yang diharapkan dari teknologi adalah menjadi sarana pembebas dan perealisasi segenap potensi manusia (Poerba, 1990). Atas dasar itu, yang dimaksud penggunaan teknologi (ICT) dalam pendidikan dalam konteks ini adalah bagaimana memanfaatkan ICT dalam pendidikan, sehingga peserta didik benar-benar "mengalami" apa yang dimaksud dengan proses pendidikan tersebut, sehingga berkembang potensinya secara optimal.

Dalam hal penggunaan ICT dalam pembelajaran, UNESCO (2002), sebagaimana dikutip oleh Chaeruman (2008), membedakan pemanfaatan ICT untuk pendidikan dengan ungkapan "*Learning to use ICT* dan *Using ICT to Learn*". Menurutny, pemanfaatan ICT yang umumnya terjadi sekarang masih dalam level "*learning to use ICT*". Artinya, ICT masih dipandang sebagai obyek yang dipelajari, masih menjadi mata pelajaran, belum menggunakan ICT untuk belajar. UNESCO membuat kategori pemanfaatan teknologi (ICT) dalam pembelajaran di sekolah ke dalam empat level, yaitu level *emerging*, *applying*,

integrating, dan *transforming*. Pada level *emerging*, seseorang baru menyadari akan pentingnya ICT untuk pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Pada level *applying*, satu langkah lebih maju dimana ICT telah dijadikan sebagai obyek untuk dipelajari (*learning to use ICT*). Sementara pada tahap *integrating*, ICT telah diintegrasikan ke dalam kurikulum (pembelajaran). Sedangkan pada level *transforming*, yang merupakan tahap yang paling ideal, ICT telah menjadi katalis bagi perubahan/evolusi pendidikan. ICT dilaksanakan secara penuh baik untuk proses pembelajaran (*instructional purpose*) maupun untuk administrasi (*administrative purpose*).

Mestinya, “*using ICT to learn*” atau level *integrating* dan *transforming* yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam penerapan ICT untuk pembelajaran. Alasannya terkait dengan tantangan pendidikan abad 21 sebagaimana telah diuraikan. Karakteristik masyarakat abad 21 tersebut dapat dibangun melalui pemanfaatan ICT untuk pendidikan pada level 3 dan 4, meski bukan berarti level 1 dan 2 tidak diperlukan.

Dalam penerapannya di bidang pendidikan, teknologi tetap memberi banyak kemudahan dan manfaat. Menurut Laksono (2008), teknologi (ICT) mendukung tercapainya hasil pendidikan dan hasil belajar yang maksimal. Tak bisa dipungkiri ICT makin berperan dalam masyarakat global. Para pakar pun berpendapat demikian. Michael Porter, misalnya, menyatakan bahwa globalisasi yang bercirikan adanya proses keterbukaan, perubahan yang cepat, dan iklim kompetisi yang keras, tak bisa dihindari dan untuk menghadapinya peran teknologi sangat strategis. Sementara itu, institusi pendidikan sebagai *center of changes* dan merupakan sumber daya manusia dituntut adaptif, lebih inovatif, dan kreatif dalam menyiapkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan global (Peter F. Drucker). Selain itu, melalui penerapan teknologi (ICT) di samping dapat menumbuhkan wawasan global peserta didik, juga dapat mengurangi GAP antara hasil pendidikan dengan tuntutan eksternal.

Akan tetapi, sarana seperti halnya ICT memang tidak ada yang sempurna. Teknologi yang semula diharapkan menjadi sarana pembebas dan perealisasi potensi-potensi manusiawi, tidak dapat sepenuhnya menjalankan peranan itu. Teknologi ICT

memang dapat memberi banyak kemudahan dan manfaat, tetapi juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, bahkan dapat berdampak negatif. Mengandalkan sepenuhnya pada penggunaan *scaffolding* berupa teknologi dalam pembelajaran, misalnya, belum tentu dapat berhasil dan malah dapat menghilangkan esensi dari pendidikan. Hal ini bisa terjadi mengingat bahwa tidak semua kompetensi atau pengetahuan dapat disajikan melalui pemberdayaan ICT secara optimal. Ranah sikap yang merupakan bagian dari esensi pendidikan bukan hanya menyangkut transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemauan, memberikan keteladanan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, membina karakter, menumbuhkan potensi “keunikan” setiap anak didik, memberi motivasi, dan rupa-rupa “*hidden curriculum*” yang lain. Hal semacam itu tidak dapat dikembangkan melalui penerapan ICT (Prawiradilaga, 2008: 9).

4. Mengakomodasi dan Mempertahankan Esensi Pendidikan

Mengingat tidak semua kompetensi dapat dicapai melalui pemberdayaan ICT, maka penggunaan teknologi tersebut harus disertai dengan kesadaran untuk tetap mengakomodasi dan mempertahankan esensi pendidikan tersebut. Disertai dengan kesadaran, dalam arti bahwa dalam usaha mengakomodasi dan mempertahankan esensi pendidikan dilakukan melalui usaha sadar dan terencana, bukan terjadi secara spontan sebagai respons atas perilaku siswa yang negatif.

Sebagai usaha pendidikan, penanaman sikap dan nilai hidup merupakan proses, maka mestinya dapat diberikan melalui pendidikan formal dengan direncanakan dan dirancang secara matang (Suparno, 2002:62). Direncanakan dan dirancang tentang nilai-nilai apa saja yang akan diperkenalkan, dan metode serta kegiatan apa yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang akan ditawarkan dan ditanamkan kepada siswa harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tugas dan perkembangan kejiwaan anak. Lickona (2013:75), menekankan pentingnya diperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral supaya berhasil, yaitu unsur pengertian, perasaan, dan tindakan moral.

Ketiga unsur itu saling berkaitan. Ketiga unsur itu perlu diperhatikan, supaya nilai yang ditanamkan tidak tinggal sebagai pengetahuan saja tetapi sungguh menjadi tindakan seseorang. Menurut Muhadjir (1997), "seseorang bisa disebut pendidik apabila seseorang tersebut disamping memiliki pengetahuan lebih, juga mampu mengimplisitkan nilai dalam pengetahuan itu dan bersedia menularkan pengetahuan beserta nilainya kepada orang lain". Sementara menurut Depdiknas (2003), proses pembelajaran harus dilandasi oleh prinsip "mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai". Manusia adalah penghayat nilai, kata Koesoema (2012: 49), seperti halnya peserta didik, yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu komunitas, sehingga mereka perlu dibekali bukan hanya pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai dan sikap-sikap hidup yang dianut dan diyakini masyarakatnya. Tujuan pendidikan nilai, menurut UNESCO (1994), meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai.

Agar tujuan pendidikan nilai seperti itu dapat terwujud, maka tak cukup hanya dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Interaksi intersubyektif edukatif antara peserta didik dan pendidik, antara peserta didik dengan sumber belajar, dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tetap diperlukan. Interaksi edukatif ini menjadi inti dari pendidikan sekolah, dan berlangsung secara terencana dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu interaksi disebut interaksi edukatif apabila interaksi tersebut secara sadar dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang bersifat mendidik. Dalam aktivitas pendidikan yang berujud interaksi di atas, proses mencapai tujuan selalu ditempuh melalui suatu media berupa bahan atau isi pendidikan dan melibatkan pula suatu prosedur atau cara yang dipakai pendidik dan peserta didik agar pencapaian tujuan tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian setiap interaksi edukatif selalu berlangsung di dalam ruang dan waktu tertentu atau dalam situasi lingkungan tertentu. Situasi lingkungan ini berpengaruh terhadap usaha pencapaian tujuan, sehingga harus dipertimbangkan bahkan dimanfaatkan oleh pendidik. Karena itu faktor situasi lingkungan merupakan faktor

penting pula dalam aktivitas pendidik. Dalam aktivitas pendidik, keenam hal tersebut (subyek didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, metode pendidikan dan situasi lingkungan) membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi, namun faktor integratifnya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya.

Pada tingkat sekolah, agar pola interaksi semacam itu dapat tercipta, menuntut perubahan paradigma pendidikan, dari paradigma pendidikan mekanik ke paradigma pendidikan organik (Zamroni, 2007:93). Dalam paradigma pendidikan mekanik, sekolah menggunakan organisasi tradisional, dengan model komando dan kontrol. Menurut model ini, individu harus melaksanakan perintah yang dikomandokan dari pucuk pimpinan. Seluruh kebijakan dan pemikiran terletak pada pucuk pimpinan, yang sepenuhnya memiliki hak-hak untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, guru lebih sebagai aparat birokrat, yang dikontrol dan dikendalikan dari atas. Kepatuhan atas pedoman, petunjuk, dan pengarahan dari atas merupakan ciri guru yang baik. Dengan demikian, kekuasaan sekolah berada di luar sekolah. Kepala sekolah, guru, apalagi peserta didik dan orang tua mereka, tidak memiliki kekuasaan terhadap penyelenggaraan sekolah. Kepala sekolah dan guru, sekedar kepanjangan aparat birokrat di atasnya.

Berbeda dengan itu, dalam paradigma pendidikan organik sekolah dipandang sebagai organisasi yang bersistem organik. Sebuah sekolah dipandang sebagai gabungan dari berbagai interaksi, baik akademik maupun non akademik, yang harus dikelola dengan baik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peserta didik secara utuh, baik kemampuan intelektual, personal maupun sosial. Dalam paradigma pendidikan organik semangat dan motivasi untuk mencapai prestasi, dibangun melalui interaksi pendidikan. Inti dari interaksi pendidikan adalah interaksi formal guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Meskipun interaksi tersebut merupakan interaksi akademik, tetapi tidak bisa dipisahkan dari interaksi non-akademik, sehingga sekolah harus mengelola keutuhan dari seluruh interaksi tersebut, demi perkembangan peserta didik. Kepala sekolah berperan mendorong, mengembangkan dan mengorganisir keseluruhan proses interaksi

serta mengelola energi yang dihasilkan dari proses interaksi tersebut untuk diarahkan demi kemajuan sekolah.

Jadi, menggunakan topangan teknologi ICT dalam pembelajaran tetap harus mengakomodasi dan mempertahankan esensi pendidikan melalui peningkatan intensitas interaksi intersubjektif edukatif manusiawi. Bila tidak, akumulasi dampak negatif jangka panjang dari penggunaan topangan teknologi dalam pendidikan, akan sangat besar. Kita mungkin justru akan kehilangan “hal yang penting” dalam pendidikan. Fenomena reduksionisme dalam pendidikan, yang bertumpu pada buku ringkasan materi plus soal-soal latihan yang sepertinya sudah menggejala dan membudaya, mungkin menunjukkan telah semakin hilangnya esensi pendidikan.

Membangun kesadaran, meningkatkan kompetensi, dan menumbuhkan kemauan pada guru untuk memanfaatkan ICT pembelajaran secara optimal, sekaligus mengakomodasi dan mempertahankan esensi pendidikan, menjadi upaya strategis yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. 2008. *Belajar dengan Teknologi Menuju Masyarakat Berpengetahuan*. Jakarta: Kongres VI dan Seminar Nasional.
- Knapp, L.R. dan Glenn, A.D. *Restructuring Schools with Technology*. Boston: Allyn and Bacon.
- Koesoema, D. (2012). *Pendidikan karakter utuh dan menyeluruh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Nusa Media.
- Mangunwijaya (Editor). 1987. *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Volume 1.
- Mangunwijaya (Editor). 1987. *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Volume 2.
- Muhadjir. (2003). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Prawiradilaga, D.S., Ariani, D., dan Handoko, H. 2013. *Mozaik Teknologi Pendidikan e-learning*. Jakarta: Prenada media Group.
- Pujiriyanto. 2012. *Teknologi Pengembangan media dan Pembelajaran*. Yogyakarta: UNY
- Supardan. 1991. *Ilmu, Teknologi, dan Etika*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Suparno, et al. (2002). *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Yusufhadi Miarso. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MEMPERSIAPKAN PENDIDIKAN INDONESIA MENUJU ABAD 21

Zamroni

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Apabila kita melaksanakan pembelajaran saat ini sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, berarti kita merampas masa depan mereka
(John Dewey)

“Change is the only constant.”
(Heraclitus, Greek philosopher)

1. Pendahuluan

Dunia terus berubah, dan akan terus berubah dan perubahan akan semakin cepat, dan amat cepat sekali. Begitu cepat perubahan sehingga kita tidak sadar bahwa diri kita sendiripun telah berubah pula. Tiada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan harus pula ikut berubah apabila diinginkan pendidikan tetap memegang peran penting dalam perubahan itu. Perubahan yang terjadi amat penting bagi pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan pesertadidik untuk bisa hidup terhormat dan bermartabat di masa depan. Perubahan yang cepat menyebabkan masa depan tidak lagi dapat dideskripsikan dengan jelas. Gambar masa depan buram lagi kabur. Tanpa dengan gambaran masa depan yang jelas, amat sangat sulit bagi pendidikan dapat memainkan peran dan tugasnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, merupakan suatu keharusan bagi dunia pendidikan untuk mempersiapkan suatu kebijakan pendidikan yang dapat meningkatkan relevansi antara bagaimana pesertadidik hidup di masa depan dan bagaimana pesertadidik harus belajar saat sekarang ini. Untuk itu menggagas masa depan masyarakat dan masa depan pendidikan merupakan suatu keperluan pokok.

2. Masyarakat Abad 21

Sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi yang mempengaruhi aspek

kehidupan lain seperti ilmu pengetahuan, budaya, sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami perkembangan yang amat sangat cepat. Perubahan sosial dan ekonomi, khususnya telah membawa pembaharuan ekonomi mikro dan perubahan tenaga kerja baik struktur maupun kualifikasinya. Terjadi pergeseran produktivitas ekonomi nasional dari penentuan ekonomi makro kearah penentuan oleh produktivitas ekonomi mikro (Harrison, Lawrence, E. And Huntington, Samuel, P., 2000). Fondasi ekonomi mikro untuk mampu bersaing adalah: strategi dan operasi perusahaan yang canggih, dan, lingkungan ekonomi yang sesuai, seperti peraturan, permintaan lokal, logistik dan pelayanan teknologi. Hanya dengan perusahaan yang dapat beroperasi lebih produktiflah ekonomi nasional suatu bangsa akan dapat berkembang.

Ekonomi mikro ini memiliki karakteristik adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa mendorong inovasi.
- b. Menekankan pada persaingan yang sehat.
- c. Menekankan akuntabilitas.
- d. Memiliki standard regulatori yang tinggi.
- e. Investasi pada kemampuan dan teknologi modern merupakan keharusan.
- f. Pekerja adalah aset perusahaan.
- g. Membisa akan kerja dalam kelompok-kelompok.
- h. Melakukan kolaborasi sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan sosial, ekonomi, kultural dan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang lain akan menyebabkan kehidupan masyarakat semakin beranekawarna, kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Kehidupan keluarga dalam arti bentuk, sifat dan dinamika kehidupan akan berubah pula. Transformasi kehidupan keluarga tidak dapat dihindari.

Karakteristik masyarakat abad 21 yang lain adalah: a)masyarakat yang memiliki watak inovasi yang tinggi, b)warga masyarakat memiliki kesadaran dan mengaplikasikan hidup sehat dalam

kehiduapn sehari-hari, c)memiliki daya tumbuh secara terus menerus, d)bersifat terbuka dan dengan kontak hubungan antar warga yang sangat intens, e)memiliki sifat fleksibel dan adaptable yang tinggi, f)warga masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, g)warga masyarakat memiliki kesatuan antara kehidupan, belajar, bekerja dan bersenang-senang, dan, h)tetap menunjung tinggi tradisi, adat istiadat dan berbagai ritual.

Salah seorang pemikir pendidikan untuk abad 21, Bruce Jilk (1998), mendeskripsikan gambaran masyarakat pembelajaran sebagai berikut:

- a. Memiliki berbagai latar belakang pembelajaran yang terpadu dalam suatu jaringan.
- b. Batas batas berbagai latar belakang pendidikan menipis.
- c. Menimbulkan suatu rasa identitas diri dan tempat.
- d. Mendorong interaksi dan komunikasi antara peserta pembelajaran.
- e. Mengadopsi dan adaptasi secara cepat berbagai kebutuhan belajar.
- f. Menampung berbagai perbedaan dari peserta pembelajaran.
- g. Menyediakan kebutuhan belajar, baik umum maupun khusus.

Dalam kaitan dengan pendidikan, masyarakat abad 21 merupakan masyarakat pembelajaran atau *Learning community* dimana setiap warga masyarakat menghargai dan menilai tinggi belajar, serta menempatkan belajar sebagai kebutuhan pokok. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat pembelajaran, belajar merupakan kebutuhan pokok bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Belajar merupakan kebutuhan pokok sepanjang masa, selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula masih memerlukan belajar.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat didasarkan atas fondasi ilmu pengetahuan, kebajikan dan ketrampilan. Disamping itu, budaya untuk selalu menjadi lebih baik merupakan fondasi yang lain. Masyarakat pembelajaran akan terus berkembang manakala ditopang oleh dinamika pembelajaran yang berlangsung di sekolah, tempat kerja dan keluarga. Dalam kaitan ini pelayanan pendidikan yang merata yang dapat dinikmati oleh siapa saja warga masyarakat memiliki makna yang amat penting.

Kondisi yang sedemikian ini menuntut pelayanan pendidikan yang semakin tinggi.

Sistem dan praktik pendidikan yang selama ini ada tidak akan lagi dapat memfasilitasi kehidupan masyarakat abad 21.

3. Orientasi Pendidikan Abad 21

Pendidikan seantiasa harus sesuai dengan kebutuhan masanya. Sebagaimana layaknya, pekerjaan akan menjadi baik dan hasilnya mendekati sempurna manakala pekerjaan tersebut memiliki substansi, cara dan peralatan yang dipakai sesuai dengan kemajuan yang ada. Hal ini berlaku pula untuk pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh substansi, cara dan peralatan yang dipergunakan dalam proses pendidikan. Manakala substansi, cara dan peralatan tidak sesuai dengan kemajuan zaman, proses dan hasil pendidikan tidak akan berkualitas, lagi tidak relevan dengan kebutuhan masanya. Jaminan kualitas sangat ditentukan oleh relevansi substansi, cara dan peralatan yang digunakan dalam proses pendidikan dengan kemajuan teknologi masa kini.

Orientasi pendidikan abad 21 memiliki arah mengembangkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Penjabaran orientasi ini adalah dengan keberadaan pelayanan pendidikan yang memiliki jangkaun dimana warga bangsa berada, apapun status sosial mereka, latarbelakang budaya dan bahasa apa saja, pada umur berapapun juga, dan kebutuhan belajar apa saja terlayani oleh sistem pendidikan yang ada. Kondisi ini sangat dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi modern. Baik dalam arti teknologi modern dimanfaatkan dalam pelayanan pendidikan, juga dalam arti peserta didik memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya teknologi modern, dimana dan kapanpun.

Orientasi pendidikan abad 21 juga menekankan relevansi antara apa yang dipelajari peserta didik atau pembelajar dengan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan ini bisa bersifat kebutuhan ekonomi, sosial maupun kebutuhan yang lain. Sekolah merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Pelaksanaan orientasi ini akan menghadirkan suatu kondisi masyarakat "*full employment*", perkembangan masyarakat tanpa ada pengangguran.

Orientasi Visi pendidikan abad 21 dijabarkan kedalam semangat "kultur berkemajuan" dalam kehidupan bangsa. Baik kalangan birokrat maupun rakyat memiliki

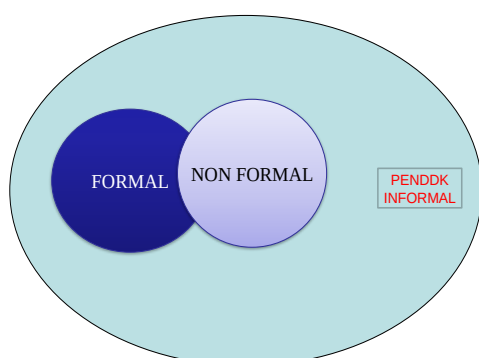
prinsip terus bergerak dari waktu ke waktu dengan keadaan lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esuk lebih baik dari hari ini. Penjabaran dari orientasi ini adalah dengan kebiasaan melakukan monitoring, refleksi dan mempertanyakan *what next*. Ini pula memiliki arti, segala sesuatu informasi sepanjang memungkinkan akan ditransfer dan disimpan ke dalam data kuantitatif, yang bersifat netral, obyektif dan universal. Perencanaan, eksekusi dan monitoring evaluasi menggunakan data ini.

Orientasi pendidikan abad 21 menekankan pada proses dan hasil pendidikan yang utuh (*the whole person*). Penjabaran dari visi ini proses pembelajaran bervariasi namun memiliki sifat integrasi, dengan sumber belajar yang juga bervariasi. Penjabaran orientasi ini akan menghasilkan berbagai sumber baru pembelajaran yang selama ini tidak pernah muncul dalam sistem pendidikan kita.

Orientasi pendidikan abad 21 terakhir adalah penekanan pada kebersamaan, kerjasama dan kolaborasi. Baik perencanaan dan proses serta kualitas hasil senantiasa menekankan pada kebersamaan. Penjabaran orientasi ini adalah dalam setiap interaksi pembelajaran menekankan pada kerjasama dan kolaborasi. Orientasi mungkin saja bersifat individual, tetapi proses tetap menekankan kerjasama kelompok.

Orientasi pendidikan abad 21 ini akan melahirkan praktik pendidikan dimana antara pendidikan formal dan non-formal menyatu dalam kehidupan pendidikan informal. Kehidupan masyarakat merupakan pembelajaran, dalam pembelajaran tersebut antara formal dan non-formal senantiasa berinteraksi secara dinamis. Kondisi ini ditunjukkan dengan gambar 1, berikut.

GAMBAR 1 ORIENTASI PENDIDIKAN



Gambar 1 menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat tidak pernah ada waktu tanpa pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut warga masyarakat senantiasa memadukan antara pembelajaran lewat pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Karena kebutuhan pendidikan semacam ini, maka akan muncul berbagai bentuk pelayanan baru dalam pendidikan.

Praktik pendidikan berdasarkan orientasi ini didesain untuk menghasilkan output dengan karakteristik sebagai berikut:

- Memahami pengetahuan mata pelajaran yang mendalam dengan dasar penguasaan konsep yang kompleks.
- Mengkaji secara kritis apa yang dipelajari.
- Bekerja secara kreatif berdasarkan konsep mengembangkan gagasan-gagasan baru, teori-teori baru, produk-produk baru dan pengetahuan baru-memiliki kemampuan untuk menemukan permasalahan, pertanyaan dan fenomena baru serta memecahkannya.
- Menyampaikan gagasan dan pikiran dengan jelas runtut dan rinci, baik secara verbal maupun tulis dengan menggunakan berbagai media.
- Menganalisis dan mengintegrasikan berbagai konsep dari berbagai mata pelajaran kedalam suatu bentuk baru yang bermakna
- Menghargai dan menghormati berbagai kelompok yang berbeda pendapat dan yang memiliki latar belakang berbeda . Melaksanakan- learning how to learn.
- Memegang teguh dan mengaplikasikan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Realitas Pendidikan Dewasa Ini.

Sudah barang tentu orientasi dan praktik pendidikan dewasa ini, khususnya pendidikan di Indonesia jauh berbeda dengan praktik dan orientasi pendidikan abad 21 sebagaimana diuraikan diatas. Sistem dan praktik pendidikan Indonesia dewasa ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan yang dapat diidentifikasi mengandung tiga kelemahan mendasar. Yakni,

- Sekolah tidak sensitif dengan perubahan yang berlangsung di masyarakatnya, karena sistem pendidikan terkonsentrasi

- pada upaya mencapai keberhasilan dalam ujian nasional.
- b. Pendidikan tidak mampu melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan sekolah tidak mampu mempersiapkan para siswa dengan kebutuhan ketrampilan yang mereka perlukan dalam bekerja.
 - c. Kesalahan dalam pemberian kebebasan.

Dengan segala kekurangan yang terkandung didalamnya, ujian nasional juga memiliki berbagai kelebihan. Serupa pula dengan ujian sekolah yang mengandung berbagai kelemahan dan sekaligus kelebihan. Jadi dibandingkan antara satu dengan yang lain, kedua sistem evaluasi akhir tersebut sama saja. Artinya, tidak ada manfaat dan relevansinya membicarakan atau mengkritik sistem ujian nasional.

Permasalahan yang perlu untuk dikaji adalah pada tataran implementasi sistem ujian nasional dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi sekali lagi bukan sistem ujian nasionalnya, melainkan implementasi UN yang keliru. Kekeliruan yang amat mendasar adalah senantiasa mengkaitkan, bahkan mewajibkan hasil nilai UN sebagai syarat mutlak untuk memasuki jenjang pendidikan di atasnya. Kesalahan ini amat fatal, sehingga ujian nasional menjadi segala-galanya dalam praktik pendidikan. Bahkan, sampai-sampai karena begitu semangatnya, dan merupakan salah satu citra lembaga, terdapat pemerintah propinsi yang diberbagai jenjang mulai dari tingkat propinsi sampai sekolah dibentuk tim sukses ujian nasional. Sudah barang tentu satuan tugas tim sukses tersebut bisa memiliki makna baik dan sekaligus makna buruk. Tergantung apa yang dilakukan tim sukses tersebut.

Kelemahan ke dua erat adalah berkaitan dengan sistem pendidikan yang terlalu kaku terpaku pada struktur yang ada. Sudah era *school based management*, namun tetap saja suatu kebijakan kalau belum ada juklak dan juknis tetap saja tidak akan berjalan. Watak strukturalis ini tidak saja berpengaruh pada apa yang berkaitan dengan manajemen, tetapi juga berkaitan dengan kurikulum. Akibatnya, Di Perguruan Tinggi kurikulum suatu prodi bisa saja tidak optimal dan tidak fokus, karena harus memuat kurikulum lembaga universitas, lembaga fakultas dan lembaga jurusan, dan sebagainya. Sedangkan makna kurikulum yang bersifat kelembagaan tersebut sering kali

tidak terlalu relevan dengan program studinya. Kurikulum yang semestinya memiliki pandangan jauh kedepan, menjadi kurikulum dengan pandangan kekinian. Sudah barang tentu akibatnya *out put* pendidikan memiliki kemampuan jauh dari yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja. Disamping itu, peran lulusan sekolah di bidang sosial kultural kemasyarakatan juga lemah, karena memang tidak dipersiapkan untuk itu.

Kelemahan sistem dan praktik pendidikan yang ketiga adalah pemerintah salah dalam memberikan kebebasan. Mestinya, kebebasan diberikan kepada sekolah dan guru untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan kebijakan yang telah ditetapkan. Guru diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran, termasuk melakukan evaluasi keberhasilan pesertadidiki dalam mengikuti pembelajaran sbagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun, kebebasan yang diperlukan sekolah dan guru tersebut tidak diberikan secara tulus. Perlu disebut secara tulus, karena kepada sekolah telah diberikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tetapi dalam praktik sekolah dan guru tetap saja tidak memiliki kebebasan, karena KTSP berubah memiliki arti Kurikulum Terserah Sama Pusat. Namanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tetapi harus mengikuti kemauan pusat, demi keseragaman nasional.

Justru yang mengherankan kebebasan kepada keluarga diberi untuk memilih sekolah bagi putra putrinya, dengan didasarkan hasil UN. Kebijakan pemberian kebebasan keluarga untuk memilih sekolah ini barangkali hanya terjadi di negara kita. Di Negara lain, kemana anak sekolah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan domisili keluarga. Sehingga anak akan sekolah di tempat yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Kebijakan pemberian kebebasan keluarga memilih sekolah ini memiliki dampak yang sangat tidak menguntungkan. Yakni, a) di kota-kota besar keluarga harus mengeluarkan biaya transportasi, karena sekolah jauh dari tempat tinggal. b) Di kota-kota besar anak harus kehilangan banyak waktu untuk perjalanan dari tempat tinggal ke sekolah. c) Banyak anak dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya karena tidak mampu menyediakan uang untuk transportasi. Disini sekolah gratis tidak relevan lagi. d) Sekolah secara moral tidak lagi menajdi

bagian dari masyarakatnya. Karena para siswa yang sekolah di suatu sekolah sebagian besar datang dari tempat yang jauh. e) Muncul fenomena sekolah favorit yang berlebihan. Kondisi ini mempersulit perpindahan rotasi pendidik, khususnya. Akibatnya, kesenjangan mutu antar sekolah semakin lama semakin tinggi. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. f) Berarti pemerintah telah melupakan prinsip keadilan dalam pelayanan pendidikan. Orang kaya mendapatkan kesempatan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berkualitas sehingga masa depan anaknya terjamin, sebaliknya keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bermutu sehingga masa depan anaknya tidak menjamin. Maka lahirlah, fenomena sekolah merupakan awal stratifikasi sosial. Muncul pulalah *inter-generational social stratification*. Dengan kata lain, peran sekolah sebagai sarana *social mobility* lenyap.

Kelemahan ke empat sistem dan praktik pendidikan Indonesia adalah menempatkan tiga tipe pendidikan tidak secara padu: yakni pendidikan formal, non-formal dan pendidikan informal. Memang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin kemungkinan adanya perpindahan diantara ketiga tipe pendidikan diatas. Namun, sayangnya pemerintah terlalu menekankan pada pentingnya pendidikan formal dan sebaliknya terlalu mengabaikan pendidikan non-formal, apalagi pendidikan informal. Kelemahan pendidikan ini merupakan pencerminan orientasi pendidikan untuk berperan sebagai *engine of growth* dari pada berperan sebagai suatu *agent for eradication of poverty*. Maka tidak mengherankan kalau peningkatan pendidikan warga bangsa tidak selalu diikuti dengan pengurangan angka kemiskinan penduduk.

Sebagai dampak dari kelemahan sistem dan praktik pendidikan ini di satu sisi, dan di sisi lain sifat ekspansi ekonomi yang bersifat liberalis- *capital intensif*, mengakibatkan kemajuan ekonomi dan kemajuan pendidikan diikuti justru diikuti dengan perluasan pengangguran, termasuk pengangguran terdidik.

Pola pikir dan cara pandang pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia amat keliru. Hal ini dikarenakan mereka para pengambil kebijakan pendidikan tidak memiliki pemahaman atas pendidikan yang benar, baik orientasi, sistem dan praktik pendidikan. Di Indonesia, orang yang pernah

mengikuti pendidikan formal, mereka merasa tahu dan faham tentang pendidikan, sehingga manakala menjadi pejabat bisa menentukan bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau orang yang sering berobat ke dokter juga merasa pengalaman dan merasa memiliki kemampuan melakukan pengobatan dan kemudian melakukan praktik pengobatan. Oleh karena itu, selama ini nyaris bangsa kita belum pernah memiliki orientasi dan praktik pendidikan yang benar dan relevan dengan kebutuhan bangsanya. Sebagai contoh bagaimana sampai ada kebijakan untuk memperbesar porsi lulusan SMK di satu sisi dan mengecilkan porsi lulusan SMA di sisi lain. Sedangkan, di seluruh belahan bumi yang lain justru porsi lulusan SMK semakin kecil, dan bahkan banyak negara yang mengarahkan orientasi pendidikan sekolah komprehensif tidak lagi mengenal sekolah kejuruan. Namun pada jenjang diatas sekolah menengah, pendidikan kejuruan di kembangkan. Jadi bukan SMK yang dikembangkan. melainkan "SMK Tinggi", yang sifatnya mengikuti ke butuhan pasar tenaga kerja jangka pendek. Sehingga program SMK Tinggi ini, buku-tutup berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar.

Namun patut dicatat, kesalahan awal para pengambil kebijakan pendidikan adalah berawal dengan mengkerdikan fungsi pendidikan hanya sekedar sebagai sarana untuk mempersiapkan tenaga kerja. Akibatnya, cara pandang dan seluruh kebijakan pendidikan diarahkan bagaimana lulusan bisa masuk pasar tenaga kerja. Para pengambil kebijakan tidak mau dan tidak bisa memahami bahwa masalah kesempatan kerja bukan masalah pendidikan, melainkan domain dunia ekonomi. Selama investasi tidak optimal dan selama arah pengembangan ekonomi bersifat *capital intensif*, maka selama itu pula dunia ekonomi tidak akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang sepadan dengan suplai tenaga kerja yang dihasilkan oleh pendidikan. Ancaman potensi pengangguran menjadi realitas.

Disamping itu, terdapat kesalahan dalam aspek politik. Di banyak negara jabatan menteri adalah jabatan politik, yang biasa dipegang oleh siapapun asal memiliki kemampuan manajemen, khususnya manajemen politik. Namun di negara-negara tersebut, seorang menteri tidak akan pernah merombak pejabat birokrasi pemerintah yang

merupakan karier, yakni jabatan direktur jenderal kebawah. Merekalah sebagai mesin kementerian yang secara profesional senantiasa siap melaksanakan arahan dari pemegang kendali. Hal ini sungguh berbedaa dengan yang terjadi di negara kita dimana seorang menteri baru akan merombak jajaran birokrasi dibawahnya. Artinya, terjadi politisasi birokrasi negara. Dan, sudah barang tentu kondisi ini terjadi pula pada lembaga pemerintah dibawahnya: propinsi dan daerah.

Disinilah, kerusakan birokrasi pendidkan melembaga dan menjalar kemana-mana. Hasilnya, efektivitas dan efisiensi birokrasi pendidikan rendah.

Secara umum, karena tidak semua dibahas dalam makalah ini, kedua orientasi pendidikan tersebut, abad 20 dan abad 21, dapat dibandingkan sebagaimana table dibawah.

Table 1. Perbandingan Orientasi Pendidikan Abad 20 Dan Abad 21

SUMBER: Education & Competitiveness Competitiveness. A Resource and Policy Guide. New York, NY: Partnership for 21st century skills

ORIENTASI PENDIDIKAN ABAD 20	ORIENTASI PENDIDIKAN ABAD 21
Disiapkan untuk usia tertentu	Disiapkan untuk semua usia
Berlangsung ditempat terisolir	Berlangsung ditempat terbuka
Mempergunakan kapur, spidol, papan	Menggunaka ICT
Berpusat pada pendidik	Kontrol ada pada peserta pembelajaran
Kurikulum local dan nasional	Kurikulum local, nasional dan global
Sumber utama pembelajaran buku teks	Sumber utama pembelajaran adalah kehidupan dan lingkungan
Sumber pembiayaan utama dari pemerintah	Sumber utama pembeayaan bersama
Menekankan pada saling ketergantungan dan kompetisi	Menekankan pada bekerjasama dan berkolaborasi
Pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan	Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri
Waktu khusus dan tertentu	Waktu bersifat umum dan terbuka
Kelas merupakan auditorium	Kelas merupakan laboratorium
Guru sebagai satu-satunya sumber ilmu	Banyak sumber ilmu, guru sebagai fasilitator

5. Kebijakan Transformasi Pendidikan

Kebijakan merupakan sesuatu yang akan dilakukan ataupun tidak akan dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sesuatu masalah yan dihadapi. Menghadapi masa depan, abad 21, sesuatu yang akan dilaksanakan ataupun tidak akan dilaksanakan di dunia pendidikan oleh pemerintah merupakan kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan salah satu penjabaran dari orientasi pendidikan yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Orientasi pendidikan merupakan keyakinan dan fondasi akan apa peran pendidikan dan gambaran masa depan yang akan disumbangkan oleh pendidikan kepada bangsanya. Pertama, bagi Indonesia diperlukan pergeseran dari pendidikan

merupakan proses penyiapan tenaga kerja menjadi suatu proses dimana setiap pesertadidik mendapatkan kesempatan yang setara guna mengembangkan potensi diri secara optimal. Dengan demikian pendidikan tidak sekedar abdi dari dunia ekonomi, untuk mempersiapkan pesertadidik menguasai ketrampilan yang dibutuhkann oleh dunia kerja.

Kedua, orientasi pendidikan mengarahkan perannya sebagai *agent for eradicating of poverty*, bukan sekedar untuk *agent of growth*. Orientasi ini harus terjabarkan dalam kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran pendidikan.

Ketiga, orientsi pendidikan mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keterpaduan antara pendidikan formal, non formal dan informal.

Berdasarkan orientasi pendidikan diatas, maka perlu dirumuskan kebijakan pendidikan Indonesia sebagai berikut.

6. Sasaran dan target Kebijakan Jangak Pendek:

- a. Menciptakan kondisi dimana peserta didik, pendidik, birokrat pemerintah dan warga masyarakat tidak hanya terjebak dalam pemikiran dan kegiatan pendidikan hanya untuk menghadapi ujian nasional.
- b. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada segenap peserta didik.
- c. Memperkecil kesenjangan mutu antar sekolah.
- d. Menciptakan efisiensi pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh orang tua.
- e. Meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan yang bersifat strategis.

7. Kebijakan jangka pendek:

- a. Ujian nasional tidak sebagai syarat memasuki sekolah jenjang diatasnya.
- b. Orang tua tidak lagi bebas mengirim anaknya ke sekolah negeri, pemerintah akan menetapkan dimana anak sekolah sesuai dengan domisili tempat tinggal.
- c. Mengembalikan proses pembelajaran ke tangan guru.
- d. Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan kebersamaan dan kebiasaan berkolaborasi diantara peserta didik.
- e. Mendorong dan memfasilitasi guru mengenalkan ketrampilan abad 21 kepada para peserta didik lewat proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan non-formal dengan mengembangkan berbagai program strategis dan mensinergikan dengan pendidikan formal.
- g. Pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan mengelola pendidikan mulai menggunakan pendekatan kultural sebagai pengganti pendekatan struktural.
- h. Mengembangkan sistem dan mekanisme untuk membahas kebijakan pendidikan yang strategis. Salah satu bentuk kebijakan adalah penyelenggaraan KTT

pendidikan Indonesia, untuk membahas dan menentukan kebijakan nasional pendidikan yang strategis. Sehingga penentuan kebijakan pendidikan yang strategis bukan monopoli birokrat pendidikan, tetapi juga ada partisipasi para pedagog dan ekspertise dan birokrat di luar pendidikan.

8. Sasaran dan target kebijakan jangka menengah:

- a. Meratakan kesiapan peserta didik memasuki pendidikan sekolah dasar.
- b. Terwujud keadilan pendidikan diantara peserta didik yang sekolah di sekolah negeri negeri dan di sekolah swasta.
- c. Jenjang dan jalur pendidikan relevan dengan kebutuhan bangsa dalam persaingan global.

9. Kebijakan jangka menengah:

- a. Mempersiapkan pembaharuan system pendidikan nasional, khususnya berkaitan dengan jenjang dan jalur pendidikan nasional. Sehingga sistem pendidikan lebih sesuai dengan tuntutan masa depan.
- b. Mengembangkan suatu kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan inti reformasi pendidikan, adanya kesetaraan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta.
- c. Mempersiapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Tetapi memperpanjang pendidikan dibawah jenjang SD. Sehingga wajib belajar 12 tahun mulai 3 tahun sampai 15 tahun.

10. Penutup.

Dunia mengalami perubahan yang amat cepat. Sebagai bagian dari dunia bangsa Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari perubahan yang amat cepat tersebut. Perubahan yang terjadi menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu aspek kehidupan yang harus berubah dan juga mempersiapkan perubahan adalah dunia pendidikan. Perubahan pendidikan yang diperlukan adalah menempatkan pendidikan pada jalur menuju perubahan global dengan tetap mendasarkan pada filosofi dan budaya lokal. Oleh karena itu perubahan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak sekedar larut dalam proses perubahan yang terjadi di banyak negara. Perubahan bisa dimulai

dengan menggeser orientasi pendidikan Indonesia yang lebih menekankan pada kebutuhan bangsa. Antara lain pendidikan berorientasi untuk memerangi kemiskinan dan bisa memberikan pelayanan setara bagi seluruh warga bangsa. Berdasarkan orientasi pendidikan dirumuskan kebijakan pendidikan Indonesia menuju pendidikan abad 21.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2008) *Education & Competitiveness . A Resource and Policy Guide*. New York, NY: Partnership for 21st century skills

Harrison, Lawrence, E. And Huntington, Samuel, P. (2000) *Culture matters. How values shape human progress*. New York, NY: Basic Book.

Jilk, Bruce. 1999. "Schools in the New Millenium." *American School & University* 71(5), pp. 46-48.

November, Alan (2010) *Empowering students with technology*. Second edition. Tousand Oaks, CA: Sage Publication.